



Rencana Pengembangan
Infrastruktur Wilayah 2025-2034

Papua Barat Daya



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dilakukan berdasarkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proses penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempertimbangkan masukan teknis dari Unit Organisasi Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 521);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.

KESATU : Menetapkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 yang selanjutnya disebut RPIW Tahun 2025-2034.

KEDUA : RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. RPIW Provinsi Aceh;
2. RPIW Provinsi Sumatera Utara;

3. RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
 4. RPIW Provinsi Sumatera Barat;
 5. RPIW Provinsi Bengkulu;
 6. RPIW Provinsi Riau;
 7. RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
 8. RPIW Provinsi Jambi;
 9. RPIW Provinsi Lampung;
 10. RPIW Provinsi Bangka Belitung;
 11. RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
 12. RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
 13. RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
 14. RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
 15. RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
 16. RPIW Provinsi Banten;
 17. RPIW Provinsi DKI Jakarta;
 18. RPIW Provinsi Jawa Barat;
 19. RPIW Provinsi Jawa Tengah;
 20. RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 21. RPIW Provinsi Jawa Timur;
 22. RPIW Provinsi Bali;
 23. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 24. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 25. RPIW Provinsi Gorontalo;
 26. RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
 27. RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
 28. RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
 29. RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
 30. RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
 31. RPIW Provinsi Maluku Utara;
 32. RPIW Provinsi Maluku;
 33. RPIW Provinsi Papua;
 34. RPIW Provinsi Papua Barat;
 35. RPIW Provinsi Papua Tengah;
 36. RPIW Provinsi Papua Selatan;
 37. RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
 38. RPIW Provinsi Papua Barat Daya,
- disusun dalam bentuk buku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

: RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

1. pendahuluan;
2. arah kebijakan;
3. profil wilayah dan potensi daerah;
4. profil dan kinerja infrastruktur;
5. permasalahan dan isu strategis;
6. skenario pengembangan wilayah;
7. analisis kebutuhan infrastruktur;
8. rencana aksi pembangunan infrastruktur; dan
9. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW.

- KEEMPAT : RPIW Tahun 2025-2034 menjadi acuan kewilayahan dan penentuan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan RPIW Tahun 2025-2034 dilakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034.
- KETUJUH : Peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- KEDELAPAN : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilaksanakan oleh pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH

RPIW Tahun 2025-2034

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 disusun dalam bentuk buku yang meliputi:

1. Buku I: RPIW Provinsi Aceh
2. Buku II: RPIW Provinsi Sumatera Utara;
3. Buku III: RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
4. Buku IV: RPIW Provinsi Sumatera Barat;
5. Buku V: RPIW Provinsi Bengkulu;
6. Buku VI: RPIW Provinsi Riau;
7. Buku VII: RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
8. Buku VIII: RPIW Provinsi Jambi;
9. Buku IX: RPIW Provinsi Lampung;
10. Buku X: RPIW Provinsi Bangka Belitung;
11. Buku XI: RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
12. Buku XII: RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
13. Buku XIII: RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Buku XIV: RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Buku XV: RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
16. Buku XVI: RPIW Provinsi Banten;
17. Buku XVII: RPIW Provinsi DKI Jakarta;
18. Buku XVIII: RPIW Provinsi Jawa Barat;
19. Buku XIX: RPIW Provinsi Jawa Tengah;
20. Buku XX: RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Buku XXI: RPIW Provinsi Jawa Timur;
22. Buku XXII: RPIW Provinsi Bali;
23. Buku XXIII: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Buku XXIV: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Buku XXV: RPIW Provinsi Gorontalo;
26. Buku XXVI: RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
27. Buku XXVII: RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Buku XXVIII: RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
29. Buku XXIX: RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. Buku XXX: RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Buku XXXI: RPIW Provinsi Maluku Utara;
32. Buku XXXII: RPIW Provinsi Maluku;
33. Buku XXXIII: RPIW Provinsi Papua;
34. Buku XXXIV: RPIW Provinsi Papua Barat;
35. Buku XXXV: RPIW Provinsi Papua Tengah;
36. Buku XXXVI: RPIW Provinsi Papua Selatan;

- 37. Buku XXXVII: RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
- 38. Buku XXXVIII: RPIW Provinsi Papua Barat Daya;



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menuntaskan penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Tahun 2025-2034. Penyusunan RPIW ini merupakan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR.

RPIW hadir untuk menjawab tantangan pengembangan wilayah 10 tahun ke depan melalui dukungan infrastruktur PUPR. Dalam penyusunannya, saya mengarahkan RPIW melanjutkan arahan pembangunan yang telah dicapai dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024 dengan memperhatikan keberlanjutan manfaat infrastruktur PUPR terbangun.

Saya melihat RPIW ini memiliki peran strategis. Pertama, RPIW merupakan *platform* sinergi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR ke depan sehingga perlu diacu pada setiap rangkaian proses perencanaan dan pemrograman pada unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PUPR. Kedua, RPIW menjadi masukan arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Renstra Kementerian PUPR. Ketiga, RPIW merupakan inovasi Kementerian PUPR dalam mewujudkan akuntabilitas perencanaan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan.

Melihat peran strategis RPIW, saya menyetujui usulan penetapan RPIW ini melalui Keputusan Menteri. Dengan penetapan ini, RPIW dapat lebih efektif menjadi basis teknokratik untuk koordinasi dan konsolidasi implementasi pembangunan infrastruktur PUPR bersama Kementerian/Lembaga lainnya dan Pemerintah Daerah dalam forum-forum perencanaan dan pemrograman pembangunan setiap tahunnya.

Akhir kata, saya minta BPIW dapat mengawal implementasi RPIW dan memastikan dilaksanakan oleh unit organisasi teknis terkait. Selain itu, agar BPIW secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan dinamika kebutuhan pengembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Jakarta, 17 April 2024

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

M. Basuki Hadimuljono



M. BASUKI HADIMULJONO
Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



YUDHA MEDIAWAN

Kepala Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur telah menjadi bagian penting pembangunan nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Peran ini masih menjadi salah satu prioritas pada periode-periode selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 bersama dengan pembangunan sektor lainnya. Demikian pula dengan infrastruktur PUPR yang memiliki peran dan kontribusi dalam mendukung pengembangan konektivitas wilayah, menjaga ketahanan air, mendukung ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan serta mendukung pengembangan sektor-sektor strategis nasional seperti pariwisata dan industri dalam rangka pengembangan wilayah.

Menyongsong RPJMN 2025-2029 dan sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR, BPIW telah menyelesaikan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Penekanan RPIW lebih kepada upaya mensinergikan program pembangunan infrastruktur PUPR dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan perencanaan pembangunan sektoral lainnya.

Muatan perencanaan yang diatur dalam RPIW telah melalui proses koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan masukan dari Unit Organisasi Teknis Kementerian PUPR. RPIW akan menjadi acuan teknokratis arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis PUPR periode mendatang serta memorandum program infrastruktur PUPR yang akan dibahas dalam Forum Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional (Konreg), dan forum-forum pemrograman lainnya.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPIW 38 Provinsi ini. Dengan diacunya RPIW, pembangunan infrastruktur PUPR diharapkan dapat melanjutkan kebermanfaatan infrastruktur PUPR terbangun serta lebih memberikan manfaat dan nilai tambah tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga pemerataan pengembangan wilayah.

Jakarta, 17 April 2024

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah



Yudha Mediawan

TIM PENYUSUN

Tim Pengarah:

Dr. Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg.
Pranoto, S.T., M.Dev.Plg.
Benny Hermawan, S.T., M.Sc.
Ir. Zevi Azzaino, M.Sc., Ph.D.
Boby Ali Azhari, S.T., M.Sc.
Melva Eryani Marpaung, S.T., MUM
Dr. Ir. Manggas Rudy Siahaan, M.Sc.
Ir. Abram Elsajaya Barus, M.Eng.Sc.

Tim Penyusun:

Dr. Andie Pramudita Saidhidayat, S.T., M.Si
Dr. Doedoeng Zenal Arifin, S.T, MT, IPM
Raden Dady Indratmo, S.T, MT
Stephanus Raden Kristianto, S.T, M.Eng.Sc
Amanda Widyadwiana, S.T, M.T.
Sri Murdiati Rin Permata Sari, S.T.
Aryowibowo Nurprilianto Nugroho, S.T, M.T.
Adito Maulana, S.T.
Ramadhan Tirta Saputra, S.T.
Balqis Febriyantina Gunari, S.T, MPWK
Fanny Septiana, S.T.
Miko Luhde Sritara Savitri, S.T.
Mario Puji Hersanto, S.T, M.Eng

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN MENTERI

SAMBUTAN MENTERI

SAMBUTAN ii

TIM PENYUSUN..... iii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... viii

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR PETA..... xiv

1. BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Kedudukan dalam Kebijakan 3

1.3 Urgensi Penyusunan 4

1.4 Muatan RPIW..... 4

1.5 Manfaat RPIW..... 5

1.6 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW..... 5

2. BAB II ARAH KEBIJAKAN..... 8

2.1 Kebijakan Penataan Ruang 8

2.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 8

2.1.2 Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Papua 9

2.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat Daya 10

2.2 Kebijakan Sektor 13

2.2.1 Visi Indonesia 2045 13

2.2.2 Kebijakan RPJMN di Pulau Papua 14

2.2.3 Kebijakan Inpres No. 9 Tahun 2020 bagi Kementerian PUPR di Pulau Papua 17

2.2.4 Target Visium Kementerian PUPR 2030..... 18

2.2.5 Konsep Rencana Strategis Kementerian PUPR 2025-2029 19

2.2.6 Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional..... 20

2.2.7 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional..... 20

2.2.8 UU Pembentukan Propinsi Papua Barat Daya Nomor 29 Tahun 2022 .. 21

2.3 Kebijakan Pengembangan Kawasan Prioritas..... 21

2.4 Agenda Global..... 24

2.4.1 Megatren Dunia Tahun 2045 24

2.4.2 Agenda SDGs 2030 26

2.5 Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur 29

2.5.1 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah 29

2.5.2 Arah Kebijakan Pemanfaatan Infrastruktur PUPR Prioritas..... 37

3	BAB III PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH.....	39
3.1	Profil Fisik dan Kebencanaan Provinsi Papua Barat Daya.....	39
3.1.1	Kondisi Klimatologi papua Barat Daya	41
3.1.2	Kondisi Tutupan Lahan Papua Barat Daya	41
3.1.3	Kondisi Kawasan Lindung Papua Barat Daya	44
3.1.4	Kondisi Ekoregion Papua Barat Daya	45
3.1.5	Kondisi Daya Dukung Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Papua Barat Daya	46
3.1.6	Kondisi Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Papua Barat Daya	47
3.1.7	Kondisi Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Papua Barat Daya	49
3.1.8	Kondisi Daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Perlindungan Banjir Papua Barat Daya.....	50
3.1.9	Kondisi Daya Dukung Jasa Ekosistem Tata Air dan Banjir Papua Barat Daya	51
3.1.10	Kondisi Kebencanaan Banjir, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Tsunami Papua Barat Daya.....	54
3.2	Profil Demografi Provinsi Papua Barat Daya	58
3.2.1	Profil Penduduk Papua Barat Daya	58
3.2.2	Profil Pembangunan Manusia Papua Barat Daya	59
3.2.3	Profil Ketenagakerjaan Papua Barat Daya	65
3.2.4	Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Papua Barat Daya	68
3.3	Profil Ekonomi Provinsi Papua Barat Daya	74
3.3.1	Profil Ekonomi Papua Barat Daya Berdasarkan PDRB.....	74
3.3.2	Profil Investasi Papua Barat Daya.....	78
3.3.3	Profil Kapasitas Fiskal Papua Barat Daya	78
3.4	Profil Sosial Budaya Provinsi Papua Barat Daya	84
3.4.1	Suku di Provinsi Papua Barat Daya	84
3.4.2	Budaya Tradisional.....	84
3.4.3	Sistem Ekonomi dan Mata Pencaharian	85
3.4.4	Kerajinan dan Kesenian.....	85
3.4.5	Ragam Bahasa	87
3.4.6	Kepemilikan Tanah Adat	87
3.5	Profil Interaksi Antar Kawasan di Provinsi Papua Barat Daya	92
3.6	Potensi Unggulan di Provinsi Papua Barat Daya.....	96
4	BAB IV PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR	99
4.1	Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air	99
4.1.1	Infrastruktur Bangunan Tampungan Air	100

4.1.2	Infrastruktur Penyediaan Irigasi.....	101
4.1.3	Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air	102
4.1.4	Infrastruktur Sumber Air Baku	102
4.2	Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan	104
4.2.1	Infrastruktur Sistem Jaringan Jalan.....	104
4.2.2	Kondisi Tingkat Pelayanan Jalan dan Waktu Tempuh	105
4.2.3	Jalur Distribusi Komoditas Unggulan	107
4.3	Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman	108
4.3.1	Sebaran Sistem Penyediaan Air Minum.....	108
4.3.2	Sebaran Sistem Pengolahan Persampahan	111
4.3.3	Sebaran Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik.....	113
4.3.4	Sistem Drainase.....	115
4.3.5	Bangunan Cagar Budaya dan Desa Adat.....	116
4.4	Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan	116
4.4.1	Sebaran dan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan.....	117
4.4.2	Sebaran dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	118
4.4.3	Sebaran dan Jumlah Backlog Perumahan.....	119
4.4.4	Kawasan Kumuh Perkotaan yang Perlu Dukungan Perumahan	121
4.5	Profil dan Kinerja Infrastruktur Non-PUPR	123
4.5.1	Infrastruktur Perhubungan	123
4.5.2	Infrastruktur Energi.....	125
4.5.3	Infrastruktur Telekomunikasi.....	126
5	BAB V PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	127
5.1	Sektor Pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional	127
5.2	Provinsi Papua Barat sebagai Pusat Pertumbuhan Industri Baru di Wilayah Timur Indonesia	134
5.3	Kawasan Perkotaan Provinsi Papua Barat Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Kegiatan Wilayah Hinterland	141
6.	BAB VI.SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH.....	147
6.1	Proyeksi Pertumbuhan	147
6.1.1	Proyeksi Penduduk.....	147
6.1.2	Proyeksi Ekonomi.....	152
6.1.3	Keberlanjutan Lingkungan	153
6.2	Visi dan Strategi.....	157
6.2.1	Perumusan Visi Wilayah.....	157
6.2.2	Analisis Penyusunan Strategi	158
6.3	Skenario Pengembangan	174
6.3.1	Pariwisata.....	174
6.3.2	Industri.....	175
6.3.3	Kawasan Perkotaan.....	176

7.	BAB VII ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR.....	178
7.1	Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah di Provinsi Papua Barat Daya.	178
7.1.1	Analisis Kesenjangan Infrastruktur Sumber Daya Air di Provinsi Papua Barat Daya.....	178
7.1.2	Analisis Kesenjangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua Barat Daya.....	180
7.1.3	Analisis Kesenjangan Infrastruktur Permukiman Provinsi Papua Barat	182
7.1.4	Analisis Kesenjangan Infrastruktur Perumahan di Provinsi Papua Barat Daya	191
7.1.5	Analisis Kesenjangan Infrastruktur Perhubungan.....	196
7.2	Analisis Prioritas Pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.....	197
7.3	Analisis Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah di Provinsi Papua Barat Daya	207
8	BAB VIII RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	217
8.1	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR	217
8.1.1	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	217
8.1.2	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.....	224
8.1.3	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya	228
8.1.4	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Perumahan.....	234
8.2	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR	239
8.2.1	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Sektor Pariwisata.....	239
8.2.2	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Sektor Industri.....	245
8.2.3	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Sektor Perkotaan.....	254
9	BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW	266
9.1	Latar Belakang	266
9.2	Tujuan	267
9.3	Jenis Pemantauan dan Evaluasi	268

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Lingkup Wilayah Perencanaan	2
Tabel 2.1	Target Visium Kementerian PUPR 2030	18
Tabel 2.2	Lingkup Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat dan Strategi Pengembangannya	23
Tabel 2.3	Daftar PSN di Provinsi Papua	24
Tabel 2.4	Rumusan Arah Kebijakan Provinsi Papua Barat Daya.....	31
Tabel 2.5	Infrastruktur Prioritas PUPR	38
Tabel 3.1	Luas Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya	40
Tabel 3.2	Data Administrasi Provinsi Papua Barat Daya	41
Tabel 3.3	Luas Tutupan Lahan di Papua Barat Daya.....	42
Tabel 3.4	Luas Kawasan Lindung di Papua Barat Daya.....	44
Tabel 3.5	Luas Kawasan Ekoregion di Papua Barat Day	45
Tabel 3.6	Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Papua Barat Daya	46
Tabel 3.7	Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Papua Barat Daya	47
Tabel 3.8	Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Papua Barat Daya	49
Tabel 3.9	Tabel profil tutupan lahan dan indeks jasa Ekosistem Papua Barat Daya	50
Tabel 3.10	Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Perlindungan Banjir Papua Barat Daya.....	50
Tabel 3.11	Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem Tata Air dan Banjir di Papua Barat Daya	51
Tabel 3.12	Tabel Profil Fisik dan Kebencanaan Papua Barat Daya.....	54
Tabel 3.13	Nilai Indeks Risiko Papua Barat Daya.....	55
Tabel 3.14	Jumlah Penduduk Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota	59
Tabel 3.15	Kepadatan Penduduk Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota	59
Tabel 3.16	IPM Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota	60
Tabel 3.17	AHH Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota.....	63
Tabel 3.18	RLS Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota	64
Tabel 3.19	Pengeluaran perkapita Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota	65
Tabel 3.20	Tingkat Persentase Angkatan Kerja Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota.....	66
Tabel 3.21	Jumlah Angkatan Kerja Angkatan Kerja Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota.....	66
tabel 3.22	Tingkat Persentase Pengangguran Terbuka Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota.....	68
Tabel 3.23	Jumlah Pengangguran Terbuka Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota.....	68

Tabel 3. 24	Tingkat Persentase Kemiskinan Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota	71
Tabel 3. 25	Jumlah Penduduk Miskin Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota...	71
Tabel 3. 26	Tingkat Ketimpangan Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota	72
Tabel 3. 27	Profil Demografi Papua Barat Daya	73
Tabel 3. 28	Distribusi Sektor PDRB Papua Barat Daya Tahun 2012-2021	76
Tabel 3. 29	Distribusi PDRB Papua Barat Daya Per Kota/Kabupaten	76
Tabel 3. 30	Laju Pertumbuhan PDRB Papua Barat Daya Per Kota/Kabupaten	77
Tabel 3. 31	Investasi Papua Barat Daya Per Kota/Kabupaten	78
Tabel 3. 32	Profil ekonomi dasar Papua Barat Daya	79
Tabel 3. 33	Profil Ekonomi Sektor unggulan pertanian dan/atau perikanan Papua Barat Daya	80
Tabel 3. 34	Profil Ekonomi sektor unggulan Industri Papua Barat Daya	82
Tabel 3. 35	Profil Ekonomi sektor unggulan pariwisata Papua Barat Daya	91
Tabel 3. 36	Profil Sosial Budaya Papua Barat Daya	92
Tabel 3. 37	Interaksi Antar Kawasan di Provinsi Papua Barat	95
Tabel 3. 38	Rekapitulasi Interaksi antarkawasan Papua Barat Daya	95
Tabel 4. 1	Bendung di Provinsi Papua Barat Daya	100
Tabel 4. 2	Daerah Irigasi di Provinsi Papua Barat Daya	100
Tabel 4. 3	Daerah Irigasi di Provinsi Papua Barat Daya	101
Tabel 4. 4	Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air di Provinsi Papua Barat Daya	102
Tabel 4. 5	Sumber Air Baku di Provinsi Papua Barat Daya	103
Tabel 4. 6	Tingkat Pelayanan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya	106
Tabel 4. 7	Presentase Akses Air Minum Layak Provinsi Papua Barat	108
Tabel 4. 8	Kapasitas Produksi Air Bersih dari SPAM di Prov. Papua Barat	108
Tabel 4. 9	Pengelolaan Persampahan di Provinsi Papua Barat Daya	112
Tabel 4. 10	Akses Sanitasi di Provinsi Papua Barat Daya	113
Tabel 4. 11	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Prov. Papua Barat Daya	113
Tabel 4. 12	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Prov. Papua Barat Daya	114
Tabel 4. 13	Penanganan Drainase Lingkungan di Provinsi Papua Barat Daya	115
Tabel 4. 14	Kawasan Kumuh Perkotaan di Provinsi Papua Barat Daya	117
Tabel 4. 15	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Papua Barat daya	118
Tabel 4. 16	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Papua Barat Daya	119
Tabel 4. 17	Penguasaan Rumah Tinggal di Provinsi Papua Barat Daya	120
Tabel 4. 18	Backlog Pemenuhan Perumahan di Provinsi Papua Barat Daya	120
Tabel 4. 19	Kawasan Kumuh Perkotaan di Provinsi Papua Barat Daya	122
Tabel 4. 20	Terminal di Provinsi Papua Barat Daya	123

Tabel	4. 21	Bandar Udara di Provinsi Papua Barat Daya.....	124
Tabel	4. 22	Pelabuhan di Provinsi Papua Barat Daya.....	124
Tabel	4. 23	Kapasitas Pembangkit Listrik Terpasang di Provinsi Papua Barat Daya	126
Tabel	5. 1	Isu Strategis Fokus Pariwisata.....	129
Tabel	5. 2	Isu Strategis Fokus Industri.....	135
Tabel	5. 3	Isu Strategis Fokus Kawasan Perkotaan.....	142
Tabel	6. 1	Proyeksi Pertumbuhan Provinsi Papua Barat Dengan Skenario Pengembangan Wilayah	150
Tabel	6. 2	Kemampuan Penyediaan Pangan Provinsi Papua Barat Daya	155
Tabel	6. 3	Analisis PESTLE (Makro) Fokus Pariwisata.....	158
Tabel	6. 4	Analisis PESTLE (Makro) Fokus Industri	160
Tabel	6. 5	Analisis PESTLE (Makro) Fokus Kawasan Perkotaan.....	161
Tabel	6. 6	Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Pariwisata	163
Tabel	6. 7	Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Industri.....	164
Tabel	6. 8	Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Kawasan Perkotaan	166
Tabel	6. 9	Analisis SWOT Fokus Pariwisata	167
Tabel	6. 10	Analisis SWOT Fokus Industri.....	170
Tabel	6. 11	Analisis SWOT Fokus Kawasan Perkotaan	172
Tabel	6. 12	Parameter Penilaian Fokus Pariwisata.....	174
Tabel	6. 13	Penentuan Kawasan Prioritas Sektor Pariwisata	175
Tabel	6. 14	Parameter Penilaian Fokus Industri.....	175
Tabel	6. 15	Penentuan Kawasan Prioritas Sektor Industri	176
Tabel	6. 16	Parameter Penilaian Fokus Kawasan Perkotaan	176
Tabel	6. 17	Penentuan Kawasan Prioritas Perkotaan	177
Tabel	7. 1	Kebutuhan Air Baku di Provinsi Papua Barat Daya	178
Tabel	7. 2	Kebutuhan Pengendalian Daya Rusak Air.....	180
Tabel	7. 3	Analisis Kesenjangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua Barat Daya.....	180
Tabel	7. 4	Jumlah dan Kapasitas SPAM Terpasang di Prov. Papua Barat Daya	183
Tabel	7. 5	Kebutuhan Air Minum Provinsi Papua Barat Daya untuk Kegiatan Domestik	184
Tabel	7. 6	Kebutuhan Air Minum Provinsi Papua Barat Daya Sesuai Dengan Rencana Pengembangan Kawasan	186
Tabel	7. 7	Kebutuhan Penanganan Air Limbah Provinsi Papua Barat Daya Sesuai Dengan Rencana Pengembangan Kawasan Tahun 2034	188
Tabel	7. 8	Cakupan Pelayanan Persampahan di Provinsi Papua Barat Daya	190
Tabel	7. 9	Analisis Kesenjangan Backlog Kepemilikan Rumah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2021.....	192
Tabel	7. 10	Kebutuhan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022	193

Tabel 7.11	Asumsi Rata-rata Kemampuan Penanganan Rumah	193
Tabel 7.12	Kebutuhan Penyediaan Rumah dan Penanganan RTLH Provinsi Papua Barat Daya	195
Tabel 7.13	Prioritas Pembangunan Infrastruktur PUPR di Provinsi Papua Barat Daya	198
Tabel 7.14	Analisis Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Provinsi Papua Barat Daya	198
Tabel 8.1	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air di Provinsi Papua Barat Daya	218
Tabel 8.2	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua Barat Daya	225
Tabel 8.3	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya di Provinsi Papua Barat Daya	229
Tabel 8.4	Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Perumahan di Provinsi Papua Barat Daya	235
Tabel 8.5	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Sektor Pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya	240
Tabel 8.6	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Sektor Industri di Provinsi Papua Barat Daya	246
Tabel 8.7	Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Sektor Perkotaan	255
Tabel 9.1	Contoh Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW	270

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Posisi RPIW dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR.....	3
Gambar 1. 2 Kedudukan RPIW Provinsi Papua Barat terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya	4
Gambar 1. 3 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW	7
Gambar 2. 1 Target Output Kementerian PUPR	19
Gambar 2. 2 Sebaran DPN, KPPN, dan KSPN di Pulau Papua.....	21
Gambar 2. 3 Megatren Dunia Tahun 2045	26
Gambar 2. 4 Tujuan TPB/SDGs 2030.....	27
Gambar 2. 5 Peta Arah Kebijakan Provinsi Papua Barat Daya	36
Gambar 3. 1 AHH Papua Barat Daya Tahun 2012-2021.....	62
Gambar 3. 2 RLS Papua Barat Daya Tahun 2012-2021	63
Gambar 3. 3 Pengeluaran Per Kapita Papua Barat Daya Tahun 2012-2021	64
Gambar 3. 4 Tingkat Angkatan Kerja Papua Barat Daya.....	65
Gambar 3. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Papua Barat Daya	67
Gambar 3. 6 Tingkat Kemiskinan Papua Barat Daya.....	69
Gambar 3. 7 Tingkat Ketimpangan Papua Barat Daya	72
Gambar 3. 8 PDRB dan LPE Papua Barat Daya Tahun 2012-2021	74
Gambar 3. 9 PDRB Lapangan Usaha Papua Barat Daya Tahun 2017-2021.....	75
Gambar 3. 10 Investasi Masuk Papua Barat Daya	78
Gambar 3. 11 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Papua Barat Daya	79
Gambar 3. 12 Wilayah Adat Domberay di Papua Barat Daya.....	84
Gambar 3. 14 Interaksi Antar Kawasan dalam Provinsi Papua Barat Daya	92
Gambar 3. 15 Interaksi Antar Kawasan Papua Barat Daya	94
Gambar 4. 1 Sumber Air Baku di Provinsi Papua Barat Daya	99
Gambar 4. 2 Sumber Air Baku di Provinsi Papua Barat Daya	103
Gambar 4. 3 Sistem Jaringan Jalan dan Konektivitasnya dengan Kawasan Strategis di Papua Barat Daya.....	104
Gambar 4. 4 Jalur Distribusi Komoditas Unggulan di Papua Barat Daya	107
Gambar 4. 5 Sebaran SPAM di Provinsi Papua Barat Daya.....	110
Gambar 4. 6 Sebaran TPA	111
Gambar 4. 7 Sebaran IPLT di Provinsi Papua Barat Daya.....	114
Gambar 4. 8 Sebaran Kawasan Kumuh di Provinsi Papua Barat.....	118
Gambar 4. 9 Sebaran Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Papua Barat Daya.....	119
Gambar 4. 10 Sebaran Backlog Perumahan di Provinsi Papua Barat Daya	121
Gambar 4. 11 Sebaran Kawasan Kumuh di Provinsi Papua Barat Daya.....	122
Gambar 4. 12 Sistem Transportasi Darat, Laut, dan Udara di Kawasan Papua Barat Daya	125
Gambar 6. 1 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua Barat Daya	148
Gambar 6. 2 Proyeksi Pertumbuhan Alamiah Papua Barat Daya	149

Gambar 6. 3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Business as Usual.....	152
Gambar 6. 4 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dengan Strategi Pengembangan ..	153
Gambar 6. 5 Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Papua Barat Daya.....	154
Gambar 6. 6 Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Papua Barat Daya.....	156
Gambar 6. 7 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Pariwisata	169
Gambar 6. 8 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Industri.....	171
Gambar 6. 9 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Kawasan Perkotaan ..	173
Gambar 7. 1 Kebutuhan Pembangunan dan Penanganan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya.....	182
Gambar 9. 1 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW Dalam Tahunan	269

DAFTAR PETA

Peta 3. 1 Peta Wilayah Sungai di Provinsi Papua Barat	39
Peta 3. 2 Peta Jaringan Jalan Nasional di Provinsi Papua Barat Daya.....	40
Peta 3. 3 Peta Administrasi Papua Barat Daya	42
Peta 3. 4 Peta Curah Papua Barat Daya	42
Peta 3. 5 Peta Tutupan Lahan Papua Barat Daya Tahun 2015.....	42
Peta 3. 6 Peta Tutupan Lahan Papua Barat Daya Tahun 2021.....	44
Peta 3. 7 Peta Kawasan Lindung di Papua Barat Daya.....	45
Peta 3. 8 Peta Ekoregion di Papua Barat Daya.....	46
Peta 3. 9 Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Papua Barat Daya.....	48
Peta 3. 10 Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Papua Barat Daya	49
Peta 3. 11 Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Papua Barat Daya	52
Peta 3. 12 Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Perlindungan Banjir di Papua Barat Daya.....	53
Peta 3. 13 Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Tata Air dan Banjir di Papua Barat Daya	53
Peta 3. 14 Peta Potensi Rawan Bencana Gempa Bumi di Papua Barat Daya	56
Peta 3. 15 Peta Potensi Rawan Bencana Banjir di Papua Barat Daya.....	56
Peta 3. 16 Peta Potensi Longsor di Papua Barat Daya	57
Peta 3. 17 Peta Potensi Bencana Kekeringan di Papua Barat Daya	57
Peta 3. 18 Peta Potensi Rawan Bencana Tsunami di Papua Barat Daya	58
Peta 3. 19 Peta Tingkat Kepadatan Penduduk Papua Barat Daya dsk Tahun 2021	61
Peta 3. 20 Peta Sebaran IPM Papua Barat Daya Tahun 2021	61
Peta 3. 26 Peta Sebaran TPT Papua Barat Daya Tahun 2021.....	70
Peta 3. 27 Peta Sebaran Tingkat Kemiskinan Sorong dsk Tahun 2012-2021	70
Peta 3. 29 Peta Sebaran Tingkat Ketimpangan Papua Barat Daya Tahun 2021	73
Peta 3. 32 Peta Sebaran Laju Pertumbuhan PDRB Papua Barat Daya Tahun 2021	77
Peta 3. 38 Peta Sebaran Potensi Unggulan Pulau Papua Barat Daya	98
Peta 5. 1 Peta Permasalahan Fokus Pariwisata	133
Peta 5. 2 Peta Permasalahan Fokus Industri.....	140
Peta 5. 3 Peta Permasalahan Fokus Perkotaan.....	145
Peta 8. 1 Peta Keterpaduan Sektor Pariwisata Provinsi Papua Barat Daya	239
Peta 8. 2 Peta Keterpaduan Sektor Industri Provinsi Papua Barat Daya	245
Peta 8. 3 Peta Keterpaduan Sektor Perkotaan Provinsi Papua Barat Daya	254



BAB 1

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini mencakup sub bab Latar Belakang, Kedudukan dalam Kebijakan, Urgensi Penyusunan, Muatan RPIW, Manfaat RPIW, dan Kerangka Pikir Penyusunan RPIW.

1.1 Latar Belakang

Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari 5 kabupaten, 1 kotamadya, 132 distrik, 74 kelurahan, dan 939 kampung. Pada tahun 2022, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 591.069 jiwa dengan total luas wilayah 38.820,49 km². Pada tahun 2029, diperkirakan jumlah penduduk akan bertambah sebanyak 196.809 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,2% per tahun. Keseluruhan wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya termasuk dalam kawasan strategis prioritas nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024 baik berupa PKSN, KI, KEK, KSPN, Kota Baru, KPPN, DDT, PPKT, dan Wilayah Adat.

Provinsi Papua Barat Daya memiliki kekuatan ekonomi yang besar dan signifikan baik secara regional dan nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Papua Barat sebesar Rp 61.594 Milyar pada tahun 2021 atau 0,55% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional (Rp. 11.118.868,5 Milyar) dan 24,14% jika dibandingkan dengan PDRB Pulau Papua (Rp. 255.153 Milyar). Provinsi Papua Barat Daya merupakan kontributor terendah terhadap PDB Nasional dengan sektor pariwisata dan sektor industri sebagai sektor unggulan. Basis pariwisata berada di KSPN dan Geopark UNESCO Raja Ampat. Basis industri Agro berada di Kawasan Agroindustri Kais (Kabupaten Sorong Selatan) dengan kontribusi sebesar 0,4% (Rp. 357 Milyar) terhadap PDRB Provinsi Papua Barat tahun 2021. Basis industri penunjang logistik, pariwisata, dan industri pengolahan perikanan berada di KEK Sorong (Kabupaten Sorong).

Sektor utama lainnya yang potensial dan strategis adalah sentra ternak Kebar dan Lumbung Pangan Tambrau (Kabupaten Tambrau).

Selain itu, posisi strategis Provinsi Papua Barat Daya didukung oleh letaknya yang berada di bagian timur Indonesia sebagai gerbang ke wilayah Timur Indonesia. Provinsi Papua Barat Daya juga memiliki implikasi penting terkait keberlanjutan wilayah Negara Indonesia dan integrasi budaya dan etnis yang beragam di dalamnya. Provinsi Papua Barat Daya juga memiliki hubungan penting dengan ASEAN. Provinsi Papua Barat Daya menjadi jembatan geografis antara Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini memungkinkan potensi kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Papua Barat Daya dan negara-negara ASEAN, serta memperkuat konektivitas dan integrasi ekonomi regional. Provinsi Papua Barat Daya juga memiliki hubungan dengan Eropa, khususnya dalam konteks perdagangan

dan investasi. Beberapa negara Eropa memiliki kepentingan ekonomi di Papua Barat Daya, terutama terkait dengan eksploitasi sumber daya alam dan investasi dalam sektor industri. Sebagai bagian dari Indonesia, Provinsi Papua Barat Daya juga merupakan bagian dari jaringan hubungan Indonesia dengan Uni Eropa melalui berbagai kerja sama perdagangan dan investasi. Selain itu, pariwisata alam Papua Barat Daya, menarik minat wisatawan internasional, termasuk dari Eropa. Ini memperkuat hubungan Papua Barat Daya dengan negara-negara Eropa dalam sektor pariwisata dan promosi budaya.

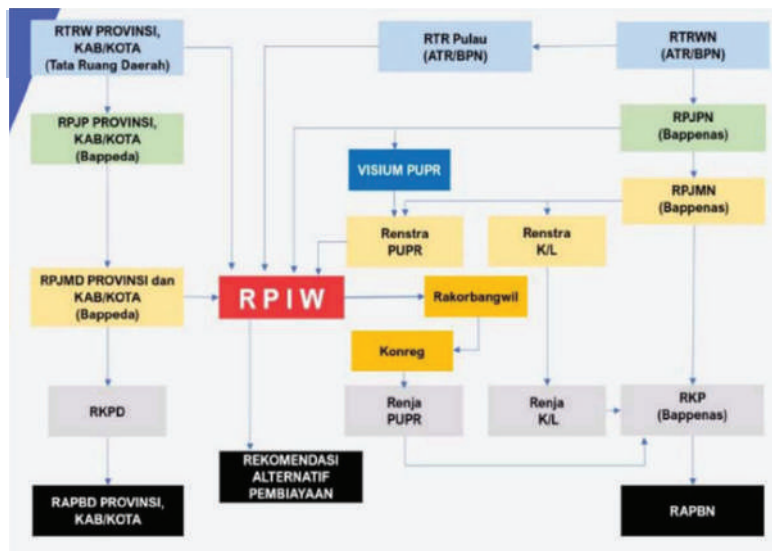
Meskipun Provinsi Papua Barat Daya memiliki kekuatan ekonomi dan sosial yang sangat penting secara nasional dan internasional, provinsi ini juga memiliki kendala dan tantangan yang dapat memperlemah posisinya. Kendala dan tantangan tersebut diantaranya: 1) Infrastruktur yang terbatas, 2) Tingkat kemiskinan yang tinggi, 3) Konflik sosial dan ketegangan politik, 4) Perlambatan pembangunan manusia, dan 5) Pelestarian lingkungan yang rentan.

Dengan uraian potensi dan kendala di atas, maka diperlukan suatu perencanaan terintegrasi lintas sektor untuk mengoptimalkan peran penting Provinsi Papua Barat Daya dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya serta memitigasi dampak risiko bencana lingkungan. Untuk itu, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III melakukan Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Provinsi Papua Barat Daya sebagai acuan dalam perencanaan dan pemrograman khususnya infrastruktur PUPR di Provinsi Papua Barat Daya.

Tabel 1. 1 Lingkup Wilayah Perencanaan

Wilayah Adat	Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten/ Kota	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Domberay	1. Kota Sorong	Sorong	657	267.912	455,7
	2. Kab. Sorong	Aimas	6.544	93.027	19,8
	3. Kab. Raja Ampat	Waisai	8.034	49.876	8,7
	4. Kab. Tambrauw	Fef	11.52	14.121	2,9
	5. Kab. Maybrat	Kemurkek	5.462	42.163	8,1
	6. Kab. Sorong Selatan	Teminabuan	6.594	48.897	8,3
Jumlah			695.154	515.996	503,5

Sumber: RPJMN 2020-2024 dan Provinsi Papua Barat dalam Angka Tahun 2023/2024



Gambar 1. 2 Kedudukan RPIW Provinsi Papua Barat Daya terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2021

1.3 Urgensi Penyusunan

Pembangunan infrastruktur PUPR harus dapat mendorong dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan. Dukungan ini dapat diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur yang sinergi dan terpadu secara internal PUPR dan lintas sektor. Dokumen RPIW merupakan dokumen perencanaan yang memuat strategi dan program pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu lintas sektor pada tingkat nasional dan daerah.

Selain sebagai acuan pembangunan Infrastruktur yang terpadu, dokumen RPIW juga menjadi alat untuk memprioritaskan penanganan kawasan dan dukungan program infrastruktur. Hal ini penting dilakukan untuk menjadi salah satu solusi dalam menghadapi keterbatasan pendanaan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.

1.4 Muatan RPIW

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Provinsi Papua Barat Daya memuat:

1. Pendahuluan, meliputi uraian latar belakang, kedudukan dalam kebijakan, urgensi penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW, dan kerangka pikir penyusunan RPIW;
2. Arah Kebijakan, meliputi sintesis analisis kebijakan serta strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, serta kawasan prioritas/strategis. Arah

kebijakan juga memuat uraian sasaran dan target jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Visium PUPR 2030 serta agenda global;

3. Profil Wilayah dan Potensi Daerah, meliputi kondisi fisik dan kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial-budaya, dan interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan;
4. Profil dan Kinerja Infrastruktur, meliputi uraian profil dan kinerja infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan serta infrastruktur permukiman dan perumahan. Bagian ini juga memuat profil dan kinerja infrastruktur non-PUPR;
5. Permasalahan dan Isu Strategis, meliputi potensi yang berupa keunggulan komparatif dan kompetitif, kendala/batasan dan permasalahan daerah, serta limitasi wilayah (daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup);
6. Skenario Pengembangan Wilayah, meliputi proyeksi pertumbuhan, perumusan visi dan strategi pengembangan wilayah, serta skenario pengembangan wilayah (tahapan dan prioritas);
7. Analisis Kebutuhan Infrastruktur, meliputi analisis kesenjangan infrastruktur wilayah dan analisis keterpaduan infrastruktur;
8. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur, meliputi rencana aksi kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR tahunan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun beserta pembagian kewenangan dan sumber pendanaan; dan
9. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW, memuat mekanisme untuk memastikan agar RPIW yang telah disusun dapat dimonitor dan dievaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun. Bagian ini akan diatur dengan petunjuk teknis tersendiri.

1.5 Manfaat RPIW

Manfaat penyusunan RPIW Provinsi Papua Barat Daya yaitu:

1. Memadukan kebijakan lintas sektor di tingkat nasional dan daerah untuk merumuskan strategi dan program pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien;
2. Memadukan proses perencanaan dan pemrograman sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian PUPR; dan
3. Menjadi masukan dalam penyusunan RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, dan dokumen perencanaan lainnya.

1.6 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

Tahapan utama dalam penyusunan RPIW terdiri dari 5 tahapan, yaitu: persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, perumusan skenario pengembangan, dan penyusunan rencana aksi.

Pada tahap persiapan, dilakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), pembentukan tim kerja, dan penyusunan rencana kerja. Tahap pengumpulan data dan informasi dimulai dengan perumusan arah kebijakan berdasarkan tinjauan terhadap berbagai dokumen kebijakan baik secara spasial dan sektoral. Perumusan arah kebijakan akan menghasilkan fokus perencanaan dan sasaran jangka panjang pengembangan wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Setelah perumusan arah kebijakan, akan disusun profil wilayah dan profil infrastruktur yang sesuai dengan fokus perencanaan.

Tahapan selanjutnya, yaitu proses pengolahan dan analisis data yang dimulai dari perumusan permasalahan dan isu strategis berdasarkan arah kebijakan, kondisi eksisting wilayah, dan potensi pengembangan di masa mendatang. Berikutnya adalah penyusunan skenario pengembangan wilayah yang menghasilkan *grand strategy* masing-masing fokus perencanaan untuk menjawab isu permasalahan dan mewujudkan sasaran jangka panjang. Analisa penyusunan *grand strategy* yang digunakan adalah analisa PESTLE & 5 FORCES dan IFAS EFAS. Dalam penyusunan skenario juga dilakukan penentuan kawasan prioritas dengan metode *multi criteria analysis* (MCA) sesuai dengan fokus perencanaan yang akan diprioritaskan sampai dengan tahun 2029. Pada kawasan prioritas terpilih kemudian dilakukan perhitungan terkait kebutuhan infrastruktur berdasarkan strategi yang telah dihasilkan.

Tahap terakhir yang dilakukan adalah penyusunan rencana aksi pembangunan infrastruktur dan monitoring-evaluasi pelaksanaan. *Grand strategy* yang dihasilkan dari skenario pengembangan wilayah akan diturunkan ke dalam program-program yang memuat rencana aksi yang terpadu antar sektor. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna memastikan pelaksanaan rencana aksi dan mendapatkan umpan balik bagi proses perencanaan berikutnya.

Secara sistematis, kerangka pikir penyusunan RPIW dapat dilihat pada bagan berikut



Gambar 1. 3 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

Sumber: Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2021



BAB 2

ARAH KEBIJAKAN



BAB II

ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi uraian kebijakan spasial dan sektoral tingkat nasional dan tingkat daerah yang menjadi acuan perumusan sintesis kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

2.1 Kebijakan Penataan Ruang

Sub bab ini berisi poin penting Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP No. 13 Tahun 2017), Rencana Tata Ruang Pulau Papua (Perpres No. 57 Tahun 2014), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2041 (Perda Provinsi Papua Barat No. 3 Tahun 2022).

2.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang, dengan jangka waktu selama 20 tahun. RTRWN mencakup beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan wilayah Provinsi Papua Barat Daya, yaitu sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, wilayah sungai, kawasan lindung, kawasan andalan, serta Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Terdapat 2 Sistem perkotaan nasional di Provinsi Papua Barat Daya yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Sorong dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sorong.

Sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, dan sistem jaringan sumber daya air telah ditetapkan dalam RTRWN di Pulau Papua dengan rincian sebagai berikut:

1. Sistem jaringan transportasi nasional terdapat 1 Pelabuhan Utama Sorong, 2 Pelabuhan Pengumpul (Arar Kab. Sorong dan Terminabuan Kab. Sorong Selatan), 6 Pelabuhan Angkutan Penyeberangan (Folley Kab. Raja Ampat, Arar Kab. Sorong, Klademak Kota Sorong, Waigeo Kab. Raja Ampat, Inanwatan Kab. Sorong Selatan, Batanta Kab. Raja Ampat), 1 Bandar Udara Pengumpul Sekunder yaitu Domine Eduard Osok Kota Sorong, 1 buah Bandar Udara Pengumpul Tersier Marinda Kab. Raja Ampat.
2. Sistem jaringan energi nasional terdapat 5 buah pembangkit tenaga listrik di Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, dan Kota Sorong.
3. Sistem jaringan sumber daya air terdapat 2 Wilayah Sungai (WS) yaitu WS Omba (Papua Barat – Papua) sebagai WS Lintas Provinsi dan WS Kamundan – Sebyar sebagai WS Strategis Nasional.

2.1.2 Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Papua

RTR Pulau Papua mencakup beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan Provinsi Papua Barat Daya, yaitu tujuan penataan ruang, pengembangan kluster, pengembangan jaringan transportasi, pengembangan pusat destinasi pariwisata, perwujudan sistem perkotaan nasional, pengembangan jaringan jalan nasional, jaringan energi, serta sistem jaringan sumber daya air.

Penataan ruang Pulau Papua bertujuan untuk mewujudkan: 1). Pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal; 2). Kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dan Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle); 3). pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, serta pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan; dan 4). Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan pintu gerbang Internasional yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini, Negara Palau, dan Negara Australia.

Dalam RTR Pulau Papua terdapat arahan sebagai berikut:

1. Pengembangan klaster meliputi Kawasan Pertanian (Kawasan Leher Pulau Papua-Teluk Cendrawasih, Kawasan Lengan Tangan Papua, Kawasan Rusuk Papua Selatan, dan Kawasan Punggung Pulau Papua Pegunungan Tengah); **Kawasan Peruntukan Perkebunan (Kawasan Sorong dan Sorong Selatan**. Kawasan Kepala Burung Pulau Papua, Kawasan Leher Pulau Papua Teluk Cendrawasih, Kawasan Lengan Tangan Papua, Kawasan Nabire-Paniai. Kawasan Rusuk Papua Selatan, dan Kawasan Rusuk Papua Utara); Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral (Kawasan Mimika dan Kawasan Rusuk Papua Utara); Kawasan Peruntukan Perikanan dan Perkebunan (**Kawasan Sorong dan Sorong Selatan**, Kawasan Kepala Burung Pulau Papua, Kawasan Leher Pulau Papua Teluk Cendrawasih, Kawasan Lengan Tangan Papua, Kawasan Rusuk Papua Selatan, dan Kawasan Rusuk Papua Utara); kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi (**Kawasan Sorong dan Sorong Selatan** serta Kawasan Kepala Burung Pulau Papua);
2. Pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional;
3. Pengembangan pusat destinasi pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata.

Perwujudan sistem perkotaan nasional diantaranya:

1. Pengembangan PKN dan PKW sebagai Pusat Klaster: PKN Sorong sebagai Pusat Klaster Kawasan Sorong dan Sorong Selatan
2. Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi; PKN, PKW, dan PKSN antara lain:
 - a. Pusat industri pengolahan dan industri jasa pertanian tanaman pangan, perkebunan. dan peternakan dilakukan di PKN Sorong;
 - b. Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan berbasis bisnis

ditakukan di PKN Sorong;

- c. Pusat pariwisata cagar budaya dan Ilmu pengetahuan bahari, ekowisata berbasis potensi kearifan lokal dilakukan di PKN Sorong;
3. Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa dilakukan di PKN Sorong.

Hal lain yang ditekankan dalam RTR Pulau Papua terkait konektivitas yaitu :

1. Pengembangan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing perekonomian di Pulau Papua meliputi:
 - a. Jaringan jalan lintas utara Pulau Papua (antara lain Jaringan Jalan Arteri Primer: Kambuaya – Pategomi – Susumuk – Kumurkek – Ayamasi – Snopy – Kebar – Arfu – Prafi - Warmare – Maruni - Manokwari; Maruni – Oransbari – Ransiki - Mameh);
 - b. Jaringan jalan lintas tengah Pulau Papua (antara lain jaringan jalan kolektor primer: Kokas-Hurimber-Fakfak, Hurimber- Bomberay).
2. Pengembangan jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/ atau bandar udara antara lain:
 - a. Jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Sorong dengan Pelabuhan Sorong dan Bandar Udara Domine Eduard Osok;
 - b. Jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKN Sorong dengan Pelabuhan Arar;

Untuk memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Papua Barat Daya, ditetapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yaitu Jaringan Distribusi di PKN Sorong sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sorong dan sekitarnya.

Pulau Papua terhadap Provinsi Papua Barat Daya meliputi pengembangan sebagai kawasan peruntukan perikanan, perkebunan, dan pertambangan (minyak dan gas bumi) serta pusat destinasi pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata.

2.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat Daya

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat Daya saat ini masih dalam proses penyusunan oleh Pemprov Papua Barat Daya Bersama Kementerian ATR/BPN sehingga dalam pembahasan selanjutnya mengacu kepada RTR provinsi induk sebelum Daerah Otonomi Baru, yaitu RTR Provinsi Papua Barat 2022-2041.

RTRW Provinsi Papua Barat Daya mencakup beberapa aspek utama yang menjadi acuan dalam pengembangan wilayah, yaitu tujuan penataan ruang, struktur dan pola ruang, serta penetapan kawasan strategis provinsi.

Berdasarkan RTRW Provinsi Papua Barat Daya, penataan ruang wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Papua Barat Daya sebagai pendukung ekonomi nasional yang maju dan berdaya saing dengan mengedepankan pelestarian wilayah

daratan dan lautan sesuai dengan nilai kearifan lokal sesuai dengan nilai adat di Provinsi Papua Barat Daya secara aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Terkait struktur ruang, dalam RTRW Provinsi, Papua Barat Daya terdiri atas 1 PKN (Kota Sorong), 1 PKSN (Kota Sorong), dan 5 PKL (Perkotaan Teminabuan di Kabupaten Sorong Selatan; Perkotaan Aimas di Kabupaten Sorong; Perkotaan Waisai di Kabupaten Raja Ampat; Perkotaan Fef di Kabupaten Tambrauw; Perkotaan Aifat di Kabupaten Maybrat).

Pengembangan pola ruang wilayah provinsi diarahkan pada peningkatan fungsi lindung dan pengelolaan wilayah-wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kearifan lokal dan perlindungan kepastian hukum mengenai keberadaan dan wilayah kelola masyarakat hukum adat. Selain itu diarahkan pada pengembangan pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi nasional sesuai dengan potensi darat dan lautan, peningkatan penyediaan lahan sawah dalam mendukung ketahanan pangan, dan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana. Pengembangan pada kawasan budi daya diarahkan pada upaya pengembangan kawasan yang sesuai dengan karakter daya dukung yang dimiliki, terutama untuk mendukung pengembangan Kawasan budidaya di laut antara lain dengan mengembangkan zona perikanan tangkap, hutan mangrove, perikanan budidaya, pariwisata, pelabuhan, pertambangan, energi.

RTRW Provinsi Papua Barat Daya menetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang dipandang dari beberapa sudut kepentingan, yaitu ekonomi, sosial dan budaya, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

KSP dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu kawasan agropolitan regional meliputi 1). Kabupaten Tambrauw (Dataran Kebar) dan Kabupaten Sorong (Distrik Salawati), 2) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terdapat di Kabupaten Sorong; kawasan potensi bioetanol di Kabupaten Sorong Selatan (Distrik Kokoda); kawasan minyak dan gas bumi (migas) meliputi Wilayah Kerja Migas di Kabupaten Sorong (Distrik Klamono, Distrik Klaili, Distrik Salawati Selatan, Distrik Salawati, dan Selat Sele) dan Kabupaten Raja Ampat (Distrik Salawati Utara).

KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas 1). Kawasan Geopark dan perlindungan Ekosistem Laut dan Terumbu Karang yang meliputi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Asia dan Ayau, Konservasi Perairan Teluk Mayalibit, Konservasi Perairan Selat Dampier, Konservasi Perairan Kepulauan Fam, Konservasi Perairan Kepulauan Kofiau-Boo, Konservasi Perairan Misool Utara, Konservasi Perairan Kepulauan Misool, Suaka Alam Pesisir Kepulauan Waigeo Sebelah Barat, Suaka Alam Pesisir Kepulauan Raja Ampat, Cagar Alam Waigeo Timur, Cagar Alam Waigeo Barat, Cagar Alam Pulau Misool, Cagar Alam Selat Sagawin, Cagar Alam Pulau Salawati di Kawasan Perairan Kepulauan Raja Ampat; 2). Koridor Mahkota Permata Tanah Papua yang meliputi koridor Konservasi Taman Pesisir Jeen Womom dan Keanekaragaman hayati rumput Kebar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa arahan kebijakan RTRW Provinsi Papua Barat Daya meliputi pembangunan wilayah dengan prinsip pemerataan melalui pembagian Sistem Perkotaan Nasional (PKN, PKW, PKL) dengan fokus pada kawasan agropolitan regional dan kawasan industri sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan kawasan-kawasan yang memiliki nilai sosial-budaya yang tinggi serta memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

2.2 Kebijakan Sektor

Sub bab ini berisi poin penting kebijakan sektoral tingkat nasional dan daerah, yaitu: Visi Indonesia 2045, RPJMN 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020), Inpres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua (Inpres No. 9 Tahun 2020), Visium PUPR 2030, Renstra PUPR Tahun 2020-2024 (Permen PUPR No. 23 Tahun 2020), Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (PP No. 14 Tahun 2015), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (PP No. 50 Tahun 2011), dan UU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Nomor 29 Tahun 2022.

2.2.1 Visi Indonesia 2045

Visi Indonesia Tahun 2045 adalah:

“Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur”

Dalam mewujudkan Visi Indonesia Tahun 2045 dengan 4 (empat) pilar, yaitu: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, serta (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Keempat pilar tersebut dibangun di atas Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa bernegara dan konstitusi, dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun perincian dari masing-masing pilar pembangunan Indonesia Tahun 2045 yaitu sebagai berikut:

- Pilar ke-1: Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - Percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata
 - Peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan
 - Peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan
 - Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat
 - Reformasi ketenagakerjaan
- Pilar ke-2: Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
 - Peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri
 - Percepatan industri dan pariwisata Pembangunan ekonomi maritim
 - Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani
 - Pemantapan ketahanan energi dan air
 - Komitmen terhadap lingkungan hidup
- Pilar ke-3: Pemerataan Pembangunan
 - Percepatan pengentasan kemiskinan
 - Pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan
 - Pemerataan pembangunan wilayah

- Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi
- Pilar ke-4: Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan
 - Demokrasi substantive
 - Reformasi kelembagaan dan birokrasi
 - Penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi
 - Politik luar negeri bebas aktif
 - Penguatan ketahanan dan keamanan.

Berkaitan dengan Visi Indonesia Tahun 2045, salah satu yang perlu diperhatikan dalam pengembangan infrastruktur wilayah yaitu Pilar ke-3: Pemerataan Pembangunan, melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi. Pembangunan Infrastruktur ke depan diarahkan untuk: (1) Meningkatkan Konektivitas Fisik dan Virtual, (2) Mendorong Pemerataan Pembangunan antar Wilayah, (3) Memenuhi Prasarana Dasar, (4) Mendukung Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan, (5) Antisipasi terhadap Bencana Alam dan Perubahan Iklim, termasuk Kenaikan Muka Air Laut.

2.2.2 Kebijakan RPJMN di Pulau Papua

Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 baik secara nasional maupun pulau dan provinsi saat ini masih dalam proses perumusan sehubungan dengan akhir periode pemerintahan 2019-2024, sehingga penyusunan RPIW tahun 2025-2029 mengacu kepada konsep perencanaan teknokratik RPJMN 2025-2029.

Berdasarkan konsep RPJMN teknokratik Tahun 2025-2029, proyek prioritas strategis (*major project*) yang diarahkan di Pulau Papua yaitu sebagai berikut:

A. Wilayah Adat Papua (Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay)

Highlight Proyek:

1. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat (Kemenkes)
2. Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi (Kemenristekdikti)
3. Pengembangan tanaman tahunan dan penyegar di Papua dan Papua Barat (Komoditas Kakao dan Kopi) (Kementan)
4. Pembangunan Jalan Trans Papua (KemenPUPR)
5. Sarana prasarana air bersih (Kemendes PDTT)
6. Penyediaan Energi Listrik (Kemen ESDM)

B. Jembatan Udara 37 Rute di Papua

Highlight Proyek:

1. Penyediaan subsidi perintis angkutan penumpang, kargo, dan BBM
2. Peningkatan kapasitas 11 bandara pendukung jembatan udara (Manokwari, Wamena, Dekai, Oksibil, Elelim, Ilaga, Timika, Tanah Merah, Yahukimo)
3. Integrasi dengan Tol Laut melalui pengembangan pelabuhan Pomako dan Agat

4. Penyediaan Subsidi Perintis Tol Laut pada 2 Rute

C. Jalan Trans Papua Merauke - Sorong

Highlight Proyek:

1. Pembangunan Jalan Ruas Waghete - Timika; Oksibil - Seredala; Wamena - Habema - Mumugu; Wamena - Elelim -Jayapura; Enarotali - Ilaga - Mulia - Wamena; Fakfak (SP. Moyana) - Windesi; Sp.3 Moyana - Tiwara - Bofuer; Sp.3 Moyana - Wanoma; Wanggar - Kwatisore - Kampung Muri (Bts Provinsi Papua Barat)
2. Pembangunan/penggantian jembatan ruas Enarotali - Ilaga -Mulia - Wamena; Wamena - Elelim - Jayapura (Yetti); Wamena - Habema - Mumugu; Kenyam - Dekai; Dekai - Oksibil; Wagete - Timika; Fakfak (SP. Moyana) - Windesi; Sp.3 Moyana - Wanoma; Wanggar - Kwatisore - Kampung Muri (Bts Provinsi Papua Barat)

D. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

Highlight Proyek: Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3terpadu wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua/Sumapapua (KPBU – koordinasi KLHK).

Indikasi program RPJMN Tahun 2020-2024 sektoral yang diarahkan di Pulau Papua yaitu sebagai berikut:

- a) Program Prioritas: Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
 - Kegiatan Prioritas: Penyediaan air baku untuk kawasanprioritas
 - Proyek Prioritas: Penyediaan dan pengamanan air bakudan air tanah
 - Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecilterluar
 - Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar,dan Tertinggal)
 - Penyediaan air baku di kawasan perkotaan
- b) Program Prioritas: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja,dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi
 - Kegiatan Prioritas: Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok.
 - Proyek Prioritas: Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas, danAtraksi, serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata.
 - Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (DP Prioritas: Lombok-Mandalika, Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo, **Raja Ampat**, Manado-Likupang) + 2 DPPbaru
 - Pengembangan **Pelabuhan Sorong**
 - Pembangunan **Bandara Perairan Raja Ampat**
 - Pengembangan **Bandara Marinda (Waisai)**
 - Pembangunan **Pelabuhan Penyeberangan Salawati**

- Kegiatan Prioritas: Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan.
Proyek Prioritas: Fasilitas Kemudahan Usaha dan Investasi
 - Fasilitas penyelesaian masalah investasi wilayah IV.
- c) Program Prioritas: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- d) Program Prioritas: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
- e) Program Prioritas: Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
- f) Program Prioritas: Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - Kegiatan Prioritas: Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan
Proyek Prioritas: Penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah
 - Penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau kecil terluar
 - Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
 - Penyediaan air baku di kawasan perkotaan
 - Kegiatan Prioritas: Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
Proyek Prioritas: Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana
 - Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana tsunami
- g) Program Prioritas: Infrastruktur Ekonomi
 - Kegiatan Prioritas: Konektivitas Jalan
Proyek Prioritas: Pembangunan Jalan Strategis
 - Jalan Trans Papua Barat
 - Jembatan di Jalan Trans Papua Barat
 - Konektivitas Fakfak (Jalan SP. Moyana - Windesi)
 - Jalan SP.3 Moyana - Tiwara – Bofuer
 - Jembatan Inari

Proyek Prioritas: Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, dan KSPN)

 - **Jalan Akses KEK Sorong**
 - Jalan Akses KI Bintuni (Bintuni - Susumuk)
 - Jalan Sp.3 Moyana - Wanoma
 - Kegiatan Prioritas: Konektivitas Laut
Proyek Prioritas: Pengembangan pelabuhan utama (hub)
 - **Pengembangan Pelabuhan Sorong**
 - Kegiatan Prioritas: Konektivitas Udara
Proyek Prioritas: Jembatan udara
 - Penyediaan Subsidi perintis penumpang, Kargo dan BBM
Proyek Prioritas: Pengembangan Bandara Hub Primer
 - **Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok**
 - Pengembangan bandara yang mendukung kawasan prioritas (KSPN, KEK, dan KI):

- **Pengembangan Bandara Marinda (Waisai)**
 - Pengembangan bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana:
- **Rehabilitasi/Pengembangan Bandara Inanwatan**

Proyek Prioritas: Pembangunan bandara perairan (waterbased airport) untuk mendukung destinasi pariwisata

 - **Pembangunan Bandara Perairan Raja Ampat**
- Kegiatan Prioritas: Konektivitas Darat

Proyek Prioritas: Pembangunan pelabuhan penyeberangan baru

 - **Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kaimana**
 - **Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta**
 - **Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati**

Proyek Prioritas: Pembangunan kapal penyeberangan perintis baru

 - **Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kaimana-Pomako**
 - **Pembangunan kapal penyeberangan perintis Wahi-Foley-Arar**
- h) Program Prioritas: Energi dan Ketenagalistrikan
- i) Program Prioritas: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

2.2.3 Kebijakan Inpres No. 9 Tahun 2020 bagi Kementerian PUPR di Pulau Papua

Beberapa kebijakan terhadap sektor di Kementerian PUPR yang termuat di dalam Instruksi Presiden (INPRES) tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yaitu sebagai berikut:

A. Bina Marga

1. Pembangunan simpul-simpul transportasi udara, laut dan darat, misalnya Bandara Rendani (Kab. Manokwari); Pelabuhan Wasior (Kab. Teluk Wondama);
2. Meningkatkan konektivitas jalan untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayah;
3. Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan konektivitas jalan.

B. Cipta Karya

1. Meningkatkan penyediaan akses air minum;
2. Meningkatkan penyediaan akses Sanitasi;
3. Meningkatkan penyediaan permukiman;
4. Pengembangan model pengembangan sentra – sentra komoditas dan kawasan perdesaan di Koridor Trans Papua;
5. Pembangunan Istana Negara Kepresidenan di Kota Jayapura;
6. Pembangunan, pengelolaan dan penguatan inovasi dan kreativitas kaum muda Asli Papua (Papua *Youth Creative Hub*); dan
7. Membangun dan mengelola asrama mahasiswa nusantara.

C. Sumber Daya Air

1. Menyediakan dan meningkatkan pengelolaan air tanah dan air baku; dan
2. Peningkatan kapasitas daerah irigasi, pembangunan embung, bendung pengendali banjir, tanggul pemecah gelombang, dan revitalisasi danau (Misalnya Danau Anggi dan **Danau Ayamaru**).

D. Perumahan dan Permukiman

1. Meningkatkan penyediaan perumahan; dan
2. Menyediakan rumah yang layak untuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga veteran, guru, paramedis dan petugas lainnya.

E. Bina Konstruksi

1. Meningkatkan peran serta pengusaha OAP terkait pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
2. Meningkatkan peran serta SDM Unggul Papua di lingkungan BUMN terkait PUPR.

F. Semua Unor

1. Meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan *Major Project* RPJMN 2020 – 2024 untuk Papua (Wilayah Adat Laa Pago, Wilayah adat Domberay, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke); dan
2. Rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan pasca bencana.

2.2.4 Target Visium Kementerian PUPR 2030

Berdasarkan tinjauan terhadap Visium Kementerian PUPR 2030, target yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Target Visium Kementerian PUPR 2030

Infrastruktur	Tahun 2020-2024	Tahun 2025-2030
Bendungan	- Kapasitas tampung 68,11 m ³ /kapita/tahun	- Kapasitas tampung 120 m ³ /kapita/tahun
Jaringan Jalan	- Jalan Mantap 97% - Pembangunan Jalan Tol 1.500Km - Pembangunan Jalan Baru 2.500 Km - Pembangunan JembatanBaru/Fly Over 60.000 m	- Jalan Mantap 99% - Pembangunan Jalan Tol 2.000 Km - Pembangunan Jalan Baru 3.000 Km - Pembangunan Jembatan Baru/Fly Over 70.000 m
Air Minum	- 88% Pelayanan Air Minum - Menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 2,6% (menjadi 17.000 ha) - 85% Pelayanan Sanitasi	- 100% Pelayanan Air Minum - Menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 4,4%(menjadi 0 ha) - 100% Pelayanan Sanitasi
Perumahan	- Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit - Pembangunan sebesar 3,9 juta unit	- Zero Backlog rumah bagi MBR 3 juta unit - Pembangunan sebesar 4,88juta unit

Sumber: Visium Kementerian PUPR 2030

2.2.5 Konsep Rencana Strategis Kementerian PUPR 2025-2029

Berdasarkan konsep Renstra Kementerian PUPR 2025-2029 yang saat ini masih dalam proses penyusunan, target output utama yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

SUMBER DAYA AIR	BINA MARGA	CIPTA KARYA	PERUMAHAN
Kapasitas Tampung (m³/cap) - Target 2030 : 70 - Target 2045 : 200	Waktu Tempuh Lintas Utama Pulau (Jam/100 km) - Target 2030 : 1,7 - Target 2045 : 1,25	Air Minum Aman Perkotaan (%) - Target 2030 : 51,36 - Target 2045 : 100	Rumah Layak Huni (%) - Target 2030 : 73 - Target 2045 : 100
Peningkatan Volume Perlindungan Banjir (%) - Target 2030 : 70 - Target 2045 : 88	Aksesibilitas Jalan Nasional (%) - Target 2030 : 90 - Target 2045 : 100	Sanitasi Aman (%) - Target 2030 : 30,51 - Target 2045 : 70,89	Akses Rumah Terjangkau (%) - Target 2030 : ?? - Target 2045 : ??
Volume Air Layanan Irigasi (m³/ha) - Target 2030 : 125.000 - Target 2045 : 350.000	Rating Kondisi Jalan Nasional (nilai) - Target 2030 : 2,2 - Target 2045 : 1,6	Penanganan Persampahan (%) - Target 2030 : 40 - Target 2045 : 90	
Pemanfaatan Air Baku (m³/detik) - Target 2030 : 15 - Target 2045 : 50	Rating Keselamatan Jalan Nasional (%) 75% jalan memiliki rating pemeringkatan bintang 3 berdasarkan target RUNK jalan	Daur Ulang Persampahan (%) - Target 2030 : 20 - Target 2045 : 35	
Optimalisasi Tampungan Air Eksisting (%) - Target 2030 : 100 - Target 2045 : 100	VCR (ratio) Target 2045 : ≤ 0,85	Kawasan Permukiman yang ditingkatkan Kualitasnya - Target 2030 : 100 - Target 2045 : 100	
Ketangguhan terhadap Banjir Periode Kala Ulang 50 Tahun di Metropolitan (%) - Target 2030 : 100 - Target 2045 : 100		Rumah Berkelanjutan (%) - Target 2030 : ?? - Target 2045 : ??	

Gambar 2. 1 Target Output Kementerian PUPR

Sumber: Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian PUPR 2025-2029

2.2.6 Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional

Sasaran pembangunan industri nasional dicapai melalui program pengembangan industri prioritas yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta. Program pengembangan industri prioritas disusun untuk periode 2015-2035.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI), 2 (dua) di antaranya berada di Pulau Papua.

WPI ditentukan berdasarkan keterkaitan ke belakang (*backward*) dan keterkaitan ke depan (*forward*) sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri. PP No. 14 Tahun 2015 (Lampiran, halaman 89) menetapkan 2 (dua) WPI, yaitu:

1. WPI Papua di Provinsi Papua; dan
2. WPI Papua Barat di Provinsi Papua Barat.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah. Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. WPPI disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:

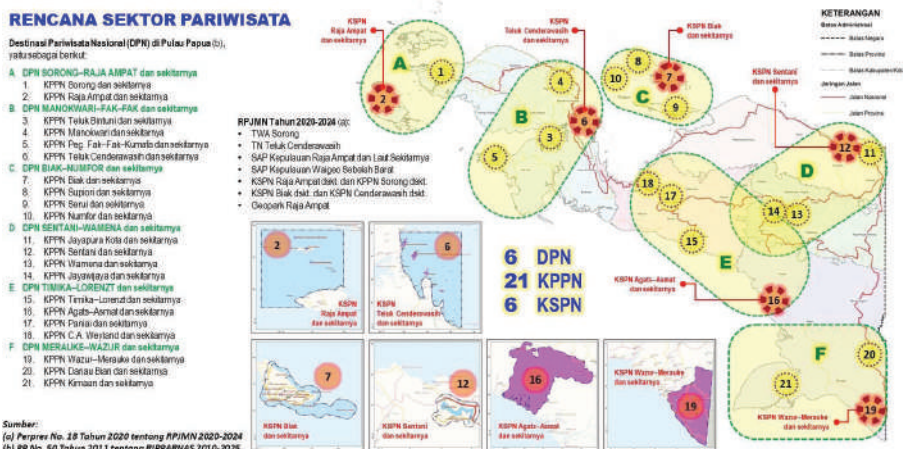
- a. Potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas);
- b. Ketersediaan infrastruktur transportasi;
- c. Kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri ke luar pulau Jawa;
- d. Penguatan dan pendalaman rantai nilai;
- e. Kualitas dan kuantitas sdm;
- f. Memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air);
- g. Memiliki potensi sumber daya air industri;
- h. Memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau; dan
- i. Kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi. Disamping kriteria umum di atas, daerah yang sudah memiliki pusat-pusat pertumbuhan industri berupa kawasan industri dan yang mempunyai rencana pengembangan kawasan industri yang telah didukung oleh industri pendorong utama (*anchor industry*) dapat langsung ditetapkan sebagai WPPI.

2.2.7 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional

Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2011 di Pulau Papua ditetapkan 21 (dua puluh satu) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan 6 (enam) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di dalam 6 (enam) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), yaitu sebagai berikut:

- a. DPN SORONG–RAJA AMPAT dan sekitarnya
 - 1) KPPN Sorong dan sekitarnya
 - 2) KPPN Raja Ampat dan sekitarnya (sekali sebagai KSPN)

Untuk lebih jelasnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Sebaran DPN, KPPN, dan KSPN di Pulau Papua

Sumber: Hasil Analisis, 2022

2.2.8 UU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Nomor 29 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya UU mengatur mengenai pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Papua Barat Daya merupakan Provinsi ke-38 yang berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua Barat, yang terdiri dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong. Ibu kota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong.

2.3 Kebijakan Pengembangan Kawasan Prioritas

Kebijakan pembangunan Wilayah Pulau Papua dalam tahun 2025-2029 seharusnya meneruskan kebijakan tahun 2020-2024 disamping penambahan kebijakan prioritas lainnya yang mungkin diarahkan pada kurun waktu 2025-2029. Kebijakan percepatan pembangunan Pulau Papua terutama untuk mengejar ketertinggalan dan pelaksanaan Otonomi Khusus dan Daerah Otonomi Baru di Pulau Papua berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua berbasis ekologis dan wilayah adat. Percepatan pembangunan Wilayah Papua juga diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian yang sangat bergantung pada sumber daya alam ke arah perekonomian wilayah yang lebih maju dengan mendorong pengembangan industri berbasis komoditas lokal pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan; pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari; pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati; pengembangan hilirisasi industri pertambangan, minyak, gas bumi dan tembaga; serta peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk

pembangunan rendah karbon.

Strategi pembangunan Wilayah Papua dalam tahun 2020-2024 mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi khusus Papua dan Papua Barat, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan dasar, antara lain: (a) peningkatan kualitas SDM; (b) percepatan pembangunan kawasan perbukitan dan pegunungan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah antara kawasan pesisir dan pegunungan serta memperhatikan kontekstual Papua; (c) percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur termasuk jaringan layanan/akses internet; (d) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya; (e) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (f) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa, dan (g) pelaksanaan pembangunan afirmatif.
- 2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Papua yaitu sagu, pala, lada, cengkeh, kakao, kopi, emas, tembaga, batubara, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap; (b) pengembangan sentra perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); (c) pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN); (d) revitalisasi kawasan transmigrasi; (e) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (f) pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan, pertambangan, perikanan, serta pengolahan pupuk dan petrokimia pada Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus; (g) pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan pengusaha lokal; (h) pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah; (i) pengembangan kawasan perkotaan dan pembangunan kota baru; dan (j) pengembangan Kawasan Potensi Ekonomi (KPE) di 7 wilayah adat (Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, Domberay) dengan memperhatikan zona ekologi dan penyiapan SDM dalam rangka revolusi industri 4.0 melalui hilirisasi potensi ekonomi Papua; dan (k) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
- 3) Penataan pelaksanaan otonomi khusus dilakukan melalui antara lain: (a) pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat kampung; (b) penguatan lembaga adat dan kampung adat, perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku termasuk hak atas tanah adat/ulayat; (c) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah; (d) pengembangan dan penguatan perandistik sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan

ekonomi kabupaten; (e) pengembangan 7 wilayah adat; (f) optimalisasi SDM Unggul Orang Asli Papua dalam Badan Usaha Milik Negara dan kementerian/lembaga; (g) pengembangan inovasi dan kreativitas kaum muda Asli Papua (*Papua Youth Creative Hub*); (h) pemberdayaan pengusaha lokal; (i) pembangunan istana kepresidenan di Kota Jayapura; dan (j) penataan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan percepatan pembangunan di Tanah Papua.

Tabel 2. 2 Lingkup Wilayah Adat Papua Barat Daya dan StrategiPengembangannya

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	Strategi Pengembangan
Domberay	Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Tambrau, Maybrat, Sorong Selatan.	Strategi pengembangan ekonomi menjadi bagian dari <i>Major Project</i> Wilayah Adat Domberay

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

- 4) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain (a) pembangunan jalan, pelabuhan laut, dan udara; dan (b) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi, khususnya pelabuhan hub komoditas mentah maupun barang hasil olahan.
- 5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat; (b) peningkatan ketahanan kawasan pantai utara Pulau Papua; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat dengan fokus utama pada peningkatan ketahanan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS); (d) peningkatan investigasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, serta (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di daerah kepulauan, dan konservasi hutan.
- 6) Penguatan koordinasi kementerian/lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi pembangunan di Tanah Papua.

Proyek Strategis Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) terdapat 8 (delapan) PSN yang ada di Pulau Papua.

PSN dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan skala prioritas yang mempertimbangkan kebutuhan, kemanfaatan, dan daya dukung atas kelancaran PSN, serta konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi, sehingga pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menjadi tepat sasaran dalam mewujudkan tercapainya pertumbuhan perekonomian nasional yang meningkat dan stabil, serta terealisasinya secara konkret pemerataan hasil pembangunan nasional ke seluruh lapisan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Adapun PSN yang ada di Provinsi Papua Barat Daya yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Daftar PSN di Pulau Papua

No.	Daftar Proyek Strategis Nasional	Lokasi
1	Pengembangan Pelabuhan Sorong	Papua Barat Daya
2	Bandara Nabire Baru	Papua Tengah
3	Bandara Siboru Fakfak	Papua Barat
4	KI Teluk Bintuni	Papua Barat
5	KI Pupuk Fakfak	Papua Barat
6	LNG Tangguh 3	Papua Barat
7	Lapangan Ubadari Bintuni	Papua Barat
8	Kepala Dalam dan turunannya	Papua Barat

Sumber: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023

2.4 Agenda Global

2.4.1 Megatren Dunia Tahun 2045

Megatren dunia tahun 2045 diantaranya sebagai berikut:

a. Demografi Global

Pada tahun 2045, penduduk dunia diperkirakan 9,45 miliar, bertambah 2,1 miliar dari tahun 2015. Lebih dari separuh pertumbuhan penduduk dunia disumbang oleh kawasan Afrika. Penduduk Asia masih terbesar (55 %). Tren demografi global mendorong urbanisasi, arus migrasi, dan penduduk usia lanjut.

b. Urbanisasi Dunia

Penduduk dunia di perkotaan diperkirakan meningkat menjadi 65 persen (2045) dengan 95 persen pertambahan terjadi di emerging economies. Pembangunan perkotaan berperan meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.

c. Peranan Emerging Economies

Output negara berkembang tahun 2050 diperkirakan mencapai 71 persen dari total output dunia dengan Asia sebagai pendorong utama—mencapai 54 persen. Investasi SDM dan infrastruktur serta reformasi struktural dan iklim usaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdaya saing, dan berkesinambungan.

d. Perdagangan Internasional

Sampai tahun 2045, perdagangan global diperkirakan tumbuh 3,4 persen per tahun. Negara berkembang menjadi poros perdagangan dan investasi dunia dengan pertumbuhan 6 persen per tahun. Perdagangan intra Asia meningkat dan investasi asing langsung ke dan antar negara berkembang berlanjut.

e. Keuangan Internasional

Dominasi mata uang dunia bergeser dari dolar AS menjadi multicurrencies. Aset keuangan emerging economies tahun 2050 diperkirakan melebihi negara maju. Cina berkembang sebagai salah satu sumber keuangan bagi pembangunan mendatang.

f. Kelas Menengah

Pada tahun 2050, jumlah middle dan upper income class diperkirakan lebih dari 84 persen atau sekitar 8,1 miliar orang. Asiadan Amerika Latin akan memiliki jumlah middle dan upper income class terbesar.

g. Persaingan Sumber Daya Alam

Meningkatnya peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam (SDA). Ketersediaan SDA diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan yang meningkat meskipun teknologi akan meningkatkan efisiensi SDA.

h. Teknologi

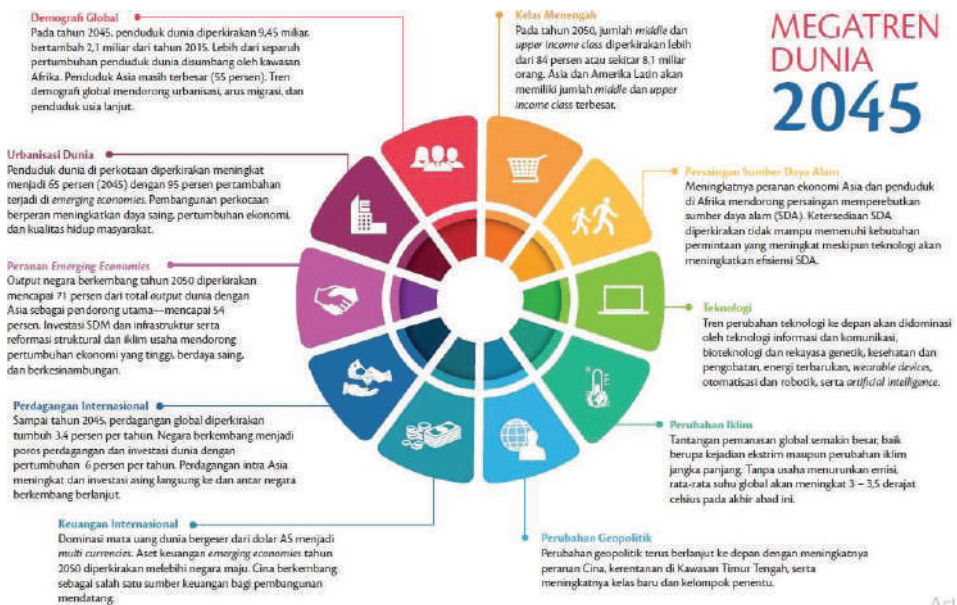
Tren perubahan teknologi ke depan akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetik, kesehatan dan pengobatan, energi terbarukan, wearable devices, otomatisasi dan robotik, serta artificial intelligence.

i. Perubahan Iklim

Tantangan pemanasan global semakin besar, baik berupa kejadian ekstrim maupun perubahan iklim jangka panjang. Tanpa usaha menurunkan emisi, rata-rata suhu global akan meningkat 3 – 3,5 derajat celsius pada akhir abad ini.

j. Perubahan Geopolitik

Perubahan geopolitik terus berlanjut ke depan dengan meningkatnya peranan Cina, kerentanan di Kawasan TimurTengah, serta meningkatnya kelas baru dan kelompok penentu.



Gambar 2. 3 Megatren Dunia Tahun 2045

Sumber: Hasil Analisis, 2022

2.4.2 Agenda SDGs 2030

Agenda tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau *SDGs*) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur;

(10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Gambar 2. 4 Tujuan TPB/SDGs 2030

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Empat Pilar SDGs yaitu sebagai berikut:

1. **Pilar Pembangunan Sosial**
Pembangunan Sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pilar Pembangunan Sosial meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5.
2. **Pilar Pembangunan Ekonomi**
Pembangunan Ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Pilar Pembangunan Ekonomi meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17.
3. **Pilar Pembangunan Lingkungan**
Pembangunan Lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pilar Pembangunan Lingkungan meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15.
4. **Pilar Pembangunan Hukum dan Tata kelola**
Pembangunan Hukum dan Tata Kelola SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata kelola meliputi Tujuan 16. Adapun Agenda TPB/SDGs 2030 yang terkait dengan infrastruktur diantaranya sebagai berikut:
 - Peningkatan kapasitas air baku baik untuk irigasi maupun air bersih;
 - Pengelolaan sumber daya air;
 - Mempercepat pengembangan seluruh kawasan strategis;
 - Akses terhadap air minum layak, sanitasi layak, dan hunian layak;

- Perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh;
- Penyelenggaraan infrastruktur untuk mengurangi disparitas antar wilayah; dan
- Adaptasi RANMAPI.

2.5 Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur

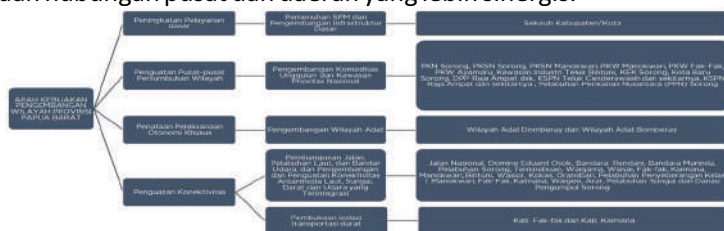
2.5.1 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan dalam konsep teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 yang diarahkan terhadap wilayah Papua adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah”

melalui strategi pembangunan:

- a. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus melalui peningkatan kapasitas daerah untuk pemenuhan standarpelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien; Pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat diarahkan pada pelaksanaan UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat secara sungguh-sungguh, konsisten, nyata dan bertanggung jawab antara lainmelalui:
 - Penguatan dan pemberdayaan Orang Asli Papua berlandaskan budaya dan adat yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan;
 - Pengembangan wilayah adat Tabi, Saereri, La Pago, Me Pago, Anim Ha, Bomberai dan **Domberai** dalam mendukung perekonomian wilayah;
 - Penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima;
 - Optimalisasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua bagi pelayanan publik dan pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah;
 - Peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja; serta
 - Penguatan distrik sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.
- b. Pengembangan kerja sama antar daerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru;
- c. Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis.



Prioritas Pembangunan Wilayah Papua

Prioritas pembangunan Wilayah Papua tahun 2020-2024 mengutamakan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, serta pendekatan berbasis ekologis dan tujuh wilayah adat: Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay sejalandengan pelaksanaan UU No. 35/2008 tentang Otonomi Khusus

Papua dan Papua Barat yang mengamanatkan penguatan dan pemberdayaan Orang Asli Papua berlandaskan budaya dan adat yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan; pengembangan wilayah adat dalam mendukung perekonomian wilayah; dan pelaksanaan Instruksi Presiden No. 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang mengamanatkan tentang: (1) Peningkatan kualitas dan akses pendidikan; (2) Peningkatan kualitas dan akses kesehatan; (3) Jaminan sosial dan kesejahteraan sosial; (4) Permukiman layak, air bersih dan sanitasi; (5) Pengembangan ekonomi lokal; (6) Konektivitas: Trans Papua, perhubungan laut, sungai dan udara, telekomunikasi dan internet; dan (7) Penguatan tata kelola dan kelembagaan.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Papua akan mencakup kegiatan prioritas:

- 1) Pengembangan sektor unggulan;
- 2) Pengembangan kawasan strategis;
- 3) Pengembangan kawasan perkotaan;
- 4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi;
- 5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Wilayah Papua

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Papua, kebijakan yang dilakukan yaitu dengan melanjutkan proyek prioritas strategis (*Major Project*) 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) Pembangunan **Kota Baru Sorong**;
- 2) Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN Jayapura dan (b) PKSN Merauke;
- 3) Pengembangan Wilayah Adat Papua: (a) **Domberay** dan (b) **LaaPago**;
- 4) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: **Sorong**;
- 5) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: **P. Biak**;
- 6) Pembangunan Jalan Trans Papua: **Merauke-Sorong**; dan
- 7) Pembangunan Jembatan Udara di Papua.

Tabel 2. 4 Rumusan Arahan Kebijakan Provinsi Papua Barat Daya

KEBIJAKAN	DOKUMEN	SINTESIS KEBIJAKAN	CORE/ SEMANGAT	KONTEKS PERENCANAAN
KEBIJAKAN PENATAAN RUANG	RTRWN (PP No. 13 tahun 2017)	1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki 2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional	Pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan tambang serta peningkatan akses pelayanan perkotaan	Pariwisata: ● DPP Raja Ampat Industri ● KEK Sorong ● KI Kais Sorong Selatan Kawasan Perkotaan ● PKW Sorong ● Kota Baru Sorong ● Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya ● Perkotaan Fef-Tambrau (Usulan Baru)
	RTR Pulau Papua (Perpres No. 57 Tahun 2014)	1. Pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal 2. Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, serta pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan		
	RTRW Provinsi Papua Barat (Perda Prov. Papua Barat No. 3 Tahun 2022)	1. Peningkatan fungsi lindung di wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan 2. Pengelolaan wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kearifan lokal dan perlindungan kepastian hukum mengenai keberadaandan wilayah kelola masyarakat hukum adat 3. Pengembangan pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi nasional sesuai dengan potensi darat dan		

KEBIJAKAN	DOKUMEN	SINTESIS KEBIJAKAN	CORE/ SEMANGAT	KONTEKS PERENCANAAN
		lautan 4. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang terkoneksi antara wilayah darat dan laut secara merata 5. Peningkatan penyediaan lahan sawah dalam mendukung ketahanan pangan 6. Pengelolaan kawasan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana 7. Pemantapan peran PKN Sorong sebagai pusat pertumbuhan utama, PKW sebagai pusat koleksi dan distribusi untuk wilayahnya dan wilayah luar 8. Meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan (perkotaan dan desa) dengan hinterlandnya		
KEBIJAKAN SEKTOR	RPJMN 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020)	Major Project: Pembangunan Kota Baru Sorong; Pengembangan Wilayah Adat Domberay dan Laa Pago; Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Sorong; Pembangunan Jalan Trans Papua: Merauke- Sorong; Pembangunan Jembatan Udara di Papua Pengembangan Kawasan Strategis Wilayah Papua Barat Daya: 1. KEK Sorong, DPP Raja Ampat 2. Pembangunan jalan Trans Papua, jalan akses KEK Sorong, jalan akses DPP Raja Ampat, Pelabuhan Sorong,	Mewujudkan pembangunan pada sektor industri, pariwisata, pertanian, dan perkotaan berbasis pengembangan wilayah adat dalam rangka mendorong peningkatan	

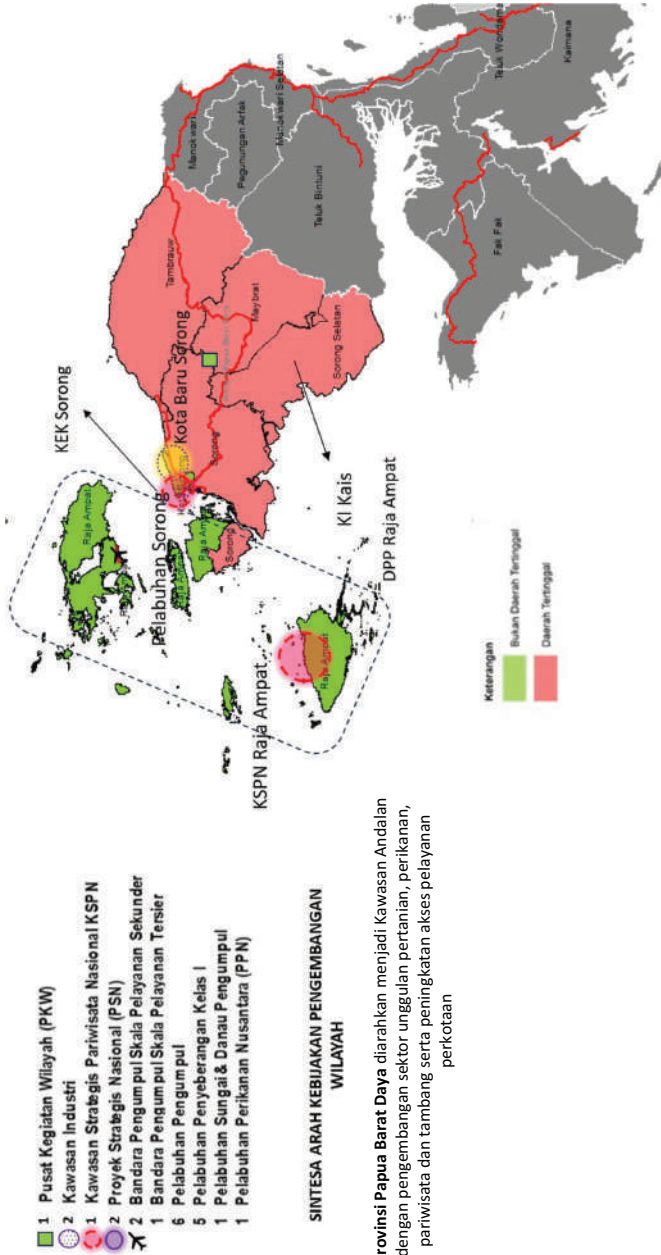
KEBIJAKAN	DOKUMEN	SINTESIS KEBIJAKAN	CORE/ SEMANGAT	KONTEKS PERENCANAAN
		- Pengembangan outlet pelabuhan hub Pelabuhan Sorong; - Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmodal laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi terutama Pelabuhan Sorong sebagai hub komoditas mentah maupun barang hasil olahan; - Percepatan pembangunan kawasan perbukitan dan pegunungan untuk mengurangi kesenjangan antara kawasan pesisir dan pegunungan - Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perdesaan	kesejahteraan rakyat.	
	RPJMD Prov. Papua Barat Tahun 2017-2022 (Perda Prov. Papua Barat No.4 Tahun 2017)	- Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (<i>good and clean governance</i>) serta otonomi khusus yang efektif; - Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan; - Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar; - Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata; - Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat		

KEBIJAKAN	DOKUMEN	SINTESIS KEBIJAKAN	CORE/ SEMANGAT	KONTEKS PERENCANAAN
	Inpres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Prov. Papua dan Prov. Papua Barat (Inpres No. 9 Tahun 2020)	meningkatkan Konektivitas, peningkatan infrastruktur permukiman, pembangunan Istana Negara di Kota Jayapura, Papua <i>Youth Creative Hub</i> , Pengelolaan Air tanah dan air baku, penyediaan perumahan, pembinaan penyedia jasa konstruksi untuk OAP, dan Rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan pasca bencana		
	RIPIN (PP No. 14 Tahun 2015)	Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah yang mandiri, berdaya saing, maju serta industri hijau sebagai penggerak perekonomian dan perluasan kesempatan kerja		
	RIPARNAS (PP No. 50 Tahun 2011)	Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian dengan peningkatan kuantitas dan kualitas destinasi serta tata kelola dan kelembagaan yang bersinergi		
	Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan	Mewujudkan perkotaan yang memiliki fasilitas pelayanan perkotaan yang lengkap dan terstandarisasi		
	PSN (Permenko Perekonomian No.7 Tahun 2023)	1. Pengembangan Pelabuhan Sorong		

KEBIJAKAN	DOKUMEN	SINTESIS KEBIJAKAN	CORE/ SEMANGAT	KONTEKS PERENCANAAN
	Renstra PUPR Tahun 2020-2024 (Permen PUPR No. 23 Tahun 2020)	Strategi SDA: penyediaan air baku, pengembangandaerah irigasi serta pengurangan resiko bencana Strategi BM: Peningkatan konektivitas melalui pembangunan jalan dan jembatan Strategi CK: Memenuhi pelayanan infrastruktur dasar air minum aman dan perpipaan, sanitasi layak dan aman, penanganan persampahan dan pengurangan sampah Strategi Perumahan: Menyediakan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya dan PSU Perumahan		
	Visium PUPR 2030 (Permen PUPR No.26 Tahun 2017)	SDA: Peningkatan Kapasitas Tampung, BM: peningkatan konektivitas CK: pemenuhan air minum, sanitasi, dan penanganan kawasan kumuh, Perumahan: Penanganan Backlog MBR		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Sintesis kebijakan pengembangan Provinsi Papua Barat Daya ke depan, disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2. 5 Peta Arah Kebijakan Provinsi Papua Barat Daya
Sumber: Hasil Analisis, 2022

2.5.2 Arah Kebijakan Pemanfaatan Infrastruktur PUPR Prioritas

Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur yang mendukung target-target nasional dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan *Major Project* RPJMN 2020-2024, sesuai dengan peraturan pemerintah. Infrastruktur PUPR meliputi sektor sumber daya air, konektivitas, permukiman, dan perumahan, yang dibangun di kawasan strategis dan prioritas seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), kawasan metropolitan, kawasan pertanian (*Food Estate*), kawasan perdesaan, serta daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan pusat distribusi yang dapat mendongkrak lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur PUPR adalah memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Jika infrastruktur yang terbangun belum termanfaatkan secara maksimal. Hal ini tidak hanya menyebabkan pemborosan dana publik, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, antara lain:

- a. **Menurunnya kualitas infrastruktur.** Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal cenderung mengalami kerusakan lebih cepat dan lebih parah. Hal ini dapat mengurangi fungsi, keamanan, dan kenyamanan infrastruktur bagi masyarakat. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan biaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur di masa depan.
- b. **Menyebabkan ketimpangan pembangunan.** Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan kesenjangan antara daerah-daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai dan daerah-daerah yang masih kekurangan infrastruktur. Hal ini dapat mempengaruhi aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan layanan publik bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan terluar.
- c. **Mengurangi daya saing dan produktivitas ekonomi.** Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menghambat konektivitas antara kawasan produksi dan pusat distribusi. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan biaya logistik, penurunan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait, serta pengurangan nilai tambah perekonomian rakyat.
- d. **Mempengaruhi kesehatan dan lingkungan hidup.** Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan hidup, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, penurunan kualitas sumber daya air, serta peningkatan risiko bencana alam. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemanfaatan infrastruktur PUPR yang telah terbangun, seperti meningkatkan konektivitas antarinfrastruktur, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur, serta menjadwalkan pemeliharaan secara berkala untuk menjamin kelangsungan manfaat

jangka panjang bagi masyarakat.

Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PUPR yang telah terbangun diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, berikut adalah lima poin arah kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PUPR prioritas dalam 10 tahun ke depan:

- a. **Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi infrastruktur berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat saling mendukung dan memberikan nilai tambah pada pengembangan kawasan.
- b. **Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur PUPR.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat beroperasi dengan baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan terluar.
- c. **Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur PUPR.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan partisipasi, keterlibatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur.
- d. **Meningkatkan kerjasama dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur PUPR.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif oleh berbagai pihak. Hal ini juga meliputi peningkatan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, peraturan, dan mekanisme terkait infrastruktur.
- e. **Meningkatkan inovasi dan adaptasi infrastruktur PUPR terhadap perubahan lingkungan dan tantangan masa depan.** Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan tantangan masa depan, seperti perubahan iklim, bencana alam, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi. Hal ini juga meliputi peningkatan kapabilitas dan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi situasi darurat dan krisis.

Tabel 2. 5 Infrastruktur Prioritas PUPR

No	Sektor	Infrastruktur Prioritas PUPR	Kab/Kota	Dasar Hukum
1	Sumber Daya Air	Pembangunan air baku Teminabuan Kab. Sorong Selatan	Kab. Sorong Selatan	-
2	Jalan dan Jembatan	Jalan Lingkar Raja Ampat	Kab. Raja Ampat	-



BAB 3

PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH



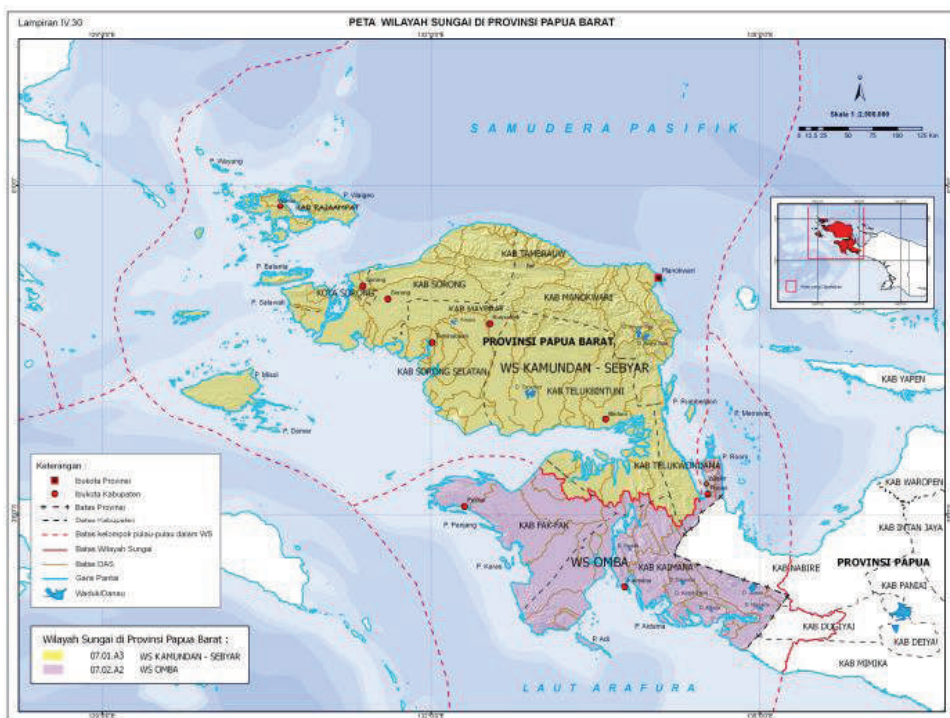
BAB III

PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH

Bab ini berisi uraian gambaran kondisi geografis, topografis, geologi, klimatologi, hidrologi, kebencanaan, ekonomi, sosial budaya, interaksi antar kawasan, serta potensi unggulan yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan Provinsi Papua Barat Daya.

3.1 Profil Fisik dan Kebencanaan Provinsi Papua Barat Daya

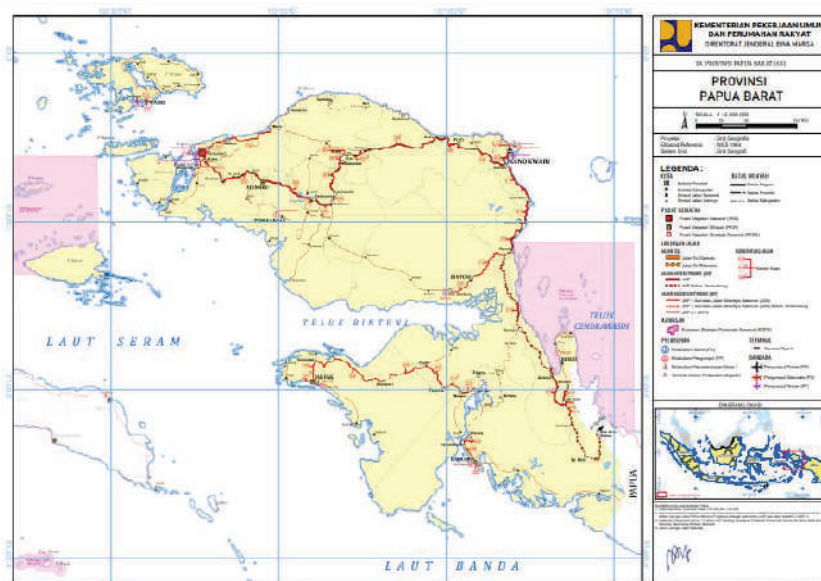
Profil fisik dan kebencanaan menguraikan gambaran klimatologi, tutupan lahan, kawasan lindung, kondisi ekoregion serta daya dukung jasa ekosistem Kawasan Papua Barat Daya.



Peta 3.1 Peta Wilayah Sungai di Provinsi Papua Barat Daya

Sumber: Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Pembagian Wilayah Sungai

Wilayah Sungai yang ada di Provinsi Papua Barat Daya terdapat Wilayah Sungai kewenangan nasional yaitu Wilayah Sungai Kamundan – Sebyar. Sehingga penanganan wilayah Sungai di Provinsi Papua Barat Daya ditangani oleh Pemerintah Pusat.



Peta 3. 2 Peta Jaringan Jalan Nasional di Provinsi Papua Barat Daya
Sumber: Kepmen PUPR No. 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1)

Jaringan jalan nasional di Provinsi Papua Barat Daya sudah tersambung dari Sorong menuju ke Batas Provinsi Papua Barat dan sudah berfungsi untuk mendukung kebutuhan transportasi Masyarakat Provinsi Papua Barat Daya.

Wilayah Papua Barat Daya terbagi atas beberapa kabupaten/kota, yang mana kabupaten/kota yang terluas terdapat di Kabupaten Tambora dengan luas sekitar 1.073.014 Ha dan yang terkecil terdapat di Kota Sorong dengan luas sekitar 20.759 Ha, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 3. 1 Luas Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1	Kota Sorong	20.759
2	Maybrat	557.315
3	Raja Ampat	739.818
4	Sorong	814.654
5	Sorong Selatan	670.719
6	Tambora	1.073.014
Jumlah		3.876.279

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Papua Barat Daya terdiri dari 6 Kab/Kota dengan rincian data administrasi seperti berikut:

Tabel 3. 2 Data Administrasi Provinsi Papua Barat Daya

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km2)	Presentase Luas Wilayah	Kawasan Perkotaan Utama	Kawasan Perkotaan Sekitarnya
1	Sorong Selatan	6.570	6,60%	Teminabuan	Sorong, Kumurkek
2	Sorong	7.564	7,60%	Sorong	Sorong, Teminabuan, Kumurkek, Fef
3	Raja Ampat	7.442	7,48%	Waisai	Sorong
4	Tambrau	11.954	12,02%	Fef	Kumurkek, Sorong
5	Maybrat	5.385	5,41%	Kumurkek	Sorong, Teminabuan
6	Kota Sorong	205	0,20%	Sorong	Sorong

3.1.1 Kondisi Klimatologi Papua Barat Daya

Data klimatologi adalah data iklim berdasarkan hasil pengamatan pada stasiun pengamat di wilayah yang bersangkutan dan/atau daerah disekitarnya, meliputi: Curah Hujan, Hari Hujan, Intensitas Hujan, Temperatur rata-rata, Kelembapan Relatif, Kecepatan dan Arah Angin, Lama Penyinaran (durasi) Matahari.

Iklim sebagai unsur lingkungan yang dapat memberikan informasi mengenai potensi suatu kawasan, diantaranya bermanfaat untuk mendukung pengelolaan suatu kawasan kaitannya dengan kebutuhan air, baik untuk pertumbuhan suatu tanaman maupun untuk kebutuhan rumah tangga. Papua Barat Daya pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab dengan temperatur berkisar antara 240 Celsius dan maksimal mencapai 360 Celsius. Intensitas penyinaran matahari selalu tinggi dan sumber daya air yang cukup banyak sehingga menyebabkan tingginya penguapan yang menimbulkan awan aktif/tebal. Curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Desember, sedangkan bulan kering/kemarau jatuh pada bulan Juni sampai dengan September.

3.1.2 Kondisi Tutupan Lahan Papua Barat Daya

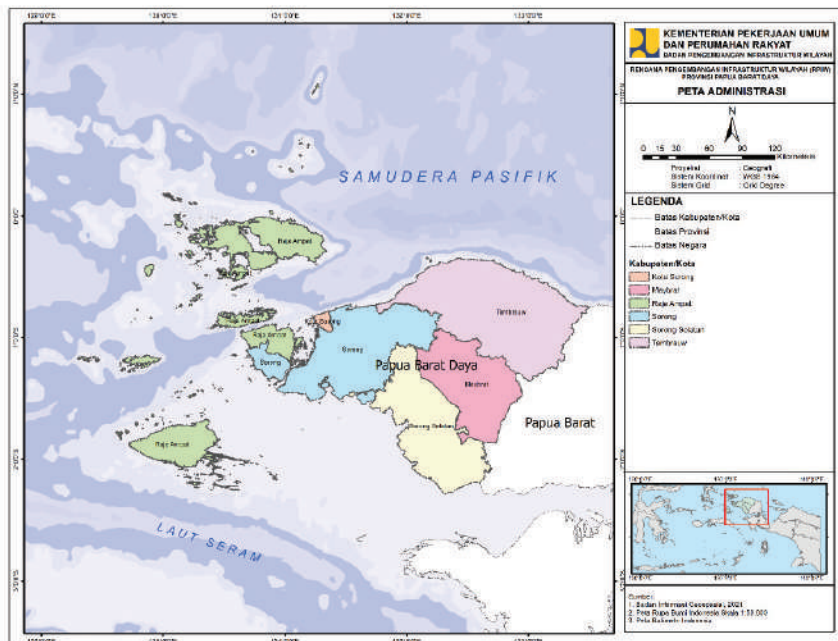
Dalam tutupan lahan saat ini, Papua Barat Daya terbagi kedalam beberapa bagian dengan proporsi paling besar yaitu penggunaan lahan untuk hutan lahan kering sebesar 79,36 % sedangkan untuk proporsi paling kecil yaitu penggunaan lahan untuk hutan tanaman

sebesar 0,001%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 3. 3 Luas Tutupan Lahan di Papua Barat Daya

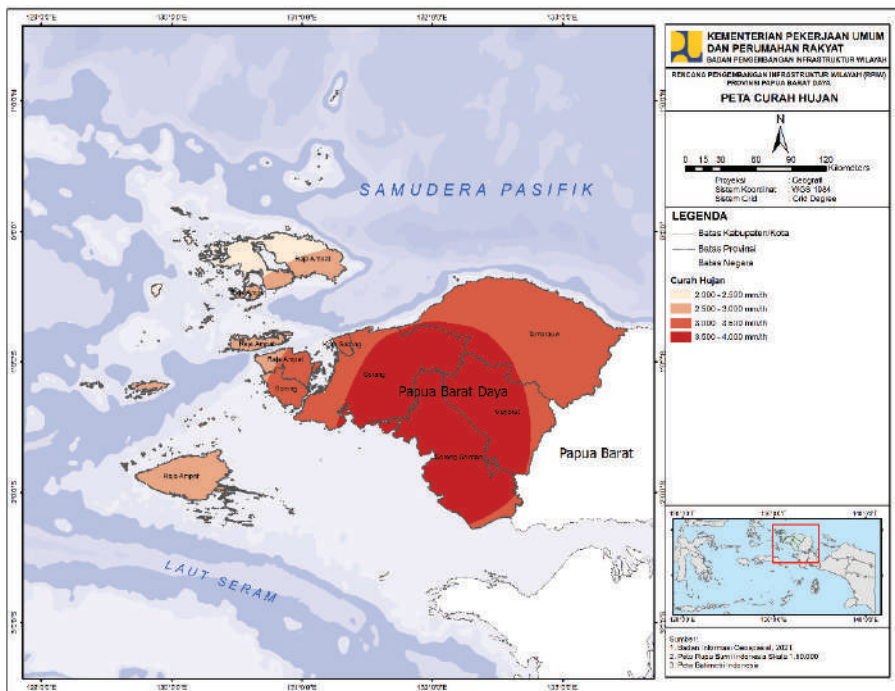
No	Penggunaan Lahan	Tahun		% Luas (Ha) 2021
		2015	2021	
1	Hutan Lahan Kering	2.779.529,61	3.088.023,19	79,36
2	Hutan Mangrove	315.806,07	168.307,25	4,33
3	Hutan Rawa	312.627,23	287.553,64	7,39
4	Hutan Tanaman	-	338,49	0,01
5	Lahan Terbuka	1.352,36	8.954,23	0,23
6	Permukiman dan Tempat Kegiatan	21.239,21	24.278,45	0,62
7	Pertanian Lahan Basah	-	928,2	0,02
8	Pertanian Lahan Kering	76.600,22	99.636,46	2,56
9	Rawa	3.078,89	598,93	0,02
10	Savana/ Padang Rumput	57.618,46	35.721,93	0,92
11	Semak Belukar	287.055,66	138.341,18	3,56
12	Tubuh Air	36.350,27	38.576,04	0,99
	Jumlah	3.891.257,99	3.891.257,99	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2022

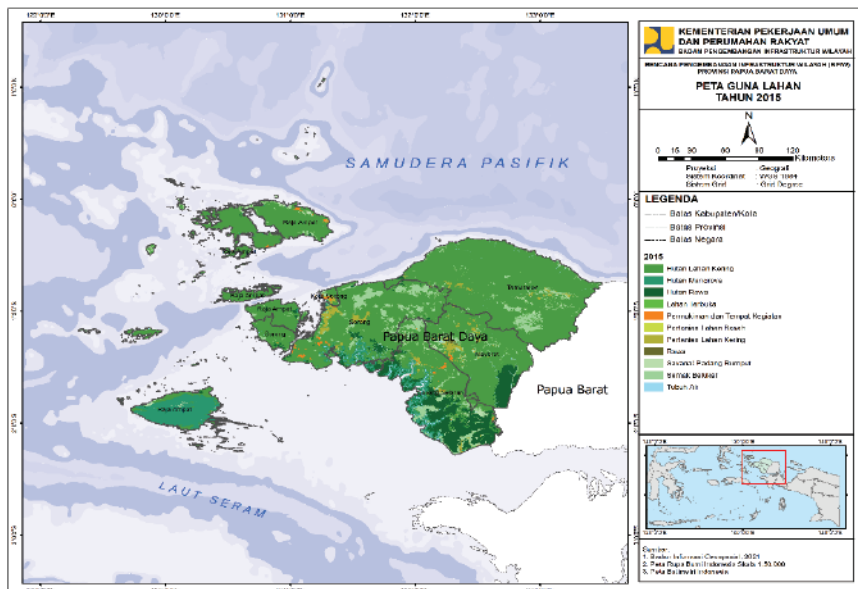


Peta 3. 3 Peta Administrasi Papua Barat Daya

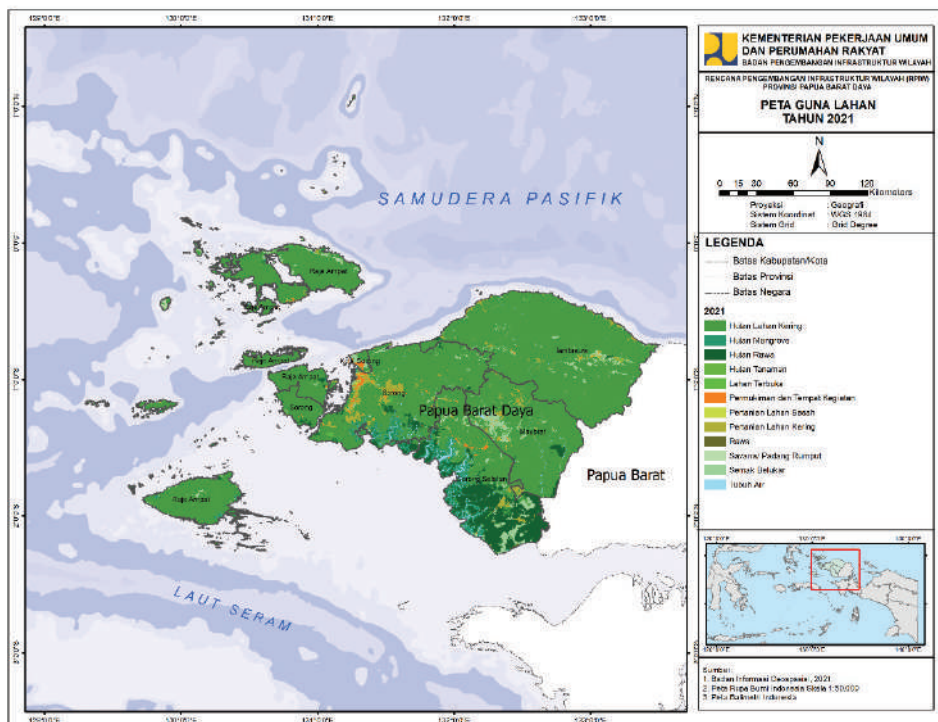
Sumber: Hasil Analisis, 2022



Peta 3. 4 Peta Curah Hujan Papua Barat Daya
Sumber: Hasil Analisis, 2022



Peta 3. 5 Peta Tutupan Lahan di Papua Barat Daya Tahun 2015
Sumber: Hasil Analisis, 2022



Peta 3. 6 Peta Tutupan Lahan di Papua Barat Daya Tahun 2021

Sumber: Hasil Analisis, 2022

3.1.3 Kondisi Kawasan Lindung Papua Barat Daya

Dalam kawasan lindung yang tersebar di Papua Barat Daya, bagian dengan proporsi paling besar kawasan lindung yaitu berada di Kabupaten Tambrau sebesar 27,68% sedangkan untuk proporsi paling kecil kawasan lindungnya yaitu berada di Kota Sorong sebesar 0,54%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 3. 4 Luas Kawasan Lindung di Papua Barat Daya

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	%
1	Kota Sorong	20.759,37	0,54
2	Maybrat	557.314,58	14,38
3	Raja Ampat	739.817,76	19,09
4	Sorong	814.653,89	21,02
5	Sorong Selatan	670.719,23	17,30
6	Tambrau	1.073.014,27	27,68
Jumlah		3.876.279,10	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2022

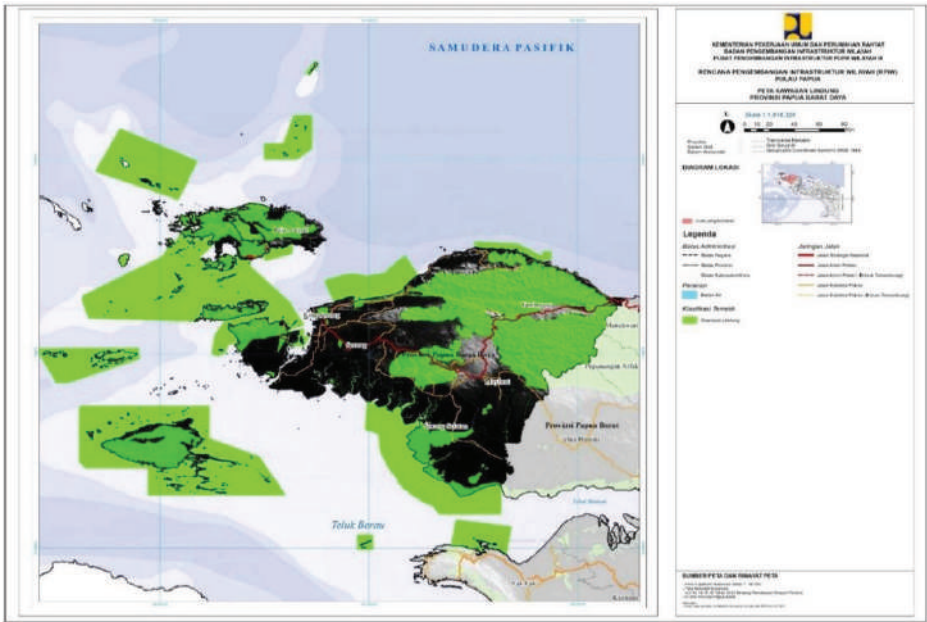
3.1.4 Kondisi Ekoregion Papua Barat Daya

Dalam kawasan ekoregion di Papua Barat Daya terbagi kedalam beberapa kategori ekoregion dengan proporsi paling besar yaitu ekoregion untuk Pegunungan Struktural Jalur Utara sebesar 36,24% sedangkan untuk proporsi paling kecil yaitu ekoregion untuk Dataran Pantai Utara Papua sebesar 0,09%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

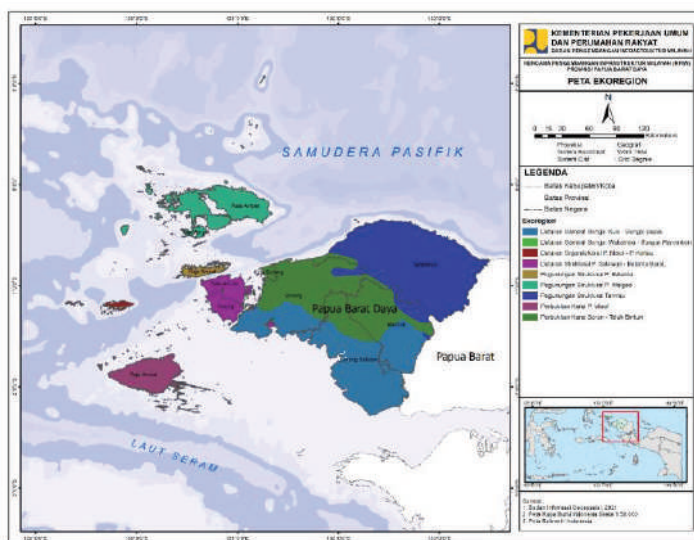
Tabel 3. 5 Luas Kawasan Ekoregion di Papua Barat Daya

No	Kategori	Luas (Ha)	%
1	Dataran Organik/Koral Kompleks Sorong	39.193,37	1,01
2	Dataran Pantai Barat Papua	30.314,52	0,78
3	Dataran Struktural Jalur Utara	441.443,21	11,43
4	Perbukitan Struktural Jalur Utara	384.913,44	9,97
5	Dataran Fluvial Seget - Bintuni	441.801,21	11,44
6	Dataran Gambut Seget - Bintuni	423.390,75	10,96
7	Pegunungan Struktural Jalur Utara	1.399.814,28	36,24
8	Perbukitan Karst Papua	697.776,27	18,07
9	Dataran Pantai Utara Papua	3.607,19	0,09
Jumlah		3.862.254,25	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Peta 3. 7 Peta Kawasan Lindung di Papua Barat Daya
Sumber: Hasil Analisis, 2022



*Peta 3. 8 Peta Ekoregion di Papua Barat Daya
Sumber: Hasil Analisis, 2022*

3.1.5 Kondisi Daya Dukung Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Papua Barat Daya

Dalam kawasan daya dukung jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup tersebar di Papua Barat Daya, bagian dengan kategori sangat tinggi Kawasan daya dukung jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup yaitu berada di Kabupaten Sorong seluas 296.636,23 Ha, sedangkan untuk kategori sangat rendah Kawasan daya dukung jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup yaitu berada di Kota Sorong seluas 355,31 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 3. 6 Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Papua Barat Daya

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)
1	Kota Sorong	20.541,02	4	Sorong	813.394,35
	Rendah	16.846,44		Rendah	359.479,09
	Sangat Rendah	355,31		Sangat Rendah	83.420,93
	Sedang	713,00		Sangat Tinggi	296.636,23
	Tinggi	2.626,28		Sedang	50.579,78
2	Maybrat	557.314,58		Tinggi	23.278,31
	Rendah	263.207,52	5	Sorong Selatan	664.008,38
	Sangat Rendah	85.176,99		Rendah	226.008,81
	Sangat Tinggi	201.880,57		Sangat Rendah	224.710,44
	Sedang	4.616,30		Sangat Tinggi	202.676,54

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)
	Tinggi	2.433,20
3	Raja Ampat	729.443,62
	Rendah	550.446,09
	Sangat Rendah	114.765,42
	Sangat Tinggi	47.582,84
	Sedang	14.455,00
	Tinggi	2.194,28

Sumber: Hasil Analisis, 2022

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)
	Sedang	6.049,09
	Tinggi	4.563,50
6	Tambrauw	1.072.722,32
	Rendah	165.842,53
	Sangat Rendah	864.014,32
	Sangat Tinggi	18.499,30
	Sedang	9.836,15
	Tinggi	14.530,03

3.1.6 Kondisi Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Papua Barat Daya

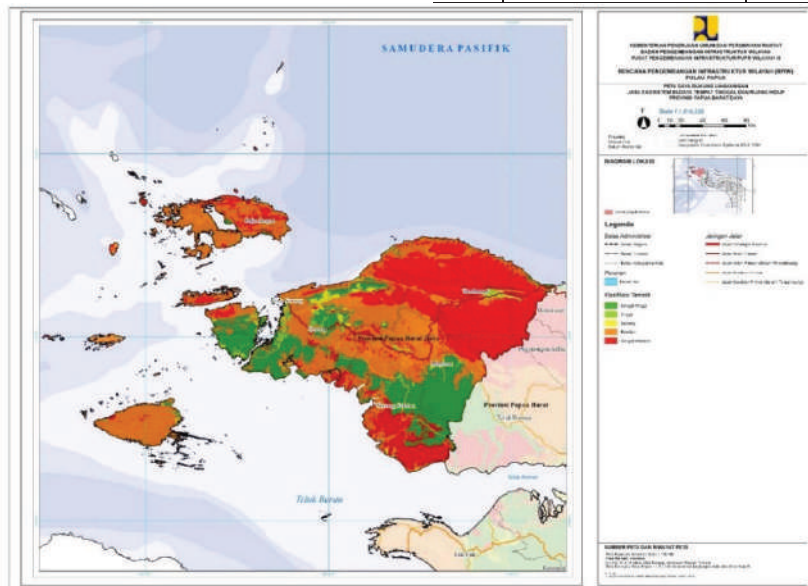
Dalam kawasan daya dukung jasa ekosistem penyediaan air bersih tersebar di Papua Barat Daya, bagian dengan kategori sangat tinggi Kawasan daya dukung jasa ekosistem penyediaan air bersihnya yaitu berada di Kabupaten Sorong seluas 95.781,88 Ha, sedangkan untuk kategori sangat rendah Kawasan daya dukung jasa ekosistem penyediaan air bersihnya yaitu berada di Kota Sorong seluas 401,46 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 3. 7 Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Papua Barat Daya

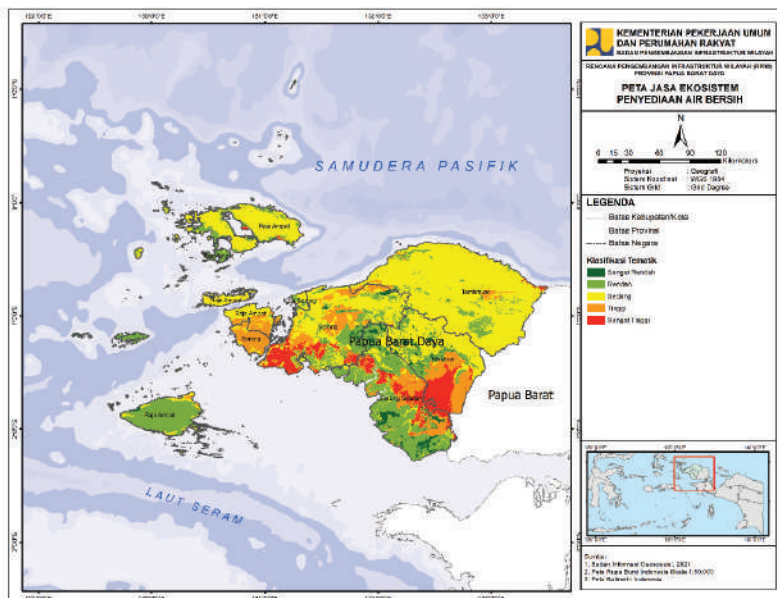
No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)
1	Kota Sorong	20.541,02
	Rendah	7.336,09
	Sangat Rendah	401,46
	Sedang	12.756,93
	Tinggi	46,54
2	Maybrat	557.314,58
	Rendah	85.232,76
	Sangat Rendah	26.521,64
	Sangat Tinggi	93.844,43
	Sedang	242.390,97
	Tinggi	109.324,79
3	Raja Ampat	729.443,62
	Rendah	308.868,15
	Sangat Rendah	17.982,28
	Sangat Tinggi	2.111,55
	Sedang	354.642,71

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)
4	Sorong	813.394,35
	Rendah	176.174,61
	Sangat Rendah	17.236,50
	Sangat Tinggi	95.781,88
	Sedang	322.896,44
	Tinggi	201.304,92
5	Sorong Selatan	664.008,38
	Rendah	329.024,83
	Sangat Rendah	59.834,70
	Sangat Tinggi	92.926,18
	Sedang	70.193,65
	Tinggi	112.029,01
6	Tambrauw	1.072.722,32
	Rendah	84.161,76
	Sangat Rendah	3.173,65
	Sangat Tinggi	4.229,52

	Tinggi	45.838,92		Sedang	953.198,26
Sumber: Hasil Analisis, 2022				Tinggi	27.959,14



Peta 3. 9 Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Papua Barat Daya
Sumber: Hasil Analisis, 2022



Peta 3.10 Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Papua Barat Daya
Sumber: Hasil Analisis, 2022

3.1.7 Kondisi Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Papua Barat Daya

Dalam kawasan daya dukung jasa ekosistem penyediaan Pangan tersebar di Papua Barat Daya, bagian dengan kategori sangat tinggi kawasan daya dukung jasa ekosistem penyediaan pangan yaitu berada di Kabupaten Sorong seluas 102.220,78 Ha sedangkan untuk Kategori rendah kawasan daya dukung jasa ekosistem penyediaan Pangannya yaitu berada di Kabupaten Raja Ampat seluas 53,30 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 3. 8 Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Papua Barat Daya

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)
1	Kota Sorong	20.541,02	4	Sorong	813.394,35
	Rendah	4.060,39		Rendah	52.992,93
	Sedang	14.466,57		Sangat Tinggi	102.220,78
	Tinggi	2.014,06		Sedang	391.507,30
2	Maybrat	557.314,58		Tinggi	266.673,33
	Rendah	34.187,07	5	Sorong Selatan	664.008,38
	Sangat Tinggi	93.846,30		Rendah	65.383,94
	Sedang	316.372,94		Sangat Tinggi	99.154,01
	Tinggi	112.908,27		Sedang	299.823,41
3	Raja Ampat	729.443,62		Tinggi	199.647,02
	Rendah	43.880,62	6	Tambrauw	1.072.722,32
	Sangat Rendah	53,30		Rendah	61.036,78
	Sangat Tinggi	2.580,81		Sangat Tinggi	4.229,88
	Sedang	568.333,76		Sedang	976.153,26
	Tinggi	114.595,13		Tinggi	31.302,40

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 3.9 Tabel profil tutupan lahan dan indeks jasa Ekosistem Papua Barat Daya

No	Provinsi/ Kabupaten / Kota	Tutupan lahan yang dominan			Ekoregion yang Dominan		
		Jenis Tutupan Lahan	Luas (ha)	%	Jenis Ekoregion	Luas (ha)	%
1.	Kota Sorong	Hutan Lahan Kering	N/A	N/A	Perbukitan Struktural Jalur Jayawijaya	N/A	N/A
2.	Sorong	Hutan Lahan Kering	N/A	N/A	Dataran Struktural Jalur Jayawijaya	N/A	N/A
3.	Sorong Selatan	Hutan Rawa	N/A	N/A	Dataran Organik/ Koral Kompleks Sorong	N/A	N/A
4.	Raja Ampat	Hutan Lahan Kering	N/A	N/A	Pegunungan Struktural Jalur Jayawijaya	N/A	N/A
5.	Tambrau	Hutan Lahan Kering	N/A	N/A	Pegunungan Struktural Jalur Jayawijaya	N/A	N/A
6.	Maybrat	Hutan Lahan Kering	N/A	N/A	Perbukitan Karst Papua	N/A	N/A

Sumber: Hasil Analisis, 2022

3.1.8 Kondisi Daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Perlindungan Banjir Papua Barat Daya

Dalam kawasan daya dukung jasa ekosistem pengaturan perlindungan banjir tersebar di Papua Barat Daya, bagian dengan kategori sangat tinggi Kawasan daya dukung jasa ekosistem pengaturan perlindungan banjir yaitu berada di Kabupaten Maybrat seluas 369.239,43 Ha sedangkan untuk Kategori sangat rendah Kawasan daya dukung jasa ekosistem pengaturan perlindungan banjir yaitu berada di Kabupaten Maybrat seluas 819,98 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 3.10 Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Perlindungan Banjir di Papua Barat Daya

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)
1	Kota Sorong	20.541,02	4	Sorong	813.394,35
	Rendah	4.632,81		Rendah	86.569,12
	Sangat Rendah	5.022,30		Sangat Rendah	25.139,60

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)
	Sangat Tinggi	954,29		Sangat Tinggi	249.804,53
	Sedang	9.849,66		Sedang	200.792,81
	Tinggi	81,95		Tinggi	251.088,29
2	Maybrat	557.314,58	5	Sorong Selatan	664.008,38
	Rendah	22.330,13		Rendah	53.831,90
	Sangat Rendah	819,98		Sangat Rendah	7.976,29
	Sangat Tinggi	369.239,43		Sangat Tinggi	324.729,38
	Sedang	107.301,80		Sedang	26.514,49
	Tinggi	57.623,24		Tinggi	250.956,33
3	Raja Ampat	729.443,62	6	Tambrau	1.072.722,32
	Rendah	20.548,84		Rendah	60.612,37
	Sangat Rendah	22.548,16		Sangat Rendah	7.251,58
	Sangat Tinggi	175.743,52		Sangat Tinggi	62.482,90
	Sedang	361.381,94		Sedang	911.327,30
	Tinggi	149.221,16		Tinggi	31.048,17

Sumber: Hasil Analisis, 2022

3.1.9 Kondisi Daya Dukung Jasa Ekosistem Tata Air dan Banjir Papua Barat Daya

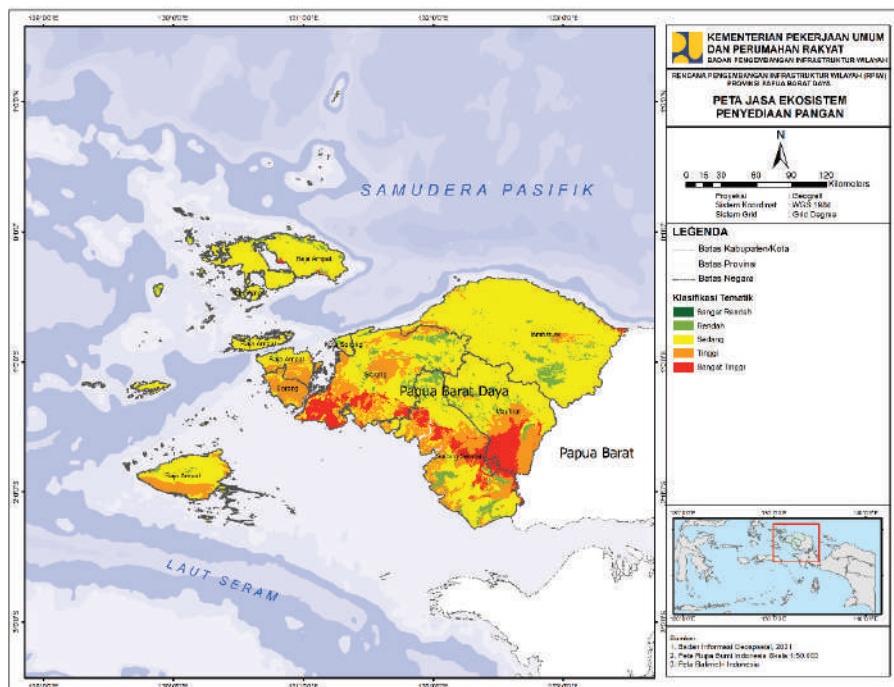
Dalam kawasan daya dukung jasa ekosistem tata air dan banjir tersebar di Papua Barat Daya, bagian dengan kategori sangat tinggi kawasan daya dukung jasa ekosistem tata air dan banjir yaitu berada di Kabupaten Sorong Selatan seluas 181.041,01 Ha sedangkan untuk Kategori sangat rendah kawasan daya dukung jasa ekosistem tata air dan banjir yaitu berada di Kota Sorong seluas 2.405,98 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 3. 11 Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem Tata Air dan Banjir di Papua Barat Daya

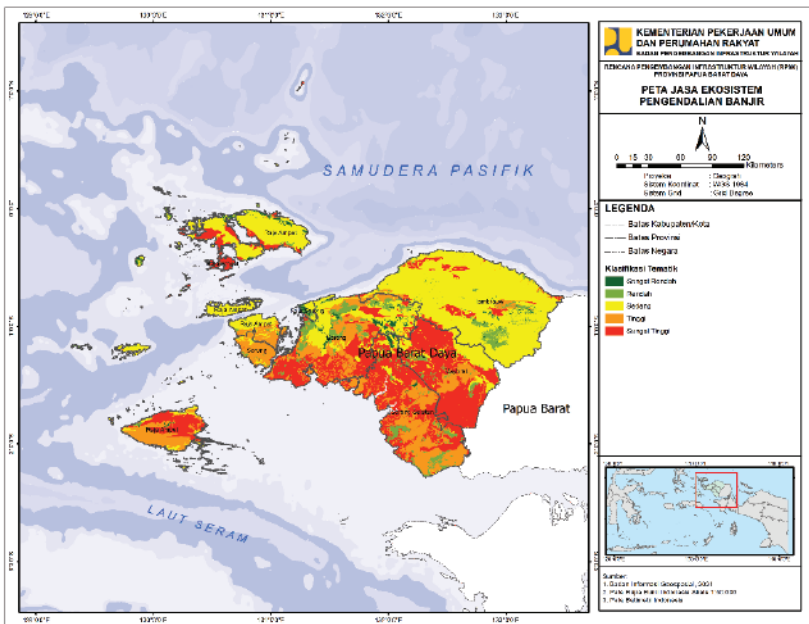
No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)
1	Kota Sorong	20.541,02	4	Sorong	813.394,35
	Rendah	7.066,42		Rendah	126.640,52
	Sangat Rendah	2.405,98		Sangat Rendah	5.461,62
	Sangat Tinggi	14,79		Sangat Tinggi	160.422,14
	Sedang	541,61		Sedang	21.867,88
	Tinggi	10.512,23		Tinggi	499.002,20
2	Maybrat	557.314,58	5	Sorong Selatan	664.008,38

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)
	Rendah	31.916,87		Rendah	64.829,04
	Sangat Rendah	9.688,26		Sangat Rendah	8.230,36
	Sangat Tinggi	146.531,07		Sangat Tinggi	181.041,01
	Sedang	18.628,37		Sedang	172.843,89
	Tinggi	350.550,01		Tinggi	237.064,09
3	Raja Ampat	729.443,62	6	Tambrau	1.072.722,32
	Rendah	49.963,02		Rendah	64.020,05
	Sangat Rendah	28.880,17		Sangat Rendah	7.790,50
	Sangat Tinggi	6.547,03		Sangat Tinggi	4.646,93
	Sedang	2.661,60		Sedang	9.808,90
	Tinggi	641.391,81		Tinggi	986.455,95

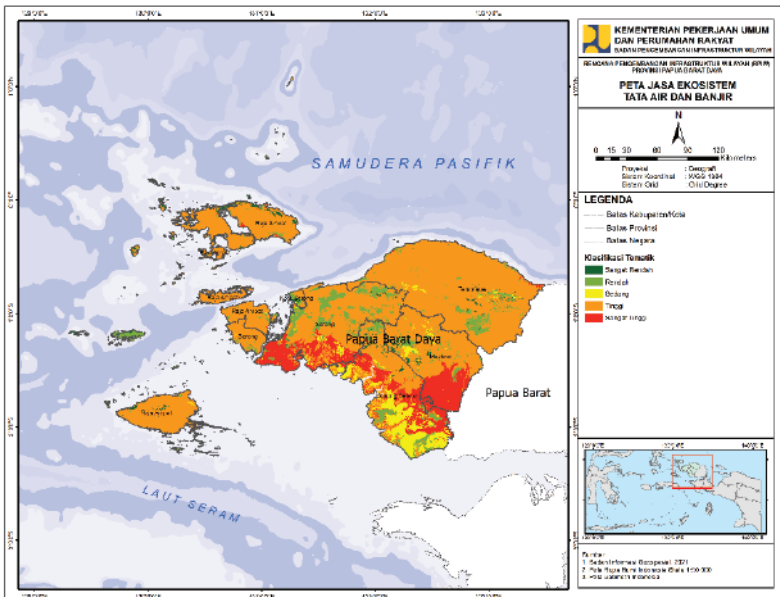
Sumber: Hasil Analisis, 2022



Peta 3.11 Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Papua Barat Daya
Sumber: Hasil Analisis, 2022



*Peta 3. 12 Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan
Perindungan Banjir di Papua Barat Daya
Sumber: Hasil Analisis, 2022*



Peta 3. 13 Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Tata Air dan Banjir di Papua Barat Daya
Sumber: Hasil Analisis, 2022

3.1.10 Kondisi Kebencanaan Banjir, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Tsunami Papua Barat Daya

Wilayah Papua Barat Daya khususnya bagian kepala burung memiliki kondisi geologi yang kompleks akibat pertemuan antara tiga lempeng yaitu Eurasia, Pasifik, dan Australia. Wilayah Papua Barat Daya terdiri dari sesa-sesar normal antara lain Sesar Sorong, Koor, Taminabun, Wandamen, Ransiki, serta Tarera-Aiduna sehingga wilayah Papua Barat Daya rawan terhadap bencana gempabumi. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia Papua Barat Daya tahun 2020 terdapat 59 bencana terjadi dari tahun 2002-2019 diantaranya adalah banjir, gempa bumi, tanah longsor, puting beliung, dan konflik sosial. Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2021 Pemerintah Papua Barat Daya memiliki kelas risiko tinggi dengan nilai 146.46. (tinggi).

Tabel 3. 12 Tabel Profil Fisik dan Kebencanaan Papua Barat Daya

No	Kab/ Kota	Topografi	Formasi Geologi		Kebencanaan			Iklim
		Kemiringan lahan	Jenis tanah	Jenis Batuan	Jenis Bencana	Tingkat rawan bencana	Indeks risiko	
1	Sorong	N/A	Dystric Fluvisols, Chromic luvisols, Humic ferasols	N/A	-	Tinggi	183.20	2500-3000 mm/thn
2	Sorong Selatan	N/A	Dystric histosols, Dystric fluvisols, Chromic luvisols	N/A	-	Tinggi	178.80	3000-3500 mm/thn
3	Kota Sorong	N/A	Dystric Fluvisols, Chromic luvisols, Humic ferasols	N/A	-	Tinggi	176.25	2500-3000 mm/thn
4	Raja Ampat	N/A	Ferric acrosols, Dystric cambisols	N/A	Gempa Bumi, Longsor,	Tinggi	153.91	2000-2500 mm/thn

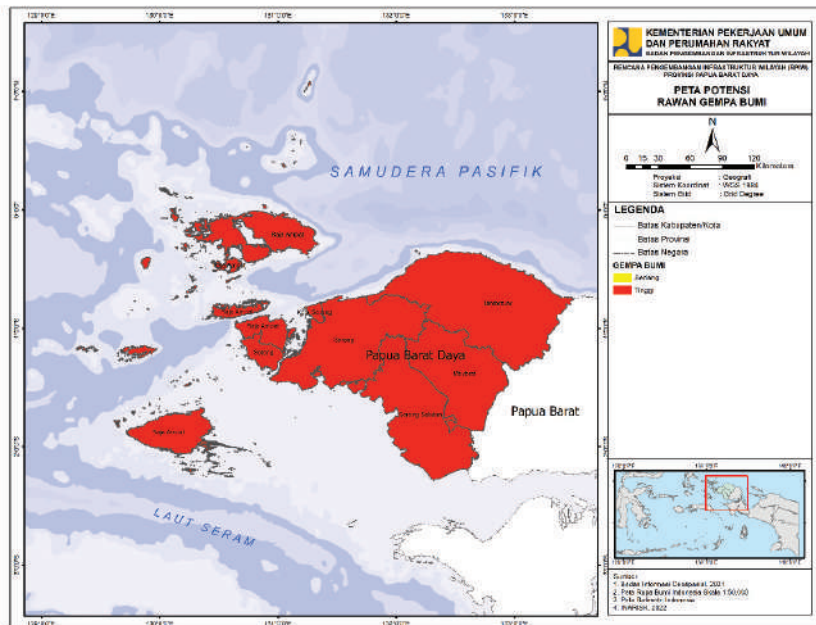
No	Kab/ Kota	Topografi	Formasi Geologi		Kebencanaan			Iklim
		Kemiringan lahan	Jenis tanah	Jenis Batuan	Jenis Bencana	Tingkat rawan bencana	Indeks risiko	
					Kekeringan			
5	Tambrauw	N/A	Humic cambisols, Chromic luvisols, Orthic acrisols	N/A	Longsor	Sedang	118.40	3000-3500 mm/thn
6	Maybrat	N/A	Dystic fluvisols, Chromic luvisols, Dystic regosols	N/A	Banjir, Longsor	Sedang	88.00	3000-3500 mm/thn

Sumber: Buku IRBI Tahun 2023

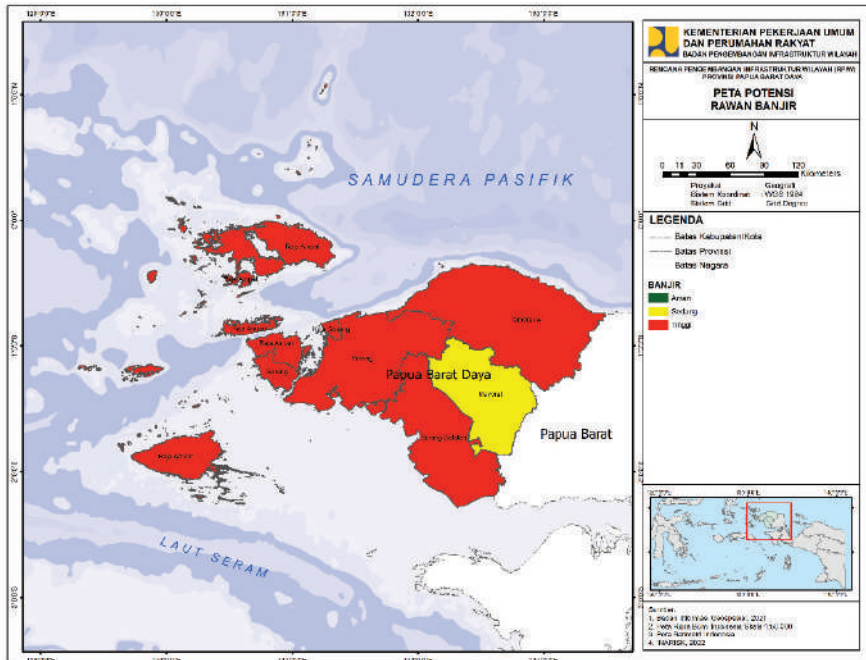
Tabel 3. 13 Nilai Indeks Risiko Papua Barat Daya

No	Kabupaten / Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kelas Risiko 2021
1	Sorong	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	Tinggi
2	Sorong Selatan	178.80	178.80	178.80	178.80	178.80	178.80	178.80	Tinggi
3	Kota Sorong	183.20	181.78	181.78	176.25	176.25	176.25	176.25	Tinggi
4	Raja Ampat	200.8	136.86	136.86	135.75	135.75	135.75	153.91	Tinggi
5	Tambrauw	118.40	118.40	118.40	118.40	118.40	118.40	118.40	Sedang
6	Maybrat	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	Sedang

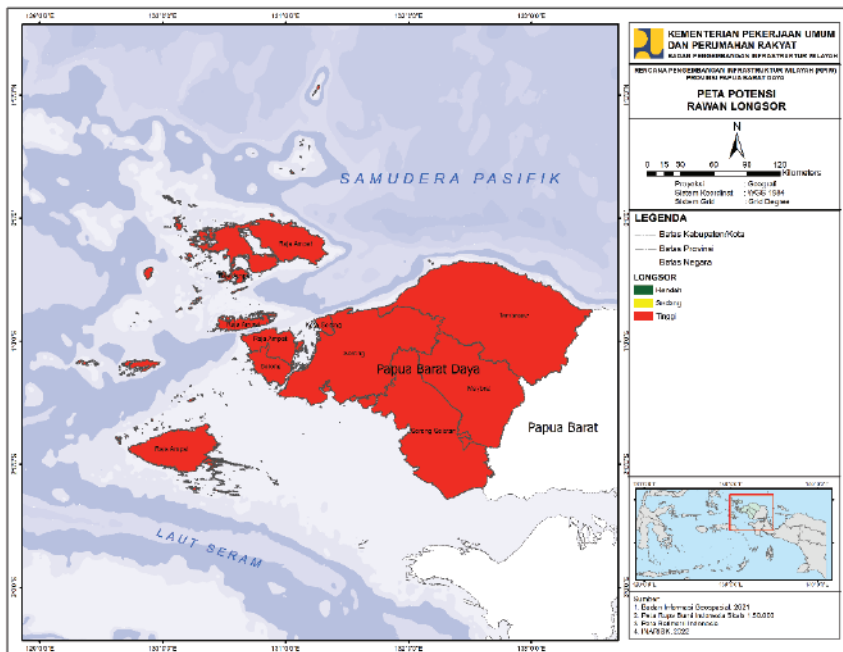
Sumber: Buku IRBI Tahun 2021



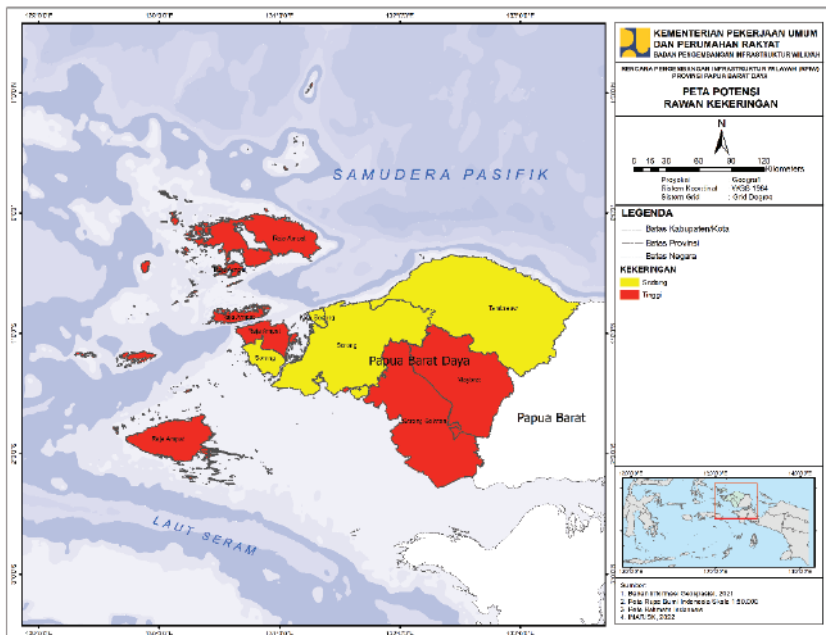
Peta 3. 14 Peta Potensi Rawan Bencana Gempa Bumi di Papua Barat Daya
Sumber: Hasil Analisis, 2022



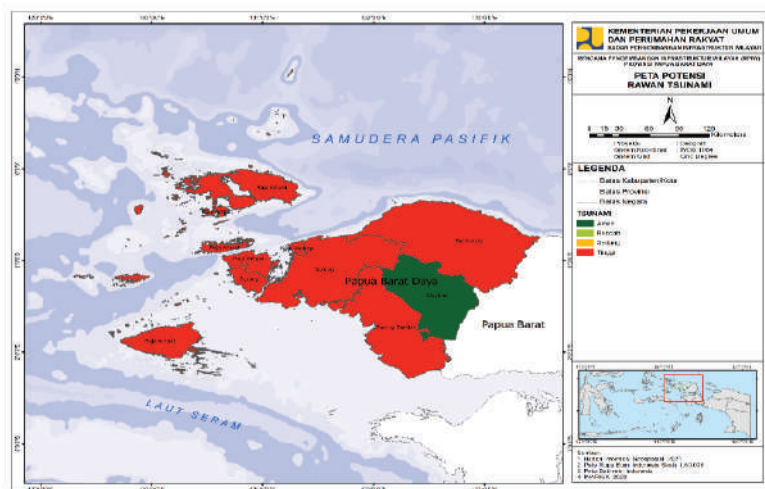
Peta 3. 15 Peta Potensi Rawan Bencana Banjir di Papua Barat Daya
Sumber: Hasil Analisis, 2022



Peta 3. 16 Peta Potensi Longsor di Papua Barat Daya
Sumber: Hasil Analisis, 2022



Peta 3. 17 Peta Potensi Bencana Kekeringan di Papua Barat Daya
Sumber: Hasil Analisis, 2022



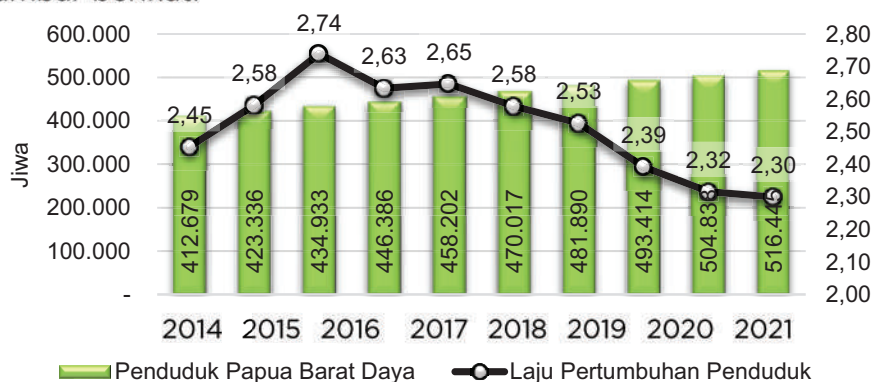
Peta 3. 18 Peta Potensi Rawan Bencana Tsunami di Papua Barat Daya

Sumber: Hasil Analisis, 2022

3.2 Profil Demografi Provinsi Papua Barat Daya

3.2.1 Profil Penduduk Papua Barat Daya

Papua Barat Daya memiliki jumlah penduduk pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sebesar 516 ribu jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,3 persen. Tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan nilai sebesar 2,74 persen. Tingkat pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 19 Perkembangan Penduduk Papua Barat Daya Tahun 2014-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Penduduk di Papua Barat Daya masih terpusat pada Kota Sorong dengan jumlah penduduk sebesar 267 ribu jiwa pada tahun 2023 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,61 persen secara lebih lengkap jumlah penduduk Papua Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 14 Jumlah Penduduk Papua Barat Daya per Kab/Kota

Kabupaten	Proyeksi Penduduk									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Sorong	205.684	211.840	218.799	225.588	232.833	239.815	247.084	254.294	260.927	267.912
Sorong	74.780	76.669	78.698	80.695	82.784	84.906	86.994	88.927	90.987	93.027
Sorong Selatan	40.110	41.085	42.028	43.036	43.896	45.019	46.021	46.922	47.918	48.897
Raja Ampat	43.902	44.568	45.310	45.923	46.613	47.301	47.885	48.493	49.216	49.876
Tambrau	13.199	13.376	13.497	13.615	13.699	13.785	13.804	13.879	14.027	14.121
Maybrat	35.004	35.798	36.601	37.529	38.377	39.191	40.102	40.899	41.763	42.613

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Selanjutnya berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, Kota Sorong merupakan wilayah yang paling padat penduduknya sekitar 455,7 jiwa per km² pada tahun 2023, selengkapnya dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3. 15 Kepadatan Penduduk Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota

Kabupaten	Kepadatan Penduduk Jiwa/Km2
Kota Sorong	455,7
Sorong	19,8
Sorong Selatan	8,3
Raja Ampat	8,7
Tambrau	2,9
Maybrat	8,1

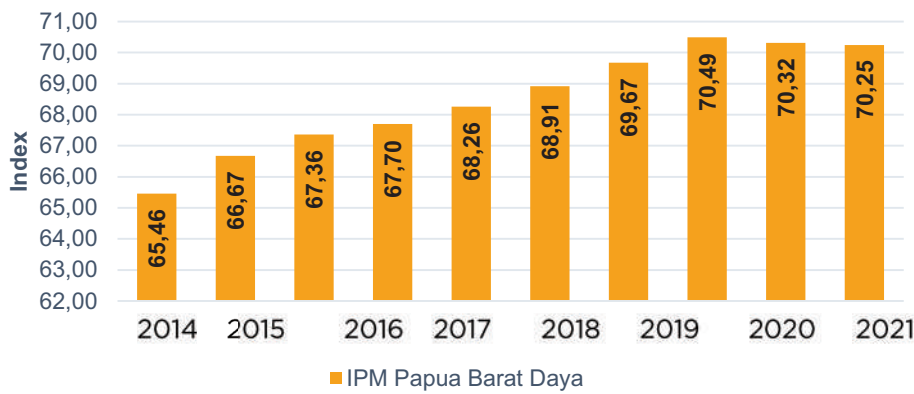
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas kepadatan penduduk Kota Sorong sangat berbeda jauh dengan kabupaten sekitarnya, sehingga dapat diindikasikan tingginya urbanisasi dikarenakan Kota Sorong merupakan pusat dari kegiatan yang ada di Papua Barat Daya.

3.2.2 Profil Pembangunan Manusia Papua Barat Daya

Tingkat pembangunan manusia Papua Barat Daya ditunjukan dengan nilai indeks pembangunan manusia pada tahun 2023 tercatat memiliki nilai sebesar 70,25, kondisi tersebut mengalami tren positif

selama 10 tahun Tren perkembangan IPM Papua Barat Daya dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 3. 20 Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat Daya
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

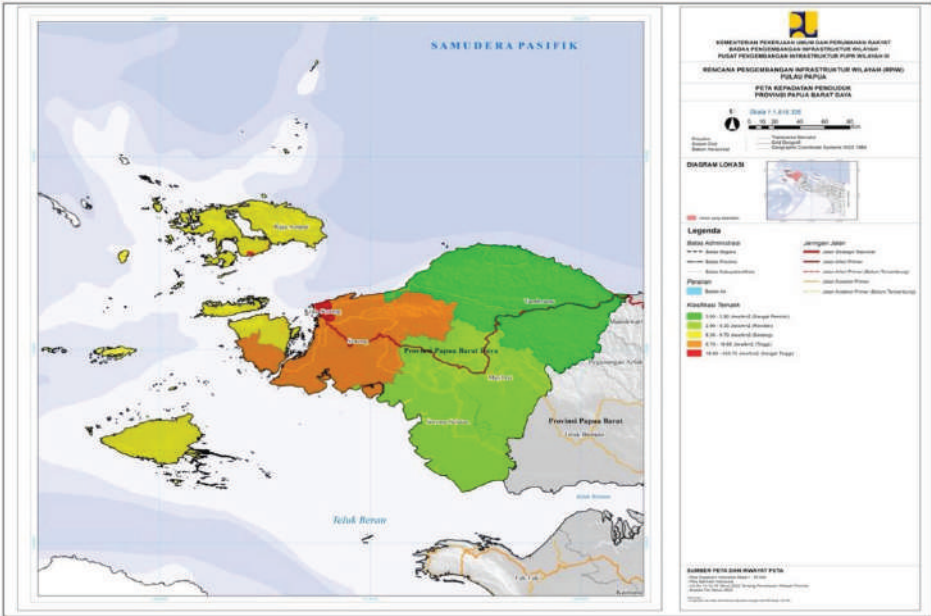
Berdasarkan gambar diatas tahun 2014 hingga tahun 2021 mengalami tren meningkat. Pembangunan manusia pada Papua Barat Daya cukup baik dan di indikasikan ke depan akan mengalami tren positif secara keseluruhan.

Selanjutnya berdasarkan kabupaten/kota yang ada di Papua Barat Daya didapat sebaran tren nilai IPM sebagai berikut.

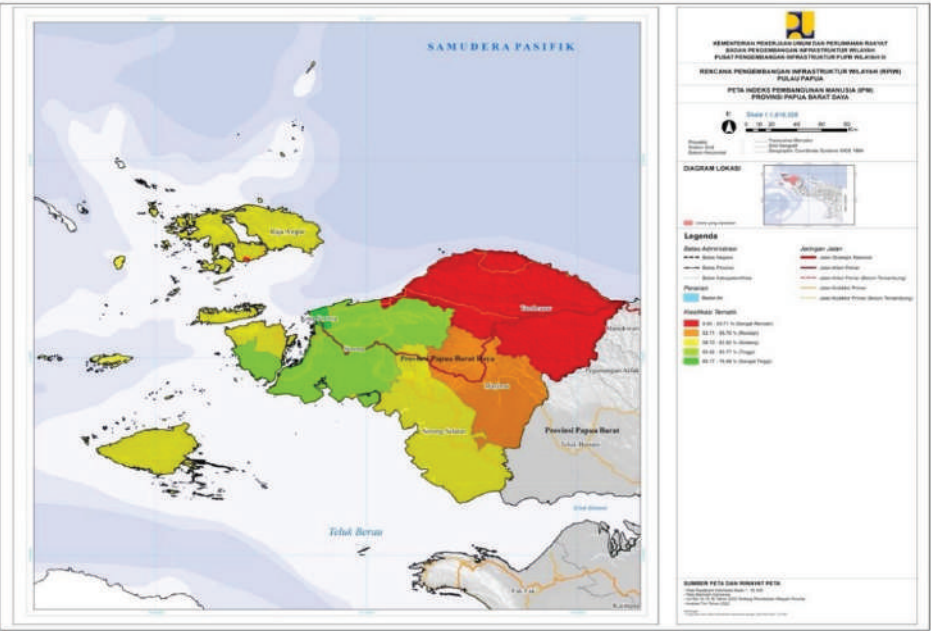
Tabel 3.16 IPM Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota

Kabupaten	IPM										Tren
	201	201	201	201	201	201	202	202	202	202	
Kota Sorong	73,89	74,96	75,78	75,91	76,33	76,73	77,35	77,98	78,45	78,49	
Sorong	59,18	60,86	61,23	61,86	62,42	63,42	64,32	65,29	65,74	65,77	
Sorong Selatan	56,87	57,73	58,24	58,60	59,20	60,19	61,01	61,93	62,42	62,46	
Raja Ampat	59,06	60,36	60,86	61,23	61,95	62,35	62,84	63,66	63,89	63,92	
Tambrauw	47,18	48,69	49,40	49,77	50,35	51,01	51,95	52,90	53,45	53,71	
Maybrat	54,13	54,93	55,36	55,78	56,35	57,23	58,16	59,15	59,52	59,70	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023



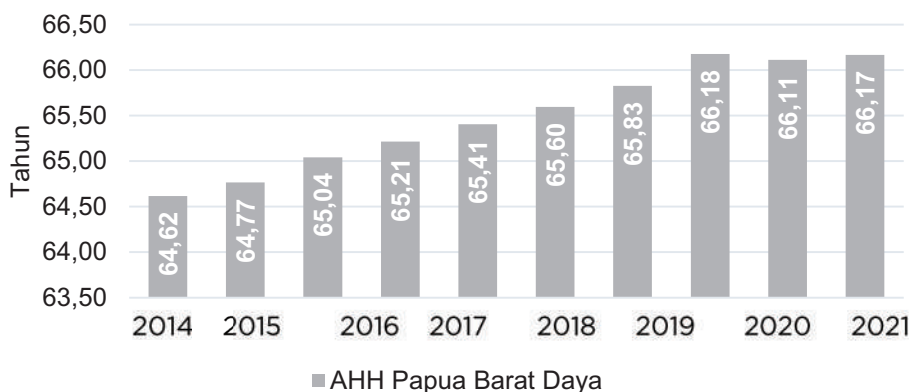
Peta 3. 19 Peta Tingkat Kepadatan Penduduk Papua Barat Daya Tahun 2023
Sumber: Hasil Analisis, 2023



Peta 3. 21 Peta Sebaran IPM Papua Barat Daya Tahun 2023
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel diatas Kota Sorong merupakan daerah dengan tingkat IPM paling tinggi di Papua Barat Daya dengan nilai 78,49 pada tahun 2023. Sedangkan daerah dengan IPM yang paling rendah pada Papua Barat Daya adalah Kabupaten Tambrauw dengan nilai IPM sebesar 54,71. Indeks pembangunan manusia secara detail dibagi tiga penilaian yaitu angka harapan hidup (AHH), rata-rata lama sekolah (RLS) dan Pengeluaran per kapita.

Berdasarkan nilai angka harapan hidup Papua Barat Daya memiliki nilai 66,17 tahun pada tahun 2023 dengan tren yang meningkat selama sepuluh tahun. Angka harapan hidup menunjukkan total agregrat indikator kesehatan pada suatu wilayah. Tren yang positif pada Papua Barat Daya menunjukkan adanya peningkatan layanan kesehatan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Tingkat perkembangan AHH selanjutnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 21 AHH Papua Barat Daya Tahun 2014-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

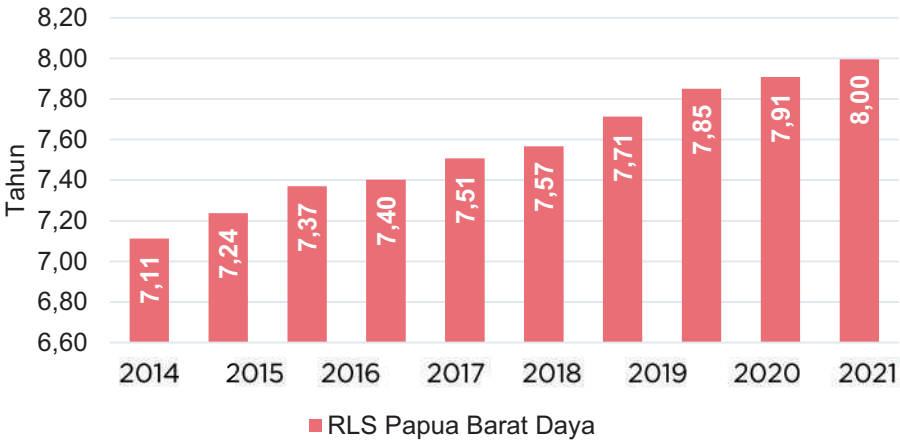
Tren angka harapan hidup yang memiliki tren meningkat dari tahun ke tahun pada Papua Barat Daya masih dibawah nilai nasional yang sebesar 72. Hal tersebut menunjukkan masih perlu peningkatan kembali layanan infrastruktur dasar dan kesehatan lainnya untuk meningkat hingga memiliki nilai yang sama atau lebih tinggi dari nilai nasional. Berdasarkan sebeara per kota/kabupaten di Papua Barat Daya maka didapat nilai AHH paling tinggi adalah Kota Sorong dengan angka harapan hidup sebesar 70,93 tahun pada tahun 2023. Selengkapny pada tabel berikut.

Tabel 3. 97 AHH Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota

Kabupaten	AHH										Tren
	201	201	201	201	201	201	202	202	202	202	
Kota Sorong	67,84	67,96	69,02	69,04	69,36	69,67	70,00	70,46	70,70	70,93	
Sorong	64,90	64,99	65,23	65,25	65,39	65,52	65,71	66,02	66,10	66,22	
Sorong Selatan	64,97	65,08	65,34	65,35	65,49	65,63	65,83	66,15	66,25	66,39	
Raja Ampat	63,81	63,84	64,05	64,06	64,16	64,26	64,42	64,70	64,74	64,83	
Tambrauw	58,39	58,48	58,72	59,02	59,16	59,29	59,56	59,96	60,13	60,20	
Maybrat	64,39	64,43	64,65	64,65	64,73	64,80	64,93	65,17	65,19	65,25	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel diatas seluruh kabupaten kota memiliki tren positif dalam peningkatan angka harapan hidup. Kabupaten Tambrauw merupakan kabupaten dengan nilai AHH yang paling rendah yaitu 60,2 tahun. Selanjutnya berdasarkan rata-rata lama sekolah (RLS) maka didapat perkembangan nilai RLS Papua Barat Daya adalah sebagai berikut.



Gambar 3. 1 RLS Papua Barat Daya Tahun 2014-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan gambar diatas didapat informasi jika rata-rata lama sekolah penduduk Papua Barat Daya adalah 8 tahun pada tahun 2023. Nilai rata-rata lama sekolah Papua Barat Daya mengalami tren positif selama 10 tahun terakhir. Berdasarkan sebaran kota/kabupaten di Papua Barat Daya didapat nilai RLS adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 108 RLS Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota

Kabupaten	Rata-rata Lama Sekolah										Tren
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kota Sorong	10,59	10,82	10,86	10,87	10,91	10,92	10,93	11,05	11,14	11,19	
Sorong	6,79	7,06	7,14	7,46	7,57	7,61	7,83	8,02	8,17	8,33	
Sorong Selatan	6,5	6,64	6,75	6,84	6,95	7,01	7,15	7,26	7,36	7,49	
Raja Ampat	6,58	7,16	7,32	7,39	7,53	7,57	7,63	7,8	7,91	8,02	
Tambrauw	4,27	4,4	4,53	4,61	4,7	4,81	4,94	5,07	5,24	5,39	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel diatas didapat informasi jika Kota Sorong yang memiliki nilai RLS yang paling tinggi dengan 11,19 tahun dengan tren positif. Sedangkan wilayah yang memiliki nilai RLS paling rendah adalah Kabupaten Tambrauw dengan 5,39 tahun. Selanjutnya adalah pembangunan manusia dilihat dari pengeluaran perkapita Papua Barat Daya yang dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 3. 22 Pengeluaran Per Kapita Papua Barat Daya Tahun 2014-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas didapat informasi jika pengeluaran perkapita Papua Barat Daya mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Tercatat pada tahun 2023 nilai pengeluaran perkapita Papua Barat Daya sebesar 10,06 juta per tahun. Mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 10,4 juta per tahun. Berdasarkan sebaran per kota/kabupaten maka didapat pengeluaran per kapita pada Papua Barat Daya sebagai berikut.

Tabel 3. 119 Pengeluaran perkapita Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota

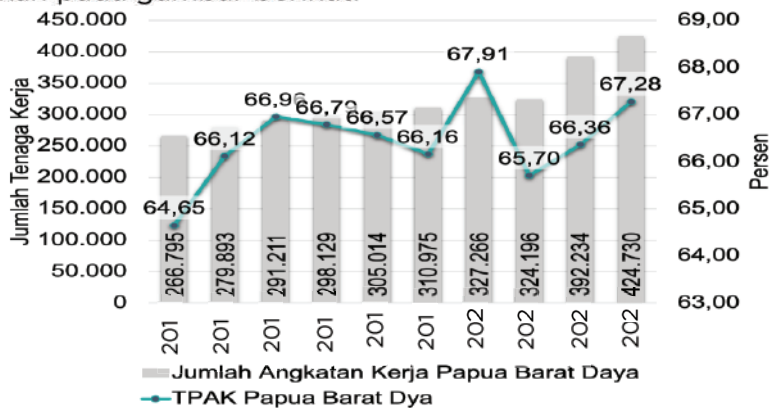
Kabupaten	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)										Tren
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kota Sorong	11.786	12.455	12.515	12.590	12.858	13.141	13.484	13.815	13.954	13.744	
Sorong	5.706	6.365	6.436	6.457	6.563	6.975	7.240	7.507	7.495	7.350	
Sorong Selatan	5.267	5.483	5.520	5.550	5.644	5.904	6.062	6.252	6.286	6.188	
Raja Ampat	6.729	7.020	7.061	7.191	7.393	7.508	7.760	7.958	8.014	7.882	
Tambrau	4.020	4.339	4.405	4.431	4.561	4.626	4.859	5.001	4.998	4.903	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan jika Kota Sorong memiliki tingkat pengeluaran perkapita paling tinggi dengan 13,74 juta per tahun. Sedangkan pengeluaran per kapita terendah ada pada Kabupaten Tambrau dengan 4,9 juta per tahun. Secara keseluruhan tren pengeluaran per kapita mengalami peningkatan hingga tahun 2019, dan mengalami tren menurun setelah tahun 2019 akibat dampak adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan gambaran umum kependudukan dan pembangunan manusia didapat jika Kabupaten Tambrau merupakan wilayah yang paling tertinggal dalam pembangunan manusia di Papua Barat Daya. Sedangkan pembangunan yang paling tinggi di Papua Barat Daya adalah Kota Sorong.

3.2.3 Profil Ketenagakerjaan Papua Barat Daya

Jumlah tenaga kerja berdasarkan persentase angkatan kerja Papua Barat Daya pada tahun 2023 adalah 67,28 persen atau berjumlah 424 ribu angkatan kerja. Secara persentase dan jumlah riil relatif meningkat. Berikut tren jumlah angkatan kerja Papua Barat Daya dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 3. 23 Tingkat Angkatan Kerja Papua Barat Daya

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas dijelaskan jika persentase angkatan kerja di Papua Barat Daya mengalami fluktuasi persentase dan jumlah yang meningkat. Peningkatan persentase terjadi hingga tahun 2018 menjadi 67,91 atau sebesar 327 ribu angkatan kerja. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 65,7 atau sebesar 324 ribu angkatan kerja dan meningkat hingga pada tahun 2021 sebesar 67,28 persen atau sebesar 424 ribu angkatan kerja. Selanjutnya data angkatan kerja dapat dijelaskan pada masing-masing kabupaten/kota yang ada di Papua Barat Daya sebagai berikut.

Tabel 3. 20 Tingkat Persentase Angkatan Kerja Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota

Kabupaten	TPAK										Tren Persentase
	201	201	201	201	201	201	202	202	202	202	
Kota Sorong	59,00	62,21	63,35	61,58	64,17	61,39	67,38	61,02	62,77	61,40	
Sorong	62,57	62,88	68,59	63,84	66,94	68,11	65,93	67,32	64,21	68,89	
Sorong Selatan	72,74	72,71	71,90	77,72	72,47	77,18	68,61	77,45	70,44	80,07	
Raja Ampat	64,60	65,99	65,55	66,92	58,70	56,97	66,78	67,45	71,83	66,43	
Tambrauw	82,93	70,58	62,31	82,15	80,85	77,72	82,24	75,71	73,43	75,61	
Maybrat	86,19	87,10	82,80	86,15	78,02	85,52	71,12	72,38	78,24	81,51	

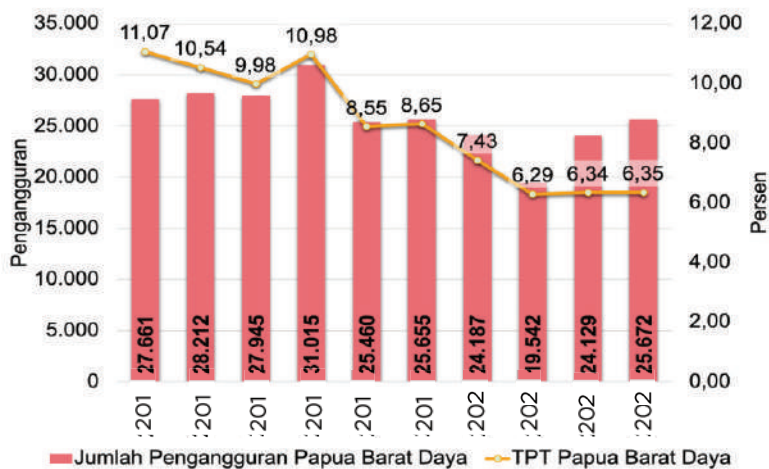
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 3. 121 Jumlah Angkatan Kerja Angkatan Kerja Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota

Kabupaten	Jumlah Penduduk Usia Kerja										Tren Jumlah
	201	201	201	201	201	201	202	202	202	202	
Kota Sorong	121.354	131.781	138.599	138.917	149.407	147.222	166.485	155.170	178.524	183.743	
Sorong	46.790	48.209	53.979	51.516	55.416	57.829	57.355	59.866	76.204	89.478	
Sorong Selatan	29.176	29.873	30.218	33.448	31.810	34.746	31.575	36.341	36.959	43.973	
Raja Ampat	28.361	29.410	29.701	30.732	27.362	26.947	31.978	32.709	46.072	46.343	
Tambrauw	10.946	9.441	8.410	11.185	11.076	10.714	11.352	10.508	20.839	25.150	
Maybrat	30.169	31.178	30.304	32.331	29.943	33.516	28.521	29.603	33.636	36.043	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas, dijelaskan jika berdasarkan persentase angkatan kerja (TPAK) didapat jika Kabupaten Sorong Selatan memiliki persentase angkatan kerja yang tinggi dengan 80,07 persen pada tahun 2021 dan Kota Sorong memiliki persentase angkatan kerja yang rendah sebesar 61,4 persen. Berdasarkan jumlah riil angkatan kerja, Kota Sorong memiliki angkatan kerja paling tinggi di Papua Barat Daya dengan 183 ribu angkatan kerja, sedangkan Kabupaten yang memiliki jumlah riil angkatan kerja terendah adalah Kabupaten Tambrauw dengan 25,15 ribu angkatan kerja. Selanjutnya untuk tingkat pengangguran, Papua Barat Daya memiliki persentase pengangguran sebesar 6,35 persen dari jumlah angkatan kerja atau sebesar 25,6 ribu penduduk.



Gambar 3. 23 Tingkat Pengangguran Terbuka Papua Barat Daya
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas dijelaskan jika tingkat persentase pengangguran terbuka Papua Barat Daya Mengalami tren menurun, pada tahun 2014 tercatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 11,07 persen atau sebesar 27,6 penduduk yang menganggur dan menurun hingga pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,35 persen atau sebesar 25,6 penduduk yang menganggur. Selanjutnya berdasarkan kabupaten/kota yang ada di Papua Barat Daya dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3. 22 Tingkat Persentase Pengangguran Terbuka Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota

Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka										Tren Persentase
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kota Sorong	19,25	18,07	16,90	17,26	13,54	13,54	11,41	9,87	9,93	9,95	
Sorong	1,27	3,27	3,81	5,66	4,10	4,56	3,08	2,94	3,29	3,36	
Sorong Selatan	3,86	2,62	1,82	2,87	5,29	4,84	4,89	3,82	3,69	3,55	
Raja Ampat	5,51	3,38	3,44	5,59	2,78	3,10	3,32	2,16	2,73	3,81	
Tambrauw	1,10	1,77	1,17	1,32	1,47	0,44	3,07	2,13	2,46	1,49	
Maybrat	2,99	2,80	2,61	4,01	1,18	1,55	1,65	0,50	2,26	1,89	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 3. 23 Jumlah Pengangguran Terbuka Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota

Kabupaten	Jumlah Pengangguran										Tren Jumlah
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kota Sorong	23.356	23.818	23.426	23.977	20.227	19.934	18.996	15.315	17.727	18.282	
Sorong	594	1.576	2.057	2.916	2.274	2.637	1.767	1.760	2.507	3.006	
Sorong Selatan	1.126	783	550	960	1.683	1.682	1.544	1.388	1.364	1.561	
Raja Ampat	1.563	994	1.022	1.718	759	835	1.062	707	1.258	1.766	
Tambrauw	120	167	98	148	163	47	349	224	513	375	
Maybrat	902	874	792	1.296	354	520	471	148	760	681	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel diatas, Kabupaten Tambrauw merupakan kabupaten dengan tingkat persentase pengangguran terbuka paling rendah di Papua Barat Daya dengan nilai 1,49 persen. Sedangkan untuk persentase tertinggi pada TPT adalah Kota Sorong dengan 9,95 persen. Berdasarkan jumlah riil pengangguran terbuka didapat informasi jika Kota Sorong memiliki jumlah pengangguran terbuka yang paling tinggi dengan 18,28 ribu jiwa, sedangkan jumlah pengangguran terendah ada di Kabupaten Tambrauw dengan 375 penduduk. Berikut sebaran nilai pengangguran terbuka dijelaskan pada gambar berikut.

3.2.4 Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Papua Barat Daya

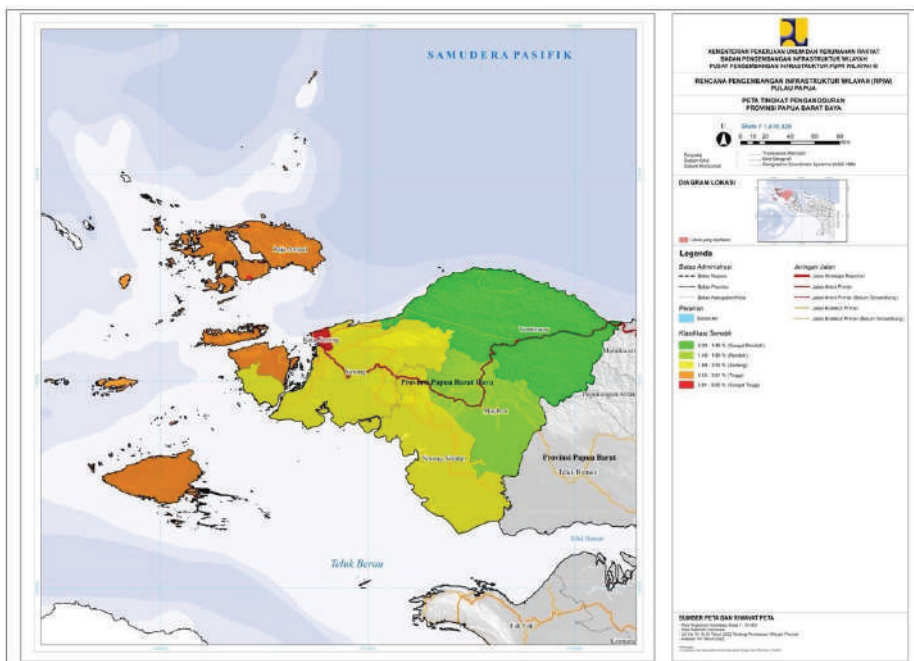
Kondisi ekonomi dan sosial wilayah dapat dijelaskan pada tingkat kemiskinan. Pada Papua Barat Daya didapat persentase tingkat kemiskinan sebesar 20,52 persen atau 129,5 ribu penduduk miskin di

Papua Barat Daya. Secara lebih detail dijelaskan pada gambar berikut.

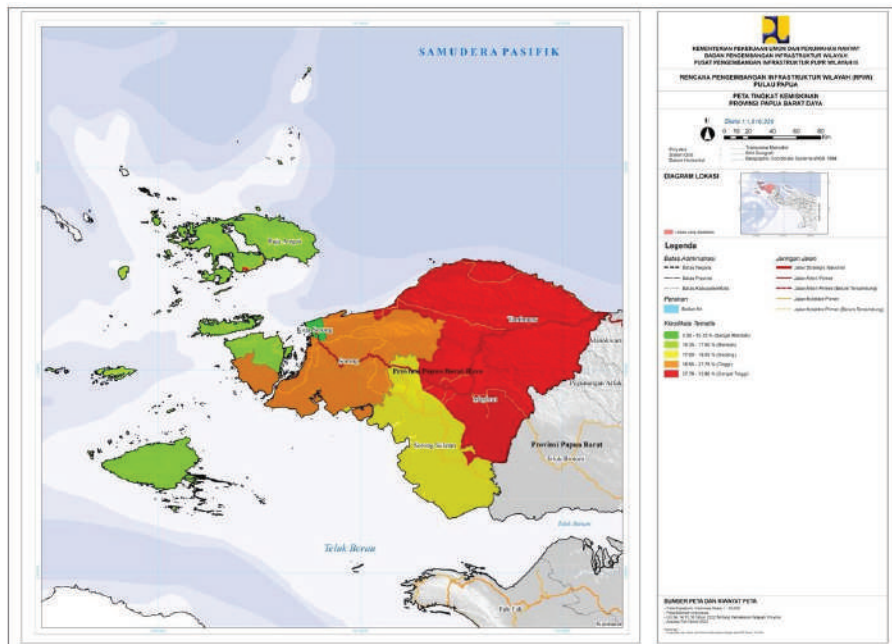


Gambar 3. 25 Tingkat Kemiskinan Papua Barat Daya
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan gambar diatas didapat informasi jika persentase kemiskinan Papua Barat Daya mengalami tren menurun selama 10 tahun. Pada tahun 2012 memiliki persentase kemiskinan sebesar 24,15 persen dan menurun hingga menyentuh angka 20,52 persen. Berdasarkan jumlah riil penduduk miskin selama 10 tahun Memiliki tren naik yang tidak terlalu fluktuaktif pada tahun 2012 tercatat tingkat pengangguran Papua Barat Daya 99,5 ribu penduduk miskin dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga sebesar 129,5 ribu penduduk miskin pada tahun 2021. Selanjutnya berdasarkan kota/kabupaten yang ada di Papua Barat Daya dapat dilihat sebagai berikut.

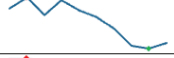


*Peta 3. 26 Peta Sebaran TPT Papua Barat Daya Tahun 2021
Sumber: Hasil Analisis, 2022*



*Peta 3. 27 Peta Sebaran Tingkat Kemiskinan Papua Barat Daya
Tahun 2012-2021
Sumber: Hasil Analisis, 2022*

Tabel 3. 24 Tingkat Persentase Kemiskinan Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota

Kabupaten	Persentase Kemiskinan										Tren Persentase
	201	201	201	201	201	201	202	202	202	202	
Kota Sorong	19,36	19,27	18,37	17,56	17,85	17,78	15,85	15,45	14,99	15,35	
Sorong	33,70	35,48	34,30	33,35	33,25	32,86	30,19	28,61	27,48	27,78	
Sorong Selatan	20,01	20,50	19,73	20,38	19,92	19,66	19,14	18,41	18,28	18,55	
Raja Ampat	21,05	21,16	20,73	20,94	20,50	20,00	17,80	17,16	17,01	17,50	
Tambrauw	38,77	38,68	38,35	38,11	36,67	35,99	34,59	33,66	32,80	33,86	
Maybrat	34,99	35,64	35,20	35,31	34,65	34,87	32,89	32,20	30,78	31,39	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

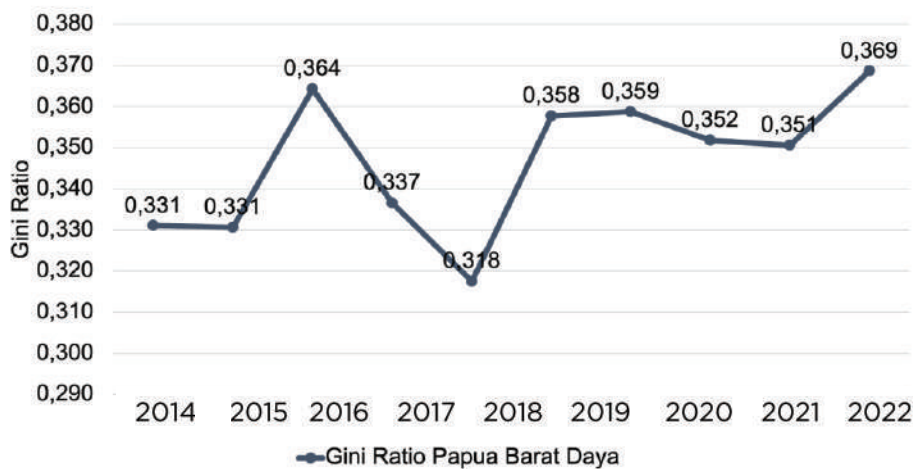
Tabel 3. 25 Jumlah Penduduk Miskin Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin										Tren Jumlah
	201	201	201	201	201	201	202	202	202	202	
Kota Sorong	39.820	40.822	40.193	39.613	41.561	42.639	39.163	39.288	42.633	45.936	
Sorong	25.201	27.202	26.993	26.912	27.526	27.900	26.263	25.442	32.613	36.082	
Sorong Selatan	8.026	8.422	8.292	8.771	8.744	8.851	8.808	8.638	9.591	10.187	
Raja Ampat	9.241	9.431	9.393	9.616	9.556	9.460	8.524	8.321	10.910	12.208	
Tambrauw	5.117	5.174	5.176	5.189	5.023	4.961	4.775	4.672	9.308	11.263	
Maybrat	12.248	12.758	12.884	13.251	13.298	13.666	13.190	13.169	13.233	13.881	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data dari tabel diatas didapat jika persentase kemiskinan paling tinggi terdapat pada Kabupaten Tambrauw dengan 33,86 persen. Sedangkan Kota Sorong merupakan daerah dengan persentase kemiskinan paling rendah dengan 15,35 persen. Berdasarkan jumlah riil penduduk miskin didapat jika Kota Sorong merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi dengan 45,94 ribu penduduk miskin sedangkan wilayah dengan penduduk miskin terendah adalah Kabupaten Sorong Selatan dengan 10,2 ribu penduduk miskin. Berdasakan sebaran persentase penduduk miskin Papua Barat Daya adalah sebagai berikut. Selanjutnya berdasarkan tingkat ketimpangan pada Papua Barat

Daya didapat ketimpangan berdasarkan gini ratio sebesar 0,369 dengan tren relatif menurun Tingkat ketimpangan Papua Barat Daya dapat dilihat pada gambar berikut.



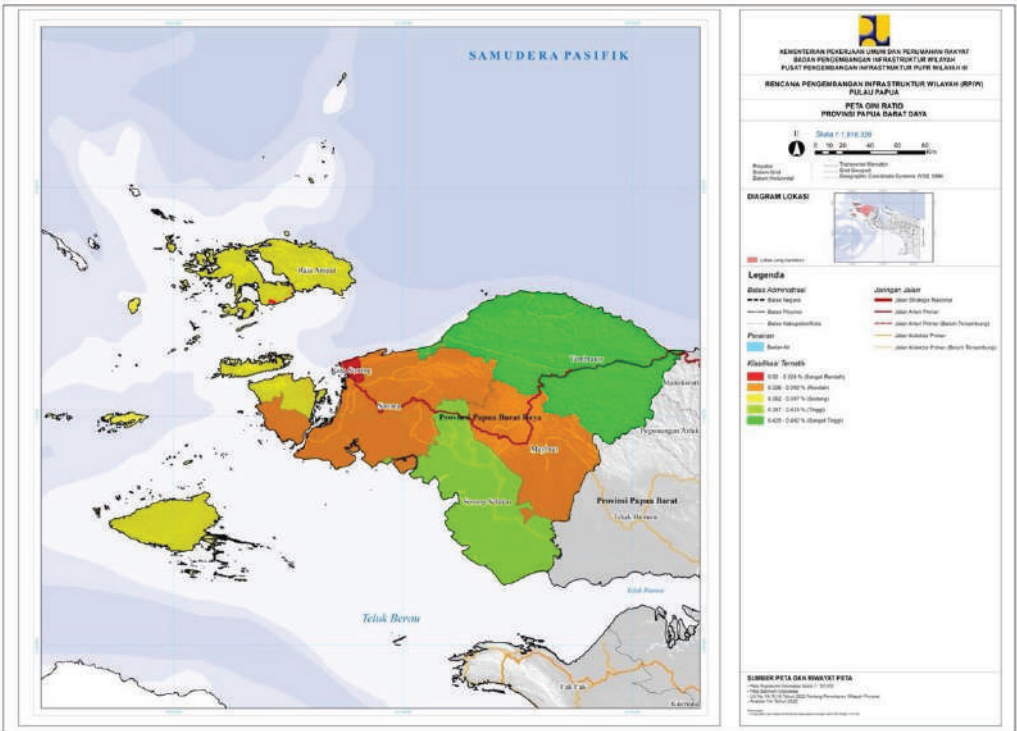
Gambar 3. 24 Tingkat Ketimpangan Papua Barat Daya
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas tingkat ketimpangan sempat mengalami tren menurun dari 0,364 pada tahun 2016 menjadi 0,318 pada tahun 2018. Kemudian mengalami peningkatan hingga puncaknya pada tahun 2023 menjadi 0,369. Selanjutnya tingkat ketimpangan per kota/kabupaten di Papua Barat Daya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3. 136 Tingkat Ketimpangan Papua Barat Daya per Kabupaten/Kota

Kabupaten	Gini Ratio										Tren
	201	201	201	201	201	201	202	202	202	202	
Kota Sorong	0,340	0,370	0,398	0,320	0,300	0,335	0,330	0,320	0,288	0,326	
Sorong	0,340	0,290	0,328	0,390	0,330	0,405	0,367	0,389	0,416	0,392	
Sorong Selatan	0,360	0,270	0,393	0,350	0,410	0,352	0,422	0,423	0,444	0,425	
Raja Ampat	0,330	0,370	0,360	0,380	0,330	0,403	0,394	0,389	0,406	0,397	
Tambrauw	0,270	0,210	0,278	0,260	0,250	0,283	0,344	0,285	0,351	0,482	
Maybrat	0,250	0,250	0,245	0,280	0,300	0,373	0,408	0,365	0,387	0,388	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023



Peta 3. 29 Peta Sebaran Tingkat Ketimpangan Papua Barat Daya Tahun 2021

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 3. 27 Profil Demografi Papua Barat Daya

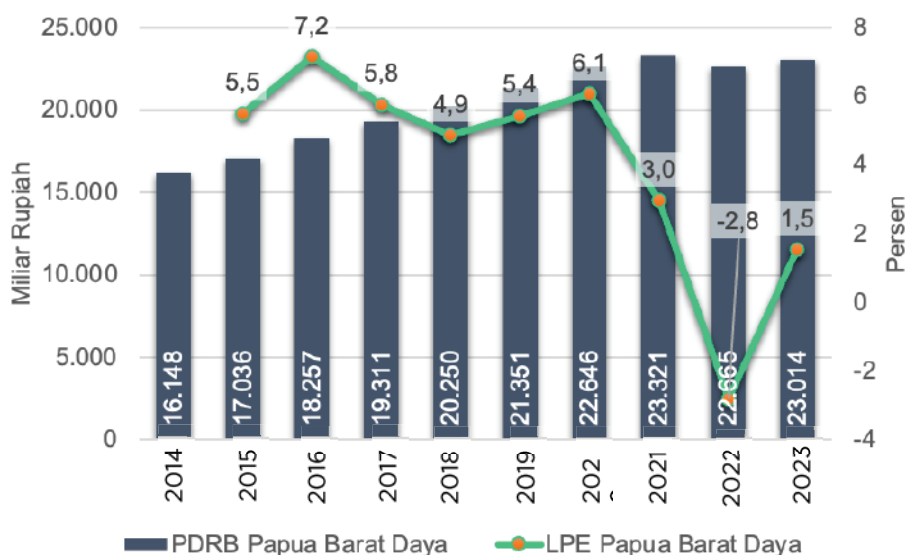
No.	Kab/ Kota	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	IPM	Laju Pertumbuhan Penduduk	Jumlah Penduduk Usia Kerja	Jumlah Pengangguran
1.	Kota Sorong	267.912	455,7	78,49	N/A	183.743	18.282
2.	Sorong	93.027	19,8	65,77	N/A	89.478	3.006
3.	Sorong Selatan	48.897	8,3	62,46	N/A	43.973	1.561
4.	Raja Ampat	49.876	8,7	63,92	N/A	46.343	1.766
5.	Tambrauw	14.121	2,9	53,71	N/A	25.150	375
6.	Maybrat	42.613	8,1	59,70	N/A	36.043	681

Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka, 2023

3.3 Profil Ekonomi Provinsi Papua Barat Daya

3.3.1 Profil Ekonomi Papua Barat Daya Berdasarkan PDRB

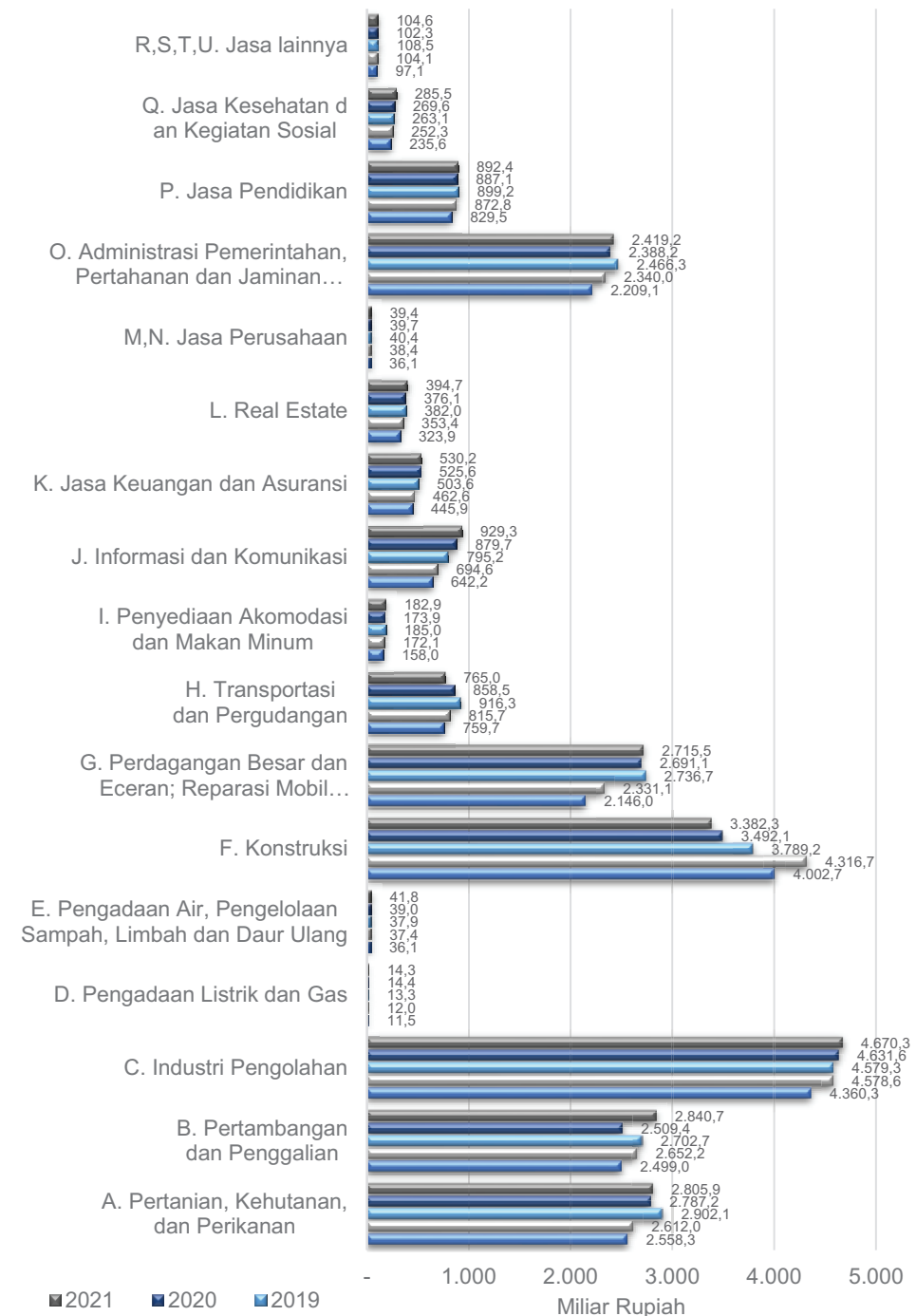
Profil ekonomi Papua Barat Daya dapat dilihat dari sisi PDRB atas dasar harga konstan dimana berdasarkan data tersebut didapat jika Papua Barat Daya Memiliki Nilai PDRB sebesar 38,58 triliun rupiah pada tahun 2021 dengan tingkat pertumbuhan sebesar -1,4 persen. Secara lebih rinci tren PDRB Papua Barat Daya selama 10 tahun adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 25 PDRB dan LPE Papua Barat Daya Tahun 2014-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan gambar diatas didapat informasi jika secara PDRB Riil mengalami tren meningkat, namun sempat mengalami penurunan akibat dampak Pandemi Covid-19. Secara pertumbuhan relatif memiliki tren menurun. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, namun pada tahun 2020 mengalami tren menurun yang diperparah adanya dampak Pandemi Covid 19 dimana pada tahun 2020 memiliki LPE sebesar 6,1 persen kemudian mengalami penurunan hingga negatif pada tahun 2020 dengan -2,8 persen dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 1,5 persen Secara lebih detail porsi pertumbuhan PDRB Papua Barat Daya adalah sebagai berikut



Gambar 3. 31PDRB Lapangan Usaha Papua Barat Daya Tahun 2017-2021

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 3. 28 Distribusi Sektor PDRB Papua Barat Daya Tahun 2014-2023

Lapangan Usaha	Distribusi Sektor PDRB (Persen) Papua Barat Daya									
	Tahun									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,9	12,8	12,6	12,3	12,0	12,0	11,5	12,4	12,3	12,2
B. Pertambangan dan Penggalian	17,3	16,0	15,0	13,8	13,3	11,7	11,7	11,6	11,1	12,3
C. Industri Pengolahan	24,8	23,7	22,9	22,1	20,6	20,4	20,2	19,6	20,4	20,3
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
F. Konstruksi	12,9	14,1	15,3	16,6	17,8	18,7	19,1	16,2	15,4	14,7
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,8	9,0	9,2	9,4	9,7	10,1	10,3	11,7	11,9	11,8
H. Transportasi dan Pergudangan	2,9	3,0	3,1	3,3	3,4	3,6	3,6	3,9	3,8	3,3
I. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
J. Informasi dan Komunikasi	2,4	2,5	2,7	2,8	3,0	3,0	3,1	3,4	3,9	4,0
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,7	2,1	2,2	2,1	2,2	2,1	2,0	2,2	2,3	2,3
L. Real Estate	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7
M,N. Jasa Perusahaan	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,8	9,2	9,4	9,8	10,1	10,3	10,3	10,6	10,5	10,5
P. Jasa Pendidikan	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
PDRB Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data diatas didapat informasi jika perekonomian Papua Barat Daya Sebagian besar didominasi Industri Pengolahan dengan 20,3 persen diikuti oleh sektor konstruksi dengan 14,7 persen. Sektor pertambangan memiliki kontribusi sebesar 12,3 persen, sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 12,2 persen serta sektor Administrasi Pemerintahan dengan kontribusi sebesar 10,5 persen. Berikut adalah kontribusi masing-masing kota/kabupaten terhadap Papua Barat Daya dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3. 29 Distribusi PDRB Papua Barat Daya Per Kota/Kabupaten

Kota/Kabupaten	Kontribusi Terhadap Papua Barat Daya										Tren
	Tahun										
	201	201	201	201	201	201	202	202	202	202	
Kota Sorong	36,15	38,32	40,08	41,79	43,45	44,62	44,90	44,91	44,71	43,40	
Sorong	44,76	42,55	40,93	39,60	38,10	37,35	37,21	36,88	37,00	37,02	
Sorong Selatan	5,19	5,25	5,25	5,28	5,34	5,45	5,45	5,60	5,54	5,65	
Raja Ampat	11,32	11,31	11,20	10,79	10,54	9,99	9,85	9,97	10,07	11,26	
Tambrauw	0,64	0,65	0,62	0,62	0,62	0,63	0,62	0,64	0,65	0,64	
Maybrat	1,94	1,93	1,92	1,91	1,94	1,96	1,96	2,01	2,04	2,03	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

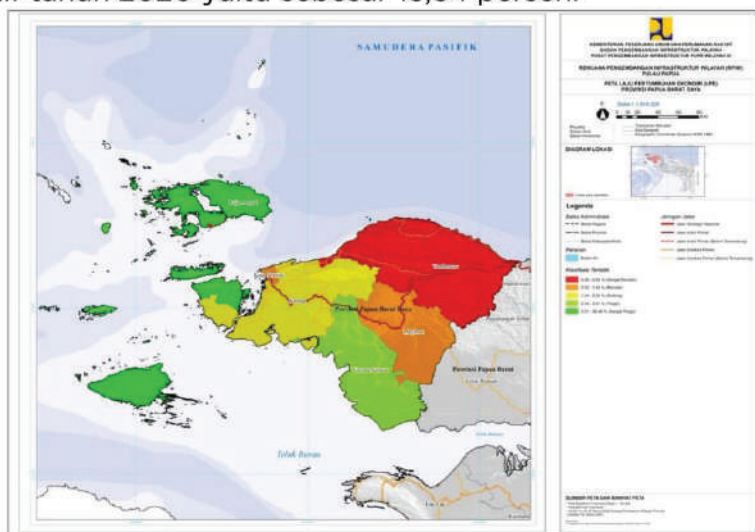
Berdasarkan distribusi kota/kabupaten, Kota Sorong memiliki tingkat kontribusi paling tinggi dengan 43,4 persen dari total PDRB Papua Barat Daya selanjutnya disusul Kabupaten Sorong dengan 37,02 persen. Selanjutnya tingkat pertumbuhan PDRB per kota/kabupaten di Papua Barat Daya disajikan sebagai berikut.

202
Tabel 3. 30 Laju Pertumbuhan PDRB Papua Barat Daya Per

Kota/Kabupaten	LPE Papua Barat Daya									Tren
	Tahun									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kota Sorong	11,83	12,10	10,27	9,05	8,26	6,73	3,00	(3,24)	(1,44)	
Sorong	0,28	3,08	2,35	0,89	3,36	5,66	2,05	(2,50)	1,62	
Sorong Selatan	6,75	7,16	6,41	6,04	7,47	6,15	5,69	(3,71)	3,51	
Raja Ampat	5,38	6,18	1,92	2,38	(0,01)	4,58	4,16	(1,85)	13,54	
Tambrauw	6,29	3,04	5,83	4,95	6,33	5,46	6,47	(2,41)	0,52	
Maybrat	5,23	6,33	5,51	6,40	6,56	6,10	5,44	(1,25)	1,16	
Maybrat	5,23	6,33	5,51	6,40	6,56	6,10	5,44	(1,25)	1,16	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel diatas seluruh kota/kabupaten di Papua Barat Daya mengalami tren menurun, dan terjadi penurunan drastis dan sebagian negatif pada tahun 2019-2020 sebagai akibat dampak pandemi Covid-19. Kabupaten Raja Ampat merupakan kabupaten yang memiliki tingkat pertumbuhan paling tinggi sejak dampak negatif tahun 2020 yaitu sebesar 13,54 persen.

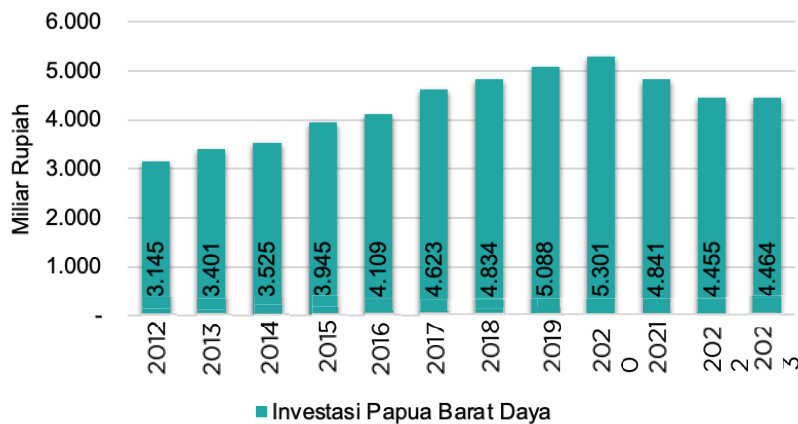


Peta 3. 32 Peta Sebaran Laju Pertumbuhan PDRB Papua Barat Daya
Tahun 2021

Sumber: Hasil Analisis, 2022

3.3.2 Provil Investasi Papua Barat Daya

Berdasarkan jumlah investasi yang masuk pada Papua Barat Daya mengalami tren meningkat selama hingga tahun 2018 dan mengalami tren menurun antara 2019 hingga 2021. Dengan nilai tertinggi pada investasi sebanyak 4,46 triliun pada tahun 2021. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 3. 33 Investasi Masuk Papua Barat Daya

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

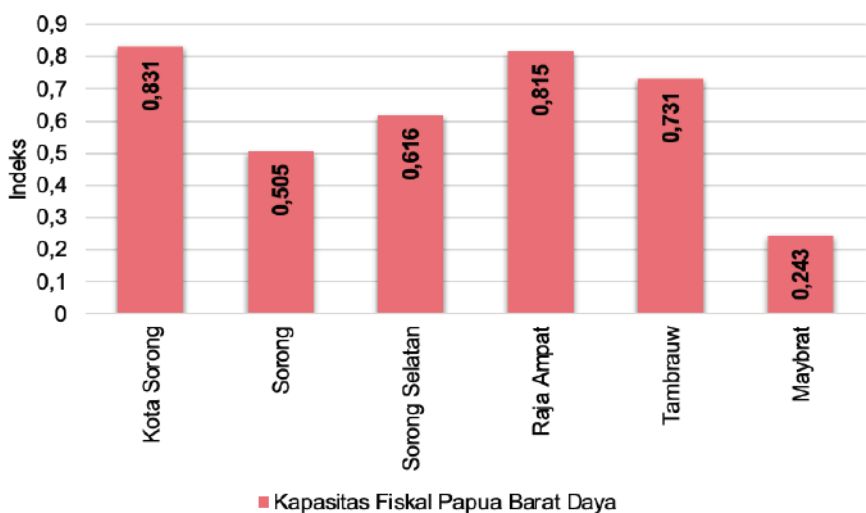
Selanjutnya jumlah investasi dapat dilihat per Kota/Kabupaten di Papua Barat Daya. Jumlah investasi terbesar berada di Kota Sorong dengan nilai 2,1 triliun. Sedangkan daerah dengan investasi terendah berada di Kabupaten Tambrauw Selatan dengan 38 miliar rupiah pada tahun 2023. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel Berikut.

Tabel 3. 31 Investasi Papua Barat Daya Per Kota/Kabupaten

Kota/Kabupaten	LPE Papua Barat Daya												Tren
	Tahun												
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kota Sorong	1.618	1.767	1.844	2.113	2.236	2.576	2.679	2.816	2.866	2.332	2.040	2.104	
Kab. Sorong	968	1.024	1.037	1.096	1.115	1.215	1.288	1.365	1.486	1.531	1.483	1.421	
Kab. Sorong Selatan	264	287	310	352	358	392	409	436	457	472	453	426	
Kab. Raja Ampat	204	226	233	269	280	311	324	333	348	355	331	360	
Kab. Tambrauw	24	25	27	30	31	32	34	36	37	39	37	38	

3.3.3 Profil Kapasitas Fiskal Papua Barat Daya

Selanjutnya adalah tingkat kapasitas fiskal untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah yang ada di masing-masing kabupaten. Dengan nilai kapasitas fiskal sebagai berikut.



Gambar 3. 34 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Papua Barat Daya
Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

Berdasarkan data diatas Kota Sorong merupakan daerah dengan kapasitas fiskal yang paling tinggi dengan kategori sedang, diikuti Kabupaten Raja Ampat. Kapasitas fiskal menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang masih memiliki interpretasi sedang hingga rendah.

Rekap Profil Ekonomi Papua Barat Daya

Tabel 3. 142 Profil Ekonomi Dasar Papua Barat Daya

No .	Kab / Kota	Nilai PDR B	Presentas e PDRB terhadap Wilayah	Pendapata n/ Kapita	Tingkat Kemiskina n	Kapasita s Fiskal
1.	Kota Sorong	N/A	43,40	N/A	15,35	0,831
2.	Sorong	N/A	37,02	N/A	27,78	0,505
3.	Sorong Selatan	N/A	5,65	N/A	18,55	0,616
4.	Raja Ampat	N/A	11,26	N/A	17,50	0,815
5.	Tambrau w	N/A	0,64	N/A	33,86	0,731
6.	Maybrat	N/A	2,03	N/A	31,39	0,243

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Profil Komoditas Unggulan Papua Barat Daya

Tabel 3. 153 Profil Ekonomi Sektor unggulan pertanian dan/atau perikanan Papua Barat Daya

No.	Kabupaten / Kota	Kontribusi Sektor Pertanian / Perikanan terhadap PDRB Kab / Kota	Sub Sektor Unggulan Pertanian dan atau Perikanan	Komoditas Unggulan	Lokasi Produksi	Lokasi Pengolahan	Lokasi Pemasaran	Besaran Produksi / Tahun	Daerah Irigasi / Sumber Air	Permasalahan	Keterangan
1.	Kota Sorong	9,15	N/A	Perikanan Ternak babi Ternak ayam Ternak sapi	N/A	N/A	N/A	Perikanan: 5.255 ton Ternak babi: 810 ton Ternak ayam: 104.211 ekor Ternak sapi: 24.918 ekor	N/A	N/A	N/A
2.	Sorong	10,41	N/A	Perikanan Padi Sagu Kelapa Sawit Sapi Ternak ayam	N/A	N/A	N/A	Perikanan: 12.311 ton Padi: 8.051 ton Sagu: 1.774 ton Kelapa: 819 ton Sawit: 14.650 ton Sapi: 1.317 ton	N/A	N/A	N/A

No.	Kabupaten / Kota	Kontribusi Sektor Pertanian / Perikanan terhadap PDRB Kab / Kota	Sub Sektor Unggulan Pertanian dan atau Perikanan	Komoditas Unggulan	Lokasi Produksi	Lokasi Pengolahan	Lokasi Pemasaran	Besaran Produksi / Tahun	Daerah Irigasi / Sumber Air	Permasalahan	Keterangan
								Ternak ayam: 51.433 ekor			
3.	Sorong Selatan	25,12	N/A	Perikanan Sagu	N/A	N/A	N/A	Perikanan: 22.863 ton Sagu: 377 ton	N/A	N/A	N/A
4.	Raja Ampat	22,87	N/A	Sagu Kelapa	N/A	N/A	N/A	Sagu: 9.850 ton Kelapa: 10.411 ton	N/A	N/A	N/A
5.	Tambrauw	29,90	N/A	Perikanan Kelapa Ternak babi	N/A	N/A	N/A	Perikanan: 37.561 ton Kelapa: 4.992 ton Ternak babi: 18,16 ton	N/A	N/A	N/A
6.	Maybrat	26,82	N/A	Perikanan Sagu	N/A	N/A	N/A	Perikanan: - ton Sagu: 18 ton	N/A	N/A	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 3. 164 Profil Ekonomi sektor unggulan Industri Papua Barat Daya

No.	Kabupaten / Kota	Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kab / Kota	Lokasi Kawasan Industri	Jenis Industri	Besaran Produksi	Jumlah Tenaga Kerja	Asal Bahan Baku	Tujuan Pemasaran	Pengelolaan Limbah	Permasalahan
1.	Kota Sorong	5,18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Sorong	42,60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Sorong Selatan	1,40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.	Raja Ampat	0,71	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.	Tambora	0,74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.	Maybrat	0,33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 3. 175 Profil Ekonomi sektor unggulan pariwisata Papua Barat Daya

No.	Kabupaten / Kota	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Destinasi Tujuan Wisata (DTW)			Jumlah Wisatawan		Lama Tinggal		Rata-rata Pengeluaran Wisatawan
			Objek DTW Unggulan	Lokasi	Jumlah Pengunjung / Tahun	Kondisi dan Permasalahan	Mancanegara	Domestik	Domestik	Mancanegara

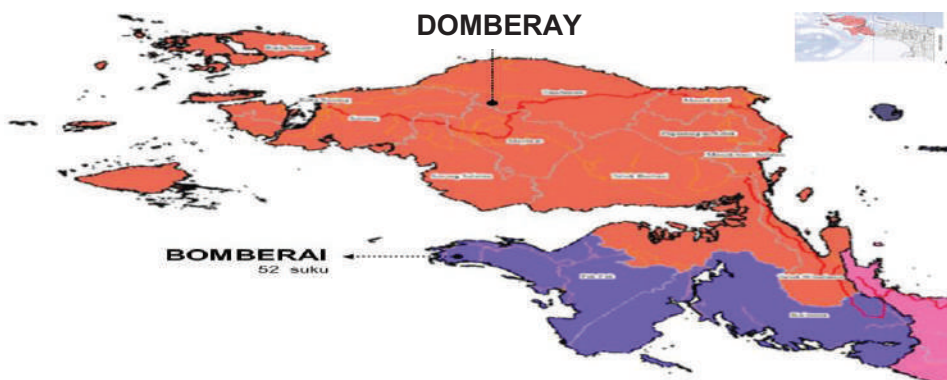
		Ka /Kota																
1.	Kota Sorong	1,79	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Sorong	0,31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Sorong Selatan	0,47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.	Raja Ampat	0,36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.	Tambrau w	0,16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.	Maybrat	0,23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

3.4 Profil Sosial Budaya Provinsi Papua Barat Daya

3.4.1 Suku di Provinsi Papua Barat Daya

Papua Barat Daya termasuk dalam Wilayah Adat Domberay. Wilayah Adat Domberay di Papua Barat Daya terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Tambrau, Maybrat, Sorong Selatan. Arah pengembangan untuk Wilayah Adat Domberay di dalam RPJMN 2020-2024 adalah pengembangan ternak sapi, kopi, kakao, kacang tanah dan tanaman hortikultura. Wilayah adat yang ada di Papua Barat Daya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. 35 Wilayah Adat Domberay di Papua Barat Daya

3.4.2 Budaya Tradisional

Menurut adat, seorang pria yang telah menikah menetap di rumah orang tuanya di tengah-tengah para kerabatnya (yaitu adat virilokal). Kelompok kekerabatan terkecil dalam masyarakat Suku Arfak adalah keluarga luas virilokal yang menghuni satu rumah (*tumitsen*), terdiri dari sepasang suami istri bersama keluarga inti dari 3-5 anak pria mereka. Apabila daya tampungnya terbatas, dengan persetujuan ayah dari anak-anak pria tadi, dibangun rumah yang baru. Satu *tumitsen* biasanya mempunyai 3-5 kamar, sebanyak pasang suami istri yang ada.

Rumah dibangun cukup besar dan berbentuk segi empat dan dinding-dindingnya terbuat dari kulit pohon dan tanpa jendela. Tidak adanya jendela menyebabkan asap pekat dari perapian dari dalam rumah orang Arfak sangat mengganggu pernafasan dan berakibat banyaknya penduduk yang terkena penyakit paru-paru. Atap rumah terbuat dari daun pandan, sedang lantainya dari belahan nibung atau bambu. Pohon yang digunakan untuk tiang tengah rumah disebut *mesiyi* (bahasa Meyah).

Dalam satu rumah biasanya terdapat kamar untuk wanita (*meraja*) dan kamar pria (*meiges*) serta sebuah ruang duduk (*umersa*) di tengah. Suatu rumah dengan suatu tempat khusus untuk upacara dan pesta adat disebut *modambau*, lantai di ruang tengah tak dialasai dengan batang-batang nibung sehingga menari dilakukan di atas tanah.

3.4.3 Sistem Ekonomi dan Mata Pencaharian

Penduduk di Pulau Papua dapat di bedakan menjadi kelompok besar yaitu:

- Penduduk daerah pantai dan kepulauan dengan ciri-ciri umum, rumah diatas tiang (rumah panggung), mata pencaharian menokok sagu dan menangkap ikan.
- Penduduk daerah pedalaman yang hidup pada daerah sungai, rawa, danau dan lembah serta kaki gunung. Pada umumnya bermata pencaharian menangkap ikan, berburu dan mengumpulkan hasil hutan.
- Penduduk daerah dataran tinggi dengan mata pencaharian berkebun beternak secara sederhana.
- Suku yang tidak termasuk penggolongan diatas di sekitar teluk Humboldt hidup dari perikanan, sedangkan pertaniannya merupakan pertanian campuran ubi dan sagu.

3.4.4 Kerajinan dan Kesenian

Ada empat bentuk tarian dalam adat suku ini yaitu:

- *Tup*, merupakan gerakan berputar di tempat, atau berjalan atau berlari yang dilakukan sambil bernyanyi.
- *Weantagawi*, merupakan gerakan dua orang yang saling berhadapan muka sambil menghentakkan kaki di tanah bersama-sama. Gerakan ini diikuti langkah mengikuti irama, maju dua langkah dan mundur dua langkah seirama dengan lagu yang dibawakan.
- *Pipakwean*, merupakan gerakan berlari mondar-mondir di suatu tempat terbatas, seirama dengan lagu yang dibawakan.
- *Tem*, gerakan ini diadakan di dalam rumah, di dalam sinar nyala api. Muda-mudi duduk berhadapan muka, dipisahkan oleh tungku api, sambil bernyanyi kaum pemuda memberi daun kepada pemuda dan sebaliknya.

Selain itu ada tiga macam tarian, yaitu:

- Tarian mudi-mudi
Tarian ini diadakan di lapangan terbuka yang disebut Tup. Dalam tarian ini para penari membentuk lingkaran sambil menyanyikan lagu-lagu asmara. Si pemuda melambai-lambaikan dedaunan

kepada gadis yang disukainya dan bila si gadis menghampiri si pemuda sambil mengikuti irama lagu yang dinyanyikan dan menerima dedaunan yang dilambaikan berarti si gadis juga tertarik pada pemuda tersebut (arama emonggop agewin). Ada tarian muda-mudi yang berlangsung di dalam rumah yang disebut Tem. Para muda-mudi duduk berhadapan dipisahkan oleh tungku api di antara mereka. Di sini mereka yang saling terpaut hatinya menyatakan kasih sayangnya dengan memberikan suatu benda. Tarian ini dapat berlangsung semalam suntuk. Dalam tarian ini para pemuda dan pemudi menyanyikan lagu dan pantun tentang cinta.

- Tarian Pesta
Tarian ini biasanya dilakukan di lapangan terbuka. Orang-orang datang sambil menyanyi lalu masuk ke lapangan pesta. Mereka berdiri membentuk lingkaran dan berputar sambil meneriakkan kata-kata "ka". Kemudian mereka mengadakan tarian Tup yang ditarikan sepanjang pesta. Lagu-lagu yang dibawakan adalah lagu-lagu kegembiraan, kesenangan dan pujian.
- Tarian Perang
Tarian perang mirip dengan tarian pesta. Yang membedakannya adalah lagu-lagu yang dibawakan dalam tarian perang berisi lagu-lagu perjuangan yang membangkitkan semangat juang.

Seni ukir kurang begitu dominan dalam kebudayaan suku di wilayah Papua Barat Daya. Seni ukir terbatas pada mengukir anak panah. Seorang pria Arfak mengukir serta melukis busur dan anak panahnya. Ukiran-ukiran yang khas itu juga dibuat pada peralatan-peralatan perang lainnya. Para wanita dan pria orang Arfak biasanya mengenakan perhiasan yang berupa gelang yang terbuat dari anyaman tali rotan dan disebut *liya*, *de'maya* (kalung), *mi'yepa* (hiasan kepala yang dianyam memakai manik-manik), *breyea* (anyaman kulit dan bulu burung atau kasuari untuk hiasan kepala). Hiasan dan busana bagi wanita adalah rumbai-rumbai yang dibuat dari alang-alang dan serat kulit kayu yang diikatkan di pinggang dan kalung manik-manik (*gemsya*). Serat-serat diambil dari batang pohonnya kemudian dipintal menjadi benang yang kemudian dengan ini digunakan untuk membuat berbagai barang kebutuhan hidupnya.

Warna-warna yang mendominasi yang digunakan dalam kerajinan adalah putih, hitam, merah dan kuning. Warna putih dibuat dari tanah liat, isi keladi putih yang membusuk atau abu dari tungku api. Warna hitam dibuat dari asap lemak babi dan damar, arang dapur atau dari buah-buahan hutan. Warna merah dibuat dari tanah merah yang digali dari dalam tanah. Sedangkan warna kuning dibuat dari akar tumbuh-tumbuhan dan tali-talian hutan.

3.4.5 Ragam Bahasa

Di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat tercatat ada 310 bahasa yang digunakan masyarakatnya. Bahasa-bahasa di Pulau Papua dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan besar yang oleh ahli linguistik disebut *phylum* (fila), yaitu fila bahasa-bahasa Melanesia dan fila bahas-bahasa non-Melanesia. Di seluruh Papua dapat digolongkan ke dalam bahasa-bahasa Melanesia. Sedangkan bahasa-bahasa non-Melanesia yang digunakan di Papua adalah khas Papua yang tidak mempunyai hubungan linguistik dengan bahasa-bahasa di luar Papua dan Papua Nugini, kecuali dengan beberapa bahasa di pulau Timor, Alor, Pantar dan Halmahera Utara (Koentjaraningrat, 1994).

Berdasarkan pembagian fila, bahasa-bahasa di Non-Melanesia di Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Barat terdiri dari 9 fila, yaitu: 1) fila Trans Papua, 2) fila Papua Barat, 3) fila Teluk Cendrawasih, 4) fila Kepala burung bagian Timur tingkat golongan, 5) fila Warnbori tingkat isolat, 6) fila Taurap (Borumeso) tingkat isolat, 7) fila Pauwi tingkat isolat, 8) fila Sko tingkat golongan, fila Kuomtari tingkat golongan. Persebaran fila bahasa-bahasa Melanesia, yaitu daerah bagian belakang leher burung dan pulau-pulau yang berhadapan dengan daerah pantai Waropen, Waropen Bawah dan Atas di sekitar Waren, derah Yapen Timur dan Barat serta pulau-pulau sekitarnya, daerah kepulauan Biak-Suntori, Pulau Numfor derah sekitar Manokwari, sebagian besar kepulauan Raja Ampat, sebagian derah Fakfak dan Kaimana serta kepulauan kepulauan sekitar Kaimana. Menurut ahli bahasa bernama C. Loukotka telah melakukan upaya untuk mengklasifikasikan kebhinekaan bahasa di Papua dan dimuat secara singkat oleh A.M. Moeliono dalam bab berjudul "Ragam bahasa di Irian Barat" dalam buku berjudul Penduduk Irian Barat (1963: hal. 33-35). Menurut klasifikasi Loukotka ada paling sedikit 31 golongan bahasa di Papua. Di dalamnya terdapat 234 bahasa yang masih diklasifikasikan juga secara geografis, yang mendekati pembagian administratif dan provinsi ke dalam 10 kabupaten yaitu:

- a. Bahasa-bahasa di Kabupaten Sorong
- b. Bahasa-bahasa di Kabupaten Papua Barat Daya

3.4.6 Kepemilikan Tanah Adat

Kepemilikan tanah bagi suku di Papua Barat Daya bersifat komunal. Sehingga, jika terjadi perpindahan kepemilikan atas tanah,

perpindahan itu menjadi urusan komunal atau urusan semua anggota suku bukan urusan individu semata. Hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam dan keluar disebut sebagai *hak ulayat*. Menurut Maria Sumardjono (2006) beberapa ciri pokok kelompok masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perseorangan, mempunyai batas wilayah tertentu, mempunyai kewenangan tertentu. Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak). Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk:

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk mengatur pemukiman, bercocok tanam, dan lain-lain), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain) dan pemeliharaan tanah.
- 2) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subjek tertentu).
- 3) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan dan lain-lain).

Hubungan antara masyarakat hukum adat dan tanah/wilayahnya adalah hubungan menguasai bukan memiliki. UUPA (Undang-Undang Peraturan Agraria) tidak menentukan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat. Tetapi mengacu pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, dapat dikatakan penentu kriteria-kriteria masih ada atau tidaknya hak ulayat dilihat pada tiga hal, yakni:

- 1) Subyek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat itu yang memenuhi karakteristik tertentu;
- 2) Obyek hak ulayat, yakni tanah wilayah yang merupakan ruang tempat hidup dan bekerja (*Lebensraum*) mereka;
- 3) Adanya kewenangan tertentu dari masyarakat hukum adat itu untuk mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan dengan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian wilayahnya.

Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA (pasal 3) merupakan hal yang wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Penentuan kriteria keberadaan hak ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan mengikutsertakan

masyarakat hukum adat, LSM dan instansi terkait dengan sumber daya alam.

Menurut Maria Sumardjono (2006), hak ulayat tidak bersifat eksklusif. Seperti juga hak atas tanah lainnya, dalam pelaksanaannya hak ulayat mengenal adanya fungsi sosial. Hal itu berarti bila tanah ulayat diperlukan untuk kepentingan umum ataupun kepentingan lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, maka hak ulayat dapat diberikan pada pihak lain. Pemberian bidang tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat dapat ditempuh dengan cara dilepaskan selamanya atau diberikan penggunaannya dalam jangka waktu tertentu. Dalam upaya mencapai kesepakatan, kompensasi yang diberikan kepada masyarakat hukum adat hendaknya mempertimbangkan hilangnya atau berkurangnya sumber daya alam yang menjadi penghidupannya dan hilangnya pusat-pusat budaya dan religi masyarakat hukum adat tersebut. Manfaat yang diperoleh pihak luar hendaknya juga dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Ketika berhadapan dengan hak ulayat diperlukan kesadaran dari pihak luar yang berarti harus membuka diri untuk memahami kesadaran hukum suatu masyarakat (yang dalam hal ini masyarakat Papua Barat) yang terwujud dalam tindakan nyata sehari-hari berangkat dari sudut pandang dan pola pikir masyarakat yang bersangkutan.

Aditjondro J. (2003) mengatakan bahwa dalam pengamatannya selama 10 tahun di Pulau Papua (1977-1987) sering kali protes-protes warga masyarakat terhadap pemerintah atau kelompok lain hanya dilandasi kekhawatiran mereka bahwa sumberdaya alam mereka tak akan dapat memenuhi kebutuhan mereka maupun anak cucu mereka, atau para pendatang memperlakukan sumber daya alam mereka tidak sesuai dengan tradisi penduduk setempat. Bukan karena mereka mau mendirikan satu negara sendiri yang lepas dari Republik Indonesia.

Pembangunan di Indonesia Bagian Timur khususnya Papua Barat Daya sebaiknya dikhususkan pada segi-segi yang antropologis, sosiologis dan berwawasan lingkungan. Misalnya, pemanfaatan hutan di Papua, bukan dengan cara *big logging company* (pembabatan hutan oleh perusahaan besar) ataupun HPH (Hak Penguasaan Hutan), tapi oleh komunitas setempat. Mengambil pembelajaran dari Missi atau LSM yang telah membangun orang Papua dengan logika dan dinamika orang Papua sendiri. Jadi pembangunan di Papua Barat Daya berdasarkan karakteristik dan budaya yang terdapat pada masyarakatnya. Dengan kata lain,

pengembangannya lebih ditekankan pada pendidikan dan ketrampilan berdasarkan karakteristik lingkungan setempat. Pembangunan di Papua Barat Daya sebaiknya ditata bersama pemerintah setempat. Ahli antropologi, ahli ekonomi maupun ekologi perlu dilibatkan untuk merencanakan unit-unit kegiatan yang fungsional. Untuk pengembangan ekonomi di Papua Barat Daya, pola-pola ekonomi harus ditata dengan lebih kreatif dan dikembangkan berdasarkan karakteristik ekonomi dan kultur etnis setempat.

Norma yang berlaku dalam adat suku-suku ini adalah "menjaga keharmonisan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya, termasuk roh-roh yang hidup di alam serta keharmonisan antara manusia dengan arwah leluhurnya". Norma tersebut di atas mengandung pengertian bahwa bila mengabaikan keharmonisan hubungan dengan sesama, maka akan selalu berada dalam konflik dengan sesama.

Walau tidak ada hukum formal dalam adat suku-suku ini, tapi jika ada orang yang melanggar suatu hukum adat akan dihukum oleh melalui pengadilan adat yang terdiri dari para kepala klan, kepala kampung, kepala desa dan beberapa tokoh orang tua lainnya. Ada satu hukuman yang sangat berat yang berlaku dalam adat suku di Papua Barat Daya yaitu dibunuh tanpa boleh membela diri atau mendapat pembelaan dari siapa pun. Hukuman ini disebut "Hanom-tagawim". Hukuman ini ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan tindakan *hanom*, yakni berzina atau melakukan perzinahan dengan seseorang yang masih ada hubungan kekerabatan yang dekat (*incest*). Bersetubuh dengan saudara sendiri atau istri orang lain.

Rekap Profil Sosial Budaya Papua Barat Daya

Tabel 3.186 Profil Sosial Budaya Papua Barat Daya

No.	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Nama Desa Adat	Komoditas Seni/ Budaya Unggulan yang bernilai ekonomi	Besar Produksi Komoditas Unggulan	Tujuan Pemasaran Komoditas Seni Unggulan	Festival / Perayaan / Kegiatan Kemasyarakatan / Keagamaan Desa	Frekuensi Pelaksanaan Perayaan	Potensi / Hambatan Pembangunan karena Budaya / Adat Istiadat
1.	Kota Sorong	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Sorong	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Sorong Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.	Raja Ampat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.	Tambrauw	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.	Maybrat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

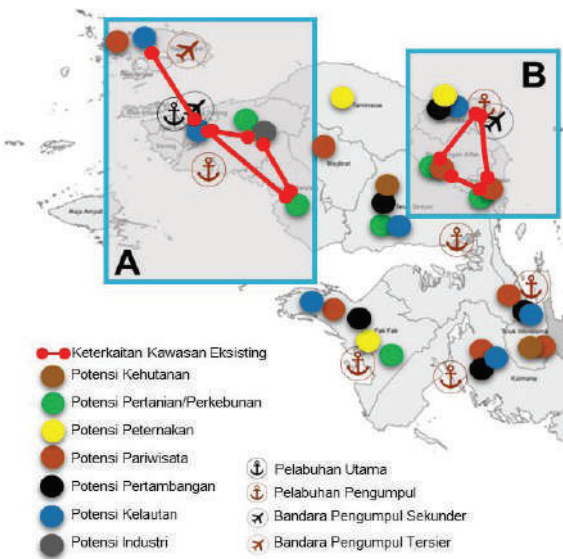
3.5 Profil Interaksi Antar Kawasan di Provinsi Papua Barat Daya

Secara keseluruhan interaksi antar kabupaten/kota di Pulau Papua dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 3. 197 Interaksi Antar Kawasan di Provinsi Papua Barat Daya

Interaksi Kawasan	Keterkaitan Fungsional
A PAPUA BARAT DAYA Kota Sorong – Kab. Sorong – Kab. Sorong Selatan – Kab. Raja Ampat	Wilayah Adat Bomberay Ketersediaan jaringan jalan yang menghubungkan Sorong – Sorong Selatan Pergerakan ulang alik Kota Sorong – Kab. Sorong Pergerakan wisata Kota Sorong – Kab. Raja Ampat Keterkaitan secara ekonomi (pergerakan logistik dari Kota Sorong menuju Kabupaten yg terkait) Waktu tempuh Kota Sorong – Kab. Sorong – Kab. Raja Ampat (< 2 jam) Waktu tempuh Kota Sorong – Kab. Sorong Selatan ± 5 jam, namun pergerakan per tahun > 2.500

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Gambar 3. 36 Interaksi Antar Kawasan dalam Provinsi Papua Barat Daya

Sumber: Hasil Analisis, 2022

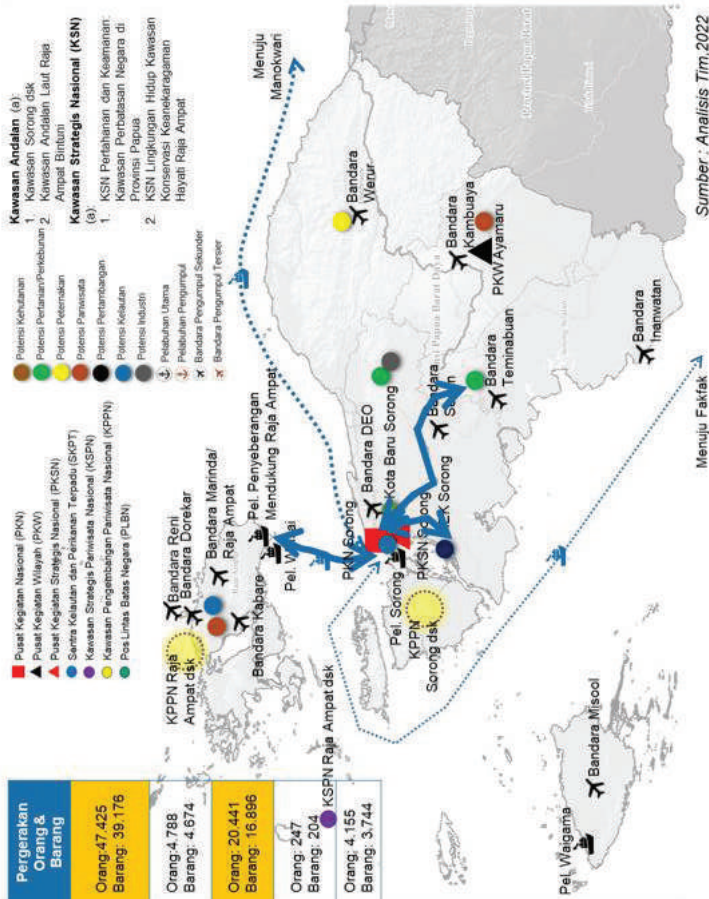
Interaksi antar kawasan merupakan keterkaitan fungsional kawasan yang tercipta dari adanya keterkaitan secara sosial budaya, ekonomi, pergerakan transportasi, dan keterjangkauan wilayah. Di Papua Barat Daya interaksi antar kawasan eksisting terbentuk dari adanya pergerakan transportasi dan kegiatan ekonomi melalui utamanya pada transportasi darat. Kota Sorong sebagai hub utama di Papua Barat Daya, menjadi penggerak perekonomian untuk kabupaten di sekitarnya, utamanya Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan dengan moda transportasi darat serta Kabupaten Raja Ampat dengan moda transportasi laut. Terdapat interaksi secara ekonomi pada keempat kabupaten tersebut, yaitu dengan adanya perdagangan kebutuhan barang pokok dari Kota Sorong menuju ketiga kabupaten lainnya. Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw sudah dapat diakses dengan transportasi darat, namun belum ada interaksi dengan Kota Sorong dan sekitarnya. Secara detail, interaksi antar kawasan di Papua Barat Daya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Pola interaksi antar Kabupaten di Papua Barat Daya:

- Kota Sorong menjadi pusat pergerakan orang/penumpang di Papua Barat Daya
- Interaksi antar kawasan di dalam wilayah Papua Barat Daya dari Kota Sorong menuju Kabupaten Sorong (Aimas) $\approx \pm 40$ menit serta dari Kota Sorong menuju Kabupaten Sorong Selatan (Teminabuan) $\approx \pm 4,5$ jam. Kabupaten Raja Ampat terhubung dengan Kota Sorong melalui transportasi laut dengan waktu tempuh ± 2 jam. Kab. Maybrat (Kumurkek) terhubung dengan Kota Sorong melalui transportasi darat dengan waktu tempuh ± 6 jam. Sedangkan Kab. Tambrauw (Fef) terhubung dengan Kota Sorong dengan waktu tempuh ± 4 jam.
- Interaksi eksternal diwujudkan dari adanya pergerakan penumpang dan barang dari Kota Sorong menuju Kabupaten Manokwari, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Fak-fak, Kota Ambon, Kota Jayapura, dan Kota Ternate
- Interaksi kawasan strategis terjadi antara pusat kegiatan perkotaan dengan kawasan pariwisata (KSPN Raja Ampat) serta bandara/pelabuhan penghubungnya.
- Pergerakan transportasi laut internal Papua Barat Daya didominasi Sorong $\leftrightarrow$ Raja Ampat
- Pergerakan transportasi laut eksternal Papua Barat Daya, didominasi Sorong $\leftrightarrow$ Ambon dan Sorong $\leftrightarrow$ Manokwari, sedangkan pergerakan transportasi udara didominasi Sorong $\leftrightarrow$ Jakarta

Kawasan Strategis	Jarak (km)	Waktu Tempuh (jam)	Komoditas	Pergerakan Orang & Barang
Kota Sorong	Kab. Sorong	19,4	37 menit	Orang: 47.425 Barang: 39.178
Kota Sorong	Kab. Sorong Selatan	159	4 jam 35 menit	Pergerakan penumpang & kebutuhan barang pokok dari Kota Sorong – Teminabuan
Kota Sorong	Kab. Maybrat	177	4 jam 36 menit	Pergerakan penumpang & kebutuhan barang pokok dari Kota Sorong – Maybrat
Kota Sorong	Kab. Tambrauw	168	4 jam 10 menit	Pergerakan penumpang & kebutuhan barang pokok dari Kota Sorong – Tambrauw
Kota Sorong	Kab. Raja Ampat	-	2 jam	Pergerakan wisata dari Kota Sorong – Raja Ampat

- a. Kota Sorong menjadi pusat pergerakan orang/penumpang di Provinsi Papua Barat Daya
- b. Interaksi antar kawasan di dalam Provinsi Papua Barat Daya dari Kota Sorong ke Kab. Sorong (Alimas), Kab. Sorong Selatan (Teminabuan), Kab. Raja Ampat terhubung dengan Kota Sorong melalui transportasi laut. Kab. Maybrat (Kumurek) terhubung dengan Kota Sorong melalui transportasi darat. Sedangkan Kab. Tambrauw (Fef) terhubung dengan Kota Sorong ke Kab. Manokwari, Kab. Blak Numfor, Kab. Fak-fak, Kota Ambon, Kota Jayapura dan Kota Ternate
- d. Interaksi kawasan strategis: pusat kegiatan perkotaan dengan kawasan pariwisata (KSPN Raja Ampat) serta bandar/pelabuhan penghubungnya.
- e. Pergerakan transportasi laut internal Provinsi Papua Barat Daya didominasi Sorong ↔ Raja Ampat
- f. Pergerakan transportasi laut eksternal Provinsi Papua Barat Daya, didominasi Sorong ↔ Ambon dan Sorong ↔ Manokwari, sedangkan pergerakan transportasi udara didominasi Sorong ↔ Jakarta



Gambar 3. 37 Interaksi Antar Kawasan Papua Barat Daya

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 3. 38 Rekapitulasi Interaksi antarkawasan Papua Barat Daya

No.	Kawasan Strategis		Jarak (km)	Waktu	Komoditas
1	Kota Sorong	Kab. Sorong	19,4	37 menit	Barang kebutuhan pokok manusia, kehutanan, dan perikanan
2	Kota Sorong	Kab. Sorong Selatan	159	4 jam 35 menit	kebutuhan barang pokok
3	Kota Sorong	Kab. Maybrat	177	4 jam 46 menit	kebutuhan barang pokok
4	Kota Sorong	Kab. Tambrau	168	4 jam 10 menit	kebutuhan barang pokok
5	Kota Sorong	Kab. Raja Ampat	-	2 jam	wisata

3.6 Potensi Unggulan di Provinsi Papua Barat Daya

A. Potensi Pariwisata

Fokus pengembangan pada kegiatan usaha hiburan dan rekreasi, serta pengoperasian/ pengelolaan kawasan Taman Nasional Raja Ampat yang telah menjadi prioritas memiliki potensi besar untuk memberikan dampak pengganda pendapatan dengan banyaknya kedatangan wisatawan. Selain sektor jasa lainnya, kebijakan juga dapat difokuskan pada sektor pendidikan. Hal ini bisa dilakukan dengan menyediakan berbagai lembaga pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang akan memiliki daya jual yang tinggi sejalan dengan tingkat pendidikan yang telah dijalani.

Pengembangan pariwisata taman nasional Raja Ampat yang terhitung memiliki angka pengganda tenaga kerja dan derajat kepekaan yang besar. Wilayah utama pariwisata Papua Barat Daya yang telah dikenal masyarakat adalah Kepulauan Raja Ampat, sebagai rumah bagi 75% spesies koral yang ada di dunia dan 1.500 spesies ikan termasuk beragam jenis hiu, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Realitas wilayah tersebut memberikan konsekuensi pada besarnya potensi sebagai aset pengembangan, khususnya pariwisata kepulauan dan bahari berbasis ekosistem (*ecotourism*).

B. Potensi Sektor Industri

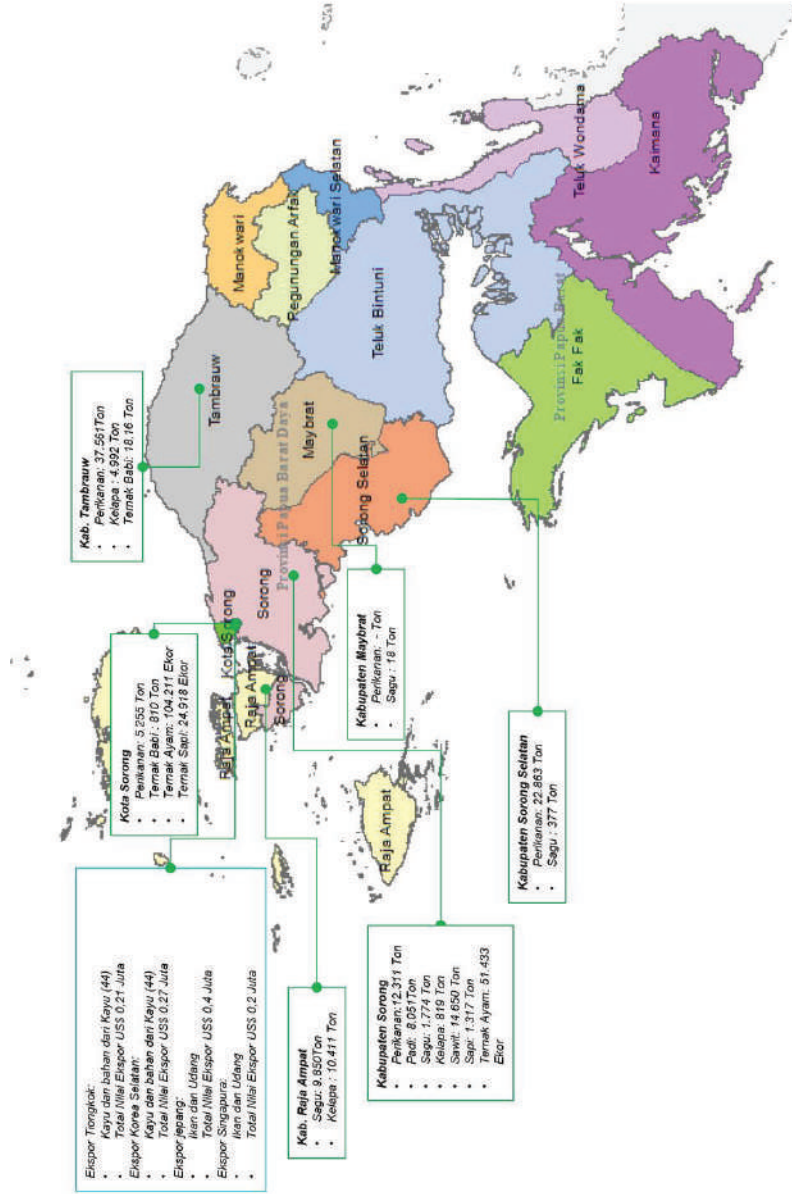
Selain potensi alam berupa kandungan minyak dan gas, mineral logam (tembaga, emas, mangan, aluminium, nikel, cobalt, corum dan besi), serta mineral industri dan golongan C (bahan konstruksi, batu gamping, marmer, asbes, dan gypsum) yang berlimpah dan menjadi objek utama investasi sektor pertambangan, Papua Barat Daya tercatat juga memiliki potensi investasi lainnya. Salah satunya adalah industri pengolahan (non migas) yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong.

KEK Sorong dikelola oleh PT. Malamoi Olom Wobok (MOW) KEK Sorong dengan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Sorong. Di dalam KEK Sorong telah tersedia listrik yang berasal dari PLTMG dengan kapasitas 100 MW dengan sumber jaringan pipa gas serta didukung 2 unit gardu listrik dan 5 BTS Telepon.

Selain itu, pada areal KEK Sorong juga tersedia fasilitas Jetty untuk angkutan kapal curah kering serta sebuah dermaga Kapal Ro-ro. Fasilitas pendukung lainnya adalah Pelabuhan Arar seluas 4 Ha dan memiliki dermaga beton sepanjang 100m yang berlokasi di kawasan KEK Sorong atau berjarak < 50 km dari pelabuhan utama Sorong.

Industri yang dimungkinkan untuk dibangun dan beroperasi di dalam KEK Sorong misalnya, industri pengalengan ikan tuna dan cakalang. Menurut perkiraan BKPM, dengan biaya produksi pada industri ini yang diperkirakan tumbuh 5,1 persen per tahun akan didapatkan internal rate of return (IRR) sebesar 27,58 persen dan payback period 7 tahun. Melalui sistem produksi pengalengan tuna yang bersifat *make to order*, utilitas pabrik akan beroperasi selama 300 hari dalam setahun dan tidak selalu memproduksi 100 persen, namun demikian industri ini dapat menyerap tenaga kerja minimal sebanyak 149 orang. Adanya industri pengalengan ikan yang memiliki angka pengganda output besar akan mendorong pertumbuhan sektor usaha lain seperti pabrik tepung tulang ikan, pabrik pakan ternak, pabrik terasi, industri kaleng serta industri garam.

RFW Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025-2034



Peta 3. 38 Peta Sebaran Potensi Unggulan Papua Barat Daya

Sumber: Hasil Analisis, 2024.



BAB 4

PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR



4.1.1 Infrastruktur Bangunan Tampungan Air

Bangunan tampungan air yang terdapat di Provinsi Papua Barat Daya yaitu berupa bendung, sebagaimana tertera pada Tabel berikut:

Tabel 4. 1 Bendung di Provinsi Papua Barat Daya

Lokasi	Bangunan Tampungan Air	Kapasitas Pengairan (Ha)
Kabupaten Sorong	Bendung Mariyat	1.500

Sumber: Data Ditjen SDA, Kementerian PUPR Tahun 2019

Tabel 4. 2 Daerah Irigasi di Provinsi Papua Barat Daya

Kabupaten/Kota	Nama Infrastruktur	Kapasitas Volume (m ³)
Kota Sorong	Embung Klalele	14.393
Kota Sorong	Embung Klasaman	44.866
Kota Sorong	Embung Tanjung Kasuari	6.570
Kabupaten Sorong	Embung Klamalu I	7.593
Kabupaten Sorong	Embung Klamalu II	14.905
Kabupaten Sorong	Embung Sidodadi	11.431
Kabupaten Sorong	Embung Sidomulyo	11.430
Kabupaten Sorong	Embung Majaran I	13.276
Kabupaten Sorong	Embung Majaran II	9.190
Kabupaten Sorong	Embung Walal	6.838
Kabupaten Sorong	Embung Malaos I	24.797
Kabupaten Sorong	Embung Malaos 2	7.777
Kabupaten Sorong	Embung Klasari	9.973
Kabupaten Sorong	Embung Brebes	34.400
Kabupaten Sorong	Embung Matawolot	38.752
Kabupaten Sorong	Embung Sisipan I	13.860
Kabupaten Sorong	Embung Sisipan II	31.542
Kabupaten Sorong	Embung Majener 1	36.328
Kabupaten Sorong	Embung Majener 2	30.300
Kabupaten Sorong	Embung Aibo	23.177
Kabupaten Sorong	Embung Makbalin	12.461
Kabupaten Sorong	Embung Wonosobo	22.570
Kabupaten Raja Ampat	Embung Kalobo	38.812
Jumlah		465.241

Sumber: Studio Peta Kementerian PUPR, Oktober Tahun 2022

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, sasaran strategis kapasitas tampung per kapita tahun 2022 sebesar 57,1 m³/kapita, sedangkan tahun 2024 sebesar 58,5 m³/kapita. Kinerja Bangunan Tampungan Air pada saat ini yaitu sebagai berikut:

Total Volume Tampung (m ³ /tahun)	563.240
Total Volume Tampung per tahun (m ³ /tahun)	205.582.837

Penduduk Tahun 2022 (kapita)	1.024.616
Kapasitas Tampung Eksisting (m ³ /kapita/tahun)	200,64
Sasaran Strategis Tahun 2022, Renstra Dit.SDA 2019-2024 (m ³ /kapita/tahun)	57,10
Kinerja Eksisting terhadap Sasaran Strategis TA 2022, Renstra Dit.SDA 2019-2024 (m ³ /kapita/tahun)	+ (Surplus)
KINERJA	351,39%

4.1.2 Infrastruktur Penyediaan Irigasi

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Papua, Pemerintah mengembangkan daerah irigasi yang dilengkapi dengan infrastruktur bendung dan jaringan irigasi. Status Daerah Irigasi (DI) di Indonesia telah ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.14/PRT/M/2015. Luas daerah irigasi di Pulau Papua berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.14/PRT/M/2015 adalah sebesar 103.975 Ha dengan perincian 55.006 Ha DI kewenangan Pemerintah Pusat, 27.895 Ha DI Kewenangan Pemerintah Provinsi dan 21.074 Ha DI Kewenangan Kabupaten. Adapun daerah irigasi yang terdapat di Provinsi Papua Barat Daya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Daerah Irigasi di Provinsi Papua Barat Daya

Lokasi	Nama Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Kewenangan
Kab. Sorong	Klasafet	1.500	Pemerintah Provinsi
Kab. Sorong	Klasagum	1.500	Pemerintah Provinsi
Kab. Sorong	Majaran	1.235	Pemerintah Provinsi
Kab. Sorong	Majener	1.235	Pemerintah Provinsi
Kab. Sorong	Makbusun	1.200	Pemerintah Provinsi
Kab. Sorong	Mariyat	1.500	Pemerintah Provinsi
Kab. Sorong	Matawolot	1.140	Pemerintah Provinsi
Kab. Sorong	Waigo/Moswaren	1.500	Pemerintah Provinsi
Kab. Fakfak	Bomberay	1.200	Pemerintah Provinsi

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi

Berdasarkan tabel di atas, luas Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu 9.666 hektare. Total kapasitas pengairan bendung yang sudah ada untuk Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu sebesar 6.450 hektare (bersumber dari Bendung Warbiadi, Bendung Waroser, dan Bendung Wariori), dengan demikian kinerja pengairan Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat saat ini sebesar 66,73%.

Adapun Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu 15.010 hektare. Total kapasitas pengairan bendung yang sudah ada untuk Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu sebesar 1.500 hektare (bersumber dari Bendung Mariyat),

dengan demikian kinerja pengairan Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat saat ini sebesar 10%.

4.1.3 Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air

Infrastruktur untuk penanggulangan daya rusak air wilayah Pulau Papua adalah wilayah dengan kerawanan bencana hidrometeorologi yang tinggi, baik berupa bencana banjir maupun bencana abrasi yang menyebabkan kerusakan pantai. Kebutuhan infrastruktur pengendalian banjir berupa infrastruktur tanggul penahan banjir ataupun bendungan multifungsi sangat dibutuhkan pada wilayah Pulau Papua, khususnya pada wilayah yang sering mengalami kejadian bencana banjir.

Selain penanganan kejadian banjir, Pemerintah juga melakukan upaya penanganan terhadap bencana abrasi yang terjadi pada wilayah pesisir Pulau Papua maupun pada pulau-pulau kecil yang berada di sekitar Pulau Papua. Infrastruktur pengendalian daya rusak air yang terdapat di Provinsi Papua Barat Daya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Infrastruktur Pengendalian Daya Rusak Air di Provinsi Papua Barat Daya

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Jenis Bangunan	Panjang (m)
Kota Sorong	Sorong Barat	Tanjung Kasuari	Tembok Laut	800
Kota Sorong	Sorong Barat	Tanjung Kasuari	Tembok Laut	496
Kota Sorong	Sorong Barat	Tanjung Kasuari	Tembok Laut	379
Kota Sorong	Sorong Barat	Tanjung Kasuari	Pemecah Gelombang	400
Kota Sorong	Sorong Barat	Tanjung Kasuari	Pemecah Gelombang	536
Sorong	Salawati Selatan	Duriankari	Pemecah Gelombang	521

Sumber: Data Ditjen SDA, Kementerian PUPR Tahun 2022

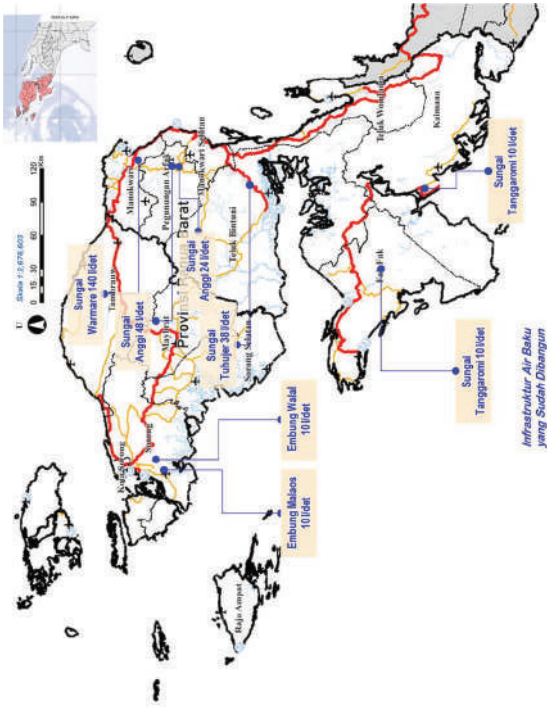
4.1.4 Infrastruktur Sumber Air Baku

Dalam rangka mendukung sistem penyediaan air bersih di Pulau Papua, pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai Papua, Balai Wilayah Sungai Papua Barat dan Balai Wilayah Sungai Papua Merauke telah dan sedang mengembangkan sistem jaringan air baku yang meliputi bangunan pengambil (intake) dan jaringan transmisi air baku. Sumber air baku yang terdapat di Provinsi Papua Barat Daya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Sumber Air Baku di Provinsi Papua Barat Daya

Kota/ Kabupaten	Kecamatan	Desa/kelurahan	Sumber	Air Baku	Debit (l/detik)	Penduduk Tahun 2022	Kebutuhan Tahun 2022 (l/detik)	GAP	Kinerja (%)
Kab. Sorong	Salawati	Malaus	Embung Malaos	Air Baku Embung	10	95.067	85,27	65,27	23,45
Kab. Sorong	Salawati	Walal	Embung Walal	Air Baku Embung	10				

Sumber: Ditjen SDA Tahun 2022, diolah Tahun 2022



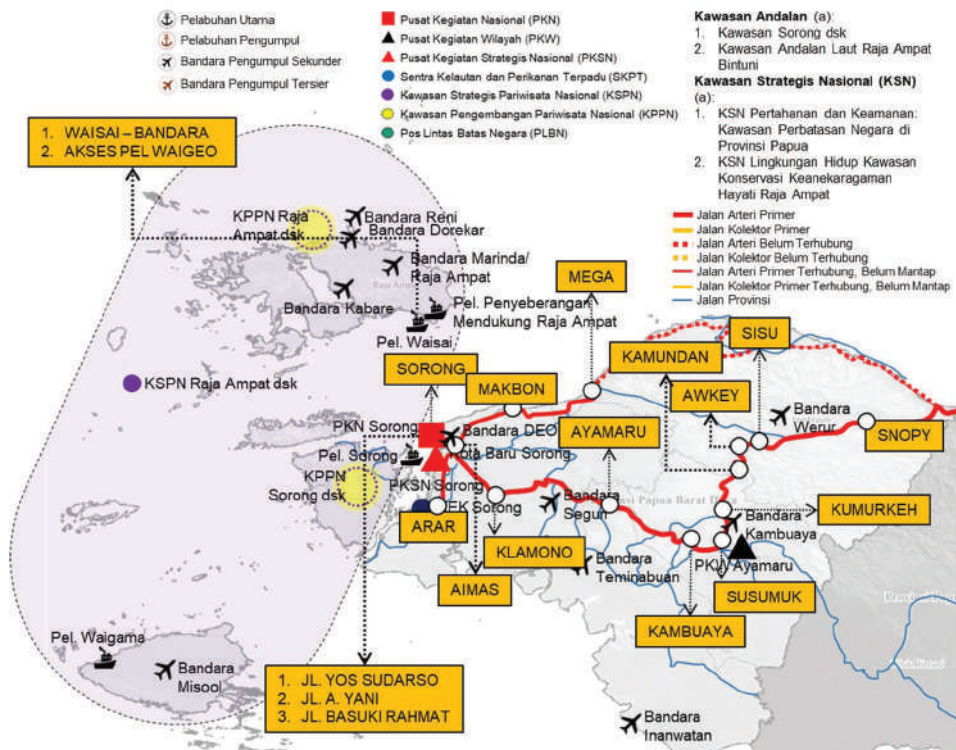
Gambar 4. 2 Sumber Air Baku di Provinsi Papua Barat Daya
Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.2 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Jalan dan jembatan merupakan salah satu infrastruktur PUPR yang menjadi *backbone* dalam pengembangan wilayah. Dengan adanya infrastruktur jalan dan jembatan dapat membuka keterisolasian wilayah, menurunkan waktu tempuh, menurunkan biaya transportasi, dan dalam rangka pemerataan wilayah.

4.2.1 Infrastruktur Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan dan jembatan di Provinsi Papua Barat Daya dan persentase pembangunannya dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini.



Gambar 4. 3 Sistem Jaringan Jalan dan Konektivitasnya dengan Kawasan Strategis di Papua Barat Daya

Sistem jaringan di atas adalah sistem jaringan jalan dengan pusat kegiatan perkotaan di PKN Sorong. Konektivitas antara PKN Sorong dengan pusat kegiatan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konektivitas antara PKN Krong dengan PKW di sekitarnya:

- PKN Sorong – PKW Manokwari : Jl. Sorong – Manokwari
- PKN Sorong – PKW Ayamaru : Jl. Sorong – Susumuk

Konektivitas dengan kawasan strategis di sekitar Sorong dan sekitarnya antara lain:

- KSPN Raja Ampat dsk: Jl. Waisai – Bandara & Akses Pel. Waigeo dan terhubung transportasi laut

Konektivitas dengan bandara dan pelabuhan di Papua Barat Daya:

- Bandara Pengumpul Sekunder DEO: Jl. Basuki Rahmat
- Bandara Pengumpul Tersier Marinda/Raja Ampat: Jl. Waisai – Bandara
- Bandara Pengumpan sudah terakses jalan: Segun, Reni, Dorekar, Misool, Kabare, Teminabuan, Werur, Kambuaya, dan Inanwatan
- Pelabuhan Utama Sorong: Jl. Ahmad Yani
- Pelabuhan Penyeberangan Raja Ampat: Jl. Akses Pel. Waigeo

4.2.2 Kondisi Tingkat Pelayanan Jalan dan Waktu Tempuh

Tingkat pelayanan jalan dan waktu tempuh di Provinsi Papua Barat Daya diuraikan secara mendetil dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Tingkat Pelayanan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya

No	Ruas Jalan	Target (km)	Terbang un	Perkerasan Jalan			Kemantapan		IRI	VCR	Waktu Tempuh
				Aspal	Tanah	Rigid	km	%			
1	Aimas (Km 23) - Pel. Arar (Sorong)	16.9	16.9	12.22	0	4.68	15.09	89.26	6.41	0.42	N/A
2	Sorong - Makbon	36	36	34.59	0	1.41	31.88	88.56	6.52	0.065	N/A
3	Makbon - Mega	55	55	55	0	0	26.49	48.16	10.63	0.04	N/A
4	Waisai - Bandara	6.15	6.15	6.15	0	0	6.05	98.4	4.3	0.22	N/A
5	Jln. Yos Sudarso (Sorong)	1.59	1.59	1.59	0	0	1.59	100	3.54	0.219	N/A
6	Jln. A. Yani (Sorong)	5.07	5.07	5.07	0	0	5.07	100	4.21	0.131	N/A
7	Jln. Basuki Rahmat (Sorong)	11.66	11.66	11.66	0	0	11.56	99.13	4.41	0.643	N/A
8	Bts. Kota Sorong - Aimas – Klamono	29.67	29.67	13.48	0	16.19	25.47	85.85	6.2	0.153	N/A
9	Klamono - Bts. Kab. Sorong Selatan	60.2	60.2	10.28	0	49.92	23.11	38.39	8.05	0.09	N/A
10	Bts. Kab. Sorong Selatan – Kambuaya	67.97	67.97	67.97	0	0	49.18	72.35	5.71	0.11	N/A
11	Kambuaya – Susumuk	25.86	25.86	25.86	0	0	16.38	63.34	5.39	0.02	N/A
12	Susumuk – Kumurkek	12.45	12.45	12.45	0	0	8.63	69.31	5.44	0.025	N/A
13	Kumurkek - Ayawasi – Senopi	137.8	137.8	137.17	0	0.63	86.96	63.11	7.24	0.02	N/A
JUMLAH		466.32	466.32	393.49	0	72.83	307.46	23.18	78.05	2.16	

Sumber: Hasil Analisis, 2023/2024

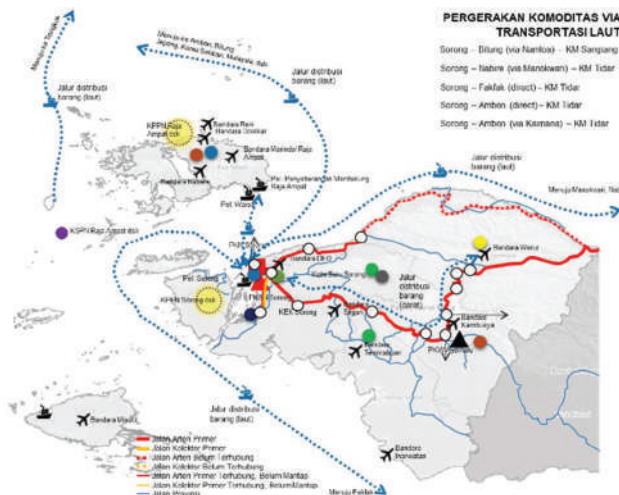
Dilihat dari VCR dengan rata-rata nilai dibawah 0,05 maka dapat dilihat bahwa lalu lintas di Provinsi Papua Barat Daya masih dalam kondisi lancar tanpa adanya tundaan maupun perlambatan. Sedangkan dilihat dari kemantapan jalan, sesuai dengan target bina marga bahwa kemantapan jalan pada Tahun 2024 adalah sebesar 97%. Apabila Nilai IRI > 8 berarti kondisi jalan dalam kondisi rusak dan perlu perbaikan, beberapa ruas yang memerlukan perbaikan antara lain:

1. Makbon – Mega
2. Klamono – Batas Kab. Sorong Selatan

Konektivitas jalan dan jembatan juga berfungsi untuk mendukung hilirisasi produk unggulan dari sentra produksi menuju ke outlet yang ada di Provinsi Papua Barat Daya.

4.2.3 Jalur Distribusi Komoditas Unggulan

Jalur distribusi komoditas unggulan di Papua Barat Daya dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Hasil Analisis, 2022

Gambar 4. 4 Jalur Distribusi Komoditas Unggulan di Papua Barat Daya

1. Ekspor buah merah, nikel (Pulau Gag,Kep. Raja Ampat), kelapa sawit (Kab. Sorong dan Sorong Selatan), hasil kehutanan dan perkebunan (sagu) (Kab. Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, dan Maybrat), perikanan tangkap yaitu tuna, cakalang, marlin, tongkol, tenggiri dan cucut, udang beku, perkebunan (biji pala, oil palm kernel, bunga pala, minyak sawit mentah, kopra, durian, alpukat, pisang, buah merah dan sarang semut) melalui Pelabuhan Sorong.
2. Jalur distribusi komoditas di dalam Provinsi Papua Barat Daya sebagian besar distribusi kebutuhan pokok dari Kota Sorong menuju ke Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw
3. Pariwisata sebagai potensi unggulan menghasilkan distribusi orang dari Kota Sorong ke Raja Ampat.

4.3 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman

4.3.1 Sebaran Sistem Penyediaan Air Minum

Berdasarkan data SIMSPAM Kementerian PUPR diketahui persentase keterlayanan akses air minum di Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2022 berada pada nilai 17,93 %, sedangkan target Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 95,9 % atau masih ada selisih sebesar 77,97% sedangkan Visium PUPR tahun 2030 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keterlayanan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya masih harus ditingkatkan kembali demi terpenuhinya target nasional dan target Pemerintah Provinsi.

Tabel 4. 7 Presentase Akses Air Minum Layak Provinsi Papua Barat Daya

No	Kabupaten/Kota	Akses Layak	Tidak Ada Akses	Gap dengan Target Renstra PUPR 2022 (akses layak 95,9%)	Gap dengan Target Visium PUPR 2030 (akses layak 100%)
		(%)	(%)		
1	Kota Sorong	24,57	75,43	-71,33	-75,43
2	Sorong	9,89	90,11	-86,01	-90,11
3	Sorong Selatan	31,59	68,41	-64,31	-68,41
4	Raja Ampat	11,56	88,44	-84,34	-88,44
5	Tambrauw	15,97	84,03	-79,93	-84,03
6	Maybrat	14,01	85,99	-81,89	-85,99
Jumlah Papua Barat Daya		17,93	82,07	-77,97	-82,07

Sumber : SIMSPAM PUPR, 2023/2024 diolah

Berdasarkan tabel terlihat bahwa akses masyarakat akan air bersih masih jauh di bawah target nasional hingga 2030. Problem mendasar berkaitan dengan masih rendahnya akses masyarakat akan air bersih bukan semata disebabkan karena ketiadaan sumber air tetapi lebih disebabkan keterbatasan sarana penyediaan air bersih dan pola permukiman yang menyebar sehingga tidak efisien apabila dikembangkan sistem perpipaan skala perkotaan. Berikut disajikan Kapasitas Produksi air bersih dari SPAM yang berada di Provinsi Papua Barat Daya.

Tabel 4. 8 Kapasitas Produksi Air Bersih dari SPAM di Prov. Papua Barat Daya

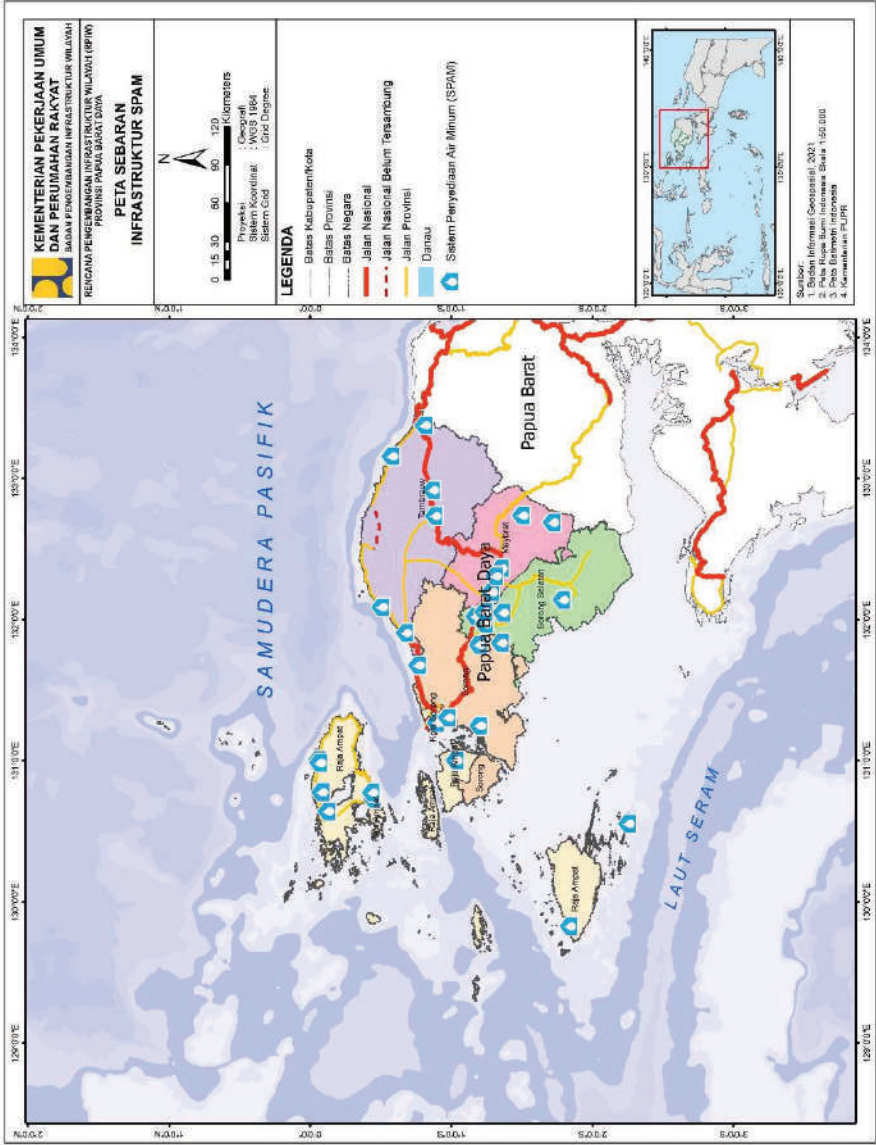
No	Kab/Kota	Jumlah Unit SPAM	Jumlah Berfungsi	Presentase Keberfungsian	Kapasitas (liter/detik)		Presentase Tingkat Keterpakaian
					Terpasang	Produksi	
1	Sorong Selatan	34	22	64,71	65,40	65,40	100
2	Sorong	52	18	34,62	48,51	48,51	100
3	Raja Ampat	22	21	95,45	18,60	18,60	100
4	Tambrauw	28	28	100,00	125,63	125,63	100
5	Maybrat	42	17	40,48	53,76	53,76	100
6	Kota Sorong	1	1	100,00	62,50	50,00	80

No	Kab/Kota	Jumlah Unit SPAM	Jumlah Berfungsi	Presentase Keberfungsian	Kapasitas (liter/detik)		Presentase Tingkat Keterpakaian
					Terpasang	Produksi	
Total		383	269	70,23	678,80	659,30	97

Sumber : SIMSPAM Ditjen CK Kementerian PUPR, BPPW Papua, 2023/2024

SPAM eksisting yang terdapat pada masing-masing kabupaten masih belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya. Dalam rangka mendukung gerakan 100-0-100 maka dalam jangka menengah hingga 2025 perlu dilakukan upaya keras peningkatan kapasitas dan pembangunan SPAM pada masing-masing kabupaten/kota. Prioritas pengembangan ditujukan pada wilayah otonom yang belum memiliki SPAM dan wilayah otonom kabupaten/kota yang memiliki peran strategis secara kewilayahan.

Minimnya sarana air bersih menjadikan sebagian masyarakat di Papua menggunakan air langsung dari sumber air yaitu sungai. Akses langsung sebenarnya tidak menjadi masalah apabila kualitas air sungai tetap terjaga, namun seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas permukiman dan masih minimnya sarana sanitasi, maka akses air langsung dari sumber akan sangat berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Berikut disajikan beberapa kegiatan pembangunan SPAM di Provinsi Papua Barat Daya:



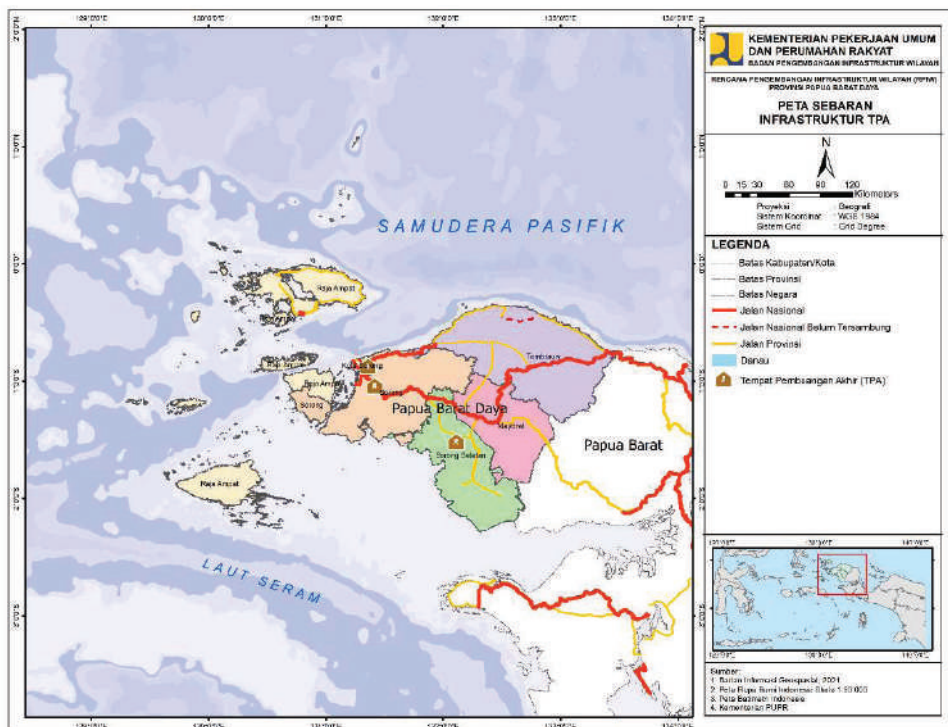
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Gambar 4. 5 Sebaran SPAM di Provinsi Papua Barat Daya

4.3.2 Sebaran Sistem Pengolahan Persampahan

Sebanyak 4 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya sudah memiliki TPA, sedangkan 2 kabupaten belum memiliki TPA yaitu Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat. Saat ini, belum semua TPA yang terbangun berfungsi dan beroperasi secara optimal.

Cakupan pelayanan di tiap-tiap kabupaten juga masih sangat kecil yaitu masih di bawah 10% kecuali kota Sorong yang sudah mencapai 32%, sehingga masih diperlukan perbaikan dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana persampahan dan juga peningkatan kapasitas SDM dan lembaga pengelola persampahan. Tabel berikut menyajikan gambaran mengenai Lokasi TPA, cakupan dan keberfungsian serta selisih cakupan penanganan.



Gambar 4. 6 Sebaran TPA

Tabel 4. 9 Pengelolaan Persampahan di Provinsi Papua Barat Daya

No	Kab/ Kota	TPA	Jumlah Penduduk 2021 (Jiwa)	Timbulan Sampah (m ³ /hari)	Kapasitas TPA (m ³ / tahun)*	Volume Sampah Masuk TPA (m ³ /hari)	Konstruksi	Keberfungsian	Cakupan Pelayanan 2021 (Jiwa)	Presentase Cakupan (%)	Gap Target Cakupan Pelayanan Persampahan Renstra PUPR Tahun 2022 (84,41%)
1	Sorong Selatan	TPA Hasmoh	48.897	122	9.742	6	2017	Berfungsi	4.500	9,20	-75,21
2	Kota Sorong	TPA Makbon	267.912	670	24.090	0	2018	Blm Berfungsi	10.000	3,73	-80,68
3	Raja Ampat	TPA Raja Ampat	49.876	125	9.636	6	2014	Berfungsi (Over Load)	4.000	8,02	-76,39
4	Kab. Sorong	TPA Mariat Gunung	93.027	233	67.609	10	2016	Berfungsi (Over Load)	30.372	32,65	-51,76
5	Tambrauw	Blm ada TPA	14.121	35	-	0	0	0	0	0	-84,41
6	Maybrat	Blm ada TPA	42.613	107	-	0	0	0	0	0	-84,41

Sumber : Direktorat Sanitasi, DICK PUPR, 2023/2024 (diolah)

4.3.3 Sebaran Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik

Berdasarkan data susenas dan Direktorat Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR tahun 2021, dapat diketahui bahwa akses sanitasi layak Provinsi Papua Barat Daya mencapai 91,85%. Dengan membandingkan target Renstra PUPR tahun 2020-2024 untuk target tahun 2022 yatu sebesar 82,07%, maka Provinsi Papua Barat Daya telah melampaui, namun masih terdapat 1 kabupaten yang masih berada di bawah target Renstra PUPR yaitu Kabupaten Raja Ampat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sanitasi, khususnya air limbah telah dilakukan secara baik. Tabel berikut menunjukkan tingkat akses sanitasi dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya.

Tabel 4. 10 Akses Sanitasi di Provinsi Papua Barat Daya

Kabupaten/Kota	Akses Layak Sanitasi (%)	Tdak Ada Akses (%)	Gap Renstra PUPR 2022 (82,07)*	Gap Visum 2030 (100% Akses Layak)
Kota Sorong	94,11	5,89	12,04	-5,89
Sorong	93,28	6,73	11,21	-6,72
Sorong Selatan	87,82	12,18	5,75	-12,18
Raja Ampat	80,66	19,34	-1,41	-19,34
Tambrau	97,38	2,62	15,31	-2,62
Maybrat	97,83	2,17	15,76	-2,17
Prov Papua Barat Daya	91,85	6,05	5,90	-6,05

Sumber : Susenas 2023/2024, diolah

Pengelolaan air limbah domestik banyak dilakukan dengan mengalirkan ke tangki septik baik individu maupun komunal. Dengan banyaknya tangki septik, maka diperlukan pengolahan lanjutan berupa pengolahan lumpur tinja. Di Provinsi Papua Barat Daya, Kondisi eksiting IPLT nya saat ini dalam kondisi belum berfungsi secara optimal dengan berbagai permasalahan baik teknis maupun non teknis.

Tabel 4. 11 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Prov. Papua Barat Daya

Nama IPLT	Kab/Kota	Kapasitas (m3/hari)	Kapasitas Terpakai (m3/hari)	Cakupan Layanan (KK)	Keberfungsian
IPLT Kota Sorong	Kota Sorong	5	0	3.500	Belum Berfungsi
IPLT Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong	5	2-3	3.750	Tidak Optimal
IPLT Kabupaten Sorong Selatan	Kab. Sorong Selatan	5	0	3.000	Belum Berfungsi
IPLT Kabupaten Raja Ampat	Kabupaten Raja Ampat	5	0	3.000	Belum Berfungsi
Provinsi Papua Barat Daya				13.250	

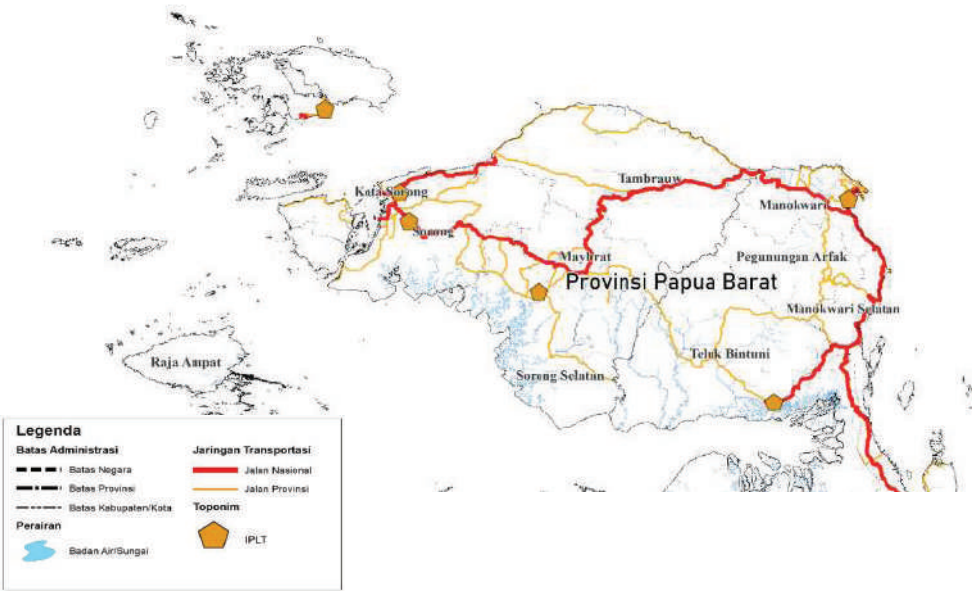
Sumber: Dirjen Cipta Karya Kemeterian PUPR, 2022

Provinsi Papua Barat Daya telah memiliki beberapa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik skala kawasan.

Tabel 4. 12 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Prov. Papua Barat Daya

IPAL	Kabupaten /Kota	Kapasitas (m ³ /hari)	Cakupan Pelayanan (KK)	Keberfungsian
IPAL Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi	Raja Ampat	2,0	200	Berfungsi
IPAL Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi	Kota Sorong	2,5	200	Tidak Berfungsi
IPAL Komunal Berbasis Masyarakat	Kota Sorong	2,5	200	Tidak Berfungsi
IPAL Komunal Berbasis Masyarakat	Kab. Sorong	2,5	200	Tidak Optimal
IPAL Komunal Berbasis Masyarakat	Kab. Raja Ampat	2,5	350	Tidak Optimal
Provinsi Papua Barat Daya			1.150	

Sumber: Dirjen Cipta Karya Kemeterian PUPR, 2023/2024



Sumber: Hasil Analisis 2022

Gambar 4. 7 Sebaran IPLT di Provinsi Papua Barat Daya

4.3.4 Sistem Drainase

Drainase lingkungan permukiman sangat penting perannya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada kawasan-kawasan permukiman perkotaan di Pulau Papua kondisi drainase lingkungan masih minim dan masih tergabung dengan sistem drainase jalan.

Kondisi ini menyebabkan beban drainase jalan menjadi berlebih dan menimbulkan genangan pada badan jalan saat musim hujan. Penilaian kinerja drainase pada kawasan permukiman biasanya dinilai berdasarkan pada perbandingan antara luasan kejadian genangan dibandingkan dengan luasan kawasan yang rawan terjadi genangan. Mengingat keterbatasan informasi luas daerah tergenang dan ketiadaan informasi daerah rawan genangan pada masing-masing kabupaten/kota, maka penilaian kinerja didasari pada kejadian genangan setiap terjadi hujan pada wilayah-wilayah permukiman di Pulau Papua.

Tabel 4. 13 Penanganan Drainase Lingkungan di Provinsi Papua Barat Daya

No.	Kota/Kab	Infrastruktur	Nama Infrastruktur	Tahun Pembangunan Terakhir	Keberfungsian (B/TB)
1	Kab. Raja Ampat	Drainase	Pembangunan Saluran Drainase Pembangunan Drainase Kab. Raja Ampat	2006	Berfungsi
		Drainase	Pembangunan Drainase Kab. Raja Ampat	2014	Berfungsi
2	Kab. Sorong	Drainase	Pembangunan Drainase Kab. Sorong	2006	Berfungsi
		Drainase	Pembangunan Drainase Kab. Sorong	2006	Berfungsi
		Drainase	Pembangunan Drainase Lingkungan Kel. Malaweke, Kec. Aimas, Kab. Sorong	2016	Berfungsi
		Drainase	Pembangunan Drainase Lingkungan Kel. Mariat Pantai, Kec. Aimas, Kab. Sorong	2016	Berfungsi
3	Kota Sorong	Drainase	Pembangunan Drainase Kota Sorong	2006	Berfungsi
		Drainase	Pembangunan Drainase Perkotaan Kota Sorong	2013	Berfungsi
		Drainase	Pembangunan Sistem Drainase Primer Kota Sorong	2014	Berfungsi

No.	Kota/Kab	Infrastruktur	Nama Infrastruktur	Tahun Pembangunan Terakhir	Keberfungsian (B/TB)
		Drainase	Pembangunan Sistem Drainase Primer Kota Sorong	2015	Berfungsi
		Drainase	Pembangunan Drainase Lingkungan Kel. Kladufu dan Kel. Klawalu, Kec. Sorong Timut Kota Sorong	2016	Berfungsi
		Drainase	Pembangunan Drainase Lingkungan Harapan Indah Kota Sorong	2017	Berfungsi
		Drainase	Pembangunan Drainase Lingkungan Kawasan Moyo Kota Sorong	2018	Berfungsi

Sumber : Direktorat Sanitasi, DJCK PUPR, 2023/2024

4.3.5 Bangunan Cagar Budaya dan Desa Adat

Provinsi Papua Barat Daya memiliki wilayah adat, yakni Domberai. Wilayah Adat Domberai terdiri atas Kota Sorong, Kab. Manokwari, Kab. Bintuni, Kab. Wondama, Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Tambrau. Suku di Wilayah Adat Domberai adalah Suku Besar Arfak terdiri dari empat suku, yaitu Hatam, Meyakh, Sough dan Moley. Suku Moi merupakan penduduk yang banyak mendiami Kota Sorong, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, dan Kab. Raja Ampat. Ragam Bahasa: Amber; As; Blatant; Bias; Biga; Gebe; Kate; Legenyem; Ma'ya; Maden; Matbat; Misool; Moi; Tepin; Wauyai, dan lain sebagainya.

Bangunan cagar budaya di Provinsi Papua Barat Daya antara lain:

1. Bunker Jepang, Doom Barat – Kota Sorong
2. Pulau Doom (Pusat Pemerintahan Belanda) – Kota Sorong
3. Pagoda Sapta Ratna – Kota Sorong
4. Desa Werbes Tambrau (Peninggalan Perang Dunia Ke II – Tambrau
5. Tradisi Suku Moi
6. Festival Bahari Raja Ampat
7. Masjid Tua Patimburak
8. Pulau Mansinam

4.4 Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan

Infrastruktur perumahan merupakan dasar fisik lingkungan serta menjadi fasilitas penunjang untuk pelayanan lingkungan dan menjadi bagian dalam pembangunan permukiman secara keseluruhan. Infrastruktur perumahan di dalam Kementerian PUPR terdiri dari rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum dan komersial. Dalam proses perencanaan infrastruktur perumahan, perlu diketahui

terlebih dahulu kondisi kepemilikan rumah berdasarkan status penguasaan rumah tinggal, kondisi rumah tidak layak huni, serta kondisi capaian pembangunan rumah (rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus, dan PSU perumahan). Berikut kondisi eksisting infrastruktur perumahan di Provinsi Papua Barat Daya.

4.4.1 Sebaran dan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan

Kawasan kumuh perkotaan di Provinsi Papua Barat Daya sebagian besar berada di sekitar pusat ekonomi seperti pasar dan sekitar muara sungai yang dihuni oleh nelayan. Tabel berikut memberikan gambaran mengenai luas kawasan kumuh per Kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan SK Penetapan Kawasan Kumuh dari Bupati setempat.

Tabel 4. 14 Kawasan Kumuh Perkotaan di Provinsi Papua Barat Daya

No	Kab/Kota	Nomor SK	Luas Wilayah Kumuh (Ha)	Luas Wilayah Kumuh Tertangani (Ha)	Presentase Wilayah Tertangani (%)
1	Kota Sorong	SK Walikota tentang Permukiman Kumuh No.663 / 76 /Tahun 2020	562,00	6,69	1,19
2	Kab. Tambrauw	SK bupati Nomor 648.2/94/2021	7,00	-	0,00
3	Kab. Maybrat	SK Bupati Nomor 600/39 Tahun 2015	29,30	8,66	29,56
4	Kab. Raja Ampat	SK Bupati Nomor 15 Tahun 2014	7,00	-	0,00
5	Kab. Sorong	SK Bupati Nomor 1045/KEP.746-DPU//2015	358,86	-	0,00
6	Kab. Sorong Selatan	SK Bupati Nomor 600/140/BSS/Tahun 2016	80,00	-	0,00
Provinsi Papua Barat Daya			1044,16	15,35	5,125

Sumber : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR, 2023/2024 diolah.



Sumber: Hasil Analisis 2022

Gambar 4. 8 Sebaran Kawasan Kumuh di Provinsi Papua Barat Daya

4.4.2 Sebaran dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

Pemenuhan kebutuhan dasar berupa rumah yang sehat dan aman secara konstruksi dapat meningkatkan kualitas hidup. Di Provinsi Papua Barat Daya, rumah tidak layak huni masih tersebar hampir di semua kabupaten/kota dengan jumlah 27.858 unit, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 15 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Papua Barat Daya

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Tanah		
	Milik Sendiri	Tanah Negara	Bukan Milik Sendiri
Sorong Selatan	21	0	
Tambrau	1.899	0	20
Sorong	4.183	1	
Raja Ampat	2.985	8	1.487
Maybrat	5.548	2	19
Kota Sorong	10.821	130	734
Jumlah	25.457	141	2.260

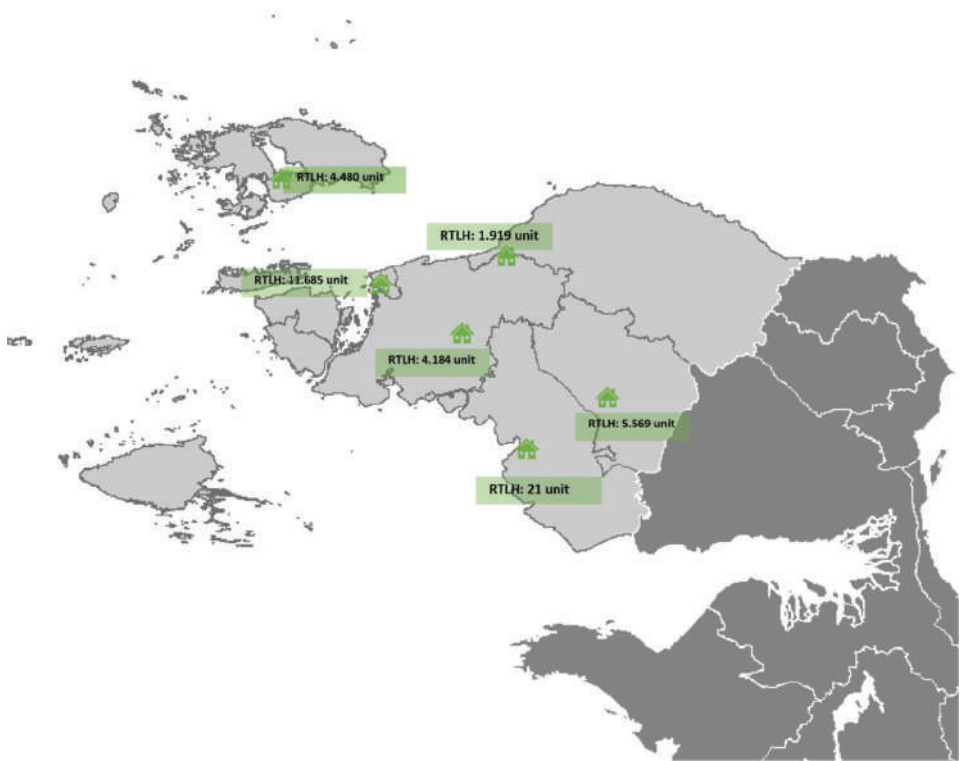
Sumber: e-rtlh.pupr.go.id, 2023/2024

Penanganan rumah tidak layak huni yang telah dilakukan Ditjen Perumahan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 16 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Papua Barat Daya

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sorong Selatan	0	0	230	90	0	0
Tambrauw	0	0	208	165	0	40
Sorong	0	0	400	930	0	24
Raja Ampat	0	120	100	210	0	13
Maybrat	0	0	100	162	0	40
Kota Sorong	0	0	507	925	0	186
Jumlah	0	120	1545	2482	0	303

Sumber: *e-rtlh.pupr.go.id*, 2022



Gambar 4. 9 Sebaran Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Papua Barat Daya

4.4.3 Sebaran dan Jumlah Backlog Perumahan

Pada Tahun 2021, sebanyak 83,77% rumah di Provinsi Papua Barat Daya merupakan milik sendiri/pribadi, 5,53% rumah sewa/kontrak, 7,28% rumah bebas sewa, 3,41% rumah dinas atau lainnya. Pada Tahun 2021, *backlog* untuk pemenuhan perumahan sebesar 19,62%. Kepemilikan rumah berdasarkan status penguasaan rumah tinggal dan *backlog* pemenuhan perumahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 17 **Penguasaan Rumah Tinggal di Provinsi Papua Barat Daya**

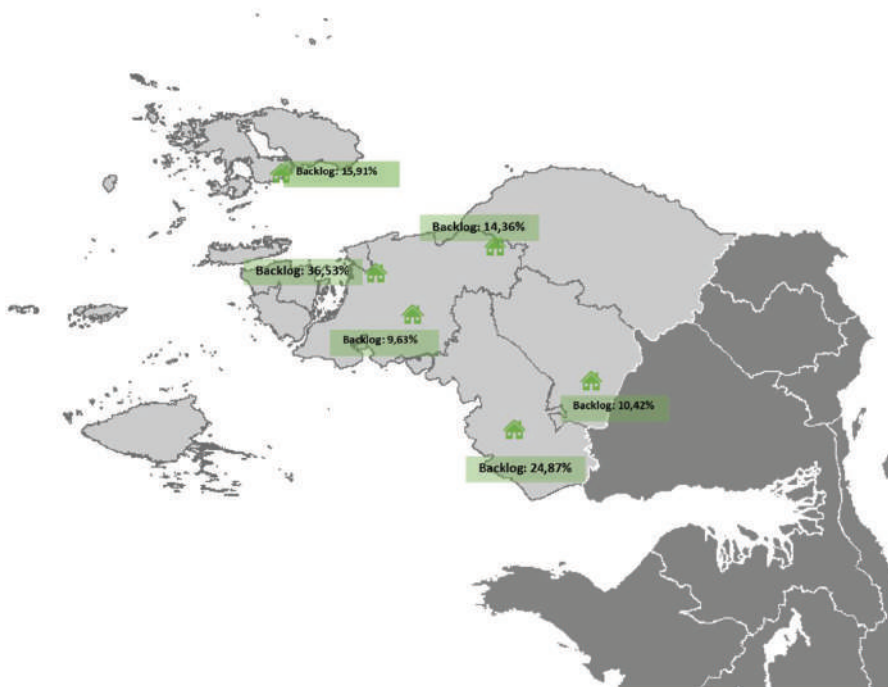
Kabupaten/Kota	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas/ Lainnya
	2021	2021	2021	2021
Sorong Selatan	89.51	1.50	5.82	3.16
Tambrauw	85.64	0.00	3.85	10.51
Sorong	90.37	3.02	6.33	0.28
Raja Ampat	84.09	3.26	9.94	2.71
Maybrat	89.57	2.16	6.44	1.82
Kota Sorong	63.47	23.23	11.30	2.00
Provinsi Papua Barat Daya	83,77	5,53	7,28	3,41

Sumber: Papua Barat Daya dalam Angka, 2023/2024

Tabel 4. 18 **Backlog Pemenuhan Perumahan di Provinsi Papua Barat Daya**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk 2019	KK	Kepemilikan Rumah (KK)	Backlog	
				Jumlah	Persentase
Sorong Selatan	47.918	11.980	10.723	1.257	10,48
Tambrauw	14.027	3.507	3.003	504	14,36
Sorong	90.987	22.747	20.556	2.191	9,63
Raja Ampat	49.216	12.304	10.347	1.958	15,91
Maybrat	41.763	10.441	9.352	1.089	10,42
Kota Sorong	260.927	65.232	41.403	23.829	36,53
Provinsi Papua Barat Daya	504.838	126.211	95.384	30.828	16

Sumber: Papua Barat Daya dalam Angka 2023/2024, diolah



Gambar 4. 10 Sebaran *Backlog* Perumahan di Provinsi Papua Barat Daya

Berdasarkan kondisi eksisting diatas, dirumuskan kinerja infrastruktur perumahan sesuai dengan target capaian visium PUPR tahun 2030 untuk pengurangan *backlog* perumahan sebesar 3 juta unit dan pembangunan sebesar 4,86 juta. Target kinerja hingga Tahun 2024 adalah pengurangan *backlog* perumahan sebesar 5 juta unit dan pembangunan sebesar 3,9 juta unit untuk seluruh Indonesia. Dilihat dari *backlog* perumahan pada Tahun 2021, masih terdapat 30.828 unit rumah yang dibutuhkan. Program pembangunan perumahan dapat dilakukan dengan pembangunan rumah swadaya, rumah khusus, maupun rumah susun.

Pengurangan rumah tidak layak huni diperlukan sebagai dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Penyelesaian rumah tidak layak huni dapat menggunakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

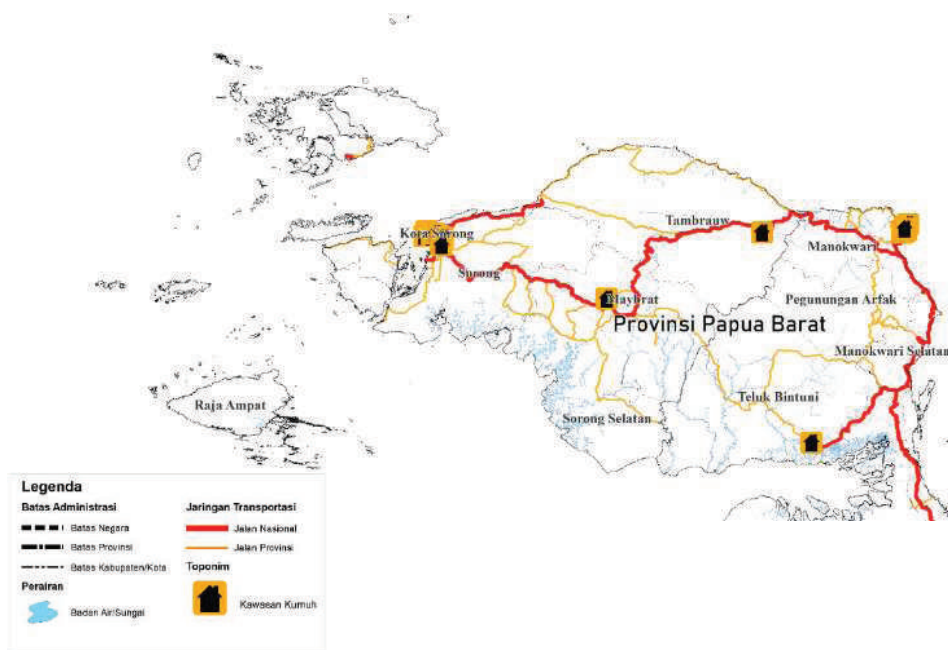
4.4.4 Kawasan Kumuh Perkotaan yang Perlu Dukungan Perumahan

Kawasan kumuh perkotaan di Provinsi Papua Barat Daya sebagian besar berada di sekitar pusat ekonomi seperti pasar dan sekitar muara sungai yang dihuni oleh nelayan. Tabel berikut memberikan gambaran mengenai luas kawasan kumuh per Kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya yang memerlukan dukungan perumahan berdasarkan SK Penetapan Kawasan Kumuh dari Bupati setempat.

Tabel 4. 19 Kawasan Kumuh Perkotaan di Provinsi Papua Barat Daya

No	Kab/Kota	Nomor SK	Luas Wilayah Kumuh (Ha)	Luas Wilayah Kumuh Tertangani (Ha)	Presentase Wilayah Tertangani (%)
1	Kota Sorong	SK Walikota tentang Permukiman Kumuh No.663 / 76 /Tahun 2020	562,00	6,69	1,19
2	Kab. Tambrauw	SK bupati Nomor 648.2/94/2021	7,00	-	0,00
3	Kab. Maybrat	SK Bupati Nomor 600/39 Tahun 2015	29,30	8,66	29,56
4	Kab. Raja Ampat	SK Bupati Nomor 15 Tahun 2014	7,00	-	0,00
5	Kab. Sorong	SK Bupati Nomor 1045/KEP.746-DPU//2015	358,86	-	0,00
6	Kab. Sorong Selatan	SK Bupati Nomor 600/140/BSS/Tahun 2016	80,00	-	0,00
Provinsi Papua Barat Daya			1.044,16	15,35	5,125

Sumber : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR, 2022 diolah.



Sumber: Hasil Analisis 2022

Gambar 4. 11 Sebaran Kawasan Kumuh di Provinsi Papua Barat Daya

4.5 Profil dan Kinerja Infrastruktur Non-PUPR

4.5.1 Infrastruktur Perhubungan

Infrastruktur perhubungan yang terdapat di Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari perhubungan darat, udara, dan laut. Pembahasan masing-masing infrastruktur perhubungan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

A. Infrastruktur Perhubungan Darat

Berdasarkan fungsi pelayanannya, terminal penumpang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) tipe terminal yaitu:

- Terminal penumpang Tipe A, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam propinasi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).
- Terminal penumpang Tipe B, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinasi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).
- Terminal penumpang Tipe C, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES).

Infrastruktur perhubungan darat di Provinsi Papua Barat Daya dengan skala pelayanan wilayah provinsi, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 4. 20 Terminal di Provinsi Papua Barat Daya

No.	Nama Terminal	Tipe Terminal	Lokasi Kab/kota
1	Sorong	B	Kota Sorong
2	Maybrat	B	Maybrat
3	Sorong Selatan	B	Sorong Selatan
4	Tambrau	B	Tambrau

Sumber: Hasil Identifikasi, 2024

B. Infrastruktur Perhubungan Udara

Berdasarkan hirarkinya bandar udara terdiri atas:

- Bandar Udara Pengumpul (Hub)
Merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
Macam-macam bandar udara pengumpul:
 - Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang pertahun;
 - Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan

- Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang pertahun;
- Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang pertahun.
 - Bandar Udara Pengumpan (Spoke), merupakan:
 - Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal;
 - Bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul;
 - Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal.

Bandar udara yang terdapat di Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tata Letak dan Fasilitas Bandar Udara, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 21 Bandar Udara di Provinsi Papua Barat Daya

No.	Nama	Lokasi	Hierarki
1	Domine Eduard Osok	Kota Sorong	Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder
2	Marinda	Kab. Raja Ampat	Pengumpan

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tata Letak dan Fasilitas Bandar Udara Nasional

C. Infrastruktur Perhubungan Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, yang kemudian terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2021, hirarki pelabuhan terdiri atas: Pelabuhan Utama (PU), Pelabuhan Pengumpul (PP), Pelabuhan Pengumpan, Terminal Umum, Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul, Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.

Pelabuhan yang terdapat di Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, yang kemudian terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

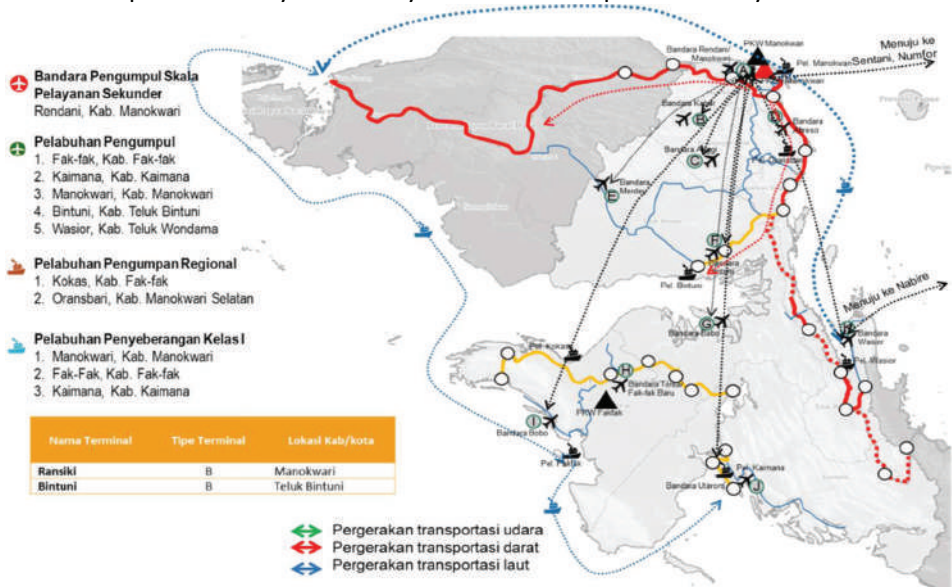
Tabel 4. 22 Pelabuhan di Provinsi Papua Barat Daya

No.	Pelabuhan	Kabupaten/ Kota	Hierarki
1	Sorong	Kota Sorong	Pelabuhan Utama
2	Teminabuan	Kab. Sorong Selatan	Pelabuhan Pengumpul

No.	Pelabuhan	Kabupaten/ Kota	Hierarki
3	Waigama	Kab. Raja Ampat	Pelabuhan Pengumpan Regional
4	Waisai	Kab. Raja Ampat	Pelabuhan Pengumpan Regional

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, yang kemudian terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2021

Profil dan kinerja infrastruktur perhubungan membahas mengenai jalur transportasi yang sudah terbentuk di Provinsi Papua Barat Daya serta aliran barang dan orang antar pusat kegiatan. Berikut profil dan kinerja infrastruktur perhubungan di Provinsi Papua Barat Daya khususnya di Kawasan Papua Barat Daya.



Gambar 4. 12 Sistem Transportasi Darat, Laut, dan Udara di Kawasan Papua Barat Daya

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.5.2 Infrastruktur Energi

Provinsi Papua Barat Daya menggunakan sistem tenaga listrik *isolated*. Sistem 20 kV dengan beban diatas 2 MW yaitu sistem Sorong dan Raja Ampat. Selain itu, terdapat sistem tenaga listrik *isolated* dengan beban puncak kurang dari 2 MW berupa listrik perdesaan dengan lokasi tersebar. Kebutuhan di sistem tenaga listrik Provinsi Papua Barat Daya dipasok dari pembangkit-pembangkit jenis PLTM, PLTD, PLTU, dan PLTG.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, PLN telah mempersiapkan rencana jangka panjang pengembangan sistem tenaga listrik yang baik dan andal, yaitu dengan membangun pembangkit beserta sistem transmisi. Sambil menunggu pembangunan sistem tenaga listrik, PLN telah melakukan pembelian kelebihan daya (*excess power*) dari PLTU Pabrik Semen untuk memenuhi kebutuhan listrik kota Manokwari dan

sekitarnya. Rincian pembangkit terpasang dan beban puncak sistem tenaga listrik di Provinsi Papua Barat Daya sebagai berikut:

Tabel 4. 23 Kapasitas Pembangkit Listrik Terpasang di Provinsi Papua Barat Daya

Pembangkit	Sistem Tenaga Listrik	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 Tahun Terakhir (MW)
PLN					
PLTD	Sorong	5	13,1	10,8	10,8
	Teminabuan	5	3,0	2,0	2,0
Jumlah PLN		10	16,1	12,8	12,8
Excess					
PLTG	Sorong	3	41,0	40,8	40,8
Jumlah Excess		3	41,0	40,8	40,8
Sewa					
PLTD	Teminabuan	2	1,6	0,9	0,9
Jumlah Sewa		2	1,6	0,9	0,9
Total		15	58,7	54,5	54,5

Sumber: RUPTL PLN Tahun 2021-2030

4.5.3 Infrastruktur Telekomunikasi

Sektor telekomunikasi merupakan salah satu masalah krusial di Provinsi Papua Barat Daya, hal ini disebabkan masih banyak daerah yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi sama sekali. Daerah yang tidak terjangkau sinyal adalah daerah yang terletak di pegunungan atau pulau – pulau terpencil. Hal ini tentu sangat menyusahkan dan merugikan untuk masyarakat setempat karena komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Kebutuhan komunikasi di masa kini sudah masuk ke kategori kebutuhan primer masyarakat.



BAB 5

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



BAB V

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan tentang potensi dan tantangan pengembangan wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang dirumuskan menjadi isu strategis berdasarkan konteks perencanaan makro (tinjauan nasional), meso (tinjauan regional wilayah Sulawesi – Maluku – Papua), dan mikro (tinjauan wilayah Provinsi Papua Barat Daya). Penetapan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting dan fokus kebijakan sebagai *baseline*, tren pengembangan di masa yang akan datang dan masalah utama yang dihadapi untuk mencapai kondisi tersebut. Permasalahan dan isu strategis menjadi masukan dalam menyusun skenario pengembangan wilayah (Bab 6).

5.1 Sektor Pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional

Papua Barat Daya merupakan provinsi yang berada di bagian timur Indonesia. Pembangunan kepariwisataan di Provinsi Papua Barat Daya harus dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, terdapat proyek strategis nasional terkait pariwisata yaitu proyek 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur dsk, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, **Raja Ampat**, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai.

Provinsi Papua Barat Daya memiliki keanekaragaman jenis pariwisata, seperti Wisata *edu-ecotourism* di Kabupaten Raja Ampat yang mempertimbangkan aspek potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, daya tarik, serta regulasi yang ada. Wisata *ecotourism* diperlihatkan pada kawasan Kabupaten Tambrau dengan mengedepankan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya, ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran, pendidikan dan wisata minat khusus.

Kawasan-kawasan pariwisata Provinsi Papua Barat Daya yang memiliki potensi alam dan budaya yang khas serta mampu menjawab isu strategis pengembangan pariwisata provinsi diarahkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Provinsi Papua Barat Daya Terdapat 1 (satu) KSP Provinsi Papua Barat Daya yaitu: KSP Alam Bahari Pulau-Pulau Kecil Kawasan Raja Ampat.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya ialah (1) keterbatasan lama tinggal wisatawan karena rute pariwisata terbatas dalam masing-masing kawasan, (2) kendala keamanan dan kepastian kepemilikan lahan, (3) pengembangan destinasi wisata tematik yang serupa dan lebih murah mengurangi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Papua (4) pemerintah daerah cenderung mengutamakan pengembangan sektor lain yang dianggap lebih

menguntungkan, maupun (5) adanya persaingan antar destinasi pariwisata, sehingga diperlukan *business scheme* yang meningkatkan daya tarik.

Permasalahan utama terkait pengembangan kawasan pariwisata kaitannya dengan unsur pertimbangan peningkatan seluruh aspek dalam sektor pariwisata untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Barat Daya, yaitu (1) Kerentanan wilayah atas perubahan iklim, pencemaran, kerusakan lingkungan dan ancaman bencana, (2) Kendala kelembagaan pariwisata mengakibatkan sarana prasarana terbangun tidak terawat, (3) Masih rendahnya kualitas SDM di Papua Barat Daya untuk mendukung sektor pariwisata, (4) Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal dan rendahnya ketersediaan serta kualitas infrastruktur dasar.

Rincian isu strategis fokus pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 1 Isu Strategis Fokus Pariwisata

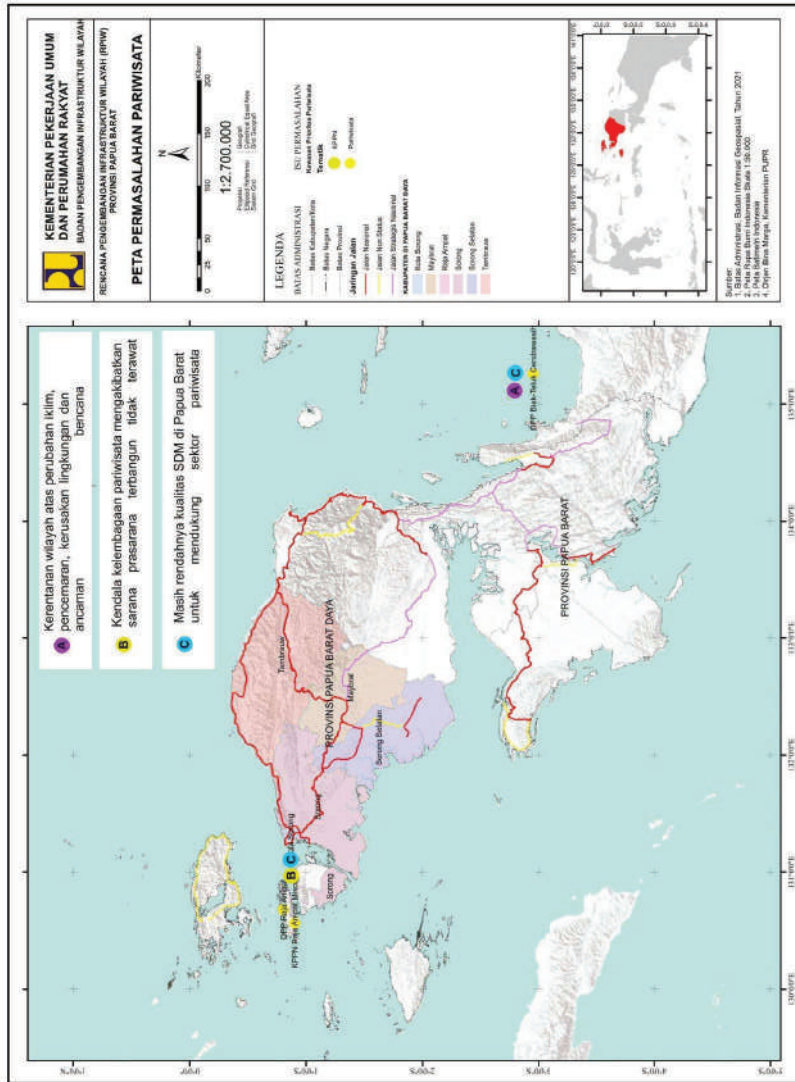
KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Makro: Sulawesi , Maluku, Papua	Arah kebijakan dan konektivitas dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan wilayah Sulmapa di tingkat nasional	Destinasi pariwisata bahari di wilayah Sulmapa saat ini sudah dikenal dan memiliki specific target market di mancanegara sebagai tujuan wisata tematik alam	Pembangunan kepariwisataan regional secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat	1. DPP Raja Ampat	Pengembangan pariwisata di wilayah Sulmapa dengan strategi diversifikasi dan target market yang jelas	Adanya persaingan antar destinasi pariwisata dengan tematik sejenis, wisatawan asing maupun lokal lebih tertarik dengan destinasi di wilayah lain yang lebih terjangkau	Peningkatan kualitas pariwisata melalui peningkatan SDM dan infrastruktur yang berkualitas
		Dukungan pemerintah pusat untuk mendorong pariwisata di wilayah Sulmapa melalui penganggaran program pembangunan oleh K/L dan dana hibah pariwisata pasca pandemi			Skema kolaborasi dalam pembiayaan pembangunan dan integrasi pembangunan infrastruktur dengan pengembangan kawasan oleh sektor swasta	Kawasan tidak menarik bagi investor karena bukan merupakan destinasi wisata massal, profit cenderung lebih rendah	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Belum terpenuhinya standar pelayanan minimum dan rendahnya ketersediaan serta kualitas infrastruktur dasar			Pemerintah pusat memfokuskan pembangunan infrastruktur pada area non-konservasi dengan memanfaatkan teknologi konstruksi berkelanjutan	Pembatasan pembangunan fisik di kawasan konservasi menjadi kendala penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata terutama konektivitas	
Meso: Pulau Papua	Amenitas, daya dukung dan daya tampung, serta strategi pengembangan kawasan pariwisata di Pulau Papua	Perubahan tren pariwisata dari mass tourism ke wisata spesifik dan minat khusus di Pulau Papua	Pengembangan destinasi pariwisata minat khusus alam berskala internasional di Pulau Papua yang berkelanjutan		Peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata melalui kampanye pariwisata minat khusus	Length of stay wisatawan di Pulau Papua pendek karena rute pariwisata baru terbatas di dalam masing-masing kawasan	
		Pembangunan infrastruktur pendukung sektor pariwisata menggunakan pembiayaan khusus			Pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan alternatif kolaborasi dengan sektor swasta	Konflik sosial dan ketidakpastian kepemilikan lahan menurunkan minat investasi pembangunan infrastruktur	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mikro: Provinsi Papua Barat Daya	Indikator makro pembangunan manusia dan komoditas pendukung sektor pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya	melalui Otsus Papua dan DTI				pendukung sektor swasta	
					Mendorong industri kreatif dengan memberikan insentif dan kesempatan pengelolaan usaha berbasis masyarakat dan UMKM	Pemerintah daerah provinsi lebih fokus mengembangkan inovasi di sektor lain seperti industri yang dianggap lebih menguntungkan	
		Keanekaragaman hayati dan ekosistem pesisir/laut yang unik menjadi atraksi minat khusus	Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan mendukung produktivitas komoditas di Provinsi Papua Barat Daya		Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan konservasi	Kerentanan wilayah atas perubahan iklim, pencemaran, kerusakan lingkungan dan ancaman bencana	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					perairan zona pemanfaatan		
		Jumlah wisatawan internasional dan lokal di kawasan pariwisata mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga dibutuhkan dukungan sarana prasarana yang memadai			Meningkatnya kualitas pelayanan pariwisata dan pelayanan infrastruktur SPM menuju pelayanan berstandar internasional melalui kolaborasi dengan swasta	Kendala kelembagaan pariwisata mengakibatkan sarana prasarana terbangun tidak terawat	
		Belum efektifnya pembangunan ekonomi berbasis komoditas unggulan untuk mendukung sektor pariwisata			Peningkatan kualitas SDM melalui program pengembangan pendidikan antara lain program vokasi tematik pariwisata dan industri	Masih rendahnya kualitas SDM di Papua Barat Daya untuk mendukung sektor pariwisata	

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Peta 5. 1 Peta Permasalahan Fokus Pariwisata

Sumber: Hasil Analisis, 2023

5.2 Provinsi Papua Barat Daya sebagai Pusat Pertumbuhan Industri Baru di Wilayah Timur Indonesia

Papua Barat Daya memiliki potensi di sektor perkebunan, perikanan, pertambangan, dan lainnya. Alamnya yang indah serta sumberdaya yang melimpah menjadikan Papua Barat Daya sebagai provinsi yang memiliki daya tarik cukup tinggi bagi investor. KEK Sorong memiliki potensi peluang investasi yang dapat dikembangkan dari berbagai sektor unggulan yaitu industri kelapa sawit, pertambangan, industri galangan kapal, perikanan serta logistik. Untuk menarik dan mengembangkan peluang investasi pada sektor-sektor tersebut, kawasan industri di Papua Barat Daya memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai meliputi aksesibilitas, energi, telekomunikasi, air bersih, air limbah, dan persampahan.

Kawasan Industri di Provinsi Papua Barat Daya, di antaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, dan Kawasan Agroindustri Sagu Kais.

Secara eksisting perkembangan Kawasan Industri di Provinsi Papua Barat Daya dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu:

1. Proses pengadaan lahan dan kepastian alokasi sumberdaya untuk 20 tahun ke depan yang belum dapat dipastikan;
2. Sebagian industri pengolahan berskala besar di Provinsi Papua Barat Daya belum beroperasi optimal karena jumlah investor belum sesuai dengan target serta belum optimalnya dukungan infrastruktur konektivitas (darat, laut, udara), infrastruktur energi, infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur permukiman;
3. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat akibat dari belum optimalnya pengelolaan sumber pendanaan alternatif non-APBN;
4. Kompetisi kawasan industri di luar papua yang lebih potensial untuk dikembangkan dan telah didukung oleh infrastruktur dasar dan akses konektivitas.

Rincian isu strategis fokus industri dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 2 Isu Strategis Fokus Industri

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Makro: Sulawesi Selatan, Maluku, Papua	Konektivitas wilayah, distribusi komoditas bahan mentah, dan strategi pengembangan Sulawesi sebagai pusat industri pengolahan	Wilayah Sulmapa berada pada jalur lintasan perdagangan internasional Pasifik Selatan yang terkoneksi langsung dengan pasar terbesar dunia dengan Selat Malaka sebagai jalur laut paling aktif di dunia	Integrasi distribusi komoditas hasil pengolahan dengan memanfaatkan jalur lintasan perdagangan internasional	1. KEK Sorong	Pengembangan sektor industri secara terpadu melalui hilirisasi komoditas unggulan di wilayah Sulmapa	Kurangnya dukungan pemerintah pusat dalam pemberian insentif bagi investor, contohnya: <i>tax holiday</i> dan <i>tax allowance</i>	Peningkatan produktivitas industri dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan penyediaan infrastruktur dasar
		Potensi sumber daya alam di wilayah Sulmapa yakni migas, perkebunan, perikanan, dan pertambangan					
		Dukungan pemerintah pusat berupa percepatan pembangunan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) diluar Pulau Jawa					
		Pulau Papua cukup bergantung pada wilayah					

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		lain dalam melakukan aktivitas perekonomian dengan nilai eksport output yang terbentuk di Pulau Papua sebesar 72 triliun, sedangkan nilai import output yang terbentuk adalah 139 triliun (destinasi utama dalam eksport import antar pulau adalah Pulau Jawa)					
		Koridor ekonomi Kepulauan Maluku - Papua masih rendah, dapat ditunjukkan dari masih sedikitnya jumlah investasi yang rendah disebabkan oleh tingginya risiko berusaha dan tingkat kepastian usaha yang rendah					

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meso: Pulau Papua	Arah kebijakan khusus, tren PDRB, indikator pembangunan manusia, serta peluang investasi	Sumber pendanaan dan arahan kebijakan khusus di Pulau Papua, contohnya Otsus	Penguatan sumber pendanaan dan kebijakan khusus di Pulau Papua untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDB nasional		Pengembangan pembiayaan alternatif lainnya di Pulau Papua contohnya KPBU dengan BUMN	Ketertarikan pemerintah daerah terhadap pembiayaan APBN dalam mengembangkan kawasan industri	
		Pulau Papua memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 1,85% dengan kontribusi terbesar terhadap struktur perekonomian adalah pertambangan dan penggalan (28,95%), pertanian, kehutanan, dan perikanan (11,30%), dan industri pengolahan (8,71%)			Efisiensi industri dengan pengoptimalan fungsi sarana pelabuhan dan akomodasi pengangkutan laut serta sentralisasi tenaga kerja	Aglomerasi yang masih rendah akibat migrasi ke kota dilakukan oleh penduduk dari luar sedangkan penduduk lokal mayoritas masih mempertahankan tanah tempat tinggal	
Mikro: Provinsi Papua	Kebutuhan air baku, persampahan, sanitasi, energi,	Jalan akses menuju kawasan industri belum seluruhnya terbangun	Penyiapan pra feasibility study berbagai aspek dalam		Pengembangan industri berbasis pada nilai jual tinggi yang	Belum adanya pemetaan sumber bahan mentah (raw material) sehingga	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSTISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Barat Daya	dan sarana prasarana pendukung disekitar kawasan industri	dan belum dalam kondisi diperkeras	kelayakan investasi melalui kajian finansial investasi di sektor perikanan, dan perkebunan		mendekat ke arah sumber bahan mentah (<i>raw material</i>)	perusahaan tidak dapat menghitung <i>cost structure</i> yang dibutuhkan untuk mobilisasi bahan mentah industri	
		Provinsi Papua Barat Daya sebagai salah satu daerah penghasil komoditas perikanan tangkap terbesar di Indonesia dengan total nilai produksi Rp 121,5 Miliar (penghasil komoditas perikanan tangkap terbesar keempat dibawah DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Bali)			Hilirisasi produk perikanan sebagai upaya mengolah komoditas perikanan sehingga memiliki daya simpan dan nilai tambah saat memasuki pasar	Masih sedikitnya industri manufaktur untuk mengelola produk perikanan di Provinsi Papua Barat Daya sehingga sebagian besar produksi ikan diekspor dalam bentuk segar yang berdampak pada margin value produk	
		Hutan sagu di Papua merupakan hutan sagu terbesar di Indonesia. Sebagai contoh, PT. ANJAP yang dapat			Prospek pasar untuk produk berbahan sagu masih luas dan sagu yang ada di	Biaya produksinya masih jauh lebih tinggi dibandingkan harga jual pati sagu di pasaran	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		memproduksi 1.000 tual sagu per hari atau sekitar 10 ton sagu per hari dari kapasitas produksi 6.000 tual per hari			pasaran relatif masih kurang baik dari jumlah maupun jenis produk yang dihasilkan		

Sumber: Hasil Analisis, 2023



5.3 Kawasan Perkotaan Provinsi Papua Barat Daya Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Kegiatan Wilayah Hinterland

PP No. 59/2022 mendefinisikan bahwa kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat Daya masih memerlukan dukungan infrastruktur dasar serta konektivitas antar wilayah yang memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi di PKN, PKW, Kota Baru, Pusat Pemerintahan DOB, dan Calon Perkotaan di Provinsi Papua Barat Daya. Prioritas pembangunan kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat Daya, diantaranya: PKN Sorong, Kota Baru Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, Kota Baru Sorong, PKW Ayamaru, Perkotaan Fef-Tambrau (usulan baru), dan Perkotaan Kumurkek-Maybrat (usulan baru).

Secara eksisting kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat Daya, beberapa kawasan perkotaan sedang dalam tahap persiapan untuk dibangun sebagai pusat perkotaan Ibukota DOB (pusat pemerintahan provinsi) dan ketersediaan dukungan infrastruktur di perkotaan Provinsi Papua Barat Daya relatif belum sepenuhnya terbangun. Kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat Daya juga memiliki kendala dalam pengembangannya, diantaranya pemberhentian *supply* dan kerjasama dari kawasan lain, adanya kebijakan baru dengan arahan yang berbeda, kondisi geografis yang menyebabkan pembangunan jalan menjadi sulit dan mahal, pemanfaatan anggaran yang tidak sesuai, serta ketidakpastian pembebasan tanah akibat permasalahan Hak Tanah Ulayat.

Rincian isu strategis fokus kawasan perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 3 Isu Strategis Fokus Kawasan Perkotaan

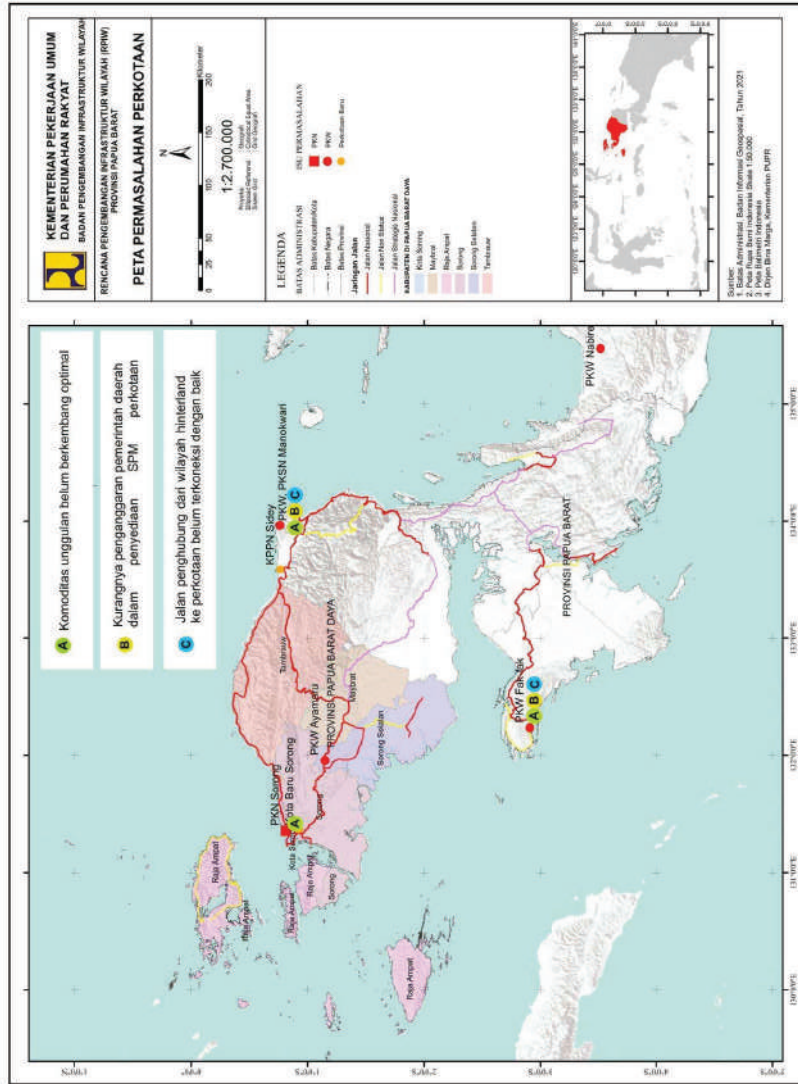
KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Makro: Sulawesi , Maluku, Papua	Interaksi kegiatan ekonomi, tren demografi, serta pelayanan	Mayoritas penduduk Sulmapa masih tinggal di perdesaan (64,85%), dengan tren pergeseran ke perkotaan (2035: 56,83%)	Pemerataan pembangunan wilayah Sulmapa melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi untuk memantapkan peran perkotaan	1. PKN Sorong	Terwujudnya perkotaan yang layak huni	Urbanisasi dari Luar Pulau Papua menyebabkan Konflik dengan OAP	Belum optimalnya peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan terhadap wilayahnya dan wilayah luar
		Interaksi kegiatan ekonomi masih terbatas pada hilirasasi logistik serta melalui jalur laut			Interaksi antar kawasan diberbagai sektor dengan beberapa alternatif jalur (udara, laut, darat)	Terbatasnya pilihan moda transportasi angkut antar pulau	
		Pelayanan fungsi perkotaan terhadap hinterland kawasan belum optimal karena keterbatasan infrastruktur			Pembangunan infrastruktur guna pemererat hubungan kawasan perkotaan dengan hinterlandnya	luasnya kawasan pelayanan	
Meso: Pulau Papua	Interaksi kawasan, kebijakan pengungkit serta kondisi sosial	Kerentanan kawasan perkotaan di Pulau Papua terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan	Penguatan pusat pertumbuhan wilayah Pulau Papua dilakukan		Pembangunan yang merata dan peningkatan SDM	Sebaran penduduk yang sporadis	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Prioritas dukungan (kebijakan dan pemerintah) terhadap kawasan strategis (PKN dan PKW) serta besarnya dukungan pembiayaan (Otsus, DAK, Inpres)	melalui pengembangan kawasan perkotaan dan pembangunan kota baru (RPJMN dan Inpres)		Terbentuknya PKN dan PKW baru	Pemanfaatan anggaran yang tidak optimal	
		Konektivitas antar pusat kegiatan (PKN, PKW) belum terhubung dengan optimal (terdapat rusak berat dan hutan)			Jalan Trans Papua terkoneksi dengan baik	Keterbatasan anggaran dan permasalahan keamanan dilokasi pembangunan	
		Aktivitas utama perkotaan bukan jasa dan perdagangan, melainkan industri dan pertanian	Pemenuhan SPM serta peningkatan keterkaitan		Perkotaan sebagai simpul kegiatan dengan kawasan hinterland sebagai penopang	Komoditas unggulan belum berkembang optimal	
Mikro: Provinsi Papua Barat Daya	Pelayanan dasar dan pengungkit pertumbuhan kawasan pendukung	Infrastruktur pelayanan dasar belum terpenuhi (persampahan, sanitasi, air minum, perumahan)	perkotaan dengan hinterlandnya		Percepatan pembangunan infrastruktur SPM perkotaan melalui investasi sektor swasta	Kurangnya penganggaran pemerintah daerah dalam penyediaan SPM perkotaan	

RPIW Provinsi Papua Barat Daya
Tahun 2025-2034

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kawasan perkotaan belum menjadi pengungkit ekonomi bagi kawasan hinterland			Peningkatan PDB dan nilai komoditas unggulan di kawasan hinterland	Jalan menghubungkan dari wilayah hinterland ke perkotaan belum terkoneksi dengan baik	

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Peta 5. 3 Peta Permasalahan Fokus Perkotaan

Sumber: Hasil Analisis, 2023



BAB 6

SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH



BAB VI

SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH

Bab skenario pengembangan wilayah merumuskan proyeksi pertumbuhan, skenario pengembangan, serta justifikasi kawasan prioritas. Tujuan dari skenario pengembangan wilayah yaitu untuk menganalisis kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah.

6.1 Proyeksi Pertumbuhan

Sub bab ini menjelaskan perkiraan kondisi atau perkembangan wilayah perencanaan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan kecenderungan perkembangannya.

6.1.1 Proyeksi Penduduk

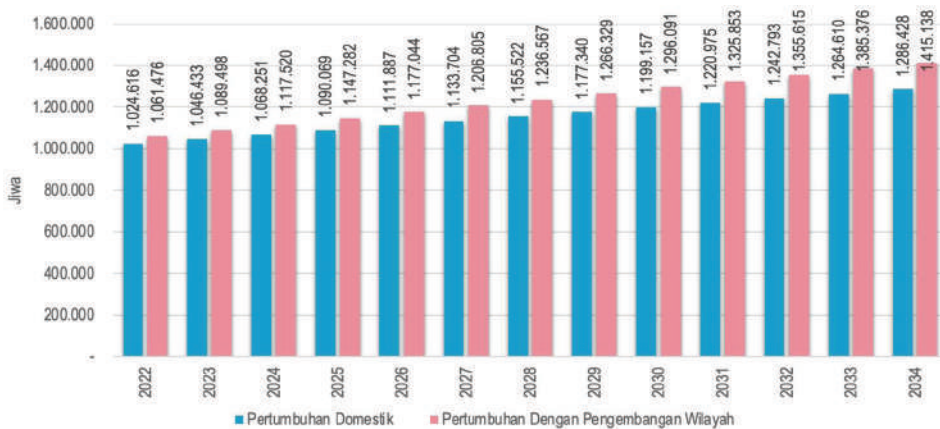
Selama dekade terakhir, jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat Daya mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat Daya tercatat sebesar 806.995 jiwa, namun pada tahun 2022, jumlah penduduknya meningkat menjadi 1.024.616 jiwa. Artinya, terdapat penambahan sekitar 117.721 penduduk dalam periode tersebut.

Proyeksi pertumbuhan penduduk dilakukan dengan menerapkan dua skenario, yaitu pertumbuhan alami dan pendekatan pengembangan wilayah. Skenario pertumbuhan alami mengacu pada pertumbuhan penduduk yang terjadi secara alami, seperti kelahiran dan kematian. Sementara itu, pendekatan pengembangan wilayah mempertimbangkan faktor-faktor seperti pembangunan infrastruktur, investasi, dan peluang ekonomi yang dapat menarik penduduk untuk bermigrasi ke wilayah tersebut.

Dengan melakukan proyeksi pertumbuhan penduduk dengan dua skenario ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan populasi di Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini penting dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah, agar dapat mengantisipasi dan menyesuaikan kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, dan sumber daya manusia dengan pertumbuhan penduduk yang diharapkan.

Dalam skenario alami, proyeksi pertumbuhan penduduk tahun 2034 didasarkan pada tren pertumbuhan penduduk berdasarkan data tahun sebelumnya. Hasil proyeksi menunjukkan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 1.286.428 jiwa pada tahun 2034. Namun, dalam skenario pendekatan pengembangan wilayah, terdapat faktor tambahan yang dipertimbangkan, seperti dampak dari pengembangan kawasan strategis tertentu. Sebagai hasilnya, proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2034 diperkirakan lebih besar, yaitu sekitar 1.415.138 jiwa. Dengan mempertimbangkan skenario pendekatan pengembangan wilayah,

proyeksi jumlah penduduk yang lebih tinggi untuk tahun 2034 memberikan gambaran tentang potensi pertumbuhan populasi yang lebih cepat sebagai akibat dari pengembangan kawasan strategis.



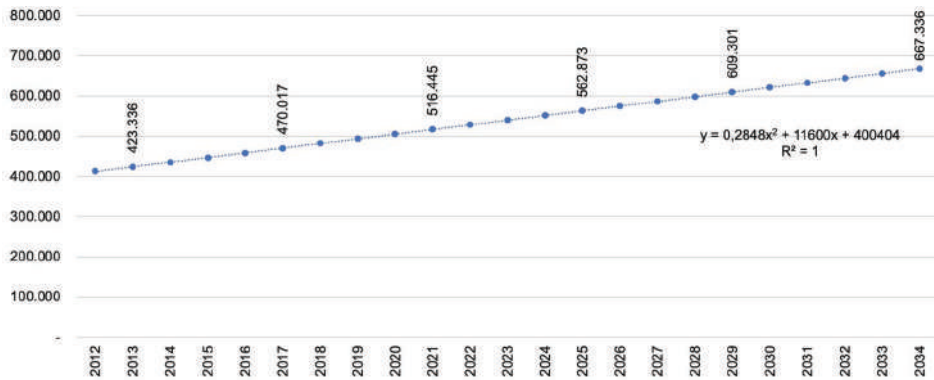
Sumber: BPS diolah BPIW, 2022

Gambar 6. 1 **Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua Barat Daya**

A. Pendekatan Alami

Secara lebih rinci, berikut adalah proyeksi pertumbuhan penduduk dengan pendekatan alami di Provinsi Papua Barat Daya. Dalam melakukan proyeksi pertumbuhan penduduk, juga digunakan pendekatan analisis trendline untuk pendekatan alamiah. Dalam analisis ini, digunakan persamaan tren garis kurva ($y = 0,24848x^2 + 11600$) dengan tingkat determinasi (R^2) yang tinggi, yaitu sebesar 1. Dengan menggunakan persamaan tersebut, diperoleh proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2034 sebesar 667.336 penduduk.

Proyeksi penduduk ini dilakukan berdasarkan tren pertumbuhan penduduk sebelumnya. Persamaan trenline yang digunakan dalam analisis ini menggambarkan laju pertumbuhan penduduk dengan memperhitungkan variabel waktu dalam bentuk kurva. Dengan nilai determinasi yang tinggi, persamaan ini dianggap mampu memberikan proyeksi yang akurat. Dalam konteks ini, proyeksi penduduk pada tahun 2034 diperkirakan mencapai 667.336 penduduk.



Sumber: Hasil Analisis, 2022

Gambar 6. 2 Proyeksi Pertumbuhan Alamiah Papua Barat Daya

B. Pendekatan Pengembangan Wilayah

Pertumbuhan penduduk tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alami, tetapi juga oleh pengembangan kawasan di suatu wilayah. Selain pertumbuhan alami, pengembangan kawasan dapat menjadi daya tarik bagi penduduk untuk bermigrasi ke wilayah tersebut. Proyeksi pertumbuhan penduduk dengan mempertimbangkan faktor pengembangan kawasan menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan alami. Misalnya, jika proyeksi pertumbuhan alami pada tahun 2034 adalah sekitar 1,29 juta penduduk, dengan adanya pengembangan kawasan proyeksi pertumbuhan penduduk dapat meningkat sekitar 130 ribu menjadi sekitar 1,42 juta penduduk. Dengan demikian, pengembangan kawasan di Provinsi Papua Barat Daya dalam 10 tahun ke depan diperkirakan akan memberikan kontribusi tambahan sebesar 130 ribu penduduk dalam peningkatan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Pengembangan kawasan memiliki potensi untuk mengubah tata ruang dan mempengaruhi pertumbuhan penduduk suatu wilayah. Dalam kasus pengembangan kawasan di Provinsi Papua Barat Daya, diperkirakan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, akan terjadi penambahan sekitar 130 ribu penduduk sebagai hasil dari pengembangan tersebut. Penambahan sumber daya manusia ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan dan dinamika sosial-ekonomi wilayah. Namun, penting juga untuk memperhatikan aspek-aspek seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan lingkungan hidup dalam mengelola pengembangan kawasan dengan baik. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang berkelanjutan, pengembangan kawasan dapat memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan penduduk dan kemajuan wilayah secara keseluruhan.

Tabel 6. 1 Proyeksi Pertumbuhan Provinsi Papua Barat Daya Dengan Skenario Pengembangan Wilayah

Kabupaten	Proyeksi	Proyeksi Penduduk												
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kota Sorong	(Domestik)	274.898	281.883	288.869	295.854	302.840	309.826	316.811	323.797	330.782	337.768	344.753	351.739	358.724
	Pusat Pemerintahan Prov. Papua Barat Daya	769	1.538	2.308	3.077	3.846	4.615	5.385	6.154	6.923	7.692	8.462	9.231	10.000
	Total	275.667	283.422	291.177	298.931	306.686	314.441	322.196	329.950	337.705	345.460	353.215	360.969	368.724
	(Domestik)	95.067	97.107	99.147	101.187	103.228	105.268	107.308	109.348	111.388	113.428	115.468	117.508	119.548
Sorong	Kota Baru Sorong	769	1.538	2.308	3.077	3.846	4.615	5.385	6.154	6.923	7.692	8.462	9.231	10.000
	Total	95.836	98.646	101.455	104.264	107.074	109.883	112.692	115.502	118.311	121.120	123.930	126.739	129.548
	(Domestik)	49.875	50.854	51.832	52.811	53.789	54.768	55.746	56.725	57.703	58.682	59.660	60.639	61.618
	Kl Kais	769	1.538	2.308	3.077	3.846	4.615	5.385	6.154	6.923	7.692	8.462	9.231	10.000
Sorong Selatan	Total	50.644	52.392	54.140	55.888	57.635	59.383	61.131	62.879	64.626	66.374	68.122	69.870	71.618
	(Domestik)	50.535	51.194	51.854	52.513	53.173	53.832	54.491	55.151	55.810	56.469	57.129	57.788	58.447
	DPP Raja Ampat	2.308	4.615	6.923	9.231	11.538	13.846	16.154	18.462	20.769	23.077	25.385	27.692	30.000
	Total	52.843	55.810	58.777	61.744	64.711	67.678	70.645	73.612	76.579	79.546	82.513	85.480	88.447
Tambrauw	(Domestik)	14.214	14.307	14.401	14.494	14.588	14.681	14.775	14.868	14.961	15.055	15.148	15.242	15.335
	SKPT Tambrauw (Usulan Baru)			-	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
	Food Estate Tambrauw				500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
	Perkotaan Fef – Tambrauw (usulan baru)	769	1.538	2.308	3.077	3.846	4.615	5.385	6.154	6.923	7.692	8.462	9.231	10.000
	Total	14.983	15.846	16.709	18.121	19.534	20.947	22.359	23.772	25.185	26.597	28.010	29.423	30.835

RPIW Provinsi Papua Barat Daya
Tahun 2025-2034

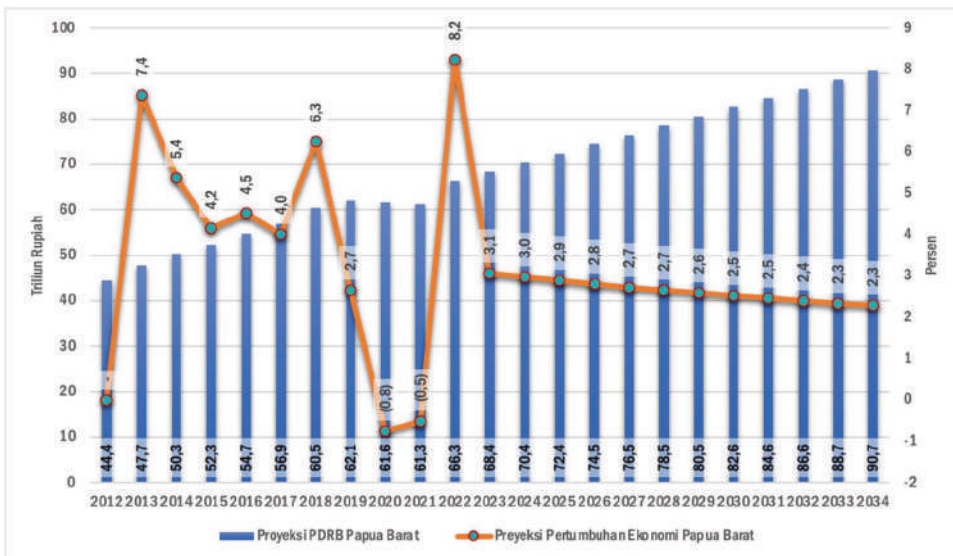
Kabupaten	Proyeksi	Proyeksi Penduduk												
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Maybrat	Domestik, perkotaan Kumurkek	43.463	44.313	45.163	46.013	46.863	47.713	48.563	49.413	50.263	51.113	51.963	52.813	53.663

Sumber: BPS diolah BPIW, 2022

6.1.2 Proyeksi Ekonomi

Selama 10 tahun terakhir, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Papua Barat Daya telah mengalami tren peningkatan yang signifikan, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun, ada pengecualian pada tahun 2020 dan 2021, di mana terjadi penurunan akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda global. Pada tahun 2012, PDRB Provinsi Papua Barat Daya mencapai Rp. 44,4 T dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 66,3 T.

Dengan mengacu pada tren pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir tanpa ada intervensi atau perubahan besar dalam kegiatan ekonomi (Business as Usual), diproyeksikan bahwa pada tahun 2034 PDRB Provinsi Papua Barat Daya akan mencapai Rp. 90,7 T dengan rerata pertumbuhan sebesar 2,4% per tahun. Proyeksi ini menggambarkan potensi pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut dan meningkat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Meskipun terdapat tantangan dan ketidakpastian di masa depan, proyeksi ini memberikan gambaran optimis terhadap potensi ekonomi Provinsi Papua Barat Daya dan memperkuat harapan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang.



Sumber: BPS diolah BPIW, 2022

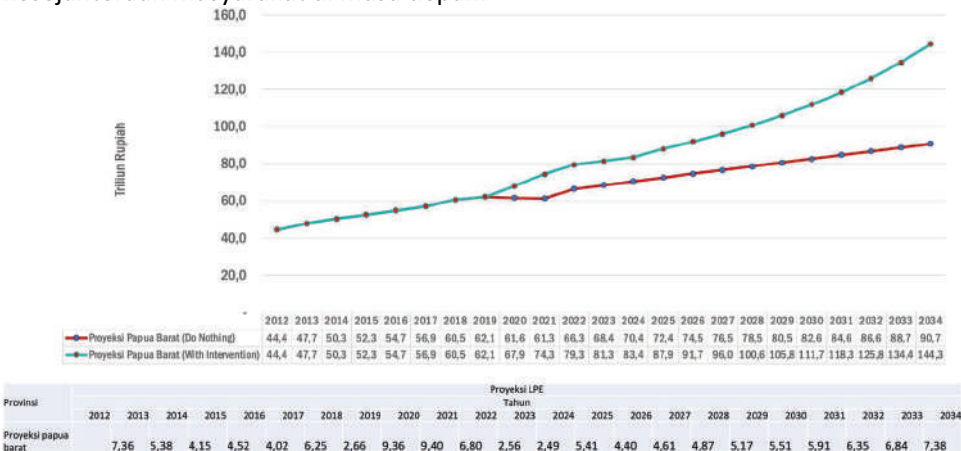
Gambar 6. 3 **Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi *Business as Usual***

Terdapat asumsi dan skenario dalam proyeksi ekonomi provinsi Papua Barat Daya sebagai berikut:

1. KEK Sorong akan dibangun dan selesai hingga tahun 2024 dan berfungsi tahun 2025
2. 2029 Akan terhubung Jalan Koridor Utara Trans Papua
3. 2034 Akan Terhubung Jalan Koridor Selatan Trans Papua

Pengembangan-pengembangan yang dilakukan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat Daya. Dengan pelaksanaan strategi pengembangan yang direncanakan, diproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat hingga 7,38% per tahun. Proyeksi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan strategi pengembangan yang efektif dan efisien dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan PDRB Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam proyeksi tersebut, diprediksi bahwa pada tahun 2034 PDRB Provinsi Papua Barat Daya akan mencapai angka sebesar Rp. 144,3 T. Angka ini mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam jangka waktu yang cukup lama. Peningkatan PDRB yang substansial ini menunjukkan adanya potensi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat Daya dengan pelaksanaan strategi pengembangan yang tepat. Proyeksi ini memberikan gambaran positif dan menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, serta memberikan dasar untuk upaya yang lebih lanjut dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.



Sumber: BPS diolah BPIW, 2022

Gambar 6. 4 **Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dengan Strategi Pengembangan**

6.1.3 Keberlanjutan Lingkungan

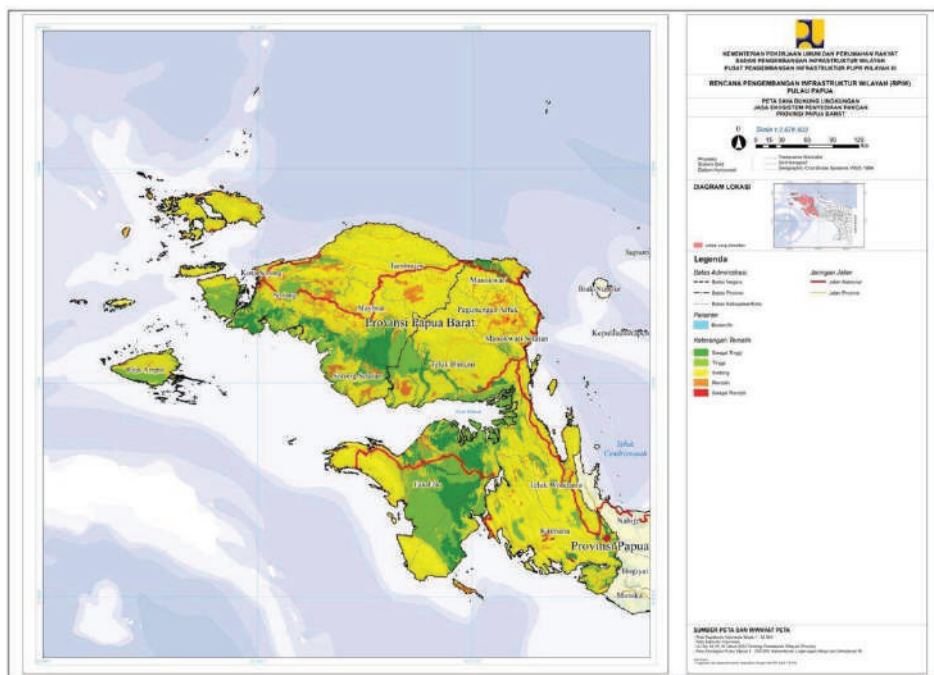
Jasa ekosistem merujuk pada manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem. Ekosistem menyediakan beragam layanan ekosistem yang sangat penting bagi keberlanjutan dan kesejahteraan manusia. Namun, ketersediaan jasa ekosistem tidaklah statis, melainkan akan mengalami variasi yang kontinu seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan ketersediaan aktual dan potensial jasa ekosistem dalam penilaian mereka.

Klasifikasi dan fungsi jasa ekosistem yang diadopsi dari *Millenium Ecosystem Assessment* membaginya menjadi empat kategori manfaat utama. Pertama, manfaat penyediaan mencakup segala sesuatu yang disediakan oleh ekosistem,

seperti sumber daya alam, air bersih, pangan, dan bahan baku. Kedua, manfaat pengaturan melibatkan peran ekosistem dalam mengatur dan menjaga proses alami, seperti siklus air, kualitas udara, dan pengendalian bencana alam. Ketiga, manfaat budaya mencakup nilai-nilai non-materi yang manusia peroleh dari ekosistem, seperti nilai estetika, spiritual, dan identitas budaya. Terakhir, manfaat pendukung mencakup dukungan dasar yang diberikan oleh ekosistem untuk kelangsungan hidup manusia, seperti pembentukan tanah, siklus nutrisi, dan regulasi iklim. Dengan memahami klasifikasi dan fungsi jasa ekosistem ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang memberikan manfaat vital bagi kehidupan manusia dan planet kita.

A. Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

Jasa ekosistem penyediaan pangan di Provinsi Papua Barat Daya didominasi oleh kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem di wilayah tersebut memberikan manfaat yang signifikan dalam hal penyediaan pangan, meskipun tingkat keberlanjutan dan produktivitasnya tidak mencapai tingkatan yang tinggi. Dominasi kategori sedang mengindikasikan bahwa ekosistem di Provinsi Papua Barat Daya memiliki potensi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk, namun perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sistem pangan di wilayah tersebut.



Sumber: Hasil Analisis, 2022

Gambar 6. 5 Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Papua Barat Daya

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kemampuan penyediaan pangan di setiap kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya diukur dalam jiwa/orang. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa Kota Sorong telah melampaui kapasitas penyediaan pangan berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah penduduk dan kemampuan produksi pangan di wilayah tersebut.

Kemudian, jika melihat proyeksi ke depan, untuk tahun 2034 beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya diperkirakan akan melampaui kemampuan penyediaan pangan. Kota Sorong mencapai 8.698%, Kabupaten Sorong mencapai 231%, dan Kabupaten Maybrat mencapai 115% dari kemampuan penyediaan pangan. Meskipun demikian, secara keseluruhan, Provinsi Papua Barat Daya masih berada di bawah kapasitas maksimal dalam penyediaan pangan. Pada tahun 2022, kemampuan penyediaan pangan Provinsi Papua Barat Daya mencapai 70%, sedangkan pada tahun 2034 diproyeksikan mencapai 92%. Hal ini menunjukkan perlu adanya strategi untuk meningkatkan produksi pangan guna memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat di masa depan.

Tabel 6. 2 Kemampuan Penyediaan Pangan Provinsi Papua Barat Daya

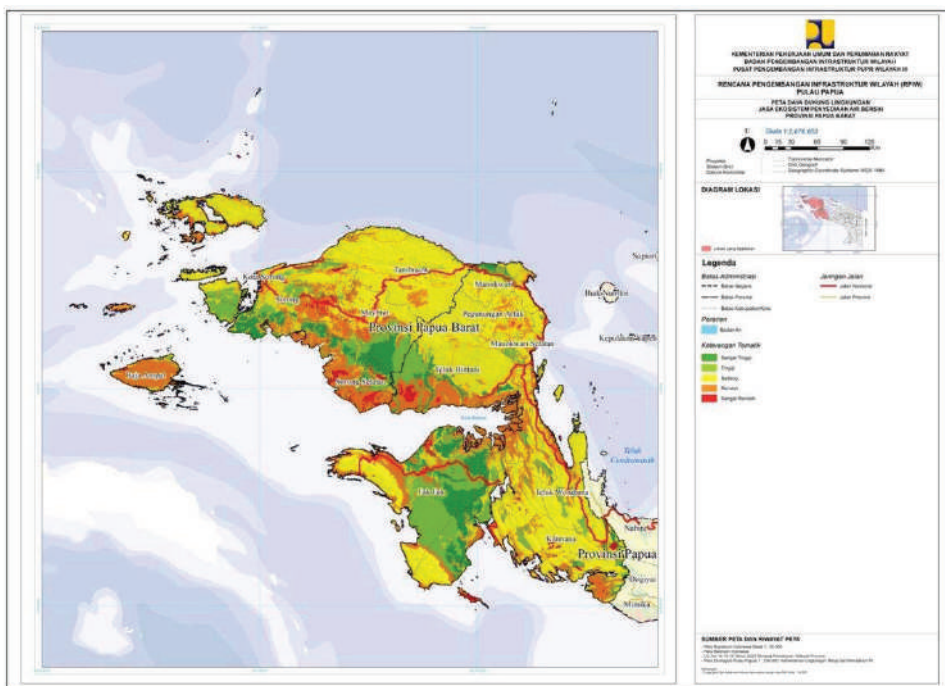
NO	KABUPATEN	PENYEDIAAN PANGAN	PENDUDUK			
			2022	%	2034	%
1	Kota Sorong	4.124	274.898	6666%	358.724	8698%
2	Sorong	99.271	95.067	96%	229.458	231%
3	Sorong Selatan	99.368	49.875	50%	61.818	62%
4	Raja Ampat	121.464	50.535	42%	58.447	48%
5	Tambrauw	181.200	14.214	8%	15.335	8%
6	Maybrat	46.666	43.463	93%	53.863	115%
Papua Barat Daya		552.093	528.052	70%	777.645	92%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

B. Jasa Ekosistem Penyediaan Air

Berdasarkan penilaian, jasa ekosistem penyediaan air bersih di Provinsi Papua Barat Daya didominasi oleh klasifikasi sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketersediaan air bersih dalam ekosistem di provinsi tersebut berada pada tingkat yang cukup, namun masih memerlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkannya. Dalam klasifikasi sedang, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi ketersediaan air bersih, seperti keberlanjutan pasokan air, keberagaman sumber air, dan kualitas air yang memadai. Meskipun masih ada tantangan dalam menjaga ketersediaan air bersih di Provinsi Papua Barat Daya, adanya klasifikasi sedang menunjukkan bahwa upaya pengelolaan dan pelestarian ekosistem perlu terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk dan menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

Meskipun secara umum jasa ekosistem penyediaan air bersih di Provinsi Papua Barat Daya didominasi oleh klasifikasi sedang, terdapat beberapa kawasan di provinsi tersebut yang memiliki kemampuan ekosistem penyediaan air yang sangat rendah. Kawasan-kawasan tersebut terutama terdapat di Kabupaten Maybrat dan Sorong Selatan. Dalam kawasan-kawasan ini, ketersediaan air bersih menjadi perhatian yang serius karena terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi pasokan air, seperti terbatasnya sumber air yang dapat diakses dan kualitas air yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa upaya konservasi dan manajemen yang lebih intensif perlu dilakukan di kawasan-kawasan tersebut guna meningkatkan kemampuan ekosistem penyediaan air dan memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduk setempat.



Sumber: Hasil Analisis, 2022

Gambar 6. 6 Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Papua Barat Daya

6.2 Visi dan Strategi

Sub bab ini berisi perumusan visi wilayah dan misi (*grand strategy*) beserta proses penyusunan strategi-strategi yang mendukung *grand strategy* dalam rangka pengembangan Provinsi Papua Barat Daya.

6.2.1 Perumusan Visi Wilayah

Visi wilayah Provinsi Papua Barat Daya dirumuskan berdasarkan hasil analisis kebijakan yang terdapat pada Bab II, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur yang dijelaskan pada Bab III dan IV. Selain itu, visi wilayah juga mencerminkan upaya menjawab permasalahan dan isu strategis yang dibahas pada Bab V. Pengembangan wilayah Provinsi Papua Barat Daya berfokus pada tiga sektor utama, yaitu pariwisata, industri, dan layanan perkotaan.

Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama dalam visi wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Potensi alam yang kaya, keanekaragaman budaya, serta keindahan panorama alamnya menjadi daya tarik bagi wisatawan. Dengan mengembangkan sektor pariwisata, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan kekayaan budaya serta keindahan alam Provinsi Papua Barat Daya kepada wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Selain itu, pengembangan sektor industri juga menjadi fokus dalam visi wilayah. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, seperti pertambangan dan perikanan, Provinsi Papua Barat Daya berusaha untuk mengembangkan industri yang berkelanjutan. Pengembangan sektor industri diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Selanjutnya, pengembangan layanan perkotaan juga menjadi prioritas dalam visi wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Dengan meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, diperlukan infrastruktur dan layanan yang memadai, seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya. Pengembangan layanan perkotaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan, meningkatkan aksesibilitas antar dan dalam kawasan, serta memperkuat peran kota-kota sebagai pusat ekonomi dan sosial di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Berdasarkan hal-hal diatas, dirumuskan visi/tujuan pengembangan infrastruktur wilayah di Provinsi Papua Barat Daya sebagai berikut:

“Papua Barat Daya sebagai destinasi pariwisata kelas dunia dan pusat hilirisasi produk sumber daya alam di Indonesia Timur”

Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi atau *grand strategy* yang akan dilakukan. Ketiga misi ini dirancang untuk menjawab permasalahan dan isu strategis dalam pengembangan wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Berikut adalah rincian dari ketiga misi tersebut:

1. Peningkatan kualitas pariwisata melalui peningkatan SDM dan infrastruktur yang berkualitas
2. Peningkatan produktivitas industri dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan penyediaan infrastruktur dasar
3. Pemantapan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan terhadap wilayah hinterland

6.2.2 Analisis Penyusunan Strategi

Dari tiga *grand strategy* yang telah dirumuskan akan menghasilkan strategi yang lebih detail dengan menggunakan metode PESTLE (Makro), 5 Forces (meso) dan SWOT untuk masing-masing *grand strategy*.

A. Analisis PESTLE (Makro)

Analisis PESTLE adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pengembangan wilayah. Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi Papua Barat Daya, didapatkan peluang dan tantangan di level makro yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter yaitu *political* (politik), *economic* (ekonomi), *sociological* (sosial), *technological* (teknologi), *legal* (kebijakan), dan *environment* (lingkungan). Berikut hasil analisis pestle terhadap 3 (tiga) fokus di Provinsi Papua Barat Daya.

Tabel 6. 3 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Pariwisata

Peningkatan kualitas pariwisata melalui peningkatan SDM dan infrastruktur yang berkualitas			
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	BOBOT PENGARUH (%)
POLITICAL	Penetapan destinasi pariwisata di Sulmapa sebagai Destinasi Pariwisata Nasional dalam RIPARNAS	Program turunan tidak diimplementasikan oleh K/L terkait	15%
ECONOMIC	Dukungan pemerintah pusat untuk mendorong pariwisata di wilayah Sulmapa melalui penganggaran program pembangunan oleh K/L dan dana hibah pariwisata pasca pandemi	Kawasan tidak menarik bagi investor karena bukan merupakan destinasi wisata massal, <i>profit</i> cenderung lebih rendah	17,50%
SOCIOLOGICAL	Destinasi pariwisata bahari di wilayah Sulmapa saat ini sudah	Adanya persaingan antar destinasi pariwisata	20%

Peningkatan kualitas pariwisata melalui peningkatan SDM dan infrastruktur yang berkualitas			
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	BOBOT PENGARUH (%)
	dikenal dan memiliki <i>specific target market</i> di mancanegara dengan dukungan <i>local wisdom</i> masyarakat adat	regional maupun internasional, yang memungkinkan wisatawan asing maupun lokal lebih tertarik dengan destinasi di wilayah lain yang lebih terjangkau dan menawarkan kelebihan lainnya dari sekedar pariwisata	
TECHNOLOGICAL	Pemerintah pusat memfokuskan pembangunan infrastruktur pada area non-konservasi dengan memanfaatkan teknologi konstruksi berkelanjutan	Pembatasan pembangunan fisik di kawasan konservasi menjadi kendala penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata terutama konektivitas	15%
LEGAL	Komitmen pemerintah pusat dalam mengembangkan potensi pariwisata di wilayah Sulmapa melalui penyusunan dokumen perencanaan (contohnya <i>Integrated Tourism Master Plan</i>)	Persaingan antar kawasan pariwisata dalam wilayah Sulmapa	17,50%
ENVIRONMENT	Keanekaragaman hayati dan ekosistem pesisir/laut yang unik menjadi atraksi minat khusus	Kerentanan wilayah atas perubahan iklim, pencemaran, kerusakan lingkungan dan ancaman bencana	15%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari hasil analisis PESTLE untuk fokus pariwisata, ditemukan bahwa parameter sociological memiliki bobot pengaruh tertinggi, dengan nilai sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang terkait dengan aspek sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya.

Tabel 6. 4 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Industri

Peningkatan produktivitas industri melalui pendekatan raw material dan penyediaan infrastruktur dasar			
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	BOBOT PENGARUH (%)
POLITICAL	Motif politik pemerintah pusat dalam peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan bagi Wilayah Timur Indonesia agar dapat mengejar wilayah lain	Arah gerak yang masih belum sejalan sehingga berdampak pada pelemahan program prioritas	14%
ECONOMIC	Skema pembiayaan yang bukan hanya berasal dari APBN menjadi sumber potensial pengembangan kawasan industri di Wilayah Timur Indonesia	Risiko fiskal yang bersumber dari kewajiban kontingensi yang akan berdampak pada kredibilitas pemerintah secara umum dan berdampak negatif pada calon investor	23%
SOCIOLOGICAL	Masyarakat Papua memiliki kesempatan untuk lebih terlibat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan mereka	Dilema pengembangan industri dan investasi dengan perbaikan sumber daya manusia	9%
TECHNOLOGICAL	Investasi teknologi yang ramah lingkungan dapat mendukung keberjalanan industri	Teknologi yang tidak diimbangi dengan dukungan peningkatan kapasitas SDM akan berdampak pada ketidakberlanjutan teknologi	14%
LEGAL	Dukungan kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan arahan pemerataan pembangunan kawasan industri sebagai lokomotif pembangunan, khususnya diluar wilayah Pulau Jawa	Belum adanya kebijakan industri yang spesifik dalam peningkatan dan penguatan industri di Indonesia	18%
ENVIRONMENT	Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dapat dioptimalkan sebagai input produksi industri pengolahan	Industri yang tidak berwawasan lingkungan dan tidak berkelanjutan dapat berdampak pada rusaknya lingkungan disekitar kawasan industri	18%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari hasil analisis PESTLE untuk fokus industri, ditemukan bahwa parameter economic memiliki bobot pengaruh tertinggi, dengan nilai sebesar 23%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang terkait dengan aspek ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengembangan sektor industri di Provinsi Papua Barat Daya.

Tabel 6. 5 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Kawasan Perkotaan

Belum optimalnya peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan terhadap wilayahnya dan wilayah luar			
PARAMETER	OPPORTUNITIES	THREAT	BOBOT PENGARUH (%)
POLITICAL	Terbitnya UU pembentukan Daerah Otonomi Baru	Ancaman keamanan akibat pemilihan Gubernur dan KKB	12%
ECONOMIC	Pertumbuhan pusat ekonomi baru yang dapat menstimulan pertumbuhan ekonomi kawasan sekitar	Pemboikotan investor atau penarikan investor	18%
SOCIOLOGICAL	Transmigrasi penduduk dari Sulawesi dan Maluku ke kawasan perkotaan di Papua	Perbedaan Budaya OAP Pegunungan, OAP Pesisir dan Pendatang	18%
TECHNOLOGICAL	Kota-kota di Indonesia Timur yang Smart City	Jaringan Internet yang belum mencapai seluruh wilayah mempersulit penerapan teknologi untuk pemerintah kota	12%
LEGAL	Peningkatan status perkotaan serta kebijakan pembangunan di kawasan pemekaran baru	Ketidakpastian pembebasan tanah akibat permasalahan Hak Tanah Ulayat	24%
ENVIRONMENT	Kawasan hinterland memiliki komoditas unggulan yang dapat mendukung aktivitas perkotaan	eksploitasi terhadap sumber daya alam serta aktivitas manusia yang masif menurunkan daya dukung kawasan	18%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari hasil analisis PESTLE untuk fokus kawasan perkotaan, ditemukan bahwa parameter legal memiliki bobot pengaruh tertinggi, dengan nilai sebesar 24%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang terkait dengan aspek hukum dan regulasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengembangan kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat Daya.

B. Analisis 5 Forces (Meso)

Secara prinsip, analisis 5 forces mengacu pada kerangka kerja yang menggambarkan lima kekuatan utama yang mempengaruhi tingkat persaingan dalam suatu industri atau pasar (dalam konteks ini pariwisata, industri dan perkotaan). Hasil dari analisis

adalah untuk mengetahui tingkat persaingan dan dinamika industri sehingga dapat mengembangkan strategi yang efektif dalam menjaga daya saing dan mencapai keberhasilan di pasar.

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di Provinsi Papua Barat Daya, didapatkan peluang dan tantangan di level meso yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter yaitu *rivalry among existing competitor* (Persaingan Antar Kompetitor Eksisting), *bargaining power of customers* (Daya Tawar Pelanggan), *bargaining power of suppliers* (Daya Tawar Pemasok), *threat of new entrants* (Ancaman Pendatang Baru), dan *threat of substitutes* (Ancaman Produk Pengganti).

Pada fokus pariwisata, parameter *rivalry among existing competitor* mengindikasikan tingginya hipotesis terkait inovasi. Ini berarti bahwa persaingan antar pesaing yang sudah ada dalam industri pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya didorong oleh faktor inovasi. Dalam lingkungan kompetitif ini, pesaing saling berusaha untuk menciptakan ide baru, produk, atau layanan yang dapat memberikan nilai tambah dan membedakan mereka dari pesaing lainnya.

Pada parameter *bargaining power of customers* (daya tawar pelanggan) dalam fokus pariwisata, hipotesis tertinggi yang muncul adalah tren eksisting. Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan negosiasi dan pengaruh yang dimiliki oleh pelanggan dalam industri pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya lebih dipengaruhi oleh tren yang sudah ada.

Pada parameter *bargaining power of suppliers* (daya tawar pemasok) dalam fokus pariwisata, hipotesis tertinggi yang muncul adalah ketergantungan saat ini. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku industri pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya memiliki tingkat ketergantungan yang signifikan terhadap pemasok dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Pada parameter *threat of new entrants* (ancaman pendatang baru) dalam konteks fokus pariwisata, hipotesis tertinggi yang muncul adalah tantangan yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku industri pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya menghadapi potensi ancaman dari masuknya pesaing baru ke dalam industri pariwisata.

Pada parameter *threat of new substitutes* (ancaman produk pengganti) dalam analisis PESTLE, hipotesis tertinggi yang muncul adalah tren analisis PESTLE. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks fokus pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya, terdapat adanya tren yang berpotensi memberikan ancaman terhadap produk atau layanan yang ada dalam industri pariwisata.

Tabel 6. 6 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Pariwisata

PARAMETER	HIPOTESA STRATEGI (%)	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR			
INOVASI	50.00%	Potensi integrasi sektor pariwisata dengan sektor industri pendukung seperti perikanan dan UMKM	Pemerintah daerah provinsi lebih fokus mengembangkan inovasi di sektor lain seperti industri yang dianggap lebih menguntungkan
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS			
TREN EKSISTING	60.00%	Perubahan tren pariwisata dari <i>mass tourism</i> ke wisata spesifik dan minat khusus di Pulau Papua	<i>Length of stay</i> wisatawan di Pulau Papua pendek karena rute pariwisata baru terbatas di dalam masing-masing kawasan
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS			
KETERGANTUNGAN SAAT INI	67.00%	Pembangunan infrastruktur pendukung sektor pariwisata menggunakan pembiayaan khusus melalui Otsus Papua dan DTI	Konflik sosial dan ketidakpastian kepemilikan lahan menurunkan minat investasi pembangunan infrastruktur pendukung sektor swasta
THREAT OF NEW ENTRANTS			
TANTANGAN YANG DIHADAPI	50.00%	Potensi mengadopsi skema pengembangan pariwisata dari <i>best practice</i> yang ada di Indonesia untuk meningkatkan jumlah wisatawan di Pulau Papua	Pengembangan destinasi pariwisata baru dengan tematik yang serupa di wilayah lainnya di Indonesia mengurangi jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Papua karena biaya yang lebih murah
THREAT OF NEW SUBSTITUTES			
TREN ANALISIS PESTLE	56.00%	Destinasi pariwisata bahari di Pulau Papua saat ini sudah dikenal dan memiliki <i>specific target market</i> di mancanegara sebagai tujuan wisata tematik alam	Adanya persaingan antar destinasi pariwisata, wisatawan asing maupun lokal lebih tertarik dengan destinasi di wilayah lain yang lebih terjangkau

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pada fokus industri di Provinsi Papua Barat Daya, parameter *rivalry among existing competitor* (persaingan antar kompetitor eksisting) dengan bobot hipotesa tertinggi adalah inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks industri di wilayah tersebut, tingkat persaingan antar pelaku industri dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam melakukan inovasi. Sedangkan untuk parameter *bargaining power of customers* (daya tawar pelanggan) bobot hipotesa strategi tertinggi yakni tren eksisting, yang berarti daya tawar pelanggan dipengaruhi oleh tren yang sedang berlangsung di pasar. Dalam konteks parameter *bargaining power of suppliers* (daya tawar pemasok) pada fokus industri di Provinsi Papua Barat Daya, bobot hipotesa strategi tertinggi adalah ketergantungan saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku industri sangat bergantung pada pemasok mereka dalam memenuhi kebutuhan bahan baku, komponen, atau layanan yang diperlukan untuk produksi. Dalam situasi di mana pemasok memiliki daya tawar yang tinggi, mereka dapat mempengaruhi

harga, ketersediaan, atau kualitas bahan atau layanan yang mereka sediakan, sehingga mempengaruhi efisiensi dan kelancaran proses produksi. Oleh karena itu, penting bagi pelaku industri untuk menjaga hubungan yang baik dengan pemasok, mencari alternatif pemasok yang dapat mengurangi ketergantungan, serta melakukan negosiasi yang efektif untuk meminimalisir dampak negatif dari daya tawar pemasok yang tinggi.

Dalam analisis *threat of new entrants* (ancaman pendatang baru), parameter tantangan yang dihadapi memiliki hipotesa dengan bobot tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kemungkinan masuknya pesaing baru ke dalam industri yang dapat mengganggu posisi persaingan pelaku industri yang sudah ada. Ancaman pendatang baru dapat mempengaruhi pasar, harga, pangsa pasar, dan keuntungan pelaku industri yang sudah mapan. Oleh karena itu, pelaku industri perlu meningkatkan daya saing mereka, mempertahankan keunggulan kompetitif, dan menjaga loyalitas pelanggan untuk menghadapi ancaman dari pesaing baru yang mungkin datang dengan inovasi atau strategi baru. Untuk analisis *threat of new substitutes* (ancaman produk pengganti), parameter tren analisis pestle memiliki hipotesa dengan bobot tertinggi. Hal ini menunjukkan adanya potensi munculnya produk pengganti yang dapat menggeser atau mengurangi permintaan terhadap produk yang sudah ada. Ancaman produk pengganti dapat mempengaruhi pangsa pasar dan keuntungan perusahaan yang bergantung pada produk tersebut. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan tren dan inovasi dalam industri mereka serta menjaga keunggulan kompetitif untuk mengatasi ancaman produk pengganti dan mempertahankan posisi mereka di pasar.

Tabel 6. 7 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Industri

PARAMETER	HIPOTESA STRATEGI (%)	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR			
INOVASI	44%	Dukungan Pembentukan Provinsi Baru (DOB) berpotensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai penggerak utama	Sebagian industri pengolahan berskala besar di Pulau Papua belum mulai beroperasi, sehingga belum dapat dilakukan analisis kendala yang dihadapi
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS			
TREN EKSISTING	36%	Tren positif pertumbuhan PDRB dan nilai IPM di Pulau Papua	Dukungan jaminan pasokan sumber bahan baku yang masih belum dapat dipastikan tersedia hingga 20 tahun kedepan
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS			

PARAMETER	HIPOTESA STRATEGI (%)	OPPORTUNITIES	THREAT
KETERGANTUNGAN SAAT INI	43%	Tingginya perhatian pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan industri di Pulau Papua dalam rangka pemerataan	Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sehingga tidak dapat menciptakan sumber pendanaan mandiri
THREAT OF NEW ENTRANTS			
TANTANGAN YANG DIHADAPI	43%	Pembangunan kawasan industri di Pulau Papua dapat menumbuhkan simpul-simpul kegiatan baru	Banyaknya potensi kawasan industri yang dapat dikembangkan dan telah didukung oleh infrastruktur dasar dan akses konektivitas
THREAT OF NEW SUBSTITUTES			
TREN ANALISIS PESTLE	71%	Skema pembiayaan yang bukan hanya berasal dari APBN menjadi sumber potensial pengembangan kawasan industri di Wilayah Timur Indonesia	Risiko fiskal yang bersumber dari kewajiban kontingensi yang akan berdampak pada kredibilitas pemerintah secara umum dan berdampak negatif pada calon investor

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pada fokus kawasan perkotaan terdapat 5 (lima) parameter analisis 5 forces. Parameter pertama yakni *rivalry among existing competitor* dengan hipotesa tertinggi yakni konversi *threat* menjadi *opportunity*, hal ini menandakan bahwa alam persaingan yang ketat, ada potensi untuk mengubah ancaman menjadi peluang yang menguntungkan. Dalam konteks ini, mungkin terdapat peluang untuk berkolaborasi dengan pesaing atau mengadopsi strategi inovasi yang memanfaatkan tren atau perubahan dalam lingkungan perkotaan. Dengan mengidentifikasi peluang dari ancaman yang ada, kawasan perkotaan dapat mengembangkan strategi yang lebih kuat dan memperoleh keuntungan kompetitif yang berkelanjutan.

Parameter kedua dalam analisis 5 forces untuk kawasan perkotaan adalah *bargaining power of customers* (daya tawar pelanggan), dengan hipotesa tertinggi terkait penciptaan nilai. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kawasan perkotaan, pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian dan permintaan pasar. Hipotesa penciptaan nilai mengacu pada kemampuan untuk menyediakan nilai tambah kepada pelanggan melalui produk atau layanan yang unik, inovatif, atau memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam konteks ini,

strategi pengembangan kawasan perkotaan harus berfokus pada menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan, baik melalui peningkatan kualitas produk atau layanan, peningkatan pengalaman pelanggan, atau pengembangan solusi yang memenuhi kebutuhan mereka. Dengan meningkatkan penciptaan nilai, kawasan perkotaan dapat meningkatkan daya tariknya bagi pelanggan, mempertahankan pangsa pasar, dan memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Parameter ketiga yakni *bargaining power of suppliers* (daya tawar pemasok) dengan hipotesa tertinggi yakni kualifikasi yang dibutuhkan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks kawasan perkotaan, pemasok memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan kualitas, ketersediaan, dan harga bahan atau produk yang dibutuhkan. Sehingga penting untuk mempertimbangkan ketergantungan pada pemasok dan memastikan adanya persediaan yang memadai serta kerjasama yang saling menguntungkan. Melalui kerjasama yang baik dengan pemasok yang berkualitas, kawasan perkotaan dapat memastikan ketersediaan bahan atau produk yang berkualitas tinggi dan mendukung keberlanjutan pengembangan perkotaan yang berkelanjutan.

Selanjutnya untuk parameter *threat of new entrants* (ancaman pendatang baru) hipotensis tertinggi yakni strategi untuk memenangkan kompetisi. Yang berarti adanya ancaman dari entitas baru yang masuk ke pasar dapat menggerakkan strategi yang agresif untuk mempertahankan posisi dan memenangkan persaingan.

Dalam analisis 5 forces, parameter terakhir adalah *threat of new substitutes* (ancaman dari produk pengganti baru), dengan hipotesis tertinggi terkait tren analisis PESTLE. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks kawasan perkotaan, adanya ancaman dari produk pengganti baru yang muncul dapat mempengaruhi permintaan dan popularitas produk atau layanan yang ada. Tren dalam analisis PESTLE seperti perubahan sosial, kebijakan pemerintah, atau kemajuan teknologi dapat memicu munculnya produk pengganti yang lebih inovatif atau efisien. Dalam menghadapi ancaman ini, kawasan perkotaan perlu mengantisipasi perubahan tren dan menerapkan strategi yang adaptif, seperti peningkatan kualitas, diferensiasi produk, atau pengembangan inovasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan tetap relevan di pasar. Dengan demikian, kawasan perkotaan dapat menjaga daya tariknya di hadapan ancaman produk pengganti baru yang muncul.

Tabel 6. 8 Analisis 5 Forces (Meso) Fokus Kawasan Perkotaan

PARAMETER	HIPOTESA STRATEGI (%)	OPPORTUNITIES	THREAT
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR			
KONVERSI THREAT MENJADI OPPORTUNITY	44%	Kerjasama antar kawasan dalam memenuhi kebutuhan	Pemberhentian supply dan kerjasama dari kawasan lain

PARAMETER	HIPOTESA STRATEGI (%)	OPPORTUNITIES	THREAT
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS			
PENCIPTAAN NILAI	44%	Terbentuknya RTRW Provinsi Baru dan Dokumen Perencanaan lainnya	Adanya kebijakan baru dengan arahan yang berbeda
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS			
KUALIFIKASI YANG DIBUTUHKAN	45%	Terhubung dan Fungsional Jalan Trans Papua, Terhubung dan Fungsional Seluruh Jalan antar Kabupaten (Jalan Provinsi)	Kondisi Geografis menyebabkan pembangunan jalan menjadi Sulit dan Mahal
THREAT OF NEW ENTRANTS			
STRATEGI UNTUK MEMENANGKAN KOMPETISI	50%	Pemanfaatan alternatif pembiayaan (Dana Otsus, Transfer, DAK, Inpres) optimal	Pemanfaatan anggaran yang tidak sesuai
THREAT OF NEW SUBSTITUTES			
TREN ANALISIS PESTLE	45%	Peningkatan status perkotaan serta kebijakan pembangunan di kawasan pemekaran baru	Ketidakpastian pembebasan tanah akibat permasalahan Hak Tanah Ulayat

Sumber: Hasil Analisis, 2023

C. Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan dengan meninjau faktor-faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) terhadap setiap fokus pengembangan di Provinsi Papua Barat. Identifikasi faktor eksternal berupa peluang dan ancaman menggunakan hasil dari analisis 5-forces yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya.

PARIWISATA

Berikut analisis SWOT untuk fokus pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya.

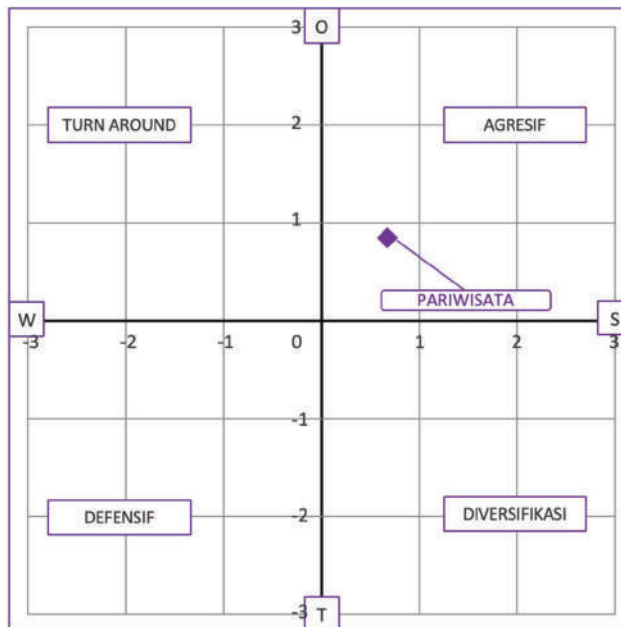
Tabel 6. 9 Analisis SWOT Fokus Pariwisata

STRENGTHS	WEAKNESSES
Jumlah wisatawan internasional dan 1 lokal di Kabupaten Raja Ampat mengalami kenaikan setiap tahunnya	1 Masih rendahnya kualitas SDM di Papua Barat untuk mendukung sektor pariwisata

2 Keanekaragaman hayati dan ekosistem pesisir/laut yang unik menjadi atraksi minat khusus	2 Kendala kelembagaan pariwisata mengakibatkan sarana prasarana terbangun tidak terawat
3 Raja Ampat menjadi salah satu destinasi pariwisata prioritas yang telah disusun dokumen ITMP nya	3 Belum efektifnya pembangunan ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal khususnya dalam mendukung sektor pariwisata
4 Memiliki Brand Image tinggi sebagai destinasi Wisata Bahari	4 Kerentanan wilayah atas perubahan iklim, pencemaran, kerusakan lingkungan dan ancaman bencana
5 Dukungan infrastruktur yang telah dibangun dan berfungsi dengan baik di kawasan	5 Belum terpenuhinya standar pelayanan minimum dan rendahnya ketersediaan serta kualitas infrastruktur dasar
OPPORTUNITIES	THREATS
1 Perubahan tren pariwisata dari <i>mass tourism</i> ke wisata spesifik dan minat khusus di Pulau Papua	1 <i>Length of stay</i> wisatawan di Pulau Papua pendek karena rute pariwisata baru terbatas di dalam masing-masing kawasan
2 Pembiayaan khusus melalui Otsus Papua dan DTI mendukung program pembangunan infrastruktur pendukung sektor pariwisata	2 Kendala keamanan dan kepastian kepemilikan lahan menjadi tantangan bagi investor
3 Potensi mengadopsi skema pengembangan pariwisata dari best practice yang ada di Indonesia untuk diimplementasikan di Pulau Papua	3 Pengembangan destinasi pariwisata baru dengan tematik yang serupa di wilayah lainnya di Indonesia mengurangi jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Papua karena biaya yang lebih murah
4 Sektor pariwisata di Pulau Papua dapat diintegrasikan dengan sektor industri pendukung seperti perikanan dan UMKM	4 Pemerintah daerah provinsi lebih fokus mengembangkan sektor lain seperti industri yang dianggap lebih menguntungkan
5 Destinasi pariwisata bahari di Pulau Papua saat ini sudah dikenal dan memiliki specific target market di mancanegara sebagai tujuan wisata tematik alam	5 Adanya persaingan antar destinasi pariwisata, wisatawan asing maupun lokal lebih tertarik dengan destinasi di wilayah lain yang lebih terjangkau, diperlukan business scheme yang meningkatkan daya tarik

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari SWOT yang telah diidentifikasi kemudian dilakukan pembobotan dan rating untuk selanjutnya menghasilkan skor baik untuk faktor internal dan eksternal. Didapat skor faktor internal untuk pariwisata yakni 0,71 dan skor faktor eksternal yakni 0,85. Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan.



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 6. 7 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Pariwisata

Pengembangan fokus pariwisata berada pada kuadran agresif, maka strategi yang diambil harus memanfaatkan kekuatan internal yang dimiliki secara maksimal dan memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Terhadap kekuatan (strengths), strategi harus fokus pada penguatan dan pemanfaatan keunggulan kompetitif yang dimiliki dalam sektor pariwisata. Terhadap peluang (opportunities), strategi harus berorientasi pada penangkapan peluang-peluang yang muncul di sektor pariwisata. Berikut hasil perumusan strategi untuk pengembangan fokus pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya:

1. Pengembangan pariwisata berbasis wisata minat khusus dengan fokus mendorong investasi swasta berupa pengembangan kawasan pariwisata berbasis edutourism, adventourism, healthourism, dst (S2-O1)
2. Penguatan konsep pengembangan pariwisata dan fokus penguatan brand image dengan mengadopsi metode dari best practice destinasi lainnya di Indonesia (S4-O3)
3. Dukungan pembangunan dan peningkatan infrastruktur untuk mengintegrasikan sektor pariwisata dengan sektor industri pendukung seperti perikanan dan UMKM (S5-O4)
4. Mendorong investasi swasta dalam pengembangan kawasan pariwisata untuk fokus pada specific target market dengan pengembangan skema inovatif dan business scheme yang meningkatkan daya Tarik (S5-O5)

INDUSTRI

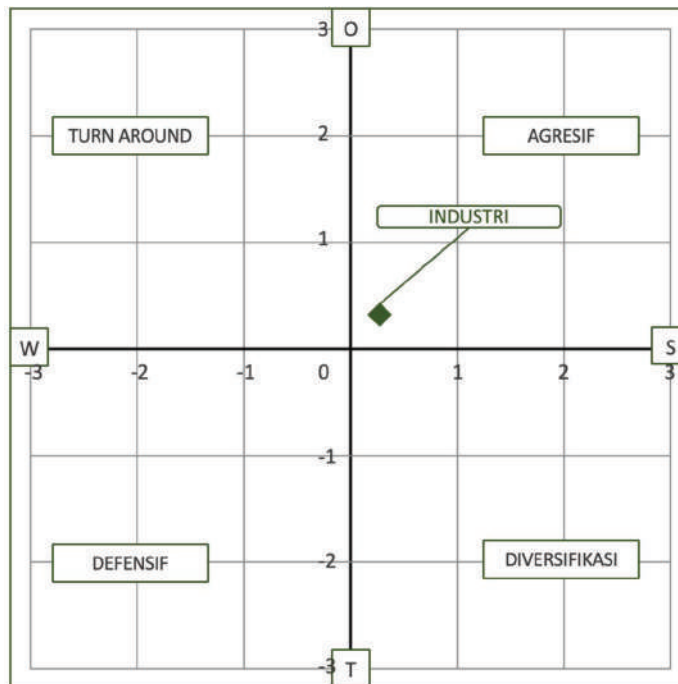
Berikut analisis SWOT untuk fokus industri di Provinsi Papua Barat Daya.

Tabel 6. 10 Analisis SWOT Fokus Industri

STRENGTHS		WEAKNESSES	
1	Berada pada jalur lintasan perdagangan internasional Asia Pasifik dan Australia	1	Rendahnya pemanfaatan lahan di KEK Sorong yang disebabkan karena transformasi lahan (capaian pemanfaatan lahan tahun 2020 sebesar 14,24% atau terealisasi 37,28 Ha dari target pemanfaatan seluas 261,85 Ha)
2	Potensi sumberdaya alam migas, perkebunan, perikanan, dan pertambangan	2	Rendahnya investasi pembangunan kawasan pada tahun 2020 yang baru mencapai 8,9% atau terealisasi Rp 138,3 Miliar dari target sebesar Rp 1,55 Triliun
3	Komitmen investasi pelaku usaha yang dibuktikan dengan capaian pelaku usaha pada tahun 2020 sebesar 56,6% atau terealisasi Rp 9.197,76 Miliar dari target sebesar Rp 16,25 Triliun	3	Rendahnya capaian penyerapan tenaga kerja yang baru mencapai 1,2% pada tahun 2020 atau terealisasi 80 orang dari target penyerapan tenaga kerja 6.680 orang
4	Salah satu pilar ketahanan pangan nasional	4	Pelabuhan Arar yang belum beroperasi sebagaimana fungsinya
5	Membantu mempercepat perkembangan daerah melalui pusat pertumbuhan ekonomi baru	5	Belum terpenuhinya pasokan listrik dalam kapasitas daya sangat besar dan supply air bersih
OPPORTUNITIES		THREATS	
1	Dukungan Pembentukan Provinsi Baru (DOB) berpotensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai penggerak utama	1	Sebagian industri pengolahan berskala besar di Pulau Papua belum mulai beroperasi, sehingga belum dapat dilakukan analisis kendala yang dihadapi
2	Tren positif pertumbuhan PDRB dan nilai IPM di Pulau Papua	2	Dukungan jaminan pasokan sumber bahan baku yang masih belum dapat dipastikan tersedia hingga 20 tahun kedepan
3	Tingginya perhatian pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan industri di Pulau Papua dalam rangka pemerataan	3	Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sehingga tidak dapat menciptakan sumber pendanaan mandiri
4	Pembangunan kawasan industri di Pulau Papua dapat menumbuhkan simpul-simpul kegiatan baru	4	Banyaknya potensi kawasan industri yang dapat dikembangkan dan telah didukung oleh infrastruktur dasar dan akses konektivitas
5	Skema pembiayaan yang bukan hanya berasal dari APBN menjadi sumber potensial pengembangan kawasan industri di Wilayah Timur Indonesia	5	Risiko fiskal yang bersumber dari kewajiban kontingensi yang akan berdampak pada kredibilitas pemerintah secara umum dan berdampak negatif pada calon investor

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari SWOT yang telah diidentifikasi kemudian dilakukan pembobotan dan rating untuk selanjutnya menghasilkan skor baik untuk faktor internal dan eksternal. Didapat skor faktor internal untuk industri yakni 0,29 dan skor faktor eksternal yakni 0,3. Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan.



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 6. 8 **Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Industri**

Pengembangan fokus industri berada pada kuadran agresif, maka strategi yang diambil harus memanfaatkan kekuatan internal yang dimiliki secara maksimal dan memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Terhadap kekuatan (strengths), strategi harus fokus pada penguatan dan pemanfaatan keunggulan kompetitif yang dimiliki dalam sektor industri. Terhadap peluang (opportunities), strategi harus berorientasi pada penangkapan peluang-peluang yang muncul di sektor industri. Berikut hasil perumusan strategi untuk pengembangan fokus industri di Provinsi Papua Barat Daya:

1. Peningkatan kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan stakeholder dalam percepatan pengembangan kawasan industri di Provinsi Papua Barat Daya (S3-O1)

2. Peningkatan kualitas SDM lokal untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja baru (S3-O2)
3. Penyediaan infrastruktur (jalan, air bersih, kelistrikan) dalam rangka percepatan pengembangan KEK/KI di Provinsi Papua Barat Daya (S5-O4)
4. Penguatan produktivitas dan nilai komoditas (S2-O3)

KAWASAN PERKOTAAN

Berikut analisis SWOT untuk fokus kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat Daya

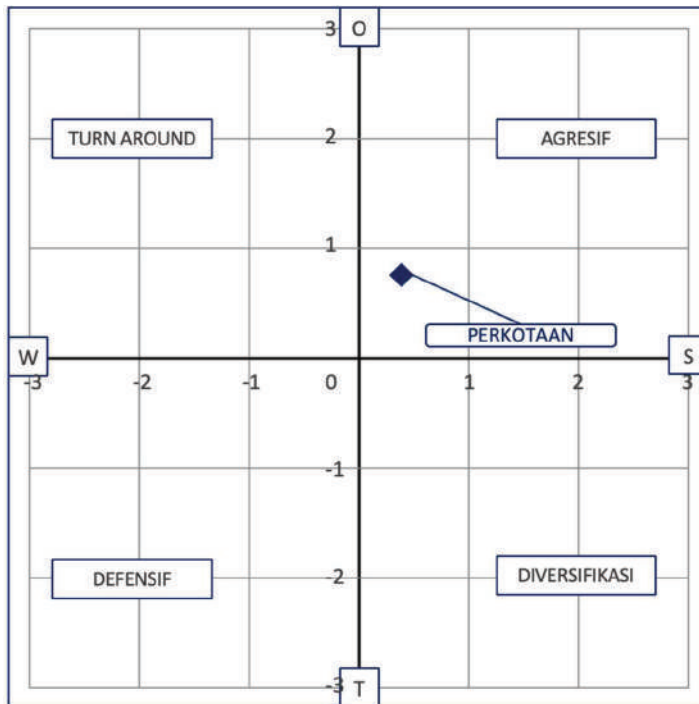
Tabel 6. 11 Analisis SWOT Fokus Kawasan Perkotaan

STRENGTHS		WEAKNESSES	
1	Jumlah penduduk di PKN PKW besar, termasuk dalam klasifikasi kota besar	1	Sektor ekonomi masih bergantung pada sektor industri dan migas, kegiatan utama perkotaan (jasa dan perdagangan) belum menjadi kontributor terbesar ekonomi
2	Lahan untuk pengembangan masih tersedia luas	2	Jalan penghubung dari wilayah hinterland ke perkotaan belum terkoneksi dengan baik
3	Kebijakan eksisting mendukung pemantapan peran perkotaan PKN dan PKW	3	Tingkat kualitas SDM masih rendah (IPM 65,89 dibawah nasional)
4	Berada di jalur persimpangan dan simpul pergerakan manusia dan barang	4	Infrastruktur pelayanan dasar belum terpenuhi (persampahan, Sanitasi, air minum, perumahan)
5	Kawasan sekitar perkotaan memiliki berbagai komoditi unggulan (industri, pertanian, perkebunan, pariwisata)	5	Kawasan penyangga belum optimal mendukung kawasan perkotaan menjadi pusat jasa dan perdagangan
OPPORTUNITIES		THREATS	
1	Kerjasama antar kawasan dalam memenuhi kebutuhan	1	Pemberhentian supply dan kerjasama dari kawasan lain
2	Terbentuknya RTRW Provinsi Baru dan Dokumen Perencanaan lainnya	2	Adanya kebijakan baru dengan arahan yang berbeda
3	Terhubung dan Fungsional Jalan TransPapua, Terhubung dan Fungsional Seluruh Jalan antar Kabupaten (Jalan Provinsi)	3	Kondisi Geografis menyebabkan pembangunan jalan menjadi Sulit dan Mahal
4	Pemanfaatan alternatif pembiayaan (Dana Otsus, Transfer, DAK, Inpres) optimal	4	Pemanfaatan anggaran yang tidak sesuai
5	Peningkatan status perkotaan serta kebijakan pembangunan di kawasan pemekaran baru	5	Ketidakpastian pembebasan tanah akibat permasalahan Hak Tanah Ulayat

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari SWOT yang telah diidentifikasi kemudian dilakukan pembobotan dan rating untuk selanjutnya menghasilkan skor baik untuk faktor internal dan eksternal. Didapat skor faktor internal untuk kawasan perkotaan yakni 0,45 dan skor faktor

eksternal yakni 0,75. Hasil pembobotan tersebut kemudian dimasukkan dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan.



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 6. 9 **Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Kawasan Perkotaan**

Pengembangan fokus kawasan perkotaan berada pada kuadran agresif, maka strategi yang diambil harus memanfaatkan kekuatan internal yang dimiliki secara maksimal dan memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Terhadap kekuatan (strengths), strategi harus fokus pada penguatan dan pemanfaatan keunggulan kompetitif yang dimiliki dalam kawasan perkotaan. Terhadap peluang (opportunities), strategi harus berorientasi pada penangkapan peluang-peluang yang muncul di kawasan perkotaan. Berikut hasil perumusan strategi untuk pengembangan fokus kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat Daya:

1. Pemenuhan infrastruktur dasar perkotaan mendukung fungsi pusat pertumbuhan dan pelayanan (S3-O1-O4)
2. Penguatan peran simpul pergerakan dan peningkatan konektivitas intra kawasan perkotaan serta antara kawasan perkotaan dan pendukungnya (S1-S4-O1-O3)
3. Mengakselerasi penguatan hilirisasi masing-masing komoditas unggulan di kawasan pendukung terhadap perkotaan dalam fungsi pusat jasa dan perdagangan (S2-S5-O1-O2-O4)

6.3 Skenario Pengembangan

Sub bab ini menjelaskan bagaimana proses dari penentuan kawasan prioritas (lokus) yang didasari pada potensi permasalahan kawasan, isu strategis, dan strategi pengembangan wilayah pada masing-masing fokus. Adapun prioritas pengembangan dilakukan untuk mengoptimalkan isu strategis dan grand strategi pada masing-masing sektor (fokus).

6.3.1 Pariwisata

Penentuan kawasan prioritas pada sektor pariwisata didasari oleh 8 kriteria yaitu (1) Kawasan prioritas pada perencanaan/kebijakan nasional (RPJMN 2020-2024), (2) Kawasan strategis pariwisata dalam RIPPARNAS, (3) Terdapat bandara/pelabuhan di sekitar kawasan, (4) Kawasan dengan dukungan Pemda dalam pengembangan sektor pariwisata, (5) Kawasan dengan dukungan Badan Usaha (BU) dalam pengembangan sektor pariwisata, (6) Tersedianya SDM/tenaga pendukung dan pengelola pariwisata yang kompeten, (7) Tersedianya sekolah khusus bidang pariwisata di kawasan, dan (8) Memenuhi amenitas dan atraksi.

Tabel 6. 12 **Parameter Penilaian Fokus Pariwisata**

Kode	Parameter	Penilaian
1	Kawasan prioritas pada perencanaan/kebijakan nasional (RPJMN 2020-2024)	Ya (1), Tidak (0)
2	Kawasan strategis pariwisata dalam RIPPARNAS	Ya (1), Tidak (0)
3	Terdapat bandara/pelabuhan di sekitar kawasan	Ya (1), Tidak (0)
4	Kawasan dengan dukungan Pemda dalam pengembangan sektor pariwisata	Ya (1), Tidak (0)
5	Kawasan dengan dukungan Badan Usaha (BU) dalam pengembangan sektor pariwisata	Ya (1), Tidak (0)
6	Tersedianya SDM/tenaga pendukung dan pengelola pariwisata yang kompeten	Ya (1), Tidak (0)
7	Tersedianya sekolah khusus bidang pariwisata di kawasan	Ya (1), Tidak (0)
8	Memenuhi amenitas dan atraksi	Ya (1), Tidak (0)

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap indikasi kawasan untuk sektor pariwisata berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

Tabel 6. 13 **Penentuan Kawasan Prioritas Sektor Pariwisata**

No	Indikasi Kawasan	Parameter								Total Point	Prioritas
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
1	DPP Raja Ampat	1	1	1	1	0	1	1	1	7	1

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari hasil penilaian diatas didapatkan bahwa 1 (satu) prioritas utama pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya yakni DPP Raja Ampat.

6.3.2 Industri

Penentuan kawasan prioritas pada sektor industri didasari oleh 7 kriteria yaitu (1) Merupakan kebijakan direktif Presiden, (2) Terdapat dukungan Pemda/Kementerian/Lembaga, (3) Berada dekat dengan lokasi sumber bahan baku, (4) Terdapat dukungan konektivitas (jalan, pelabuhan, bandara), (5) Merupakan kawasan prioritas pada perencanaan nasional (RIPIN/RPJMN), (6) Terdapat realisasi investasi yang besar, dan (7) Sesuai dengan arah pengembangan Provinsi Papua Barat Daya.

Tabel 6. 14 **Parameter Penilaian Fokus Industri**

Kode	Parameter	Penilaian
1	Merupakan kebijakan direktif Presiden	Ya (1), Tidak (0)
2	Terdapat dukungan Pemda/Kementerian/ Lembaga	Ya (1), Tidak (0)
3	Berada dekat dengan lokasi sumber bahan baku	Ya (1), Tidak (0)
4	Terdapat dukungan konektivitas (jalan, pelabuhan, bandara)	Ya (1), Tidak (0)
5	Merupakan kawasan prioritas pada perencanaan nasional (RIPIN/RPJMN)	Ya (1), Tidak (0)
6	Terdapat realisasi investasi yang besar	Ya (1), Tidak (0)
7	Sesuai dengan arah pengembangan Provinsi Papua Barat Daya	Ya (1), Tidak (0)
8	Memenuhi amenitas dan atraksi	Ya (1), Tidak (0)

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap indikasi kawasan untuk sektor industri berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

Tabel 6. 15 **Penentuan Kawasan Prioritas Sektor Industri**

No	Indikasi Kawasan	Parameter							Total Point	Prioritas
		I	II	III	IV	V	VI	VII		
1	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong	1	1	1	1	1	1	1	7	1
2	Kawasan Industri Kais, Sorong Selatan	1	1	1	0	0	1	0	4	3

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari hasil penilaian diatas didapatkan bahwa prioritas utama pengembangan sektor industri di Provinsi Papua Barat Daya yakni KEK Sorong, dan Kawasan Industri Kais.

6.3.3 Kawasan Perkotaan

Penentuan kawasan prioritas pada kawasan perkotaan didasari oleh 9 kriteria yaitu (1) Kawasan prioritas pada perencanaan/kebijakan nasional (RTRWN PP 13/2017), (2) Kawasan prioritas dalam RTRW Provinsi Papua Barat, (3) Berkaitan dengan pengembangan DOB Baru Prov. Papua Barat Daya, (4) Terdapat kesiapan Pemda untuk mendukung pengembangan kawasan, (5) Terdapat permasalahan khas perkotaan (kumuh, macet), (6) Memiliki jumlah penduduk lebih dari 50.000 jiwa (kota sedang), (7) Memiliki jumlah penduduk lebih dari 100.000 jiwa (kota besar), (8) Merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), karena PKN sudah pasti menjadi perhatian pemerintah pusat, dan (9) Memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Papua Barat Daya lebih dari Rp. 10 M.

Tabel 6. 16 **Parameter Penilaian Fokus Kawasan Perkotaan**

Kode	Parameter	Penilaian
1	Kawasan prioritas pada perencanaan/kebijakan nasional (RTRWN PP 13/2017)	Ya (1), Tidak (0)
2	Kawasan prioritas dalam RTRW Provinsi Papua Barat	Ya (1), Tidak (0)
3	Berkaitan dengan pengembangan DOB Baru Prov. Papua Barat Daya	Ya (1), Tidak (0)
4	Terdapat kesiapan Pemda untuk mendukung pengembangan kawasan	Ya (1), Tidak (0)
5	Terdapat permasalahan khas perkotaan (kumuh, macet)	Ya (1), Tidak (0)
6	Memiliki jumlah penduduk lebih dari 50.000 jiwa (kota sedang)	Ya (1), Tidak (0)
7	Memiliki jumlah penduduk lebih dari 100.000 jiwa (kota besar)	Ya (1), Tidak (0)
8	Merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), karena PKN sudah pasti menjadi perhatian pemerintah pusat	Ya (1), Tidak (0)
9	Memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Papua Barat Daya lebih dari Rp. 10 M	Ya (1), Tidak (0)

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap indikasi kawasan untuk kawasan perkotaan berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

Tabel 6. 17 Penentuan Kawasan Prioritas Perkotaan

No	Indikasi Kawasan	Parameter									Total Point	Prioritas
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
2	PKN Sorong	1	1	1	1	0	1	1	0	1	7	2
4	Kota Baru Pusat Pemerintahan Provinsi Barat Daya	0	0	1	1	0	1	1	0	1	5	4
5	Kota Baru Sorong	0	0	1	1	0	1	1	0	1	5	5
6	PKW Ayamaru	1	1	0	1	0	0	0	1	0	4	6
7	Perkotaan Fef-Tambrau (usulan Baru)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	8
8	Perkotaan Kumurkek - Maybrat (usulan baru)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	9

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari hasil penilaian diatas didapatkan bahwa 1 (satu) prioritas utama pengembangan kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat Daya yakni PKN Sorong.



BAB 7

ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR



BAB VII
ANALISIS KEBUTUHAN INFRSTRUKTUR

7.1 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah di Provinsi Papua Barat Daya

7.1.1 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Sumber Daya Air di Provinsi Papua Barat Daya

A. Analisis Kebutuhan Air Baku

Wilayah Provinsi Papua Barat Daya dilalui oleh banyak sungai, yang tercakup dalam 2 (dua) wilayah sungai (WS), yaitu WS Kamundan Sebyar dan WS Omba. Keberadaan WS tersebut mampu mencukupi kebutuhan domestik maupun non domestik di Provinsi Papua Barat Daya apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.

Dari hasil analisis, untuk tahun 2034 diperlukan sekitar 1.273,55 liter/detik untuk memenuhi kebutuhan domestik dan kawasan-kawasan prioritas nasional di Provinsi Papua Barat Daya, dengan perhitungan menggunakan asumsi sebagai berikut:

- Kebutuhan domestik untuk Kota 150 ltr/org/hari; untuk Kabupaten 60 ltr/org/hari;
- Kebutuhan Kawasan Industri dan Pelabuhan 50 ltr/org/hari;
- Kebutuhan SKPT: 50 ltr/org/hari;
- Kebutuhan wisatawan diasumsikan pada hari maksimal;
- Kebutuhan air untuk wisatawan: meggunakan asumsi 60 ltr/org/hari;
- Kebutuhan proses produksi pada Kawasan Industri maupun Sentra Produksi 0,55-0,75 liter/detik/Ha; dan
- Kebutuhan irigasi 1,2 liter/detik/ha.

Adapun analisis lebih rinci mengenai kebutuhan infrastruktur sumber daya air di Provinsi Papua Barat Daya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7. 1 Kebutuhan Air Baku di Provinsi Papua Barat Daya

Kabupaten	Peruntukan	Kebutuhan (ltr/dtk)		Air Baku Eksistins (ltr/detik) Tahun 2021	GAP (ltr/detik)	
		Tahun 2022	Tahun 2034		Tahun 2022	Tahun 2034
Kota Sorong	Domestik	613,97	822,08	0	613,97	839,44
	Pusat Pemerintahan	-	17,36			

Kabupaten	Peruntukan	Kebutuhan (litr/dtk)		Air Baku Eksistin g (litr/det ik) Tahun 2021	GAP (litr/detik)	
		Tahun 2022	Tahun 2034		Tahun 2022	Tahun 2034
	Provinsi Papua Barat Daya					
	PKN Sorong , PKSN Sorong					
Sorong	Domestik	85,27	109,59	20	65,27	106,95
	Kota Baru Sorong & KEK Sorong	-	17,36			
Sorong Selatan	Domestik	44,82	56,48	0	44,82	111,34
	KI Kais (usulan baru)	-	54,86			
Raja Ampat	Domestik	45,72	53,58	0	45,72	105,66
	DPP Raja Ampat (KPPN Raja Ampat, KSPN Raja Ampat, Geopark Raja Ampat)	-	52,08			
Tambrau	Domestik	12,94	14,06	0	12,94	40,97
	SKPT Tambrau (Usulan Baru)	-	0,87			
	Food Estate Tambrau	-	8,68			
	Perkotaan Fef – Tambrau (usulan baru)	-	17,36			
Maybrat	Domestik	39,06	49,19	0	39,06	49,19
	Perkotaan Kumurkek (usulan baru)					
Provinsi Papua Barat		841,78	1.273,55	20	821,78	1253,55

Sumber: Hasil Analisis, 2022

B. Analisis Kebutuhan Pengendalian Daya Rusak Air

Di Provinsi Papua Barat Daya terdapat rawan bencana tsunami maupun abrasi pantai sehingga memerlukan adanya infrastruktur pengendalian daya rusak air, secara lebih rinci tertera pada tabel berikut:

Tabel 7. 2 Kebutuhan Pengendalian Daya Rusak Air

Kabupaten / Kota	Kecamatan	Panjang Pantai Terancam Daya Rusak Air(km)	Infrastruktur Eksisting (km)	Gap Kebutuhan Infrastruktur (km)
Kota Sorong	Kecamatan Sorong Barat	11,500	2,611	8,889
Kota Sorong	Kecamatan Sorong	2,500	0	2,500
Kota Sorong	Kecamatan Sorong Manoi	2,000	0	2,000

Sumber: Hasil Analisis, 2022

7.1.2 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua Barat Daya

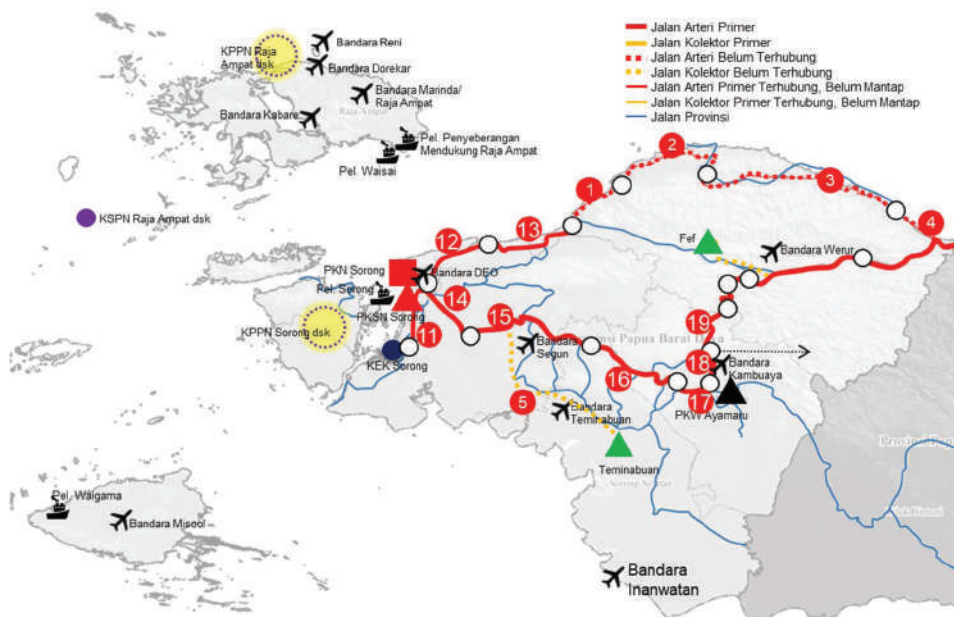
Analisis kesenjangan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Papua Barat Daya merupakan kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah. Berikut analisis kebutuhan pembangunan jaringan jalan.

Tabel 7. 3 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua Barat Daya (Sorong dan Sekitarnya)

No	Kebutuhan Jalan	Indikasi Panjang Jalan (km)	Analisis Konektivitas
1	Pembangunan Jalan Mega – Sausafor	28.01	- Mendukung konektivitas di jalur utara Pulau Papua - Mendukung pengembangan wilayah pesisir utara Pulau Papua - Meningkatkan akses pada Jalur Pantai Utara Pulau Papua sehingga terhubung ke Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat
2	Pembangunan Jalan Sausafor – Saubeba	57.75	
3	Pembangunan Jalan Saubeba – Wau	35.13	
4	Pembangunan Jalan Wau – Saukorem	38.41	
5	Pembangunan Jalan Akses Industri Kais – Sorong Selatan	55,59	- Dukungan pengembangan dan hilirisasi komoditas unggulan di Papua Barat - Pengembangan wilayah Kab. Sorong Selatan
6	Pembangunan Jalan Akses Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Lokasi belum definitif	- Mendukung pengembangan pusat pemerintahan baru Provinsi Papua Barat Daya - Mendukung perwujudan PKN Sorong
7	Pembangunan Jalan Akses Kota Baru Sorong	Lokasi belum definitif	Mendukung pengembangan Kota Baru Sorong sebagai cadangan ruang akibat perkembangan Kota Sorong

No	Kebutuhan Jalan	Indikasi Panjang Jalan (km)	Analisis Konektivitas
8	Pembangunan Jalan Akses SKPT Tambrau	Lokasi belum definitif	▪ Mendukung hilirisasi komoditas unggulan (pergerakan barang terendah di Provinsi Papua Barat Daya) ▪ Mendukung pengembangan Kab. Tambrau
9	Pembangunan Jalan Akses Food Estate Tambrau	Lokasi belum definitif	▪ Pembangunan Jalan guna mendukung pengembangan food estate Arso (dukungan ketahanan pangan)
10	Pembangunan Jalan Akses Perkotaan Kumurkek – Maybrat	Lokasi belum definitif	▪ Mendukung pengembangan kawasan permukiman perkotaan di ibukota Kabupaten Maybrat (Kumurkek) ▪ Mendukung hilirisasi produk dari dan menuju Kab. Maybrat ▪ Meningkatkan akses dari Jalan Trans Papua ke Kab. Maybrat
11	Peningkatan Jalan Aimas (Km 23) - Pel. Arar(Sorong)	1.81	▪ Kemantapan jalan 89,26% dari 16,90 km
12	Peningkatan Jalan Sorong - Makbon	4.12	▪ Kemantapan jalan 88,56% dari 36,00 km
13	Peningkatan Jalan Makbon - Mega	28.51	▪ Kemantapan jalan 48,16% dari 55,00 km
14	Peningkatan Jalan Bts. Kota Sorong -Aimas – Klamono	4.2	▪ Kemantapan jalan 85,85% dari 29,67 km
15	Peningkatan Jalan Klamono - Bts. Kab. Sorong Selatan	37.09	▪ Kemantapan jalan 38,39% dari 60,20 km
16	Peningkatan Jalan Bts. Kab. Sorong Selatan – Kambuaya	18.79	▪ Kemantapan jalan 72,35% dari 67,97 km
17	Peningkatan Jalan Kambuaya – Susumuk	9.48	▪ Kemantapan jalan 63,34% dari 25,86 km
18	Peningkatan Jalan Susumuk – Kumurkek	3.82	▪ Kemantapan jalan 69,31% dari 12,45 km
19	Peningkatan Jalan Kumurkek-Ayawasi – Snopy	50.84	▪ Kemantapan jalan 63,11% dari 137,80 km

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Sumber: Hasil Analisis, 2022

Gambar 7. 1 Kebutuhan Pembangunan dan Penanganan Jalan di Provinsi Papua Barat Daya

7.1.3 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Permukiman Provinsi Papua Barat Daya

A. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Sektor Air Minum Provinsi Papua Barat Daya

Ketersediaan air minum ini menjadi salah satu tolak ukur tingkat kesehatan yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan dan produktifitas masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu prioritas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat suatu daerah, dimana Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan akan air minum dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan pada Profil dan Kinerja Infrastruktur (bab 4) serta data SIMSPAM diketahui bahwa Layanan Akses Air Minum di Provinsi Papua Barat Daya 22,09 % masih ada selisih 73,81 % persen untuk mencapai target dari Renstra PUPR untuk tahun 2022 (95,9%). Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Papua Barat Daya masih memerlukan penambahan infrastruktur baik air baku maupun infrastruktur air minumnya.

Pengelolaan air bersih di Provinsi Papua Barat Daya oleh PDAM dan Non PDAM. Belum semua Kabupaten dan Kota memiliki PDAM, sehingga pengelolaan dilakukan oleh UPTD ataupun Dinas terkait. Sedangkan untuk lainnya dipenuhi oleh sistem

penyediaan air minum pedesaan (PAMSIMAS), serta sistem Penampungan Air Hujan (SPAH) ataupun pemenuhan secara mandiri.

Selain untuk pemenuhan kebutuhan domestik, penyediaan air bersih yang dilakukan juga direncanakan untuk dapat melayani kebutuhan non domestik, komersil untuk khusus kegiatan pariwisata belum dilakukan secara terpisah, namun untuk mengetahui tingkat kebutuhan wisatawan, berikut disajikan perhitungan kebutuhan masing-masing peruntukan.

Tabel 7. 4 Jumlah dan Kapasitas SPAM Terpasang di Prov. Papua Barat Daya

No	Nama Kabupaten	Jumlah Unit SPAM	Jumlah Berfungsi	Presentase Keberfungsian	Kapasitas (liter/detik)		Presentase Tingkat Keterpakaian
					Terpasang	Produksi	
1	Sorong Selatan	34	22	64,71	65,4	65,4	100
2	Sorong	52	18	34,62	748,51	48,51	100
3	Raja Ampat	22	21	95,45	18,6	18,6	100
4	Tambrau	28	28	100	125,63	125,63	100
5	Maybrat	42	17	40,48	53,76	53,76	100
6	Kota Sorong*	1	1	100	62,5	50	80
Total		179	107	435,26	1.074,4	361,9	96,67

Sumber : SIMSPAM DITJEN CK KEMEN PUPR, DIAKSES 19.10.2022

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa kapasitas SPAM terpasang di Provinsi Papua Barat Daya adalah 1.074,4 liter/detik dan kapasitas produksi sebesar 361,9 liter/detik sehingga masih terdapat *Idle Capacity* sebesar 19,5 liter/detik. Dikarenakan keterbatasan sumber data, tabel diatas belum menunjukan waktu operasional dari masing-masing SPAM yang ada di Provinsi Papua Barat Daya.

Perhitungan Kebutuhan Air

Dalam perencanaan perhitungan kebutuhan sektor air minum, terdapat beberapa dasar dan asumsi yang digunakan, yaitu :

- Infrastruktur air minum harus mampu melayani kebutuhan harian untuk populasi (domestik), wisatawan untuk kawasan pariwisata, kebutuhan domestik di Kawasan Industri, kawasan pertanian maupun kawasan peternakan dan amenities lainnya.
- Data proyeksi populasi mengacu pada perhitungan dari analisis demografi.
- Perhitungan pemenuhan kebutuhan air minum dihitung sebagai kegiatan non domestic juga memprakirakan adanya kebocoran air.
- Perhitungan proyeksi kebutuhan air minum dilakukan untuk semua Kabupaten/Kota yang ada di Papua Barat Daya.

- Proyeksi Penambahan penduduk untuk Kawasan-kawasan pengembangan baru dilakukan berdasarkan asumsi dan standar sesuai dengan rencana pengembangan kawasan.

Kebutuhan air bersih untuk Kabupaten/Kota dengan Status PKN/PKW, kebutuhan air menggunakan standar sebesar 150 ltr/org/hari, sedangkan untuk diluar PKN dan PKW standar kebutuhan air menggunakan 60 ltr/orng/hari.

Tabel 7. 5 Kebutuhan Air Minum Provinsi Papua Barat Daya untuk Kegiatan Domestik

Kabupaten	Kebutuhan Air Domestik (ltr/dtk)			Kebutuhan Air Bersih Domestik (ltr/dtk)			Kebutuhan Air Bersih Non Domestik (ltr/dtk)			Kebutuhan Air 20 % dari Domestik dan 80 % dari Non Domestik (ltr/dtk)			Grand Total (ltr/dtk)		Kebutuhan	
	2022	2029	2034	2023	2024	2029	2034	2022	2029	2034	2022	2029	2034	2022	2029	2034
Kota Sorong	477,25	562,15	622,78	48,94	50,15	56,21	62,28	105,00	123,67	137,01	629,97	742,03	822,08			
Sorong	66,02	75,94	83,02	6,74	6,89	7,59	8,30	14,52	16,71	18,26	87,14	100,24	109,59			
Sorong Selatan	34,64	39,39	42,79	3,53	3,60	3,94	4,28	7,62	8,67	9,41	45,72	52,00	56,48			
Raja Ampat	35,09	38,30	40,59	3,56	3,60	3,83	4,06	7,72	8,43	8,93	46,32	50,55	53,58			
Tambrau	9,87	10,33	10,65	0,99	1,00	1,03	1,06	2,17	2,27	2,34	13,03	13,63	14,06			
Maybrat	30,18	34,31	37,27	3,08	3,14	3,43	3,73	6,64	7,55	8,20	39,84	45,30	49,19			
Papua Barat Daya	653,05	760,42	837,1	66,84	68,38	76,03	83,71	143,67	167,3	184,15	862,02	1.003,75	1.104,98			

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 7. 6 Kebutuhan Air Minum Provinsi Papua Barat Daya Sesuai Dengan Rencana Pengembangan Kawasan

Kabupaten	Peruntukan	Penduduk Tahun 2021 (Jiwa)	Penduduk Tahun 2034 (Jiwa) Penambahan Kawasan	Kebutuhan (ltr/dtk)		Kapasitas 2021 (liter/detik)		GAP (Ltr/detik)	
				2021	2034	Terpasang	Produksi	2021	2034
Kota Sorong	Domestik	267.912	358.724	613,97	822,08	62,5	50	- 551,47	- 776,94
	PNK Sorong , PKSN Sorong								
	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya		10.000	-	17,36				
Sorong	Domestik	93.027	119.548	85,27	109,59	48,51	48,51	- 36,76	- 78,44
	Kota Baru Sorong, KEK Sorong		10.000	-	17,36				
Sorong Selatan	Domestik	48.897	61.618	44,82	56,48	65,4	65,4	20,58	- 8,44
	KI Kais (usulan baru)		10.000	-	17,36				
Raja Ampat	Domestik	49.876	58.447	45,72	53,58	18,6	18,6	- 27,12	- 142,47
	DPP Raja Ampat , KPPN Raja Ampat, KSPN Raja Ampat, Geopark Raja Ampat		61.915	-	107,49				
Tambrauw	Domestik	14.121	15.335	12,94	14,06	125,63	125,63	112,69	84,66
	SKPT Tambrauw (Usulan Baru)		500	-	0,87				
	Food Estate Tambrauw		5.000	-	8,68				
	Perkotaan Fef – Tambrauw (usulan baru)		10.000	-	17,36				
Maybrat	Domestik	42.613	53.663	39,06	49,19	53,76	53,76	14,70	4,57
	Perkotaan Kumurkek (usulan baru)								
Papua Barat Daya		516.446	774.750	842	1.291	374	362	-467	-917

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Dari tabel-tabel diatas dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun 2034, kebutuhan air bersih berdasarkan skenario pengembangan wilayah yang direncanakan adalah sebesar 917 ltr/detik, dengan memperhitungkan kondisi SPAM eksisting (2021), maka sampai dengan tahun 2034 diperlukan penambahan debit air minum sebesar 917 ltr/detik. Pemenuhan kebutuhan Infrastruktur penyediaan air minum ini akan menjadi tugas dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi sampai dengan tugas dari pemerintah pusat.

B. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Air Limbah Provinsi Papua Barat Daya

Secara umum pengembangan SPAL di Provinsi Papua Barat Daya masih menggunakan sistem setempat, baik individual maupun komunal yaitu berupa Tangki Septik Individual ataupun komunal. Walaupun sudah terdapat beberapa sistem secara terpusat (IPAL) baik yang dikelola masyarakat maupun institusi.

Berdasarkan data BPS di Provinsi Papua Barat Daya Sanitasi Layak Prov Papua Barat Daya mencapai 90,37% atau sudah diatas target Renstra PUPR untuk tahun 2022 yaitu 82,07%.

Di Provinsi Papua Barat Daya telah terdapat 12 unit pengolahan air limbah berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (*black water*) dan 12 Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), (Data di bab 4). Infrastruktur IPLT yang sudah dibangun direncanakan dapat melayani 29.250 KK; atau 11,67 % dari total 250.699 KK pada tahun 2021, sedangkan IPAL yang sudah dibangun direncanakan dapat melayani 3.550 KK ; atau 1,4 % dari total 250.699 KK pada tahun 2021.

Berdasarkan data eksisting, maka dilakukan proyeksi dan perhitungan kebutuhan Instalasi pengolahan limbah (IPAL atau IPLT) sesuai dengan rencana/skenario pengembangan wilayah dan kawasan prioritas. Asumsi timbulan air limbah adalah 80% dari kebutuhan air minum, sedangkan untuk pengelolaan skenario yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan (2034) Akses Aman 20%, Akses Layak 80% dan Babs 0%.

Tabel 7. 7 Kebutuhan Penanganan Air Limbah Provinsi Papua Barat Daya Sesuai Dengan Rencana Pengembangan Kawasan
Tahun 2034

		Eksisting 2021 (Masih Terdapat GAP BABS)				Kebutuhan Tahun 2034			
Kabupaten	Kawasan Pengembangan	Akses Layak (Jiwa)		Tdk Ada Akses (Jiwa)	Akses Layak (Jiwa)		Tdk Ada Akses (Jiwa)		
		Akses Aman (Jiwa)	Akses Dasar (Jiwa)	BABs	Akses Aman (Jiwa)	Akses Dasar (Jiwa)	BABs		
		2021						2034	
Kota Sorong	Domestik	75.551	176581	15780	71.745	286.979	0		
	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya		-		2.000	8.000	0		
	PKN Sorong , PKSN Sorong		-		-	-	0		
Sorong	Domestik	25.962	60804	6261	23.910	95.638	0		
	Kota Baru Sorong, KEK Sorong		-		2.000	8.000	0		
Sorong Selatan	Penduduk	12.882	30059	5956	12.324	49.294	0		
	KI Kais (usulan baru)		-		2.000	8.000	0		
	Domestik	12.069	28161	9646	11.689	46.758	0		
Raja Ampat	DPP Raja Ampat , KPPN Raja Ampat, KSPN Raja Ampat, Geopark Raja Ampat		-		12.383	49.532	0		
Tambrauw	Domestik	4.125	9625	370	3.067	12.268	0		
	SKPT Tambrauw (Usulan Baru)		-		100	400	0		
	Food Estate Tambrauw		-		1.000	4.000	0		
	Perkotaan Fef – Tambrauw (usulan baru)		-		2.000	8.000	0		
Maybrat	Domestik	12.506	29.182	925	10.733	42.930	0		
	Perkotaan Kumurkek		-		-	-	0		
Papua Barat		143.095	334.412	38.938	154.951	619.799	0		

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Perhitungan Kebutuhan Infrastruktur IPLT:

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk dengan akses sanitasi aman yang harus dilayani adalah sebesar 154.951 Jiwa atau setara dengan 38.738 KK (1 kk = 4 jiwa). Dengan Asumsi 1 IPLT melayani 5.000 KK; maka sampai tahun 2034 diperlukan 15 Unit IPLT; Eksisting terdapat 7 Unit IPLT, sehingga masih diperlukan 8 Unit IPLT Kapasitas Pelayanan 5.000 KK. (kebutuhan IPLT berubah sesuai dengan asumsi Kapasitas Pelayanan).

C. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Persampahan Provinsi Papua Barat Daya

Pertumbuhan kawasan yang ditandai dengan penambahan penduduk dan perkembangan aktivitas ekonomi, memberikan dampak yang besar bagi semua sektor kehidupan. Salah satunya adalah peningkatan pencemaran lingkungan sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk serta bertambah dan beraneka ragamnya industri yang berimbas pada semakin tingginya potensi timbunan sampah. Disatu sisi prasarana untuk mengolah sampah tidak berkembang sepesat pertumbuhan sampah, semakin besar timbunan maka akan berimbas pada besaran biaya untuk penanganan sampah (pewadahan-pengumpulan-pengangkutan-pengolahan akhir).

Untuk penanganan sampah kawasan perdesaan didorong dengan sistem setempat dengan pembangunan TPST yang melayani skala komunal. Kondisi ini tidak terlepas dari karakter permukiman yang menyebar dan lokasi yang berjauhan sehingga pengembangan sampah secara terpusat menjadi tidak efisien.

Kondisi Eksisting pengelolaan persampahan di Provinsi Papua Barat Daya adalah sebesar 11,86% atau ada selisih sebesar 72,67 %. dibandingkan dengan target Renstra PUPR untuk tahun 2021 (79,21%).

RPIW Provinsi Papua Barat Daya
Tahun 2025-2034

Tabel 7. 8 Cakupan Pelayanan Persampahan di Provinsi Papua Barat Daya

Kabupaten/ Kota	2034			Target 70% Penanganan di Perkotaan		Eksisting 2021	Eksisting 2021		GAP Kebutuhan Pelayanan 2034
	Penduduk (jiwa)	KK	Timbulan Sampah (m ³ /hari)	KK	Timbulan (m ³ /hari)		TPA	KK	
Kota Sorong	368.724	92.181	922	64.527	645	277	1	0	64.527
Sorong	129.548	32.387	324	22.671	227	97	1	7.593	15.078
Sorong Selatan	71.618	17.904	179	12.533	125	54	1	1.125	11.408
Raja Ampat	120.362	30.091	301	21.063	211	90	1	1.000	20.063
Tambrauw	30.835	7.709	77	5.396	54	23	0	0	5.396
Maybrat	53.663	13.416	134	9.391	94	40	0	0	9.391
Papua Barat Daya	774.750	193.688	1.937	135.581	1.356	581	4	9.718	125.863
									1.259

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Asumsi:
Timbulan Sampah = 2,5 Ltr/org/hari
1 KK = 4 jiwa
1 TPA = Melayani 10.000 KK

Target Penanganan = 70 % (menggunakan asumsi perhitungan pelayanan terhadap jumlah KK. Tahun 2034 Prov Papua Barat Daya memiliki 193.688 KK, dengan Pelayanan 70 % maka KK yang harus ditangani = 135.581 KK. Dengan asumsi pengelolaan persampahan, khususnya TPA telah selesai dibangun pada 2029, atau periode 2029-2034, maka sampai tahun 2034 belum diperlukan penambahan lokasi TPA di Papua Barat Daya.

Upaya penanganan sampah sebagaimana tabel di atas adalah penanganan sampah kawasan perkotaan. Untuk penanganan sampah kawasan perdesaan didorong dengan sistem setempat dengan pembangunan TPST yang melayani skala komunal. Kondisi ini tidak terlepas dari karakter permukiman yang menyebar dan lokasi yang berjauhan sehingga pengembangan sampah secara terpusat menjadi tidak efisien.

D. Analisis Kesenjangan Kawasan Kumuh Provinsi Papua Barat Daya

Program penanganan kawasan kumuh pada kawasan-kawasan pusat aktivitas pada masing-masing kabupaten/kota di Papua Barat Daya dapat dilakukan dengan model peremajaan kawasan melalui konsolidasi lahan. Dalam rangka melakukan upaya ini tentu dibutuhkan kesediaan masyarakat untuk merelakan lahan yang ditinggali (jika merupakan hak milik) untuk ditata ulang.

Terkait dengan kebutuhan penanganan kawasan kumuh di Pulau Papua, tentu akan efektif apabila pemerintah memberikan peran lebih besar dalam proses penanganan kawasan. Peran ini dapat diawali dengan inisiasi penyusunan rencana program penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan. Melakukan inisiasi untuk melibatkan peran serta swasta (CSR) dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan di masing-masing kabupaten/kota. Melakukan sinergi dan integrasi pelaksanaan pembangunan antar sektor terkait dengan menggunakan pendekatan pembangunan berbasis kawasan.

7.1.4 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Perumahan di Provinsi Papua Barat Daya

Analisis kesenjangan infrastruktur perumahan merupakan gap kebutuhan perumahan berdasarkan backlog kepemilikan rumah dan rumah tidak layak huni. Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan mengenai kinerja backlog dan rumah tidak layak huni di Provinsi Papua Barat Daya. Berikut hasil analisis *backlog* kepemilikan rumah dan rumah tidak layak huni yang perlu untuk dilakukan penanganan dalam jangka waktu 10 tahun kedepan.

Tabel 7. 9 Analisis Kesenjangan *Backlog* Kepemilikan Rumah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Kepemilikan Rumah Tahun 2021	Jumlah Penduduk 2021	Tahun 2019			Tahun 2034			
			KK/ Kebutuhan Rumah	Backlog	Persentase Backlog	Jumlah Penduduk 2034	KK/ Kebutuhan Rumah	Backlog	Persentase Backlog
Sorong Selatan	10,723	47,918	11,980	1,257	10.48	61,618	15,404	4,682	30.39
Tambrauw	3,003	14,027	3,507	504	14.36	15,335	3,834	831	21.66
Sorong	20,556	90,987	22,747	2,191	9.63	119,548	29,887	9,331	31.22
Raja Ampat	10,347	49,216	12,304	1,958	15.91	58,447	14,612	4,265	29.19
Maybrat	9,352	41,763	10,441	1,089	10.42	53,663	13,416	4,064	30.29
Kota Sorong	41,403	260,927	65,232	23,829	36.53	358,724	89,681	48,278	53.83

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Papua Barat Daya hingga Tahun 2022 adalah sebesar 40.482 unit sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

Tabel 7. 10 Kebutuhan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Tanah			Total
	Milik Sendiri	Tanah Negara	Bukan Milik Sendiri	
Sorong Selatan	21	0	0	21
Tambrauw	1.899	0	20	1.919
Sorong	4.183	1	0	4.184
Raja Ampat	2.985	8	1.487	4.480
Maybrat	5.548	2	19	5.569
Kota Sorong	10.821	130	734	11.685
Jumlah	25.457	141	2.260	27.858

Sumber: e-rtlh.perumahan.pupr.go.id

Berdasarkan data RTLH dan *backlog* di Provinsi Papua Barat Daya, maka diperlukan upaya penuntasan rumah tidak layak huni serta gap penyediaan rumah pada setiap kabupaten/kota. Dalam melakukan analisis kemampuan penyediaan rumah oleh masing-masing stakeholder digunakan asumsi dari realisasi penanganan rumah melalui Program Sejuta Rumah sepanjang tahun 2016-2022 sebagai berikut.

Tabel 7. 11 Asumsi Rata-rata Kemampuan Penanganan Rumah

Kategori	Pelaksana	Rata-rata Kemampuan Penanganan Rumah	Keterangan
MBR	Kementerian PUPR	23,74%	Penyediaan rumah (Rumah susun; rumah khusus; FLPP) 6,81% Rumah swadaya: 16,93%
	K/L lain	2,00%	Kemensos; Kemenhan; Polri
	Pemerintah Daerah	7,821%	Penyediaan rumah (Rumah susun dan rumah khusus): 0,61% Rumah swadaya: 7,14%
	Pengembang MBR	36,88%	Sikumbang Non FLPP dan Non Sikumbang
	CSR	0,14%	Forum CSR Provinsi; Baznas Provinsi
	Masyarakat MBR	2,65%	IMB/PBG dan Non IMB/PBG; rumah tapak
Non MBR	Pengembang Non MBR	23,42%	Rumah susun; rumah tapak
	Masyarakat Non MBR	3,34%	IMB dan Non IMB

Sumber: Program Sejuta Rumah tahun 2016-2022 diolah

Dari hasil analisis tersebut, maka kebutuhan untuk penanganan rumah di Provinsi Papua Barat sebagai berikut.

Tabel 7. 12 Kebutuhan Penyediaan Rumah dan Penanganan RTLH Provinsi Papua Barat Daya

Kabupaten/ Kota	Kawasan Strategis	Total Proyeksi Gap Kebutuhan Rumah 2029	Rumah Tidak Layak Huni 2021	MBR				Non MBR		
				Rencana Rumah Dibangun PUPR 2029 (unit)	Peningkatan Kualitas RTLH (Swadaya) (Unit)	Rencana Rumah Baru Dibangun Pemda 2029 (unit)	Pengembang MBR 2029 (unit)	Masyarakat MBR 2029 (unit)	Pengembang Non MBR 2029 (unit)	Masyarakat Non MBR 2029 (unit)
Kota Sorong	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	42.046	11.685	2.863	11.685	256	15.507	1114	9.847	1.404
	PKN Sorong PKSN Sorong									
Sorong	Kota Baru Sorong KEK Sorong	9.281	4.184	632	4.184	57	3.423	246	2.174	310
Sorong Selatan	KI Kais (usulan baru)	5.958	21	406	21	36	2.197	158	1.395	199
Raja Ampat	DPP Raja Ampat KSPN Raja Ampat Geopark Raja Ampat	18.920	4.480	1.288	4.480	115	6.978	501	4.431	632
Tambrauw	SKPT Tambrauw (usulan baru)	4.589	1.919	313	1.919	28	1.692	122	1.075	153
	Food Estate Tambrauw									
	Perkotaan Fef-Tambrauw (usulan baru)									
Maybrat	Perkotaan Kumurkek (usulan baru)	3.001	5.569	204	5.569	18	1.107	80	703	100
Papua Barat		83.795	27.858	5.706	27.858	510	30.904	2.221	19.625	2.798

Sumber: Hasil analisis, 2023

7.1.5 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Perhubungan

Kebutuhan pembangunan infrastruktur perhubungan dalam rangka pengembangan wilayah di Provinsi Papua Barat Daya antara lain:

- Pengembangan kapasitas penumpang dan barang di Bandara Misool, Kabare, Reni, Dorekar untuk mendukung pengembangan **DPP Raja Ampat** dsk
- Pengembangan kapasitas kargo untuk hilirisasi komoditas unggulan di Papua Barat Daya
- Penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat pasca pembangunan Jalan Pantai Utara Papua
- Pembangunan jalan pada bandara pengumpan Bandara Pengumpan Segun, Reni, Dorekar, Misool, Kabare, Werur, dan Inanwatan
- Pembangunan jalan pada Pelabuhan Pelabuhan Pengumpan Regional Wigama
- Pergerakan barang di Kab. Tambrau relative kecil dibandingkan dengan Kabupaten/kota lain, perlu adanya peningkatan hilirisasi komoditas menuju ke Kab. Tambrau
- Pengembangan kapasitas kargo untuk hilirisasi komoditas unggulan di Papua Barat Daya
- Penyediaan sarana dan prasarana transportasi umum antar Kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya

7.2 Analisis Prioritas Pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya

Prioritisasi pembangunan merupakan analisis yang ditujukan untuk menentukan rencana yang akan dilaksanakan sebagai rencana prioritas dengan kriteria pertimbangan berupa kesesuaian dengan kebijakan nasional, kriteria daya ungkit sesuai dengan tujuan pengembangan wilayah, dan kriteria *quick yield*. Untuk lebih jelasnya kriteria dalam prioritasi pembangunan ini antara lain:

Kriteria Kesesuaian Dengan Kebijakan Nasional (Maksimal 30%)

- (1) Kegiatan mendukung kebijakan strategis (prioritas nasional/sesuai dengan RPJMN) (30%);
- (2) Kegiatan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah (diluar RPJMN tetapi merupakan agenda nasional) (20%).

Kriteria Daya Ungkit Sesuai Dengan Tujuan Pengembangan Wilayah (Maksimal 40%)

- (3) Kegiatan dengan kriteria memberi dampak besar namun effort minimal (*quick wins*) (40%); *Quick wins* yaitu kegiatan yang memberikan dampak ekonomi yang besar sesuai tujuan pengembangan wilayah, tetapi membutuhkan biaya minimal. Sebagai contoh, untuk tema pengembangan wilayah sektor basis pertanian, maka kegiatan yang langsung mendukung aktivitas pertanian seperti pembangunan irigasi dan konektivitas (logistik pertanian) mendapatkan skor maksimal.
- (4) Kegiatan dengan kriteria memberi dampak besar dan effort besar (*major project*) (30%); *Major project* yaitu kegiatan yang memberikan dampak ekonomi yang besar sesuai tujuan pengembangan wilayah dan membutuhkan biaya yang besar. Sebagai contoh: untuk tema pengembangan wilayah sektor basis pertanian, maka kegiatan yang langsung mendukung aktivitas pertanian seperti bendungan.
- (5) Kegiatan dengan kriteria memberi dampak kecil namun effort minimal (*Fill in*) (20%); *Fill in* yaitu kegiatan yang memberikan dampak ekonomi yang minimal sesuai tujuan pengembangan wilayah dan membutuhkan biaya yang kecil. Sebagai contoh kegiatan rehabilitasi irigasi.
- (6) Kegiatan dengan kriteria afirmatif (10%);

Kriteria *Quick Yield* (Maksimal 30%)

- (7) Kegiatan dengan kriteria cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (30%);
- (8) Kegiatan dengan kriteria menyerap tenaga kerja besar (20%).

Hasil tabel prioritisasi pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. 13 Prioritas Pembangunan Infrastruktur PUPR di Provinsi Papua Barat Daya

No	Unor	Kebutuhan Infrastruktur	Kesesuaian dengan kebijakan nasional (Maksimal 30%)		Kriteria Daya Ungkit Sesuai Dengan Tujuan Pengembangan Wilayah (Maksimal 40%)				Kriteria Quick Yield (Maksimal 30%)		Total Nilai	Ranking
			Mendukung kebijakan strategis nasional/ sesuai RPJMN -30%	Mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah (di luar RPJMN) tapi agenda nasional -20%	Quick wins (40%)	Major Projects (30%)	Fill In -20%	Affirmatif -10%	Cepat dirasakan manfaat oleh masyarakat (30%)	Menyerap tenaga kerja besar (20%)		
A	SUMBER DAYA AIR											
1	Sumber Daya Air	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi/ Prasarana Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Kota Sorong)	30		40				30		100	1
2	Sumber Daya Air	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi/ Prasarana Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Kab. Sorong)	30		40				30		100	1
3	Sumber Daya Air	Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi untuk SPAM Sorong Selatan		20		30			30		80	3
4	Sumber Daya Air	Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi untuk SPAM Raja Ampat	30		40				30		100	1

No	Unor	Kebutuhan Infrastruktur	Kesesuaian dengan kebijakan nasional (Maksimal 30%)		Kriteria Daya Ungkit Sesuai Dengan Tujuan Pengembangan Wilayah (Maksimal 40%)				Kriteria Quick Yield (Maksimal 30%)		Total Nilai	Ranking		
			Mendukung kebijakan strategis nasional/ sesuai RPJMN	Mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah (di luar RPJMN) tapi agenda nasional	Quick wins (40%)	Major Projects (30%)	Fill In	Affirmatif	Cepat dirasakan manfaat oleh masyarakat (30%)	Menyerap tenaga kerja besar (20%)				
													-30%	-20%
5	Sumber Daya Air	Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi untuk SPAM Tambrau		20		30			30		80	3		
6	Sumber Daya Air	Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi untuk SPAM Maybrat		20		30			30		80	3		
7	Sumber Daya Air	Pembangunan Pengaman Pantai Pesisir Kota Sorong		20			20		30		70	4		
B	BINA MARGA													
1	Bina Marga	Pembangunan Jalan Mega – Sausafor	30			30			30		90	2		
2	Bina Marga	Pembangunan Jalan Sausafor – Saubeba	30			30			30		90	2		
3	Bina Marga	Pembangunan Jalan Saubeba – Wau	30			30			30		90	2		
4	Bina Marga	Pembangunan Jalan Wau – Saukorem	30			30			30		90	2		

RPIW Provinsi Papua Barat Daya
Tahun 2025-2034

No	Unor	Kebutuhan Infrastruktur	Kesesuaian dengan kebijakan nasional (Maksimal 30%)		Kriteria Daya Ungkit Sesuai Dengan Tujuan Pengembangan Wilayah (Maksimal 40%)				Kriteria Quick Yield (Maksimal 30%)		Total Nilai	Ranking	
			Mendukung kebijakan strategis/ nasional/ sesuai RPJMN	Mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah (di luar RPJMN) tapi agenda nasional	Quick wins (40%)	Major Projects (30%)	Fill In	Affirmatif	Cepat dirasakan manfaat oleh masyarakat (30%)	Menyerap tenaga kerja besar (20%)			
5	Bina Marga	Pembangunan Jalan Akses Industri Kais – Sorong Selatan		20			30			30		80	3
6	Bina Marga	Pembangunan Jalan Akses Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	30				30			30		90	2
7	Bina Marga	Pembangunan Jalan Akses Kota Baru Sorong	30				30			30		90	2
8	Bina Marga	Pembangunan Jalan Akses SKPT Tambrauw		20			30			30		80	3
9	Bina Marga	Pembangunan Jalan Akses Food Estate Tambrauw		20			30			30		80	3
10	Bina Marga	Pembangunan Jalan Akses Perkotaan Kumurkek – Maybrat		20				20			20	60	5
11	Bina Marga	Peningkatan Jalan Aimas (Km 23) - Pel. Arar (Sorong)	30				30			30		90	2

No	Unor	Kebutuhan Infrastruktur	Kesesuaian dengan kebijakan nasional		Kriteria Daya Ungkit Sesuai Dengan Tujuan Pengembangan Wilayah				Kriteria Quick Yield		Total Nilai	Ranking
			(Maksimal 30%)		(Maksimal 40%)				(Maksimal 30%)			
			Mendukung kebijakan strategis nasional/ sesuai RPJMN	Mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah (di luar RPJMN) tapi agenda nasional	Quick wins (40%)	Major Projects (30%)	Fill In	Affirmatif	Cepat dirasakan manfaat oleh masyarakat (30%)	Menyerap tenaga kerja besar (20%)		
12	Bina Marga	Peningkatan Jalan Sorong - Makbon	30			30			30		90	2
13	Bina Marga	Peningkatan Jalan Makbon - Mega	30			30			30		90	2
14	Bina Marga	Peningkatan Jalan Bts. Kota Sorong -Aimas – Klamono	30			30			30		90	2
15	Bina Marga	Peningkatan Jalan Klamono - Bts. Kab. Sorong Selatan	30			30			30		90	2
16	Bina Marga	Peningkatan Jalan Bts. Kab. Sorong Selatan – Kambuaya	30			30			30		90	2
17	Bina Marga	Peningkatan Jalan Kambuaya – Susumuk	30			30			30		90	2
18	Bina Marga	Peningkatan Jalan Susumuk – Kumurkeh	30			30			30		90	2
19	Bina Marga	Peningkatan Jalan Kumurkeh - Ayawasi – Snopy	30			30			30		90	2
C	CIPTA KARYA											

RPIW Provinsi Papua Barat Daya
Tahun 2025-2034

No	Unor	Kebutuhan Infrastruktur	Kesesuaian dengan kebijakan nasional (Maksimal 30%)		Kriteria Daya Ungkit Sesuai Dengan Tujuan Pengembangan Wilayah (Maksimal 40%)				Kriteria Quick Yield (Maksimal 30%)		Total Nilai	Ranking
			Mendukung kebijakan strategis nasional/ sesuai RPJMIN	Mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah (di luar RPJMIN) tapi agenda nasional	Quick wins (40%)	Major Projects (30%)	Fill In	Affirmatif	Cepat dirasakan manfaat oleh masyarakat (30%)	Menyerap tenaga kerja besar (20%)		
1	Cipta Karya	Pembangunan dan Optimalisasi SPAM Regional Sorong	30	-30%	-20%		30		30		90	2
2	Cipta Karya	Peningkatan Kapasitas SPAM Kabupaten Sorong	30				30		30		90	2
3	Cipta Karya	Optimalisasi SPAM Sorong Selatan	30				30		30		90	2
4	Cipta Karya	Peningkatan Kapasitas SPAM Tambrau			20		30		30		80	3
5	Cipta Karya	Pembanguhnan SPAM mendukung Pariwisata Raja Ampat	30				30		30		90	2
6	Cipta Karya	Optimalisasi SPAM Maybrat		20			30		30		80	3
7	Cipta Karya	Optimalisasi IPLT Kab. Sorong	30				30		30		90	2
8	Cipta Karya	Optimalisasi IPLT Sorong Selatan		20			30		30		80	3

No	Unor	Kebutuhan Infrastruktur	Kesesuaian dengan kebijakan nasional (Maksimal 30%)		Kriteria Daya Ungkit Sesuai Dengan Tujuan Pengembangan Wilayah (Maksimal 40%)				Kriteria Quick Yield (Maksimal 30%)		Total Nilai	Ran
			Mendukung kebijakan strategis nasional/ sesuai RPJMN	Mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah (di luar RPJMN) tapi agenda nasional	Quick wins (40%)	Major Projects (30%)	Fill In	Affirmatif	Cepat dirasakan manfaat oleh masyarakat (30%)	Menyerap tenaga kerja besar (20%)		
9	Cipta Karya	Pembangunan SPALD Terpusat (IPAL Komunal Skala Permukiman) Kota Sorong	-30%	-20%		30			30		80	3
10	Cipta Karya	Pembangunan TPA (baru) Raja Ampat	30			30			30		90	2
11	Cipta Karya	Optimalisasi dan Rehabilitasi TPA Sorong Selatan	30			30			30		90	2
12	Cipta Karya	Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten Tambrauw		20		30			30		80	3
13	Cipta Karya	Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maybrat		20		30			30		80	3
D.	PERUMAHAN											

RPIW Provinsi Papua Barat Daya
Tahun 2025-2034

No	Unor	Kebutuhan Infrastruktur	Kesesuaian dengan kebijakan nasional		Kriteria Daya Ungkit Sesuai Dengan Tujuan Pengembangan Wilayah				Kriteria Quick Yield		Total Nilai	Ran king
			(Maksimal 30%)		(Maksimal 40%)				(Maksimal 30%)			
			Mendukung kebijakan strategis nasional/ sesuai RPJMIN	Mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah (di luar RPJMIN) tapi agenda nasional	Quick wins (40%)	Major Projects (30%)	Fill In	Affirmatif	Cepat dirasakan manfaat oleh masyarakat (30%)	Menyerap tenaga kerja besar (20%)		
1	Perumahan	Pembangunan Rumah Swadaya Kab. Sorong Selatan		20	40				30		90	2
2	Perumahan	Pembangunan Rumah Swadaya Kab. Tambrau		20	40				30		90	2
3	Perumahan	Pembangunan Rumah Swadaya Kab. Sorong		20	40				30		90	2
4	Perumahan	Pembangunan Rumah Swadaya Kab. Raja Ampat		20	40				30		90	2
5	Perumahan	Pembangunan Rumah Swadaya Kab. Maybrat		20	40				30		90	2
6	Perumahan	Pembangunan Rumah Swadaya Kota Sorong		20	40				30		90	2
7	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kab. Sorong Selatan		20	40				30		90	2
8	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kab. Tambrau		20	40				30		90	2

No	Unor	Kebutuhan Infrastruktur	Kesesuaian dengan kebijakan nasional		Kriteria Daya Ungkit Sesuai Dengan Tujuan Pengembangan Wilayah				Kriteria Quick Yield		Total Nilai	Ranking
			(Maksimal 30%)		(Maksimal 40%)				(Maksimal 30%)			
			Mendukung kebijakan strategis nasional/ sesuai RPJMIN	Mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah (di luar RPJMIN) tapi agenda nasional	Quick wins (40%)	Major Projects (30%)	Fill In	Affirmatif	Cepat dirasakan manfaat oleh masyarakat (30%)	Menyerap tenaga kerja besar (20%)		
9	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kab. Sorong		20	40				30		90	2
10	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kab. Raja Ampat		20	40				30		90	2
11	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kab. Maybrat		20	40				30		90	2
12	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kota Sorong		20	40				30		90	2
13	Perumahan	Pembangunan Rumah Khusus Pendukung Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya		20		30			30		80	3
14	Perumahan	Pembangunan Rumah Khusus Pendukung Kawasan Kota Baru Sorong		20			20		30		70	4
15	Perumahan	Pembangunan Rumah Susun Pendukung Kawasan Kota Baru Sorong		20			20		30		70	4

No	Unor	Kebutuhan Infrastruktur	Kesesuaian dengan kebijakan nasional		Kriteria Daya Ungkit Sesuai Dengan Tujuan Pengembangan Wilayah				Kriteria Quick Yield		Total Nilai	Ranking
			(Maksimal 30%)		(Maksimal 40%)				(Maksimal 30%)			
			Mendukung kebijakan strategis nasional/ sesuai RPJMN	Mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah (di luar RPJMN) tapi agenda nasional	Quick wins (40%)	Major Projects (30%)	Fill In	Affirmatif	Cepat dirasakan manfaat oleh masyarakat (30%)	Menyerap tenaga kerja besar (20%)		
16	Perumahan	Pembangunan Rumah Khusus Kawasan Perkotaan Kumurkek - Maybrat		20			20		30		70	4
17	Perumahan	Pembangunan Rumah Khusus Kawasan DPP Raja Ampat, KPPN Raja Ampat, KSPN Raja Ampat, Geopark Raja Ampat		20			30		30		80	3
18	Perumahan	Pembangunan Rumah Khusus Food Estate Tambrauw		20			30		30		80	3
19	Perumahan	Pembangunan Rumah Khusus Kawasan Industri Kais - Sorong Selatan		20			30		30		80	3
20	Perumahan	Pembangunan Rumah Susun Kawasan Industri Kais - Sorong Selatan		20			30		30		80	3

Sumber: Hasil Analisis, 2022

7.3 Analisis Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah di Provinsi Papua Barat Daya

Analisis keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah merupakan analisis dukungan infrastruktur wilayah terhadap kawasan-kawasan yang akan didorong pengembangannya dalam 10 tahun ke depan. Berikut hasil analisis keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah.

Tabel 7. 14 Analisis Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Provinsi Papua Barat Daya

No	Kawasan Prioritas	Tematik Pengembangan Kawasan	Infrastruktur PUPR								Keterpaduan antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan dengan Infrastruktur Non PUPR
			Sumber Daya Air		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan			
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
1	Kota Baru Sorong	Kawasan Perkotaan	Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi untuk SPAM Kota Sorong	2025	Pembangunan Jalan Akses Kota Baru Sorong	2030	Pembangunan dan Optimalisasi SPAM Regional Sorong	2025	Pembangunan Rumah Swadaya Kota Sorong	2025	- Keterpaduan pembangunan intake dan jaringan transmisi air aku (SDA) dengan pembangunan dan optimalisasi SPAM Regional Sorong (CK)	-
			Pembangunan Pengaman Pantai Pesisir Kota Sorong	2025	-	-	Operasional IPLT Kota Sorong	2025	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kota Sorong	2025	- Keterpaduan pembangunan dan optimalisasi SPAM Regional Sorong, TPA Kota Sorong, IPLT, dan SPALD (CK) dengan pembangunan dan peningkatan rumah swadaya (PnP)	
			-	-	-	-	Operasional TPA Kota Sorong	2025	Pembangunan Rumah Khusus Pendukung Kawasan Kota Baru Sorong	2030	- Keterpaduan pembangunan jalan akses kota baru Sorong (BM) dengan pembangunan rumah	
			-	-	-	-	Pembangunan SPALD Terpusat (IPAL Komunal Skala	2025	-	-	-	

No	Kawasan Prioritas	Tematik Pengembangan Kawasan	Infrastruktur PUPR								Keterpaduan antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan dengan Infrastruktur Non PUPR	
			Sumber Daya Air		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan				
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu			
								Permukiman) Kota Sorong				khusus Kota Baru Sorong (PnP)	
			-	-	-	-	-	Pembangunan TPA (baru) Kota Sorong	2030	-	-		
2	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Kawasan Pusat Pemerintahan	Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi untuk SPAM Kota Sorong	2025	Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	2030	Pembangunan dan Optimalisasi SPAM Regional Sorong	2025	Pembangunan Rumah Khusus Pendukung Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	2030	-	Keterpaduan pembangunan intake dan jaringan transmisi air aku (SDA) dengan pembangunan dan optimalisasi SPAM Regional Sorong (CK) - Keterpaduan pembangunan dan optimalisasi SPAM Regional Sorong, TPA Kota Sorong, IPLT, dan SPALD (CK) dengan pembangunan dan peningkatan rumah swadaya (PnP) - Keterpaduan pembangunan jalan	
			Pembangunan Pengaman Pantai Pesisir Kota Sorong	2025	-	-	Operasional IPLT Kota Sorong	2025	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kota Sorong	2025			
			-	-	-	-	Operasional TPA Kota Sorong	2025	Pembangunan Rumah Swadaya Kota Sorong	2025			

No	Kawasan Prioritas	Tematik Pengembangan Kawasan	Infrastruktur PUPR							Keterpaduan antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan dengan Infrastruktur Non PUPR	
			Sumber Daya Air		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan			
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan			Waktu
			-	-	-	-	Pembangunan SPALD Terpusat (IPAL Komunal Skala Permukiman) Kota Sorong	2025	-	-	akses pusat pemerintahan provinsi (BM) dengan pembangunan rumah khusus pendukung kawasan pusat pemerintahan (PnP)	
			-	-	-	-	Pembangunan TPA (baru) Kota Sorong	2030	-	-		
3	PKN Sorong, PKSN Sorong	Kawasan Perkotaan	Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi untuk SPAM Kota Sorong	2025	Peningkatan Jalan Sorong - Makbon	2030	Pembangunan dan Optimalisasi SPAM Regional Sorong	2025	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kota Sorong	2025	- Keterpaduan pembangunan intake dan jaringan transmisi air aku (SDA) dengan pembangunan dan optimalisasi SPAM Regional Sorong (CK)	Keterpaduan dengan bandara dan pelabuhan Sorong
			Pembangunan Pengaman Pantai Pesisir Kota Sorong	2025	Peningkatan Jalan Makbon - Mega	2030	Operasional IPLT Kota Sorong	2025	Pembangunan Rumah Swadaya Kota Sorong	2025	- Keterpaduan pembangunan dan optimalisasi SPAM Regional Sorong, TPA Kota Sorong, IPLT, dan SPALD (CK)	
			-	-	Peningkatan Jalan Bts. Kota Sorong -	2031	Operasional TPA Kota Sorong	2025	-	-		

No	Kawasan Prioritas	Tematik Pengembangan Kawasan	Infrastruktur PUPR								Keterpaduan antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan dengan Infrastruktur Non PUPR	
			Sumber Daya Air		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan				
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu			
4	KEK Sorong	Kawasan Industri			Aimas – Klamono							dengan pembangunan dan peningkatan rumah swadaya (PnP) - Keterpaduan peningkatan jalan Sorong - Makbon - Mega, Batas Kota Sorong - Aimas - Klamono - Bts Kab Sorong Selatan (BM)	
			-		Peningkatan Jalan Klamono - Bts. Kab. Sorong Selatan	2031	Pembangunan SPALD Terpusat (IPAL Komunal Skala Permukiman) Kota Sorong	2025	-	-	-	dengan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya (PnP)	
			-		-	-	Pembangunan TPA (baru) Kota Sorong	2030	-	-	-	- Keterpaduan peningkatan jalan Aimas - Pel. Arar (BM) dengan pembangunan dan peningkatan rumah swadaya (PnP)	
			-		Peningkatan Jalan Aimas (Km 23) - Pel. Arar (Sorong)	2030	-	-	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kota Sorong	2025	-		

No	Kawasan Prioritas	Tematik Pengembangan Kawasan	Infrastruktur PUPR								Keterpaduan antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan dengan Infrastruktur Non PUPR
			Sumber Daya Air		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan			
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
5	DPP Raja Ampat	Kawasan pariwisata	Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi untuk SPAM Raja Ampat	2025	-		Operasional IPLT Raja Ampat	2025	Pembangunan Rumah Khusus Kawasan DPP Raja Ampat, KPPN Raja Ampat, KSPN Raja Ampat, Geopark Raja Ampat	2030	- Keterpaduan pembangunan intake dan jaringan transmisi air aku (SDA) dengan pembangunan SPAM Raja Ampat (CK)	Keterpaduan dengan perubahan dan bandara Raja Ampat
			-	-	-	Pembangunan TPA (Baru) Raja Ampat	2025	Pembangunan Rumah Swadaya Kab. Raja Ampat	2025	Raja Ampat, pembangunanTPA Raja Ampat, dan IPLT (CK) dengan pembangunan dan peningkatan rumah swadaya (PnP)		
			-	-	-	Pembangunan SPAM mendukung Pariwisata Raja Ampat	2025	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kab. Raja Ampat	2025			
6	Perkotaan Kumurkek (Kab. Maybrat)	Kawasan Perkotaan	Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi	2025	Pembangunan Jalan Akses Perkotaan Kumurkek - Maybrat	2030	Optimalisasi SPAM Maybrat	2029	Pembangunan Rumah Khusus Kawasan Perkotaan	2030	- Keterpaduan pembangunan intake dan jaringan transmisi air aku (SDA) dengan optimalisasi SPAM	

No	Kawasan Prioritas	Tematik Pengembangan Kawasan	Infrastruktur PUPR								Keterpaduan antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan dengan Infrastruktur Non PUPR	
			Sumber Daya Air		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan				
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu			
			untuk SPAM Maybrat							Kumurkek - Maybrat		Maybrat (CK) - Keterpaduan optimalisasi SPAM Maybrat dan sistem pengelolaan persampahan (CK) dengan pembangunan dan peningkatan rumah swadaya (PnP)	
			-		Peningkatan Jalan Kambuaya – Susumuk	2032	Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten Maybrat	2030	Pembangunan Rumah Swadaya Kab. Maybrat	2030			
			-		Peningkatan Jalan Susumuk – Kumurkek	2033				Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kab. Maybrat	2030		
			-		Peningkatan Jalan Kumurkeh - Ayawasi – Snopy	2033							
7	Food Estate Tambrau w	Kawasan pertanian	Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi untuk SPAM Tambrau w	2025	Pembangunan Jalan Mega – Sausafor	2025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten Tambrau w	2030	Pembangunan Rumah Khusus Kawasan Food Estate Tambrau w	2030	- Keterpaduan pembangunan intake dan jaringan transmisi air aku (SDA) dengan peningkatan kapasitas SPAM		

No	Kawasan Prioritas	Tematik Pengembangan Kawasan	Infrastruktur PUPR								Keterpaduan antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan dengan Infrastruktur Non PUPR
			Sumber Daya Air		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan			
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
			-	-	Pembangunan Jalan Sausafor – Saubeba	2025	Peningkatan Kapasitas SPAM Tambrau	2025	Pembangunan Rumah Swadaya Kab. Tambrau	2026	Tambrau (CK) - Keterpaduan peningkatan kapasitas SPAM	
			-	-	Pembangunan Jalan Saubeba – Wau	2028	-	-	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kab. Tambrau	2026	Tambrau dan sistem pengelolaan persampahan (CK) dengan pembangunan dan peningkatan rumah swadaya (PnP)	
			-	-	Pembangunan Jalan Wau – Saukorem	2028	-	-	-	-	- Keterpaduan pembangunan jalan akses food estate	
			-	-	Pembangunan Jalan Akses Food Estate Tambrau	2030	-	-	-	-	tambrau dengan pembangunan rumah khusus food estate Tambrau	
8	SKPT Tambrau	Kawasan Perikanan	Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi untuk SPAM Tambrau	2025	Pembangunan Jalan Mega – Sausafor	2025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten Tambrau	2030	Pembangunan Rumah Khusus Kawasan Food Estate Tambrau	2030	- Keterpaduan pembangunan intake dan jaringan transmisi air aku (SDA) dengan peningkatan kapasitas SPAM	

No	Kawasan Prioritas	Tematik Pengembangan Kawasan	Infrastruktur PUPR								Keterpaduan antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan dengan Infrastruktur Non PUPR
			Sumber Daya Air		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan			
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
			-		Pembangunan Jalan Sausafor – Saubeba	2025	Peningkatan Kapasitas SPAM Tambrauw	2025	Pembangunan Rumah Swadaya Kab. Tambrauw	2026	Tambrauw (CK) - Keterpaduan peningkatan kapasitas SPAM Tambrauw dan sistem pengelolaan persampahan (CK) dengan pembangunan dan peningkatan rumah swadaya (PnP) - Keterpaduan pembangunan jalan akses SKPT Tambrauw dengan pembangunan rumah khusus SKPT Tambrauw	
			-		Pembangunan Jalan Saubeba – Wau	2028	-	-	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kab. Tambrauw	2026		
			-		Pembangunan Jalan Wau – Saukorem	2028	-	-	-	-		
			-		Pembangunan Jalan Akses SKPT Tambrauw	2030	-	-	-	-		
9	KI Kais	Kawasan Industri	Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi untuk SPAM Sorong Selatan	2025	Pembangunan Jalan Akses Industri Kais – Sorong Selatan	2030	Optimalisasi SPAM Sorong Selatan	2025	Pembangunan Rumah Khusus Kawasan Industri Kais Sorong Selatan	2030	- Keterpaduan pembangunan intake dan jaringan transmisi air aku (SDA) dengan pembangunan dan optimalisasi SPAM Sorong Selatan (CK)	

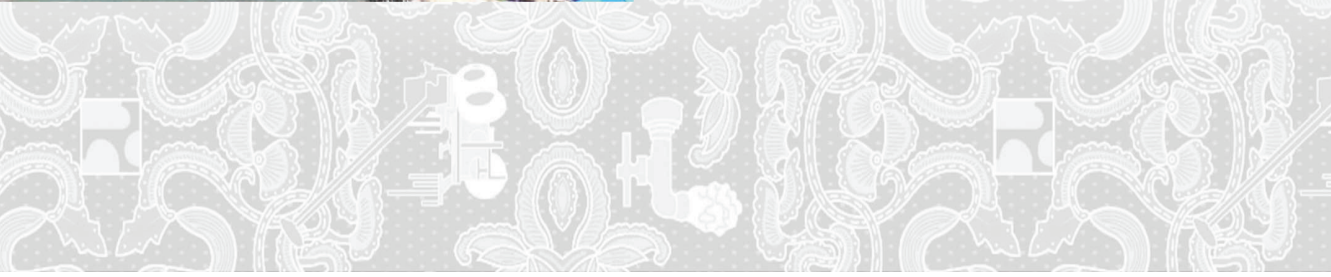
No	Kawasan Prioritas	Tematik Pengembangan Kawasan	Infrastruktur PUPR								Keterpaduan dengan Infrastruktur Non PUPR	Keterpaduan antar Infrastruktur PUPR
			Sumber Daya Air		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan			
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
			-	-	-	-	Optimalisasi IPLT Kab. Sorong Selatan	2027	Pembangunan Rumah Susun Kawasan Industri Kais - Sorong Selatan	2030	- Keterpaduan pembangunan akses industri Kais - Sorong Selatan (BM) dengan pembangunan rumah khusus dan susun K1 Kais (PnP) - Keterpaduan pembangunan dan optimalisasi SPAM Sorong Selatan dan IPLT (CK) dengan pembangunan dan peningkatan rumah swadaya (PnP)	
			-	-	-	-	-	Pembangunan Rumah Swadaya Kab. Sorong Selatan	2025			
			-	-	-	-	-	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kab. Sorong Selatan	2025			

Sumber: Hasil Analisis, 2022



BAB 8

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



BAB VIII

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

8.1. Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR

8.1.1 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air

Rencana aksi pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air di Provinsi Papua Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. 1 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air di Provinsi Papua Barat Daya

No	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi	Indikasi Kebutuhan		Biaya (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
		Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Satuan			Mula	Selesai
A	SUMBER DAYA AIR											
1	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi/ Prasarana Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun	SPM	Kab. Raja Ampat	Untuk memenuhi kebutuhan air baku penduduk	Agar disiapkan	-	31,71	l/det	31.710.000	APBN	2023	2028
2	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi / Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	DPP Raja Ampat	Kab. Raja Ampat	Terbangunnya intake dan jaringan pipa transmisi yang dapat mencukupi kebutuhan sektor pariwisata	Agar disiapkan	-	52,08	l/det	52.080.000	APBN	2026	2029
3	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi / Prasarana Air Baku yang Dibangun	SPM	Kota Sorong	Untuk memenuhi kebutuhan air baku penduduk dan kawasan prioritas nasional di Kota Sorong	Agar disiapkan	-	672,87	l/det	672.870.000	APBN	2025	2029

No	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Keterangan Tambah Hasil Diskusi	Indikasi Kebutuhan		Biaya (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
		Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Satuan			Mula	Selesai
4	Penyediaan Air Baku di Kab. Sorong	PKN Sorong	Kota Sorong	Terbangunnya intake dan jaringan pipa Transmisi yang dapat mencukupi kebutuhan air minum penduduk dan kawasan prioritas nasional	Agar disiapkan	-	41,08	l/det	41.080.000	APBN	2025	2029
5	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air / Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	SPM	Kota Sorong	Terbangunnya infrastruktur pengendali daya rusak air di kawasan permukiman pesisir	Agar disiapkan	-	13.389	Km	672.870.000	APBN	2025	2029
6	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi/ Prasarana Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Kl. Kais	Kab. Sorong Selatan	Terbangunnya intake dan jaringan pipa transmisi yang dapat mencukupi kebutuhan air minum penduduk dan kawasan prioritas nasional	Agar disiapkan	-	41,08	l/det	41.080.000	APBN/APBD	2025	2029

RPIW Provinsi Papua Barat Daya
Tahun 2025-2034

No	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Keterangan Tambah Hasil Diskusi	Indikasi Kebutuhan		Biaya (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
		Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Satuan			Mula	Selesai
7	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi/ Prasarana Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	SPM	Kab. Sorong Selatan	Terbangunnya jaringan pipa transmisi untuk dapat mengalirkan air dari intake teminabuan hingga ke kawasan perkotaan dan Distrik Kayan	Agar disiapkan	-	23	Km	110.400.000	APBN	2025	2026
8	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi / Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Sorong n	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Kab. Sorong	Terbangunnya air baku yang dapat mencukupi kebutuhan untuk mendukung pusat pemerintahan Prov. Papua Barat Daya, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023	Agar disiapkan	-	9	Titik	22.500.000	APBN	2023	2025

No	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi	Indikasi Kebutuhan		Biaya (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
		Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Satuan			Mula	Selesai
9	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi/ Rehabilitasi Intake Air Baku SPAM Regional Sorong Tahap II	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, KEK Sorong	Kab. Sorong	Terpenuhinya kebutuhan air baku untuk mencukupi kebutuhan mendukung pusat pemerintahan Prov. Papua Barat Daya, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023 Perbaikan Intake Air Baku SPAM Regional dengan kapasitas 600 l/det	Agar disiapkan	-	0	l/det	9.000.000	APBN	2024	2026
10	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi/ Pembangunan Air Baku di Kawasan	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, KEK Sorong	Kab. Sorong	Terpenuhinya kebutuhan air baku untuk mencukupi kebutuhan mendukung pusat pemerintahan	Agar disiapkan	-	30	Km	103.000.000	APBN	2024	2025

RPIW Provinsi Papua Barat Daya
Tahun 2025-2034

No	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi	Indikasi Kebutuhan		Biaya (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
		Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Satuan			Mula	Selesai
	Ekonomi Khusus Kab. Sorong Tahap III			Prov. Papua Barat Daya, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023								
11	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air / Pengendalian Banjir (Pembangunan Talud dan Perkuatan Tebing Sungai (Klablim) pada kawasan pusat pemerintahan	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Kab. Sorong	Terbangunnya infrastruktur pengendali daya rusak air di kawasan pusat pemerintahan Prov. Papua Barat Daya, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023	Agar disiapkan	-	3	Km	60.000.000	APBN	2024	2025
12	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air / Penanganan Abrasi Pantai	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, KEK Sorong	Kab. Sorong	Terbangunnya infrastruktur pengendali daya rusak air mendukung kawasan pusat	Agar disiapkan	-	0,5	Km	80.000.000	APBN	2026	2027

No	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi	Indikasi Kebutuhan		Biaya (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
		Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Satuan			Mula	Selesai
	Kampung Arar Kawasan KEK Sorong			pemerintahan Prov. Papua Barat Daya, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023								
	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi/ Peningkatan Kapasitas Intake dan Pipa Transmisi SPAM Regional Kab & Kota Sorong	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, KEK Sorong	Kab. Sorong, Kota Sorong	Terpenuhinya kebutuhan air baku untuk mencukupi kebutuhan mendukung pusat pemerintahan Prov. Papua Barat Daya, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023	Agar disiapkan	-	160	l/det	86.000.000	APBN	2024	2025

Sumber: Hasil Analisis, 2022

8.1.2 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Rencana aksi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari pembangunan jalan Trans Papua, pembangunan jalan Pantai Utara Papua, pembangunan jalan untuk mendukung kawasan strategis, dan peningkatan jalan menuju standar. Berikut rencana aksi pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Papua Barat Daya.

Tabel 8. 2 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua Barat Daya

No	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readines s Criteria Hasil Diskusi	Indikasi Kebutuhan		Biaya (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaa n	Tahun	
		Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mula i	Selesa i
B	BINA MARGA										
Klaster Sorong dsk											
1	Pembangunan Jalan Lingkar Raja Ampat	DPP Raja Ampat	Kab. Raja Ampat	Dukungan konektivitas di Pulau Waigeo dan pengembangan DPP Raja Ampat	Agar disiapkan	206,8	km	2.895.200.000	APBN/ KPBU	2025	2029
2	Pembangunan Jalan Akses Kota Baru Sorong	Kota Baru Sorong	Kota. Sorong	Mendukung pengembangan Kota Baru Sorong sebagai cadangan ruang akibat perkembangan Kota Sorong	Agar disiapkan	N/A	km	N/A	APBN	2026	2028
3	Pembangunan Jalan Akses Industri Kails – Sorong Selatan	Kl. Kails	Kab. Sorong Selatan	Dukungan pengembangan dan hilirisasi komoditas unggulan di Kl Kails Papua Barat	Agar disiapkan	55,59	km	416.925.000	APBN/ KPBU	2025	2029
4	Pembangunan Jalan Nasional (Bandara-Kantor Gubernur)	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Kota Sorong	Mendukung pengembangan pusat pemerintahan	Agar disiapkan	10,74	km	75.180.000	APBN	2023	2025

RPIW Provinsi Papua Barat Daya
Tahun 2025-2034

No	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readines Criteria	Keterangan Tambahhan Hasil Diskusi	Indikasi Kebutuhan		Biaya (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaa n	Tahun Rencana Mula Selesa i
		Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volum e	Satua n			
5	Pembangunan Jalan Akses Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Kota Sorong	baru Provinsi Papua Barat Daya, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023							
				Mendukung pengembangan pusat pemerintahan baru Provinsi Papua Barat Daya, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023	Agar disiapkan	-	5,3	km	42.000.000	APBN	2024 2025
6	Pembangunan Jalan Utama Kawasan Kantor Gubernur	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Kota Sorong	Mendukung pengembangan pusat pemerintahan baru Provinsi Papua Barat Daya, List Kebutuhan Anggaran DOB	Agar disiapkan	-	4,7	km	75.200.000	APBN	2025
											2029

No	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readlines Criteria	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi	Indikasi Kebutuhan		Biaya (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
		Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Satuan			Mula	Selesai
				Expose Jayapura 10 Oktober 2023								
				Mendukung pengembangan pusat pemerintahan baru Provinsi Papua Barat Daya, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023								
7	Peningkatan Jalan Akses Belakang Kantor Gubernur	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Kota Sorong		Agar disiapkan	-	2	km	12.000.000	APBN	2024	2025
8	Pembangunan Jalan Perumahan ASN	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Kota Sorong		Agar disiapkan	-	9,1	km	45.000.000	APBN, APBD, swasta	2024	2025

Sumber: Hasil Analisis, 2022

8.1.3 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya

Rencana aksi pembangunan infrastruktur Cipta Karya di Provinsi Papua Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. 3 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya di Provinsi Papua Barat Daya

No Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi	Indikasi Kebutuhan		Biaya (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana			
	Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Satuan			Mulai	Selesai		
C	CIPTA KARYA												
		Klaster Tambrauw-Maybrat dsk											
1	Pembangunan SPALD Terpusat Kab. Tambrauw	Perkotaan Fef (usulan baru)	Kab. Tambrauw	Pemenuhan target Sanitasi Layak Aman 20%	Agar disiapkan	-	1.542	KK	2.313.000	APBN	2025	2029	
2	Pembangunan TPST Kabupaten Tambrauw	SPM	Kab. Tambrauw	Pemenuhan SPM Persampahan pelayanan 70%	Agar disiapkan	-	5.314	KK	21.000.000	APBN	2025	2029	
3	Pemugaran Permukiman Kumuh di Kab. Tambrauw	Perkotaan Fef-Tambrauw	Fef	Penanganan Pelayanan Dasar : Pengentasan kawasan kumuh 0 ha	SK Kumuh	-	7	Ha	11.200.000	APBN, APBD	2025	2029	
4	Pemugaran Permukiman Kumuh di Kab. Maybrat	Perkotaan Kumurkek-Maybrat	Kumurkek	Penanganan Pelayanan Dasar : Pengentasan kawasan kumuh 0 ha	SK Kumuh	-	20,64	Ha	33.024.000	APBN, APBD	2025	2029	
5	Peningkatan SPAM Kab. Sorong Selatan	SPM	Teminabuan	Penanganan Pelayanan Dasar : Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan wilayah, pemenuhan SPM, kawasan industri	Agar disiapkan	-	4	Ltr/dtk	1.200.000	APBN, APBD	2025	2029	
6	Pembangunan SPALD Terpusat Kab. Sorong Selatan	SPM	Teminabuan	Pemenuhan target Sanitasi Layak Aman 20%	Agar disiapkan	-	2.831	KK	4.246.500	APBN	2025	2029	

RPIW Provinsi Papua Barat Daya
Tahun 2025-2034

No Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi	Indikasi Kebutuhan		Biaya (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
	Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Satuan			Mulai	Selesai
7	SPM	Teminabuan	Pemenuhan SPM Persampahan pelayanan 70%	Agar disiapkan	-	10.552	KK	21.000.000	APBN	2027	2029
	Klaster Sorong dsk										
1	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, PKN Sorong	Kota Sorong	Penanganan Pelayanan Dasar ; Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan pemerintahan, pusat perkotaan	Agar disiapkan	Agar disiapkan	697	litr/detik	209.100.000	APBN, APBD	2025	2029
2	Peningkatan SPAM Kab. Sorong	Kab. Sorong	Penanganan Pelayanan Dasar ; Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan pusat perkotaan, kawasan industri kawasan pariwisata	Agar disiapkan	Agar disiapkan	70	litr/detik	21.000.000	APBN, APBD	2025	2029
3	Optimalisasi IPLT dan IPAL Kab. Sorong	Kab. Sorong	Penanganan Pelayanan Dasar ; Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan pusat	Agar disiapkan	Agar disiapkan	200	KK	N/A	APBN, APBD	2026	2029

RPIW Provinsi Papua Barat Daya
Tahun 2025-2034

No Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi	Indikasi Kebutuhan		Biaya (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
	Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Satuan			Mulai	Selesai
			perkotaan, kawasan industri								
4	Pembangunan SPALD Terpusat (IPAL Komunal Skala Permukiman) Kota Sorong	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, PKN Sorong	Kota Sorong	Agar disiapkan	Agar disiapkan	2.000	KK	3.000.000	APBN, APBD	2026	2029
5	SPALD Terpusat Skala Kota (Optimalisasi IPLT (Kab. Sorong)	Non Kawasan	Kab. Sorong	Agar disiapkan	Agar disiapkan	3.750	KK	N/A	APBN, APBD	2026	2029
6	Pembangunan SPALD Terpusat Kab. Sorong	Non Kawasan	Kab. Sorong	Agar disiapkan	Agar disiapkan	5.540	KK	8.310.000	APBN, APBD	2026	2029
7	Sistem Pengelolaan Persampahan (TPST)	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, PKN Sorong	Kota Sorong	Agar disiapkan	-	58.414	KK	21.000.000	APBN	2027	2029

RPIW Provinsi Papua Barat Daya
Tahun 2025-2034

No Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi	Indikasi Kebutuhan		Biaya (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
	Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Satuan			Mulai	Selesai
8	Sistem Pengelolaan Persampahan (TPST)	Non Kawasan	Kab. Sorong	Pemenuhan SPM Persampahan pelayanan 70%	Agar disiapkan	13.293	KK	21.000.000	APBN	2027	2029
9	Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Kompleks Moyo	Non Kawasan	Kota Sorong	Penanganan Pelayanan Dasar : Pengentasan kawasan kumuh 0 ha	SK Kumuh	16,32	Ha	26.112.000	APBN, APBD	2025	2029
10	Pemugaran Permukiman Kumuh di Kab. Sorong	Non Kawasan	Kab. Sorong	Penanganan Pelayanan Dasar : Pengentasan kawasan kumuh 0 ha	SK Kumuh	358,86	Ha	574.176.000	APBN, APBD	2025	2029
11	Pemugaran Permukiman Kumuh di Kab. Sorong Selatan	Non Kawasan	Kab. Sorong Selatan	Penanganan Pelayanan Dasar : Pengentasan kawasan kumuh 0 ha	SK Kumuh	80	Ha	128.000.000	APBN, APBD	2025	2029
12	Pembangunan Gedung Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Kota Sorong	Dukungan perkantoran pusat pemerintahan baru Provinsi Papua Barat Daya, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023	Agar disiapkan	1	unit	339.742.000	APBN	2025	2025
13	Pembangunan Gedung DPRD Provinsi Papua Barat Daya	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Kota Sorong	Dukungan perkantoran pusat pemerintahan baru Provinsi Papua Barat Daya, List	Agar disiapkan	1	unit	132.178.000	APBN	2025	2025

RPIW Provinsi Papua Barat Daya
Tahun 2025-2034

No Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi	Indikasi Kebutuhan		Biaya (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
	Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Satuan			Mulai	Selesai
			Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023								
14	Pembangunan Gedung MRP provinsi Papua Barat Daya	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Dukungan perkantoran pusat pemerintahan baru Provinsi Papua Barat Daya, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023	Agar disiapkan	-	1	unit	103.126.000	APBN	2025	2025
15	Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Kompleks BTN	Non Kawasan	Penanganan Pelayanan Dasar : Pengentasan kawasan kumuh 0 ha	SK Kumuh	-	17,95	Ha	28.720.000	APBN	2025	2029
16	Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Kompleks Mapas dan Arter	Non Kawasan	Penanganan Pelayanan Dasar : Pengentasan kawasan kumuh 0 ha	SK Kumuh	-	17,67	Ha	28.272.000	APBN	2027	2029

Sumber: Hasil Analisis, 2022

8.1.4 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Perumahan

Rencana aksi pembangunan infrastruktur permukiman di Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari pembangunan rumah swadaya, pembangunan rumah khusus untuk mendukung kawasan strategis, serta peningkatan kualitas rumah swadaya. Berikut rencana aksi pembangunan infrastruktur perumahan di Provinsi Papua Barat Daya.

Tabel 8. 4 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Perumahan di Provinsi Papua Barat Daya

No	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi	Indikasi Kebutuhan		Biaya (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
		Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Satuan			Mula	Selesai
D	PERUMAHAN											
Klaster Tambrauw-Maybrat dsk												
1	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Tambrauw	Non Kawasan	Kab. Tambrauw	Pengurangan RTLH di Kab. Tambrauw sebesar 1.919 unit, Dukungan perbaikan rumah untuk kesehatan masyarakat	Agar disiapkan	-	1.919	unit	67.165.000	APBN, APBD, swasta, masyarakat	2025	2029
2	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Maybrat	Non Kawasan	Kab. Maybrat	Pengurangan RTLH di Kab. Maybrat sebesar 5.569 unit, Dukungan perbaikan rumah untuk kesehatan masyarakat	Agar disiapkan	-	5.569	unit	194.915.000	APBN, APBD, swasta, masyarakat	2025	2029
3	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni di Kab. Tambrauw	Non Kawasan	Kab. Tambrauw	Penuntasan Backlog Perumahan	Agar disiapkan	-	313	unit	53.210.000	APBN	2025	2029
4	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni di Kab. Maybrat	Non Kawasan	Kab. Maybrat	Penuntasan Backlog Perumahan	Agar disiapkan	-	204	unit	34.680.000	APBN	2026	2029

RPIW Provinsi Papua Barat Daya
Tahun 2025-2034

No	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi	Indikasi Kebutuhan Volume Satuan	Biaya (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
		Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik							Mula	Selesai
5	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Raja Ampat	Non Kawasan	Kab. Raja Ampat	Pengurangan RTLH di Kab. Raja Ampat sebesar 4480 unit, Dukungan perbaikan rumah untuk kesehatan masyarakat	Agar disiapkan	-	4.480 unit	156.800.000	APBN, APBD, swasta, masyarakat	2025	2029
6	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni di Kab. Raja Ampat	Non Kawasan	Kab. Raja Ampat	Penuntasan Backlog Perumahan	Agar disiapkan	-	1288 unit	218.960.000	APBN	2025	2029
Klaster Sorong dsb											
1	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Sorong Selatan	Non Kawasan	Kab. Sorong Selatan	Pengurangan RTLH di Kab. Sorong Selatan sebesar 4682 unit, Dukungan perbaikan rumah untuk kesehatan masyarakat	Agar disiapkan	-	21 unit	735.000	APBD, swasta, masyarakat	2025	2029
2	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Sorong	Non Kawasan	Kab. Sorong	Pengurangan RTLH di Kab. Sorong sebesar 4.184 unit, Dukungan perbaikan rumah untuk kesehatan masyarakat	Agar disiapkan	-	4.184 unit	146.440.000	APBN, APBD, swasta, masyarakat	2025	2029
3	Peningkatan Kualitas Rumah	Non Kawasan	Kota Sorong	Pengurangan RTLH di Kota Sorong sebesar	Agar disiapkan	-	11.685 unit	408.975.000	APBN, APBD,	2025	2029

No	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi	Indikasi Kebutuhan		Biaya (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
		Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Satuan			Mulai	Selesai
	Tidak Layak Huni di Kota Sorong			11.685 unit, Dukungan perbaikan rumah untuk kesehatan masyarakat						swasta, masyarakat		
4	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni di Kab. Sorong Selatan	Non Kawasan	Kab. Sorong Selatan	Penuntasan Backlog Perumahan	Agar disiapkan	-	406	unit	69.020.000	APBN	2025	2029
5	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni di Kab. Sorong	Non Kawasan	Kab. Sorong	Penuntasan Backlog Perumahan	Agar disiapkan		632	unit	107.440.000	APBN	2026	2029
6	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni di Kota Sorong	Non Kawasan	Kota Sorong	Penuntasan Backlog Perumahan	Agar disiapkan		2863	unit	486.710.000	APBN	2026	2029
7	Pembangunan Rumah Susun ASN Pemprov Papua Barat Daya (1 tower, 4 lantai type 36)	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Kota Sorong	Dukungan hunian untuk ASN pemerintahan baru Provinsi Papua Barat Daya, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023	Agar disiapkan		60	unit	41.480.086	APBN	2024	2025

RPIW Provinsi Papua Barat Daya
Tahun 2025-2034

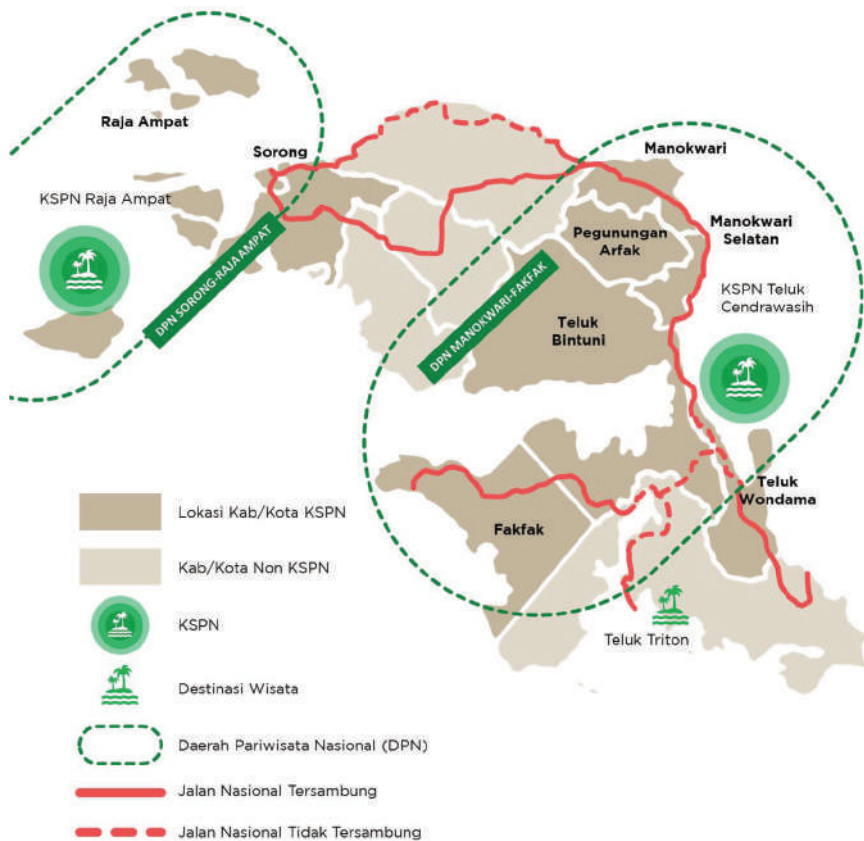
No	Program/ Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan Readiness Criteria	Keterangan Tambahan Hasil Diskusi	Indikasi Kebutuhan		Biaya (Rp. Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
		Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik				Volume	Satuan			Mulai	Selesai
8	Pembangunan Rumah Susun ASN PUPR (1 tower, 3 lantai type 45)	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Kota Sorong	Dukungan hunian untuk ASN PUPR di Provinsi Papua Barat Daya, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023	Agar disiapkan		36	unit	55.112.342	APBN	2024	2025
9	Pembangunan Rumah Susun TNI AL (1 tower, 3 lantai type 36)	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Kota Sorong	Dukungan hunian untuk TNI AL di Provinsi Papua Barat Daya, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023	Agar disiapkan		44	unit	32.221.804	APBN	2024	2025
10	Bantuan PSU untuk Rumah Milik	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Kota Sorong	Dukungan hunian untuk ASN pemerintahan baru Provinsi Papua Barat Daya, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023	Agar disiapkan		300	unit	6.485.500	APBN	2024	2025

Sumber: Hasil Analisis, 2022

8.2 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR

8.2.1 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan di Provinsi Papua Barat Daya yang memiliki potensi keanekaragaman hayati dan ekosistem pesisir maupun laut yang unik sehingga dapat dikembangkan menjadi atraksi minat khusus. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan kedepannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata dan pelayanan infrastruktur SPM dalam rangka mewujudkan pelayanan pariwisata berstandar internasional.



Peta 8. 1 Peta Keterpaduan Sektor Pariwisata Provinsi Papua Barat Daya
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Rencana aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Sektor Pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. 5 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Sektor Pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya

STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR (HARD AND SOFT)		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNO R	TAHUN									
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pengembangan pariwisata berbasis wisata minat khusus dengan fokus mendorong investasi swasta berupa pengembangan kawasan pariwisata berbasis edutourism, adventourism,	Peningkatan kualitas lingkungan kawasan pariwisata	Infrastruktur Permukiman	Penataan Kawasan	Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Wisata di KTA Waisai, KTA Wayag, KTA Misool	Kab. Raja Ampat	Kementerian PUPR	CK										
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Pariwisata untuk Menarik Minat Investasi	Infrastruktur Sumber Daya Air	Infrastruktur Air Baku	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi/ Prasarana Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Kab. Raja Ampat	Kementerian PUPR	SDA										
		Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Air Minum	Pembangunan SPAM dukungan Pariwisata Raja Ampat	Kab. Raja Ampat	Kementerian PUPR	CK										
		Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Pengolahan Air Limbah	Pembangunan SPALD Terpusat Kab. Raja Ampat	Kab. Raja Ampat	Kementerian PUPR	CK										

STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR (HARD AND SOFT)		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNO R	TAHUN									
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
healthourism, dst		Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan (TPST)	Kab. Raja Ampat	Kementerian PUPR	CK										
		Infrastruktur Perumahan	Peningkatan Kualitas RTLH (RTLH)	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Raja Ampat	Kab. Raja Ampat	Kementerian PUPR	PR										
		Pengembangan Kelembagaan Kawasan Pariwisata	Pembentukan Lembaga Pengelola	Fasilitasi pembentukan Forum Tata Kelola Pariwisata	Kab. Raja Ampat	Kementerian Pariwisata	-										
		Pengembangan Kelembagaan Kawasan Pariwisata	Pembentukan Lembaga Pengelola	Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata (Command Centre)	Kab. Raja Ampat	Kementerian Pariwisata	-										
Penguatan konsep pengembangan pariwisata dan fokus penguatan brand image dengan mengadopsi metode dari best practice destinasi lainnya di Indonesia	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata	Pengembangan Kelembagaan Kawasan Pariwisata	Peningkatan Kapasitas	Pelatihan UMKM produk cinderamata	Kab. Raja Ampat	Kementerian Koperasi dan UKM	-										
		Pengembangan SDM	Peningkatan Kapasitas	Pelatihan E - Commerce UMKM sektor pariwisata	Kab. Raja Ampat	Kementerian Koperasi dan UKM	-										

STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR (HARD AND SOFT)		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNO R	TAHUN									
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dukungan pembangunan dan peningkatan infrastruktur untuk mengintegrasikan sektor pariwisata dengan sektor	Pemasaran Pariwisata	Pengembangan SDM	Peningkatan Kapasitas	Pelatihan Vocational Bagi Usaha Mikro di Sektor Pariwisata	Kab. Raja Ampat	Kementerian Koperasi dan UKM	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pengembangan Budaya	Peningkatan Kapasitas	Penetapan Cagar Budaya	Kab. Raja Ampat	Kemendikbud	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Pengembangan Budaya	Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Raja Ampat	Kemendikbud	-	4	5	6	7	8	9				
		Pemasaran Destinasi Pariwisata	Pemasaran Luring	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (mengikuti travel show)	Kab. Raja Ampat	Kementerian Pariwisata	-										
		Pemasaran Destinasi Pariwisata	Pemasaran Daring	Pemuktahiran Muatan Situs Web Promosi	Kab. Raja Ampat	Kementerian Pariwisata	-										
		Infrastruktur Konektivitas	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Lingkar Raja Ampat	Kab. Raja Ampat	Kementerian PUPR	BM										
		Pembangunan Infrastruktur Konektivitas untuk menghubungkan kawasan pariwisata dengan															

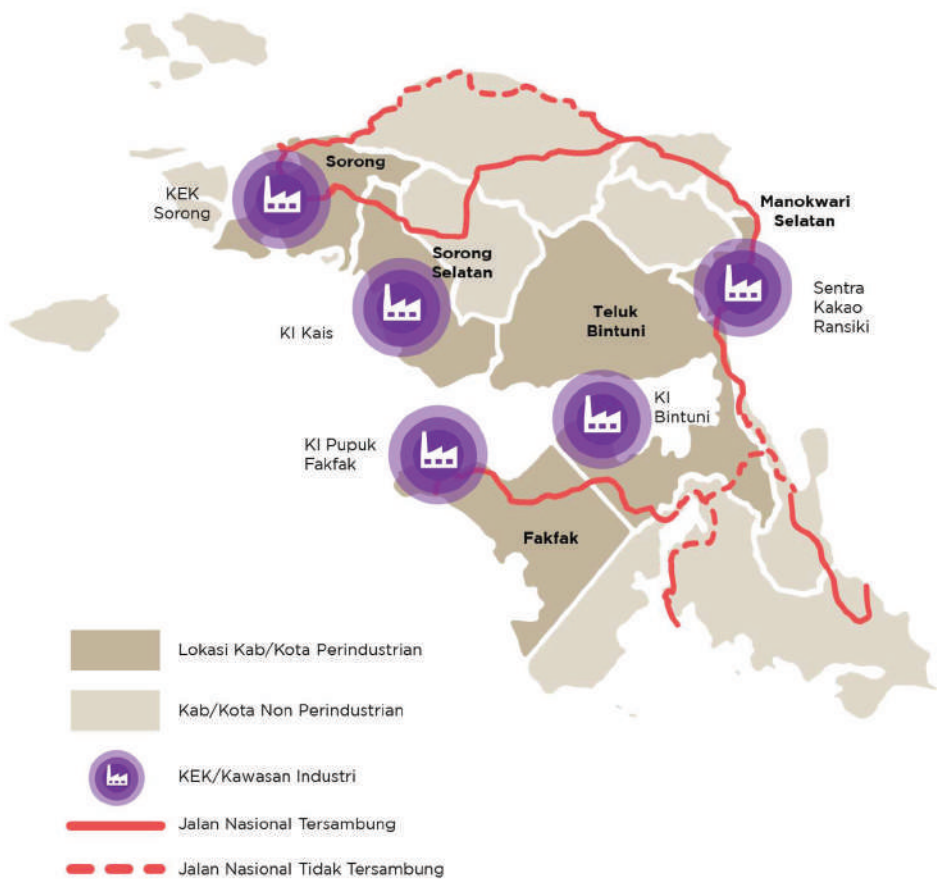
STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR (HARD AND SOFT)		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNO R	TAHUN									
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
industri pendukung seperti perikanan dan UMKM	Kawasan Industri/UMKM																
		Persiapan UMKM di Sekitar Kawasan Pariwisata	Pemetaan Potensi	Pemetaan potensi industri, temu bisnis dan fasilitas kemitraan industri pariwisata dan ekonomi kreatif	Kab. Raja Ampat	Kementerian Pariwisata	-										
	Peningkatan Kapasitas UMKM	Persiapan UMKM di Sekitar Kawasan Pariwisata	Pelatihan UMKM	Pelatihan Bagi UMKM Pariwisata	Kab. Raja Ampat	Kementerian Pariwisata	-										
		Pengembangan Skema Inovatif	Peningkatan Kapasitas	Penyusunan modul investasi yang ramah lingkungan dan berkearifan lokal	Kab. Raja Ampat	Kementerian Investasi	-										
Mendorong investasi swasta dalam pengembangan kawasan pariwisata untuk fokus pada specific target market dengan pengembangan	Upaya Mendorong Investasi	Pengembangan Business Scheme	Peningkatan Kapasitas	Menetapkan bentuk insentif bagi investasi yang ramah lingkungan dan bersesuaian dengan kearifan lokal	Kab. Raja Ampat	Kementerian Investasi	-										

STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR (HARD AND SOFT)		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNO R	TAHUN									
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
skema inovatif dan business scheme yang meningkatkan daya tarik		Pemberian Insentif	Peningkatan Kapasitas	Peningkatan minat investasi swasta melalui insentif pemerintah (tax allowance, dll)	Kab. Raja Ampat	Kementerian Investasi	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
								4	5	6	7	8	9				

Sumber: Hasil Analisis, 2022

8.2.2 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Sektor Industri

Sektor industri menjadi fokus selanjutnya yang memberikan kontribusi terbesar terhadap struktur perekonomian di Provinsi Papua Barat Daya. Dari total Produk Domestik Bruto Provinsi, sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 28,95%, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,30%, dan sektor industri pengolahan sebesar 8,71%. Untuk mewujudkan peningkatan produktivitas industri, diperlukan upaya mendekatkan lokasi raw material dan memastikan penyediaan infrastruktur dasar.



Peta 8. 2 Peta Keterpaduan Sektor Industri Provinsi Papua Barat Daya
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Rencana aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Sektor Industri di Provinsi Papua Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. 6 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Sektor Industri di Provinsi Papua Barat Daya

STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNO R	TAHUN									
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Peningkatan kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan stakeholder dalam percepatan pengembangan kawasan industri di Provinsi Papua Barat Daya	Peningkatan daya saing perekonomian dan investasi daerah	Partisipasi	Jumlah investasi	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah Daerah	TBD										
			Keikutsertaan pameran	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah Daerah	TBD										
Peningkatan kualitas SDM lokal untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja baru	Peningkatan daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	Perlindungan hak dan kesempatan tenaga kerja	tenaga kerja	Program peningkatan kesempatan kerja	Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah Daerah	TBD										
			tenaga kerja	Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah Daerah	TBD										

STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNO R	TAHUN											
							2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9						
			Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah Daerah	TBD												
	Peningkatan kualitas dan manajemen pendidikan	Kesempatan pendidikan	Program pendidikan menengah	Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah Daerah	TBD												
		Tenaga pendidik	Program pengembangan perguruan tinggi	Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah Daerah	TBD												
Penyediaan infrastruktur (jalan, air bersih, kelistrikan) dalam rangka percepatan pembangunan	Penyediaan layanan dasar infrastruktur sumber daya air	Infrastruktur Sumber Daya Air	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi / Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Sorong	Kab. Sorong	Kementerian an PUPR	SDA												

STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNO R	TAHUN									
								2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
KEK/KI di Provinsi Papua Barat Daya		Infrastruktur Sumber Daya Air	Penyediaan Air Baku	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi/ Prasarana Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Kab. Sorong Selatan	Kementeri an PUPR	SDA										
		Infrastruktur Sumber Daya Air	Penyediaan Air Baku	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi/ Rehabilitasi Intake Air Baku SPAM Regional Sorong Tahap II	Kab. Sorong	Kementeri an PUPR	SDA										
		Infrastruktur Sumber Daya Air	Penyediaan Air Baku	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi/ Pembangunan Air Baku di Kawasan Ekonomi Khusus Kab. Sorong Tahap III	Kab. Sorong	Kementeri an PUPR	SDA										

STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNO R	TAHUN									
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Infrastruktur Sumber Daya Air	Pengaman Pantai	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air / Penanganan Abrasi Pantai Kampung Arar Kawasan KEK Sorong	Kab. Sorong	Kementeri an PUPR	SDA										
	Peningkatan interkoneksi antar wilayah	Infrastruktur Konektivitas	Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan Akses Kota Baru Sorong	Kota Sorong	Kementeri an PUPR	BM										
		Infrastruktur Konektivitas	Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan Nasional (Bandara-Kantor Gubernur)	Kota Sorong	Kementeri an PUPR	BM										
		Infrastruktur Konektivitas	Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan Akses Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Kota Sorong	Kementeri an PUPR	BM										
		Infrastruktur Konektivitas	Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan Akses Industri Kais – Sorong Selatan	Kab. Sorong Selatan	Kementeri an PUPR	BM										

STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNO R	TAHUN									
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Peningkatan layanan kebutuhan dasar kawasan permukiman	Peningkatan layanan kebutuhan dasar kawasan permukiman	Infrastruktur Permukiman	Penyediaan Air Minum	Peningkatan SPAM Kab. Sorong	Kab Sorong	Kementerian an PUPR	CK										
		Infrastruktur Permukiman	Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan (TPST)	Kab. Sorong	Kementerian an PUPR	CK										
		Infrastruktur Permukiman	Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan (TPST)	Kota Sorong	Kementerian an PUPR	CK										
		Infrastruktur Permukiman	Sanitasi	Optimalisasi IPLT dan IPAL Kab. Sorong	Kab. Sorong	Kementerian an PUPR	CK										
		Infrastruktur Permukiman	Sanitasi	Pembangunan SPALD Terpusat (IPAL Komunal Skala Permukiman) Kota Sorong	Kota Sorong	Kementerian an PUPR	CK										
		Infrastruktur Permukiman	Sanitasi	SPALD Terpusat Skala Kota (Optimalisasi IPLT Kab. Sorong)	Kab. Sorong	Kementerian an PUPR	CK										

STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNO R	TAHUN									
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Penguatan produktivitas dan nilai komoditas	Peningkatan layanan kebutuhan dasar perumahan	Infrastruktur Permukiman	Sanitasi	Pembangunan SPALD Terpusat Kab. Sorong	Kab. Sorong	Kementerian an PUPR	CK										
		Infrastruktur Perumahan	Peningkatan Kualitas RTLH (RTLH)	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Sorong Selatan	Kab. Sorong Selatan	Kementerian an PUPR	P										
		Infrastruktur Perumahan	Peningkatan Kualitas RTLH (RTLH)	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Sorong	Kota Sorong	Kementerian an PUPR	P										
	Peningkatan produktivitas dan pertumbuhan sektor pertanian	Daerah rawan pangan	Lembaga cadangan pangan	Program peningkatan penanganan daerah rawan pangan	Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah Daerah	TBD										
		Sektor Perikanan	Perikanan tangkap	Program pengembangan perikanan tangkap	Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah Daerah	TBD										
		Sektor Perikanan	Budidaya perikanan	Program pengembangan budidaya perikanan	Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah Daerah	TBD										

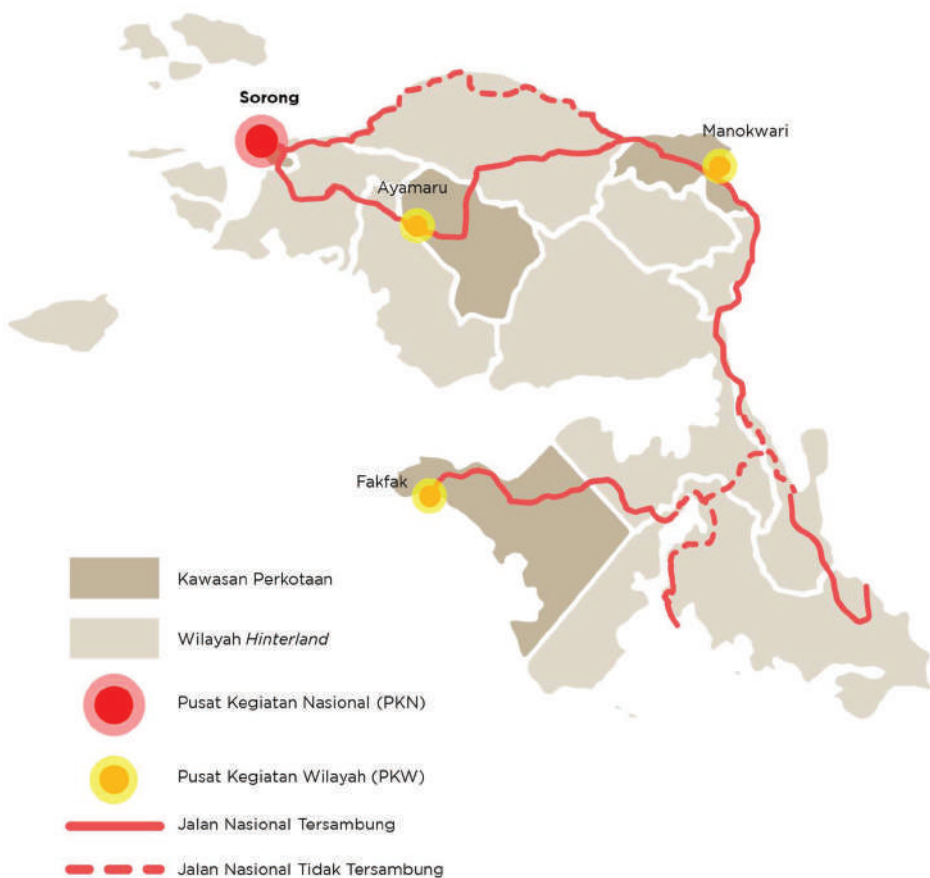
STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNO R	TAHUN									
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Sektor Perikanan	Pemasaran produksi	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah Daerah	TBD										
		Sektor pertanian	Peningkatan produksi	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan	Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah Daerah	TBD										
		Sektor pertanian	Peningkatan produksi	Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura	Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah Daerah	TBD										
		Sektor pertanian	Penguatan perbenihan	Program penguatan sistem perbenihan dan pembibitan	Provinsi Papua Barat Daya	Pemerintah Daerah	TBD										

STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNO R	TAHUN									
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				tanaman pangan dan holtikultura				2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan	Provinsi Papua Barat Daya	Pemerinta h Daerah	TBD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Sektor pertanian	Peningkatan produksi					4	5	6	7	8	9				
				Program peningkatan kesejahteraan petani	Provinsi Papua Barat Daya	Pemerinta h Daerah	TBD										
		Sektor pertanian	Peningkatan kesejahteraan														
				Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian	Provinsi Papua Barat Daya	Pemerinta h Daerah	TBD										
		Sektor pertanian	Peningkatan sarana prasarana														

Sumber: Hasil Analisis, 2022

8.2.3 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Sektor Perkotaan

Sektor perkotaan merupakan salah satu fokus pengembangan karena kawasan perkotaan di Provinsi Papua Barat Daya ditetapkan sebagai prioritas dukungan kebijakan dan pemerintah terhadap kawasan strategis serta besarnya dukungan pembiayaan pemerintah. Namun saat ini antar pusat kegiatan belum terhubung dengan optimal karena kondisi jalan yang rusak berat dan hutan. Kedepannya, perlu diupayakan pemenuhan SPM serta peningkatan keterkaitan perkotaan dengan hinterlandnya untuk mengoptimalkan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan terhadap wilayahnya dan wilayah luar.



Peta 8. 3 Peta Keterpaduan Sektor Perkotaan Provinsi Papua Barat Daya

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Rencana aksi keterpaduan infrastruktur PUPR dan non PUPR sektor perkotaan di Provinsi Papua Barat Daya pada periode Tahun 2023-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. 7 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Sektor Perkotaan

STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	Tahun									
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pemenuhan infrastruktur dasar perkotaan mendukung fungsi pusat pertumbuhan dan pelayanan	Penyediaan Infrastruktur Dasar sesuai SPM	Sumber Daya Air	Pengendalian	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air / Pengendalian Banjir (Pembangunan Talud dan Perkuatan Tebing Sungai dan Perkuatan Tebing Sungai Klabilim) pada kawasan pusat pemerintahan	Kab Sorong	Kementerian PUPR	SDA									
		Sumber Daya Air	Pengendalian	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air / Penanganan Abrasi Pantai Kampung Arar Kawasan KEK Sorong	Kab Sorong	Kementerian PUPR	SDA									
		Sumber Daya Air	Air Baku	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi/ Prasarana Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Kab Raja Ampat	Kementerian PUPR	SDA									
		Sumber Daya Air	Air Baku	Penyediaan Air Baku di Kab. Sorong	Kota Sorong	Kementerian PUPR	SDA									
		Sumber Daya Air	Air Baku	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi/	Kab Sorong Selatan	Kementerian PUPR	SDA									

STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	Tahun									
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prasarana Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				4	5	6	7	8	9				
		Sumber Daya Air	Air Baku	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi / Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Sorong	Kab Sorong	Kementerian PUPR										
		Cipta Karya	Air Minum	Pembangunan SPAM Kab. Raja Ampat	Kab Raja Ampat	Kementerian PUPR										
		Cipta Karya	Air Minum	Pembangunan dan Peningkatan SPAM Regional Sorong	Kota Sorong	Kementerian PUPR										
		Cipta Karya	Air Minum	Peningkatan SPAM Kab. Sorong	Kab Sorong	Kementerian PUPR										
		Cipta Karya	Air Minum	Peningkatan SPAM Kab. Sorong Selatan	Teminabuan	Kementerian PUPR										
		Cipta Karya	Sanitasi	Pembangunan SPALD Terpusat Kab. Tambrau	Kab. Tambrau	Kementerian PUPR										
		Cipta Karya	Sanitasi	Pembangunan SPALD Terpusat Kab. Maybrat	Kab. Maybrat	Kementerian PUPR										
		Cipta Karya	Sanitasi	Optimalisasi IPLT dan IPAL Kab. Sorong	Kab. Sorong	Kementerian PUPR										
		Cipta Karya	Sanitasi	Pembangunan SPALD Terpusat Kab. Raja Ampat	Kab. Raja Ampat	Kementerian PUPR										

STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	Tahun									
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cipta Karya	Sanitasi	Pembangunan SPALD Terpusat (IPAL Komunal Skala Permukiman) Kota Sorong	Kota Sorong	Kementerian PUPR	CK									
		Cipta Karya	Sanitasi	SPALD Terpusat Skala Kota (Optimalisasi IPLT Kab. Sorong)	Kab. Sorong	Kementerian PUPR	CK									
		Cipta Karya	Sanitasi	Pembangunan SPALD Terpusat Kab. Sorong	Kab. Sorong	Kementerian PUPR	CK									
		Cipta Karya	Sanitasi	Pembangunan SPALD Terpusat Kab. Raja Ampat	Kab. Raja Ampat	Kementerian PUPR	CK									
		Cipta Karya	Sanitasi	Pembangunan SPALD Terpusat Kab. Sorong Selatan	Teminabuan	Kementerian PUPR	CK									
		Cipta Karya	Persampah an	Pembangunan TPST Kabupaten Tambrau	Kab. Tambrau	Kementerian PUPR	CK									
		Cipta Karya	Persampah an	Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan (TPST) Kabupaten Maybrat	Kab. Maybrat	Kementerian PUPR	CK									
		Cipta Karya	Persampah an	Sistem Pengelolaan Persampahan (TPST)	Kota Sorong	Kementerian PUPR	CK									
		Cipta Karya	Persampah an	Sistem Pengelolaan Persampahan (TPST)	Kab. Sorong	Kementerian PUPR	CK									

RPIW Provinsi Papua Barat Daya
Tahun 2025-2034

STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	Tahun									
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Cipta Karya	Persampahan	Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan	Kementerian PUPR	CK									9
		Cipta Karya	Persampahan	Sistem Pengelolaan Persampahan (TPST)	Kab. Raja Ampat	Kementerian PUPR	CK									
		Cipta Karya	Penataan Kawasan	Pemugaran Permukiman Kumuh di Kab. Tambrauw	Fef	Kementerian PUPR	CK									
		Cipta Karya	Penataan Kawasan	Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Kompleks Moyo	Kota Sorong	Kementerian PUPR	CK									
		Cipta Karya	Penataan Kawasan	Pemugaran Permukiman Kumuh di Kab. Sorong	Kab. Sorong	Kementerian PUPR	CK									
		Cipta Karya	Penataan Kawasan	Pemugaran Permukiman Kumuh di Kab. Sorong Selatan	Kab. Sorong Selatan	Kementerian PUPR	CK									
		Cipta Karya	Penataan Kawasan	Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Wisata di KTA Waisai	Kab. Raja Ampat	Kementerian PUPR	CK									
		Cipta Karya	Penataan Kawasan	Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Wisata di KTA Wayag	Kab. Raja Ampat	Kementerian PUPR	CK									
		Cipta Karya	Penataan Kawasan	Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Wisata di KTA Misool	Kab. Raja Ampat	Kementerian PUPR	CK									

STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	Tahun									
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cipta Karya	Penataan Kawasan	Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Kompleks BTN	Fef	CK	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Cipta Karya	Penataan Kawasan	Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Kompleks Mapas dan Arter	Kota Sorong	CK	4	5	6	7	8	9				
		Perumahan	RTLH	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Tambrauw	Kab. Tambrauw	CK										
		Perumahan	RTLH	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Maybrat	Kab. Maybrat	CK										
		Perumahan	RTLH	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni di Kab. Tambrauw	Kab. Tambrauw	CK										
		Perumahan	RTLH	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni di Kab. Maybrat	Kab. Maybrat	CK										
		Perumahan	RTLH	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Sorong Selatan	Kab. Sorong Selatan	CK										
		Perumahan	RTLH	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Sorong	Kab. Sorong	CK										

RPIW Provinsi Papua Barat Daya
Tahun 2025-2034

STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	Tahun									
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
							4	5	6	7	8	9				
		Perumahan	RTLH	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Raja Ampat	Kab. Raja Ampat	Kementerian PUPR	CK									
		Perumahan	RTLH	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Sorong	Kota Sorong	Kementerian PUPR	CK									
		Perumahan	RTLH	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni di Kab. Sorong Selatan	Kab. Sorong Selatan	Kementerian PUPR	CK									
		Perumahan	RTLH	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni di Kab. Sorong	Kab. Sorong	Kementerian PUPR	CK									
		Perumahan	RTLH	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni di Kab. Raja Ampat	Kab. Raja Ampat	Kementerian PUPR	CK									
		Perumahan	RTLH	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni di Kota Sorong	Kota Sorong	Kementerian PUPR	CK									
		Perumahan	RTLH	Pembangunan Rumah Susun ASN Pemprov Papua Barat Daya (1 tower, 4 lantai type 36)	Kota Sorong	Kementerian PUPR	CK									

STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	Tahun									
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
							4	5	6	7	8	9				
							CK									
							CK									
							CK									
							CK									
							CK									
							TBD									
							CK									
							CK									
							CK									
	Penguatan Fungsi Perkotaan sebagai Pusat	Pendidikan	Sekolah	Optimalisasi SMP Negeri 9 Kebar Kab. Tambrau	Kebar, Kab. Tambrau	Kementerian PUPR										
	Pendidikan	Rusun	Pembangunan Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi	Papua Barat Daya	Kota Sorong	Kementerian PUPR										
	Pendidikan	Rusun	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Mahasiswa STKIP Muhammadiyah Sorong	Kota Sorong	Kementerian PUPR	Kementerian PUPR										

RPIW Provinsi Papua Barat Daya
Tahun 2025-2034

STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	Tahun									
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
							4	5	6	7	8	9				
	Pertumbuhan	Pemerintahan	Pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan DOB Papua Barat Daya	Kota Sorong	Kementerian PUPR	CK										
	Konektivitas intra kawasan	Bina Marga	Pembangunan Jalan Akses Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Kota Sorong	Kementerian PUPR	BM										
		Bina Marga	Pembangunan Jalan Utama Kawasan Kantor Gubernur	Kota Sorong	Kementerian PUPR	BM										
		Bina Marga	Peningkatan Jalan Akses Belakang Kantor Gubernur	Kota Sorong	Kementerian PUPR	BM										
		Bina Marga	Pembangunan Jalan Perumahan ASN	Kota Sorong	Kementerian PUPR	BM										
		Bina Marga	Pembangunan Jalan Akses Kota Baru Sorong	Kota Sorong	Kementerian PUPR	BM										
		Bina Marga	Pembangunan Jalan Nasional (Bandara-Kantor Gubernur)	Kota Sorong	Kementerian PUPR	BM										
	Konektivitas antara kawasan perkotaan dan wilayah pendukung															

STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	Tahun									
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bina Marga	Jalan	Peningkatan Kapasitas Jalan / Rehabilitasi jalan ruas Hurimber- Kokas	Kab. Fakfak	Kementerian PUPR	BM	4	5	6	7	8	9				
		Bina Marga	Jalan	Pembangunan Jalan Mameh - Wendes	Kab. Teluk Bintuni	Kementerian PUPR	BM										
		Bina Marga	Jalan	Pembangunan Jalan Wendesi - Tiwara	Kab. Teluk Bintuni	Kementerian PUPR	BM										
		Bina Marga	Jalan	Pembangunan Jalan Tiwara - Bofuer	Kab. Teluk Bintuni	Kementerian PUPR	BM										
		Bina Marga	Jalan	Pembangunan Jalan Akses KI Bintuni (Aroba-Sumuri)	Kab. Teluk Bintuni	Kementerian PUPR	BM										
		Bina Marga	Jalan	Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Fakfak	Kab. Fakfak	Kementerian PUPR	BM										
		Bina Marga	Jalan	Pembangunan Jalan Akses KI Pupuk Fakfak dan Pelabuhan Kokas (Tol Laut)	Kab. Fakfak	Kementerian PUPR	BM										
		Bina Marga	Jalan	Pembangunan Jalan Sp. Goro - Kp. Muri	Kab. Kaimana	Kementerian PUPR	BM										
		Bina Marga	Jalan	Pembangunan Jalan Kp. Muri - Batas Provinsi Papua Barat	Kab. Kaimana	Kementerian PUPR	BM										
		Bina Marga	Jalan	Pembangunan Jalan Gusi - Wonama	Kab. Kaimana	Kementerian PUPR	BM										

RPIW Provinsi Papua Barat Daya
Tahun 2025-2034

STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	Tahun									
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Bina Marga	Jalan	Pembangunan Jalan Akses Kawasan Wisata Teluk Triton	Kab. Kaimana	BM										9
		Bina Marga	Jalan	Pembangunan Jalan Sp.3 Moyana - Gusi	Kab. Kaimana	BM										
		Bina Marga	Jalan	Pembangunan Jalan Akses Ekowisata Anggi (Danau Anggi)	Kab. Pegunungan Arfak	BM										
		Bina Marga	Jalan	Pembangunan Jalan Mega – Sausafor	Kab. Tambrauw	BM										
		Bina Marga	Jalan	Pembangunan Jalan Sausafor – Saubeba	Kab. Tambrauw	BM										
		Bina Marga	Jalan	Pembangunan Jalan Saukorem - Arfu	Kab. Tambrauw	BM										
		Bina Marga	Jalan	Pembangunan Jalan Lingkar Raja Ampat	Kab. Raja Ampat	BM										
		Bina Marga	Jalan	Pembangunan Jalan Wendesi - Ambuni	Kab. Teluk Wondama	BM										
		Bina Marga	Jalan	Pembangunan Jalan Akses Bandara dan Pelabuhan Wasior	Kab. Teluk Wondama	BM										
Mengakselerasi	Penguatan Produktivitas	Pangan	SDM	Peningkatan kapasitas petani OAP melalui fasilitasi pelatihan dan pendampingan	Papua Barat	TBD										

STRATEGI	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	Tahun									
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
penguatan hilirisasi masing- masing komoditas unggulan di kawasan pendukung terhadap perkotaan dalam fungsi pusat jasa dan perdagangan	s Komoditas	Pangan	Sarpras	Fasilitasi bantuan sarana produksi pertanian dan perkebunan	Papua Barat Daya	Kementan, Pemprov, Pemda	TBD										
		Pangan	Produk	Peningkatan kualitas dan pengawasan bibit tanaman	Papua Barat Daya	Kementan, Pemprov, Pemda	TBD										
		Perikanan	-	Pengembangan kawasan perikanan terpadu di wilayah strategis	Papua Barat Daya	KKP, Pemprov, Pemda	TBD										
		Pengolahan	Investasi	Peningkatan daya saing dan iklim investasi daerah	Papua Barat Daya	Pemprov, Pemda	TBD										
Peningkatan Distribusi Komoditas	Peningkatan Nilai Komoditas	Pengolahan	SDM	Peningkatan kapasitas tenaga kerja	Papua Barat Daya	Pemprov, Pemda	TBD										
		Pengolahan	SDM	Peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah	Papua Barat Daya	KemenkopUM KM, Pemprov, Pemda	TBD										
		Pengolahan	SDM	Peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah	Papua Barat Daya	KemenkopUM KM, Pemprov, Pemda	TBD										
Peningkatan Distribusi Komoditas	Peningkatan Distribusi Komoditas	Bina Marga	Konektivitas	Pembangunan Jalan Sausafor – Saubeba	Kab. Tambrauw	Kementerian PUPR	BM										
		Bina Marga	Konektivitas	Pembangunan Jalan Sausafor – Arfu	Kab. Tambrauw	Kementerian PUPR	BM										
		Bina Marga	Konektivitas	Pembangunan Jalan Mega – Sausafor	Kab. Tambrauw	Kementerian PUPR	BM										

Sumber: Hasil Analisis, 2022



BAB 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW



BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW

Pada bab ini untuk evaluasi pelaksanaan yaitu terkait kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW digunakan sebagai klarifikasi atas pelaksanaan program dari dokumen RPIW dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RPIW selanjutnya.

9.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Kementerian PUPR dalam menyiapkan dokumen Rencana pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat menggunakan pendekatan berdasarkan pengembangan wilayah dalam hal ini disebut dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan infrastruktur dalam hal ini dokumen RPIW.

Pemantauan pelaksanaan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi pelaksanaan RPIW dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Pemilihan jenis evaluasi disesuaikan dengan tujuan evaluasi tersebut: 1) Evaluasi Pelaksanaan RPIW, dan 2) Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW sebagai tindakan korektif/akselerasi/klarifikasi atas pelaksanaan program dari dokumen RPIW dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RPIW disesuaikan dengan dinamika perubahan lingkungan strategi yang terus berkembang (*living document*).

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi khususnya di Provinsi Papua Barat Daya terdapat beberapa kondisi khusus yang harus menjadi perhatian, antara lain:

1. Keterbatasan moda transportasi menuju dan antar kawasan (rute pesawat, kapal, mobil double gardan untuk *track* sulit);
2. Isu keamanan (rentan terjadi kerusuhan, zona merah);
3. Kondisi geografis kawasan yang luas dan terpencar antar pusat kegiatan satu dan yang lainnya sehingga memerlukan waktu lebih lama pada saat pengambilan data;
4. Keterbatasan data sekunder (dokumen pemerintah daerah yang kurang lengkap dan belum ada update serta skala data yang terlalu besar).

9.2 Tujuan

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW bertujuan:

1. Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan implementasi dokumen RPIW, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
2. Evaluasi merupakan tindakan untuk mengetahui pencapaian/implementasi hasil, kemajuan, dan kendala dari dokumen RPIW berdasarkan output (infrastruktur terbangun), outcome (keberfungsian dari infrastruktur yang terbangun), benefit (manfaat dari berfungsinya infrastruktur), impact (dampak dari terimplementasikannya dokumen RPIW), dan rekomendasi (keberlanjutan dari dokumen RPIW).

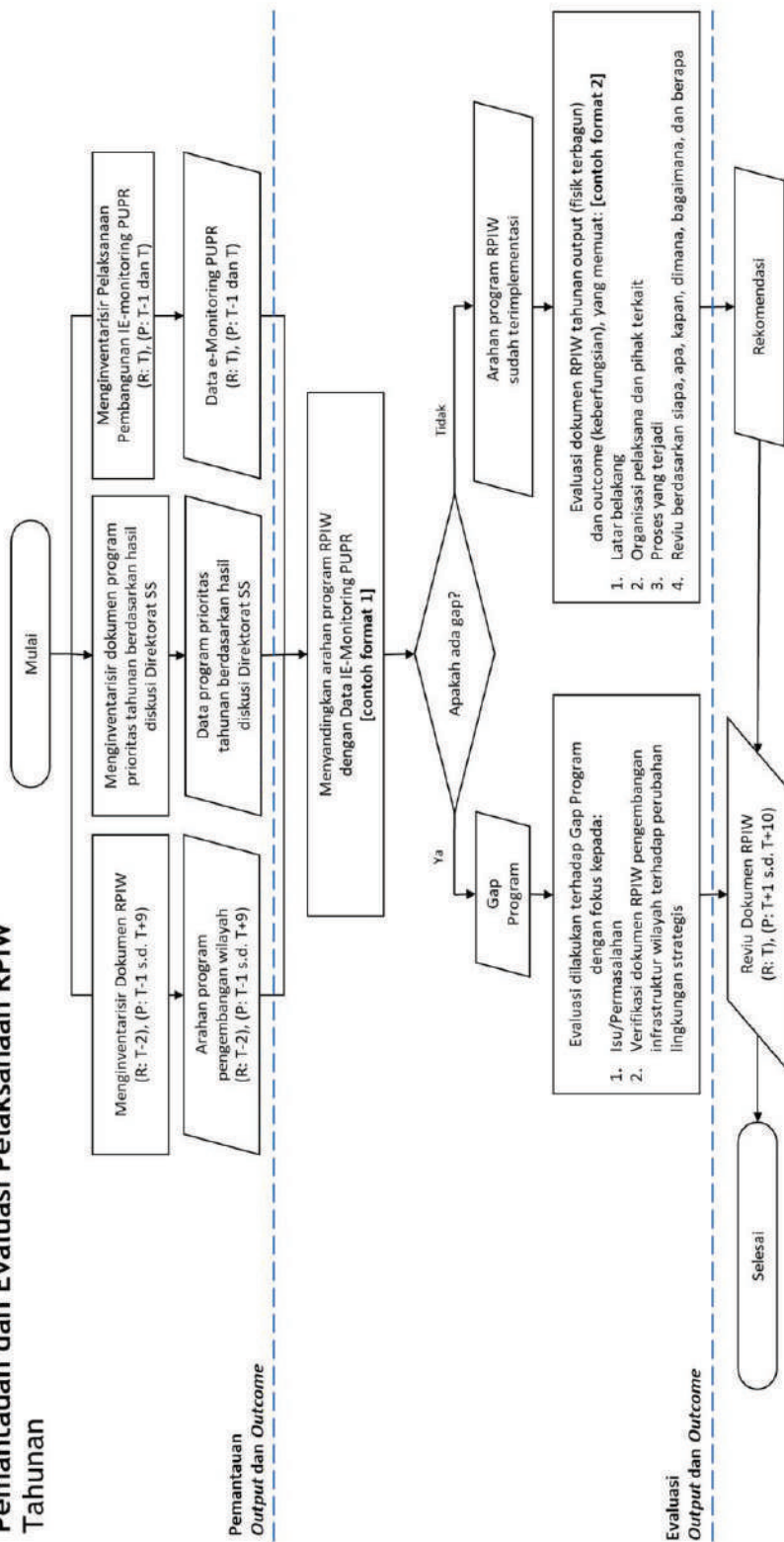
9.3 Jenis Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pemantauan Pelaksanaan RPIW
 - a. Pemantauan Tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW pada Bab 8 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR per tahun.
 - b. Pemantauan Lima (5) Tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW pada Bab 8 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR per 5 tahun).
2. Evaluasi Pelaksanaan RPIW
 - a. Evaluasi Tahunan (output dan outcome) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah.
 - b. Evaluasi Lima (5) Tahunan (benefit, impact, dan keberlanjutan) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah.

Tahapan dan proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW dapat dilihat pada Gambar 9.1, Gambar 9.2 dan Tabel 9.1.

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW Tahunan



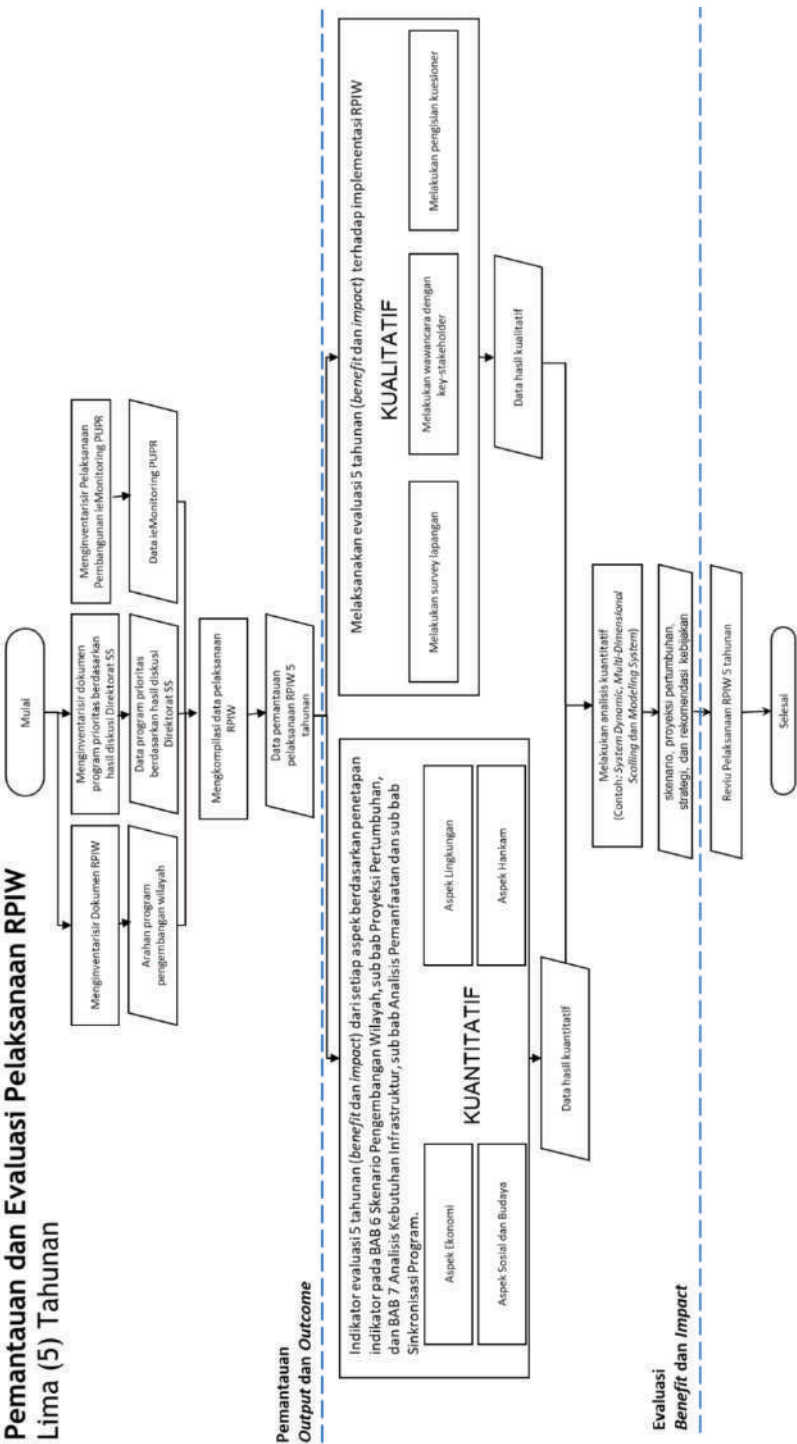
Gambar 9.1 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW Dalam Tahunan

Sumber: Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2021

Tabel 9. 1 Contoh Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW

Dukungan Perencanaan	Infrastruktur	Pembiayaan (Cost Effectiveness)	Readines Kriteria	Wilayah yang dikembangkan	Keterbangan infrastruktur (Output)	Keberfungsian Infrastruktur (Outcome)	Manfaat Infrastruktur	Dampak pembangunan Infrastruktur	Isu Permasalahan yang ditangani dengan terbangunnya infrastruktur

Sumber: Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2021



Gambar 9. 2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW Dalam Lima (5) Tahunan
Sumber: Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2021



www.pu.go.id